



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2025**



Nomor : 29.A/T/LHP/DJPKN-VI.PAL/PPD.01/06/2026

Tanggal : 17 Juni 2026

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Jalan Yos Sudarso Nomor 16 Palangka Raya Telepon (0536) 3241119

**SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2025**

Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 terdiri dari dua laporan yaitu:

I. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan

Laporan ini memuat:

- a. Hasil pemeriksaan yang memuat opini BPK;
- b. Gambaran Umum Pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, standar pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, entitas yang diperiksa, lingkup pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, dan batasan pemeriksaan; dan
- c. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025.

II. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Laporan ini memuat:

- a. Resume Laporan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. Ikhtisar Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Keuangan Sebelumnya.

DAFTAR ISI

Sistematika Laporan Hasil Pemeriksaan.....	i
Daftar Isi	ii
Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan.....	iii
Gambaran Umum Pemeriksaan	v
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025	



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2025, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Barito Selatan. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan tanggal 31 Desember 2025, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 29.B/T/LHP/DJPKN-VI.PAL/PPD.01/06/2026 tanggal 17 Juni 2026, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Palangka Raya, 17 Juni 2026

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



**Dodik Achmad Akbar
Register Negara Akuntan No. 12707**

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 berpedoman pada SPKN yang ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017.

3. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 yang didasarkan pada kriteria:

- a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
- b. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
- c. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern.

4. Entitas yang Diperiksa

Pemeriksaan dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang memiliki 35 SKPD dan 13 BLUD.

5. Lingkup Pemeriksaan

Lingkup pemeriksaan adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang terdiri dari:

- a. Neraca per 31 Desember 2025;
- b. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- c. Laporan Operasional (LO);
- d. Laporan Arus Kas (LAK);
- e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengujian atas laporan keuangan tersebut di atas meliputi:

- a. Kewajaran penyajian saldo akun dalam Neraca dan Laporan Perubahan SAL per 31 Desember 2025;
- b. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025;
- c. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025;
- d. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan pada Catatan atas Laporan Keuangan;

- e. Konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan LKPD;
- f. Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan akun-akun dalam laporan keuangan; dan
- g. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan negara dalam rangka penyusunan LKPD.

6. Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 dilakukan dengan pendekatan pemeriksaan berbasis risiko. Kegiatan pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan.

Perencanaan pemeriksaan diawali dari proses identifikasi dan penilaian risiko kesalahan penyajian material. Identifikasi dan penilaian risiko tersebut dilakukan melalui pemahaman entitas, termasuk sistem pengendalian intern terkait, serta penelaahan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat, tetapi tidak bertujuan untuk menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern.

Berdasarkan hasil penilaian risiko, Pemeriksa mengumpulkan dan menguji bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pengujian tersebut meliputi pengujian pengendalian maupun pengujian substantif atas transaksi dan saldo laporan keuangan. Prosedur pengujian mencakup inspeksi, observasi, konfirmasi, penghitungan kembali, pelaksanaan ulang (*reperformance*), dan prosedur analitis, serta memadukan beberapa prosedur sebagai tambahan atas permintaan keterangan dari manajemen entitas. Prosedur tersebut dipilih berdasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Berdasarkan pengujian dan bukti-bukti yang diperoleh, Pemeriksa mengomunikasikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan terkait dengan kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kesalahan penyajian laporan keuangan, serta kecukupan pengungkapan kepada manajemen/pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Pejabat entitas yang diperiksa memberikan komentar/tanggapan atas permasalahan tersebut. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan kemudian dievaluasi dampaknya terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.

Laporan hasil pemeriksaan keuangan menghasilkan kesimpulan berupa opini serta laporan hasil pemeriksaan terkait kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan, serta permasalahan lain yang perlu ditekankan kepada pembaca laporan.

7. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan selama 60 hari dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan Interim mulai tanggal 1 Februari 2026 s.d. 3 Maret 2026 berdasarkan Surat Tugas Nomor 26/T/ST/DJPKN-VI.PAL/PPD.01/01/2026 tanggal 26 Januari 2026; dan

- b. Pemeriksaan Terinci mulai tanggal 12 April 2026 s.d. 11 Mei 2026 berdasarkan Surat Tugas Nomor 89/T/ST/DJPKN-VI.PAL/PPD.01/04/2026 tanggal 8 April 2026.

8. Batasan Pemeriksaan

Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak disengaja oleh manajemen.

Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan BPK tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan.

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas ketentuan peraturan perundang-undangan, BPK hanya menguji kepatuhan instansi atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada ketentuan peraturan yang tidak teridentifikasi.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
BARITO SELATAN
TAHUN 2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	1
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	2
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	5
NERACA	6
LAPORAN OPERASIONAL	9
LAPORAN ARUS KAS	12
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	15
BAB I PENDAHULUAN	16
1.1. Maksud Dan Tujuan Laporan Keuangan	16
1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan	16
1.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	17
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	18
1.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	19
1.3.1. Unsur Laporan Keuangan	19
1.4. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	21
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	22
2.1. Ekonomi Makro	22
2.1.1. Tingkat Kemiskinan	22
2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka	29
2.1.3. Indeks Gini (Gini Ratio)	30
2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	31
2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi	33
2.1.6. Inflasi	34
2.1.7. Struktur Perekonomian Kabupaten Barito Selatan	34
2.2. Kebijakan Keuangan	35
2.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah	36
2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah	37
2.2.3. Kebijakan Keuangan Pembiayaan	39
2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD	39
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	46
3.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN	46
3.2. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN YANG DITETAPKAN	49

AM

3.2.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD).....	49
3.2.2. BELANJA DAERAH.....	49
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	51
4.1. ENTITAS AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH.....	51
4.1.1. Entitas Akuntansi.....	51
4.1.2. Entitas Pelaporan Laporan Keuangan	53
4.2. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH.....	56
4.3. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.	56
4.3.1. Laporan Realisasi Anggaran.....	56
4.3.2. Laporan Perubahan SAL	58
4.3.3. Neraca.....	59
4.3.4. Laporan Operasional (LO)	66
4.3.5. Laporan Arus Kas.....	69
4.3.6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).....	70
4.3.7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).....	70
4.4. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN.....	71
BAB V PENJELASAN ATAS AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN	72
5.1. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	72
5.1.1. PENDAPATAN DAERAH.....	72
5.1.2. BELANJA DAERAH.....	95
5.1.3. Pembiayaan Netto	133
5.2. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH.....	139
5.2.1. Saldo Anggaran Lebih (awal).....	139
5.2.2. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan.....	139
5.2.3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).....	139
5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	140
5.2.5. Lain-Lain.....	140
5.2.6. Saldo Anggaran Lebih (Akhir).....	140
5.3. PENJELASAN NERACA	140
5.3.1. ASET	140
5.3.2. KEWAJIBAN	194
5.3.3. EKUITAS	196
5.4. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL.....	197

5.4.1. Pendapatan-LO.....	197
5.4.2. Beban.....	208
5.4.3. Kegiatan Non Operasional	216
5.5. PENJELASAN LAPORAN ARUS KAS	217
5.5.1. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi.....	217
5.5.2. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi.....	218
5.5.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan.....	219
5.5.4. Kenaikan/Penurunan Kas	220
5.5.5. Saldo Akhir Kas	220
5.6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	221
BAB VI INFORMASI NON KEUANGAN	222
6.1.1. Domisili Entitas.....	222
6.1.2. Sifat Operasi Entitas dan Kegiatan Pokoknya.....	222
6.1.3. Ketentuan Perundang-Undangan sebagai Landasan Operasional	222
6.1.4. Susunan Struktur Kepemimpinan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Bupati. Wakil Bupati. Sekretaris Daerah dan Bendahara Umum Daerah	222
6.1.5. Visi Dan Misi Bupati Barito Selatan	223
6.1.6. Satuan Kerja Perangkat Daerah.....	224
6.1.7. Lembaga Keuangan Dan Perbankan	225
6.1.8. Profil Barito Selatan	225
BAB VII PENUTUP	226

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1** Realisasi Penyaluran Dana Desa Tahun 2025
- Lampiran 2** Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin per SKPD
- Lampiran 3** Bukti Setoran Lebih Bayar SP2D
- Lampiran 4** Penjelasan Sisa Kas di BLUD RSUD Jaraga Sasameh
- Lampiran 5** Rincian Sisa Kas Dana BOSP
- Lampiran 6** Rincian Piutang Retribusi
- Lampiran 7** Setoran Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal
- Lampiran 8** Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah
- Lampiran 9** Naskah Perjanjian Hibah Daerah tentang Serah Terima Barang Milik Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (NPHD)
- Lampiran 10** Daftar Nilai Harga Tanah Pemerintah





BUPATI BARITO SELATAN

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB
BUPATI BARITO SELATAN**

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Pernyataan ini merupakan tanggung jawab saya.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.

Buntok, 17 Juni 2026

BUPATI BARITO SELATAN



EDDY RAYA SAMSURI



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(AUDITED)

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	ANGGARAN	2025	%	2024
1	2	3	4	5	6
PENDAPATAN DAERAH	5.1.1	1.648.597.165.175,23	1.543.309.437.665,78	93,61	1.831.871.547.012,98
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.1.1.1	120.216.516.022,23	111.097.900.846,78	92,41	83.690.122.826,98
Pajak Daerah	5.1.1.1.1	46.198.637.522,00	37.657.696.612,55	81,51	14.168.868.108,32
Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	9.225.095.685,00	49.675.948.069,00	538,49	4.768.725.847,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	4.521.318.992,00	3.756.648.302,31	83,09	4.522.022.594,50
Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.1.4	60.271.463.823,23	20.007.607.862,92	33,20	60.230.506.277,16
PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2	1.286.584.463.942,00	1.426.117.527.001,00	110,85	1.743.463.544.883,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.1.1.2.1	1.228.684.996.740,00	1.349.833.314.386,00	109,86	1.682.796.719.789,00
Dana Perimbangan	5.1.1.2.1.1	1.159.506.853.740,00	1.297.317.525.986,00	111,89	1.602.375.206.713,00
Dana Bagi Hasil (DBH)	5.1.1.2.1.1.1	497.539.368.740,00	691.761.517.556,00	139,04	864.534.116.455,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	5.1.1.2.1.1.2	515.686.582.000,00	483.563.006.552,00	93,77	591.322.819.252,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	5.1.1.2.1.1.3	18.022.668.000,00	17.734.980.455,00	98,40	53.206.175.347,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	5.1.1.2.1.1.4	128.258.235.000,00	104.258.021.423,00	81,29	93.312.095.659,00
Dana Desa	5.1.1.2.1.2	69.178.143.000,00	52.515.788.400,00	75,91	73.702.409.076,00
Dana Insentif Daerah (DID)	5.1.1.2.1.3	0,00	0,00	0,00	6.719.104.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.1.1.2.2	57.899.467.202,00	76.284.212.615,00	131,75	60.666.825.094,00
Pendapatan Bagi Hasil	5.1.1.2.2.1	57.899.467.202,00	75.848.612.615,00	131,00	60.666.825.094,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA	5.1.1.2.2.2	0,00	435.600.000,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.3	241.796.185.211,00	6.094.009.818,00	2,52	4.717.879.303,00
Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	12.577.505.043,00	30.000.000,00	0,24	138.000.000,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.1.1.3.2	229.218.680.168,00	6.064.009.818,00	2,65	4.579.879.303,00
BELANJA DAERAH	5.1.2	1.796.752.649.820,00	1.682.460.442.997,86	93,64	1.765.648.332.753,40

Handwritten signature

URAIAN	REF	ANGGARAN	2025	%	2024
1	2	3	4	5	6
BELANJA OPERASI	5.1.2.1	1.075.083.720.236,50	1.001.982.776.374,86	93,20	1.020.479.418.028,50
Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	549.588.376.375,41	506.616.293.948,06	92,18	467.108.665.972,00
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	468.486.267.861,09	440.925.782.385,80	94,12	447.961.452.752,50
Belanja Bunga	5.1.2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi	5.1.2.1.4	2.525.000.000,00	2.525.000.000,00	100,00	2.735.558.710,00
Belanja Hibah	5.1.2.1.5	42.232.076.000,00	40.037.795.041,00	94,80	80.845.739.144,00
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.6	12.252.000.000,00	11.877.905.000,00	96,95	21.828.001.450,00
BELANJA MODAL	5.1.2.2	525.317.095.814,50	514.327.377.771,00	97,91	532.177.064.624,90
Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	54.753.632.158,50	50.944.552.172,00	93,04	76.322.201.311,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	176.967.028.701,00	172.512.642.353,00	97,48	146.211.601.103,80
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.1.2.2.4	290.285.910.955,00	287.563.196.250,00	99,06	309.157.085.006,10
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	221.329.000,00	218.199.996,00	98,59	44.337.204,00
Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.6	3.089.195.000,00	3.088.787.000,00	99,99	441.840.000,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.3	10.377.625.000,00	5.522.666.080,00	53,22	423.718.824,00
Belanja Tidak Terduga		10.377.625.000,00	5.522.666.080,00	53,22	423.718.824,00
TRANSFER	5.1.2.4	185.974.208.769,00	160.627.622.772,00	86,37	212.568.131.276,00
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	5.1.2.4.1	8.786.065.769,00	1.380.490.812,00	15,71	0,00
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	5.1.2.4.1.1	8.022.601.070,00	1.380.490.812,00	17,21	0,00
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.1.2.4.1.2	763.464.699,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	5.1.2.4.2	177.188.143.000,00	159.247.131.960,00	89,87	212.568.131.276,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	5.1.2.4.2.1	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	5.1.2.4.2.2	177.178.143.000,00	159.237.131.960,00	89,87	212.568.131.276,00
SURPLUS / DEFISIT		(148.155.484.644,77)	(139.151.005.332,08)	93,92	66.223.214.259,58

URAIAN	REF	ANGGARAN	2025	%	2024
1	2	3	4	5	6
PEMBIAYAAN NETTO	5.1.3	148.155.484.644,77	149.500.480.030,11	100,91	97.969.438.914,19
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.3.1	164.192.653.173,77	164.115.933.746,11	99,95	110.419.438.914,19
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		164.192.653.173,77	164.115.933.746,11	100,75	110.419.438.914,19
Penggunaan SiLPA Tahun Lalu	5.1.3.1.1	164.192.653.173,77	164.192.653.173,77	100,00	110.419.438.914,19
Koreksi SiLPA	5.1.3.1.2	0,00	(76.719.427,66)	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	5.1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.3.2	16.037.168.529,00	14.615.453.716,00	91,13	12.450.000.000,00
Penyertaan Modal Daerah		0,00	0,00	0,00	12.300.000.000,00
Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	5.1.3.2.1	0,00	0,00	100,00	12.300.000.000,00
Pembayaran Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
Pembayaran Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	5.1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	5.1.3.2.3	16.037.168.529,00	14.615.453.716,00	91,13	150.000.000,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	05.01.04	0,00	10.349.474.698,03	0,00	164.192.653.173,77
Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan					

BUPATI BARITO SELATAN



EDDY RAYA SAMSURI



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(AUDITED)

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	2025	2024
1	2	3	4
Saldo Anggaran Lebih (awal)	5.2.1	164.192.653.173,77	110.419.438.914,19
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2	164.115.933.746,11	110.419.438.914,19
Sub Total		76.719.427,66	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	5.2.3	10.349.474.698,03	164.192.653.173,77
Sub Total		10.426.194.125,69	164.192.653.173,77
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.4	(76.719.427,66)	0,00
Lain-lain	5.2.5	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	5.2.6	10.349.474.698,03	164.192.653.173,77
Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan			

BUPATI BARITO SELATAN

EDDY RAYA SAMSURI



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(AUDITED)

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	2025	2024
1	2	3	4
ASET	5.3.1.	2.928.469.147.650,08	2.786.279.353.873,09
ASET LANCAR	5.3.1.1.	165.184.102.445,52	218.730.291.525,31
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1.	3.541.633.155,35	157.348.442.318,67
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.2.	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.3.	7.217.349,00	60.060,00
Kas di BLUD	5.3.1.1.4.	4.062.060.857,28	3.975.530.309,98
Kas di Bendahara Dana Kapitasi pada FKTP (JKN)	5.3.1.1.5.	89.322.213,06	2.388.779.776,12
Kas di Bendahara Dana BOS	5.3.1.1.6.	190.836.123,34	119.250.709,00
Kas Lainnya	5.3.1.1.7.	15.000.000,00	38.000.000,00
Kas Dana BOK Puskesmas	5.3.1.1.8.	2.598.562.005,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.9.1.	14.791.908.650,00	14.228.464.288,00
Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.1.9.2.	1.751.449.327,00	995.752.350,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.3.1.1.9.3.	4.575.000,00	4.575.000,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.9.4.	3.125.600.327,25	4.531.954.479,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	5.3.1.1.9.5.	0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah	5.3.1.1.9.6.	36.197.147.056,00	0,00
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	5.3.1.1.9.7.	10.313.451,00	18.240.651,00
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	5.3.1.1.9.8.	101.700.800,00	101.700.800,00
Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal	5.3.1.1.9.9.	0,00	1.274.690.297,14
Piutang Lain- Lainnya	5.3.1.1.9.10.	163.200.600,00	171.972.100,00
Penyisihan Piutang	5.3.1.1.9.11.	(13.748.785.075,46)	(12.851.667.108,49)
Persediaan	5.3.1.1.10.	112.282.360.606,70	46.384.545.494,89
JUMLAH ASET LANCAR	5.3.1.1.	165.184.102.445,52	218.730.291.525,31
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2.		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen			
Dana Bergulir	5.3.1.2.1.	39.275.750,00	39.275.750,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen	5.3.1.2.1.	39.275.750,00	39.275.750,00
Investasi Jangka Panjang Permanen			
Penyertaan Modal	5.3.1.2.2.	197.670.856.027,00	151.596.254.202,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen		197.670.856.027,00	151.596.254.202,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2.	197.710.131.777,00	151.635.529.952,00

AM

URAIAN	REF	2025	2024
1	2	3	4
ASET TETAP	5.3.1.3		
Tanah	5.3.1.3.1	293.207.089.649,35	271.092.162.979,35
Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	444.144.107.828,96	398.544.979.745,85
Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	1.052.672.850.069,33	902.098.779.704,50
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.3.1.3.4	2.114.642.191.588,90	1.895.391.751.701,35
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	4.858.377.158,98	4.451.198.388,03
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	90.545.502.789,88	92.542.029.414,76
Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(1.497.567.961.176,78)	(1.312.015.874.828,62)
JUMLAH ASET TETAP	5.3.1.3	2.502.502.157.908,62	2.252.105.027.105,22
ASET LAINNYA	5.3.1.4		
Tagihan Jangka Panjang	5.3.1.4.1	0,00	30.582.000,00
Aset Tidak Berwujud	5.3.1.4.2	14.476.791.614,00	8.536.003.670,00
Aset Lain-lain	5.3.1.4.3	88.959.711.317,84	133.932.728.454,50
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.3.1.4.4	(8.140.857.453,32)	(7.044.527.561,68)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	5.3.1.4.5	(42.423.442.303,58)	(53.223.183.272,26)
Dana Transfer Treassury Deposit Facility (TDF)	5.3.1.4.6	10.200.552.344,00	81.576.902.000,00
JUMLAH ASET LAINNYA	5.3.1.4	63.072.755.518,94	163.808.505.290,56
JUMLAH ASET	5.3.1	2.928.469.147.650,08	2.786.279.353.873,09
KEWAJIBAN	5.3.2		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1	155.157.005,00	0,00
Utang Bunga		0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.2	0,00	0,00
Utang Belanja	5.3.2.1.3	4.749.887.688,10	4.466.800.163,88
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.4	701.425.693,00	5.170.687.646,01
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1	5.606.470.386,10	9.637.487.809,89
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.2.2	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	5.3.2	5.606.470.386,10	9.637.487.809,89

URAIAN	REF	2025	2024
1	2	3	4
EKUITAS	5.3.3		
EKUITAS	5.3.3	2.922.862.677.263,98	2.776.641.866.063,20
JUMLAH EKUITAS		2.922.862.677.263,98	2.776.641.866.063,20
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		2.928.469.147.650,08	2.786.279.353.873,09
Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan			

BUPATI BARITO SELATAN



EDDY RAYA SAMSURI



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(AUDITED)

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	2025	2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	2	3	4	5	6
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN – LO	5.4.1	1.506.344.790.864,64	1.542.979.261.963,02	(36.634.471.098,38)	(2,37)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	5.4.1.1	108.584.775.145,64	86.691.542.777,02	21.893.232.368,62	25,25
Pajak Daerah-LO	5.4.1.1.1	38.221.140.974,55	15.139.603.495,36	23.081.537.479,19	152,46
Retribusi Daerah-LO	5.4.1.1.2	47.884.637.903,00	5.146.786.582,00	42.737.851.321,00	830,38
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	5.4.1.1.3	3.756.648.302,31	4.522.022.594,50	(765.374.292,19)	(16,93)
Lain-lain PAD yang Sah-LO	5.4.1.1.4	18.722.347.965,78	61.883.130.105,16	(43.160.782.139,38)	(69,75)
PENDAPATAN TRANSFER-LO	5.4.1.2	1.390.938.324.401,00	1.450.826.839.883,00	(59.888.515.482,00)	(4,13)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	5.4.1.2.1	1.278.456.964.730,00	1.390.160.014.789,00	(111.703.050.059,00)	(8,04)
Dana Perimbangan-LO		1.225.941.176.330,00	1.383.440.910.789,00	(157.499.734.459,00)	(11,38)
Dana Bagi Hasil (DBH)-LO		620.385.167.900,00	673.243.238.462,00	(52.858.070.562,00)	(7,85)
Dana Alokasi Umum (DAU)-LO		483.563.006.552,00	563.679.401.321,00	(80.116.394.769,00)	(14,21)
Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO		121.993.001.878,00	146.518.271.006,00	(24.525.269.128,00)	(16,74)
Dana Desa-LO		52.515.788.400,00	0,00	52.515.788.400,00	-
Insentif Fiskal-LO		0,00	6.719.104.000,00	(6.719.104.000,00)	(100)
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	5.4.1.2.2	112.481.359.671,00	60.666.825.094,00	51.814.534.577,00	85,41
Pendapatan Bagi Hasil-LO		112.045.759.671,00	60.666.825.094,00	51.378.934.577,00	84,69

URAIAN	REF	2025	2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	2	3	4	5	6
Bantuan Keuangan-LO		435.600.000,00	0,00	435.600.000,00	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO	5.4.1.3	6.821.691.318,00	5.460.879.303,00	1.360.812.015,00	24,92
Pendapatan Hibah-LO	5.4.1.3.1	757.681.500,00	881.000.000,00	(123.318.500,00)	(14,00)
Dana Darurat-LO	5.4.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	5.4.1.3.3	6.064.009.818,00	4.579.879.303,00	1.484.130.515,00	32,41
BEBAN	5.4.2	1.323.740.489.436,68	1.377.261.271.265,16	(53.520.781.828,48)	(3,89)
BEBAN OPERASI	5.4.2.1	1.163.112.866.664,68	1.164.693.139.989,16	(1.580.273.324,48)	(0,14)
Beban Pegawai	5.4.2.1.1	506.616.293.948,06	467.092.694.472,00	39.523.599.476,06	8,46
Beban Barang dan Jasa	5.4.2.1.2	407.227.014.710,53	423.669.807.913,77	(16.442.793.203,24)	(3,88)
Beban Bunga	5.4.2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Subsidi	5.4.2.1.4	2.525.000.000,00	2.735.558.710,00	(210.558.710,00)	(7,70)
Beban Hibah	5.4.2.1.5	43.838.603.841,00	86.558.007.894,01	(42.719.404.053,01)	(49,35)
Beban Bantuan Sosial	5.4.2.1.6	11.877.905.000,00	21.828.001.450,00	(9.950.096.450,00)	(45,58)
Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.1.7	897.117.966,97	1.744.892.986,25	(847.775.019,28)	(48,59)
Beban Lain-lain	5.4.2.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.4.2.1.9	42.601.883.908,20	33.006.765.194,83	9.595.118.713,37	29,07
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	5.4.2.1.10	18.514.958.774,25	16.035.515.940,63	2.479.442.833,62	15,46
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.4.2.1.11	128.277.435.415,67	111.512.999.256,83	16.764.436.158,89	15,03
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	5.4.2.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya	5.4.2.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.4.2.1.14	736.653.100,00	508.896.170,84	227.756.929,16	44,76
BEBAN TRANSFER	5.4.2.2	160.627.622.772,00	212.568.131.276,00	(51.940.508.504,00)	(24,43)

URAIAN	REF	2025	2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	2	3	4	5	6
Beban Bagi Hasil	5.4.2.2.1	1.380.490.812,00	0,00	1.380.490.812,00	-
Beban Bantuan Keuangan	5.4.2.2.2	159.247.131.960,00	212.568.131.276,00	(53.320.999.316,00)	(25,08)
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI		182.604.301.427,96	165.717.990.697,86	16.886.310.730,10	10,19
KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.3				
Surplus Penjualan/Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar-LO	5.4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	5.4.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	5.4.3.3	52.782.863.401,62	0,00	52.782.863.399,00	-
Defisit Penjualan/Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar-LO	5.4.3.4	73.212.051.556,21	5.855.119.947,54	67.356.931.608,67	1.150,39
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	5.4.3.5	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(20.429.188.154,59)	(5.855.119.947,54)	(14.574.068.207,05)	248,91
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		162.175.113.273,37	159.862.870.750,32	2.312.242.523,05	(1,45)
POS LUAR BIASA					
Beban Tak Terduga	5.4.3.3	5.522.666.080,00	423.718.824,00	5.098.947.256,00	1.203,38
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		(5.522.666.080,00)	(423.718.824,00)	5.098.947.256,00	(1.203,38)
SURPLUS/DEFISIT-LO		156.652.447.193,37	159.439.151.926,32	(2.786.704.732,95)	(1,75)
<i>Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan</i>					

BUPATI BARITO SELATAN


EDDY RAYA SAMSURI



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(AUDITED)

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	2025	2024
1	2	3	4
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
Arus Kas Masuk	5.5.1.1		
Pendapatan Pajak Daerah - LRA		37.657.696.612,55	14.168.868.108,32
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA		49.675.948.069,00	4.768.725.847,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA		3.756.648.302,31	4.522.022.594,50
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA		19.986.291.962,92	60.156.569.812,16
Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak		68.689.745.200,00	404.148.408.401,00
Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		623.071.772.356,00	460.385.708.054,00
Pendapatan dana Alokasi Umum		483.563.006.552,00	591.322.819.252,00
Pendapatan dana Alokasi Khusus		121.993.001.878,00	146.518.271.006,00
Pendapatan Dana Insentif Daerah (DID)		0,00	6.719.104.000,00
Pendapatan Dana Desa		52.515.788.400,00	73.702.409.076,00
Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi		75.848.612.615,00	60.666.825.094,00
Pendapatan Bantuan Keuangan		435.600.000,00	0,00
Pendapatan Hibah		30.000.000,00	138.000.000,00
Pendapatan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		6.064.009.818,00	4.579.879.303,00
Jumlah Arus Kas Masuk		1.543.288.121.765,78	1.831.797.610.547,98
Arus Kas Keluar	5.5.1.2		
Belanja Pegawai		506.616.293.948,06	467.108.665.972,00
Belanja Barang dan Jasa		440.925.782.385,80	447.961.452.752,50
Belanja Bunga		0,00	0,00
Belanja Subsidi		2.525.000.000,00	2.735.558.710,00
Belanja Hibah		40.037.795.041,00	80.845.739.144,00
Belanja Bantuan Sosial		11.877.905.000,00	21.828.001.450,00
Belanja Tak Terduga		5.522.666.080,00	423.718.824,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah		1.380.490.812,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan		159.247.131.960,00	212.568.131.276,00
Jumlah Arus Kas Keluar		1.168.133.065.226,86	1.233.471.268.128,50
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	5.5.1	375.155.056.538,92	598.326.342.419,48
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2		
Arus Kas Masuk	5.5.2.1		
Hasil Penjualan Peralatan/Mesin - LRA		0,00	0,00
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan - LRA		0,00	0,00
Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya - LRA		21.315.900,00	73.936.465,00

URAIAN	REF	2025	2024
1	2	3	4
Jumlah Arus Kas Masuk		21.315.900,00	73.936.465,00
Arus Kas Keluar	5.5.2.2		
Belanja Modal Tanah		0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		50.944.552.172,00	76.322.201.311,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		172.512.642.353,00	146.211.601.103,80
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		287.563.196.250,00	309.157.085.006,10
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		218.199.996,00	44.337.204,00
Belanja Modal Aset Lainnya		3.088.787.000,00	441.840.000,00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah		0,00	12.300.000.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar		514.327.377.771,00	544.477.064.624,90
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	5.5.2	(514.306.061.871,00)	(544.403.128.159,90)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3		
Arus Kas Masuk	5.5.3.1		
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri dari Bank		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		0,00	0,00
Arus Kas Keluar	5.5.3.2		
Pembayaran Pinjaman Dalam Negeri dari Bank		14.615.453.716,00	150.000.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar		14.615.453.716,00	150.000.000,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3	(14.615.453.716,00)	(150.000.000,00)
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4		
Arus Kas Masuk	5.5.4.1		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		94.513.576.139,83	79.518.617.266,00
Penerimaan Pembayaran Piutang Tahun Sebelumnya		322.590.000,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		94.836.166.139,83	79.518.617.266,00
Arus Kas Keluar	5.5.4.2		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		94.358.419.134,83	79.518.617.266,00
Jumlah Arus Kas Keluar		94.358.419.134,83	79.518.617.266,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	5.5.4	477.747.005,00	0,00
Kenaikan / (Penurunan) Kas	5.5.5	(153.288.712.043,08)	53.773.214.259,58
Saldo Awal Kas		163.870.063.173,77	110.519.438.914,19
Koreksi SILPA		(76.719.427,66)	0,00
Saldo Akhir Kas		10.504.631.703,03	163.870.063.173,77
Saldo Akhir Kas di BUD		3.541.633.155,35	157.348.442.318,67
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		7.217.349,00	60.060,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
Kas di BLUD		4.062.060.857,28	3.975.530.309,98
Kas di Bendahara FKTP (JKN)		89.322.213,06	41.490.221,12
Kas di Bendahara BOK Puskesmas		2.598.562.005,00	2.347.289.555,00

URAIAN	REF	2025	2024
1	2	3	4
Kas di Bendahara BOSP		190.836.123,34	119.250.709,00
Kas Lainnya		15.000.000,00	38.000.000,00
Setara Kas		0,00	0,00
Saldo Akhir Kas	5.5.6	10.504.631.703,03	163.870.063.173,77
<i>Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan</i>			


BUPATI BARITO SELATAN

EDDY RAYA SAMSURI



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(AUDITED)

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	2025	2024
1	2	3	4
EKUITAS AWAL	5.6	2.776.641.866.063,20	2.607.544.245.113,22
SURPLUS/DEFISIT-LO		156.652.447.193,37	159.439.151.926,32
Koreksi Penambahan Nilai Aset Tetap		0,00	0,00
Koreksi Saldo Awal Piutang		0,00	0,00
Koreksi Saldo Awal Aset Lancar		(36.448.200,00)	0,00
Koreksi Saldo Awal Aset Tetap		32.248.011,95	0,00
Koreksi Saldo Awal Aset Lainnya		0,00	0,00
Koreksi Saldo Awal Aset Lain-lain		0,00	0,00
Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan		0,00	0,00
Koreksi Saldo Awal Akumulasi Amortisasi		0,00	0,00
Koreksi Saldo Awal Investasi Jangka Panjang		0,00	0,00
Koreksi Saldo Awal Persediaan		0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya		(10.427.435.804,54)	9.658.469.023,66
Jumlah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar		(10.431.635.992,59)	9.658.469.023,66
EKUITAS AKHIR	5.6	2.922.862.677.263,98	2.776.641.866.063,20
Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan			

BUPATI BARITO SELATAN


M EDDY RAYA SAMSURI



Catatan Atas Laporan Keuangan **Pemerintah Kabupaten Barito Selatan**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1. Maksud Dan Tujuan Laporan Keuangan

1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang berakhir 31 Desember 2025 disusun dan disajikan dengan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, Laporan keuangan dibuat untuk dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk para pembaca tertentu ataupun hanya manajemen entitas pelaporan, sehingga laporan keuangan ini dibuat untuk menghindari kesalahpahaman informasi diantara pengguna informasi keuangan yang bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sebagai Entitas Pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam periode tertentu, sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas manajemen dan keseimbangan kecukupan penerimaan, guna membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial dan politik guna untuk kepentingan masyarakat

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan



Catatan Atas Laporan Keuangan **Pemerintah Kabupaten Barito Selatan**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. **Keseimbangan antar Generasi**

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e. **Evaluasi Kinerja**

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Dalam penyusunan Laporan ini dengan berbagai cara dan upaya telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam meningkatkan kualitas layanan pengelolaan setiap tahunnya. Selain tata kelola keuangan yang telah diatur secara rinci dalam berbagai peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan terobosan yang inovatif guna mempercepat pelaksanaan anggaran untuk kepentingan masyarakat. Termasuk pada penyelenggaraan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang terus menjadi perhatian dari berbagai pemangku kepentingan agar dapat memberikan gambaran secara konkrit tentang seluruh aktifitas pemerintah baik yang terkait langsung dengan penyediaan pelayanan kebutuhan dasar, pemberdayaan masyarakat maupun tata kelola pemerintahan. Dalam hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan telah berkomitmen untuk terus dan selalu meningkatkan kualitas akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

1.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan;
2. Untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan cara:
 - a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
 - b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
 - c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
 - e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
 - f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
 - g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
3. Menyediakan informasi untuk bahan evaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya; dan
4. Menyajikan informasi yang relevan terkait hak dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Barito Selatan



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sebagai suatu entitas pelaporan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 berpedoman pada ketentuan yang termuat dalam.

- a. Pancasila;
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah sebagian dicabut dengan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah);
- g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- k. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
- n. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
- o. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah



Catatan Atas Laporan Keuangan **Pemerintah Kabupaten Barito Selatan**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- t. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1);
- u. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Satuan Organisasi dan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
- w. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua Kabupaten Barito Selatan;
- x. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor 16 Tahun 2024 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor 50 Tahun 2025 tentang Penerapan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Berbasis Akrua;
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- z. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
- aa. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor 32 Tahun 2025 tanggal 12 September 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
- bb. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
- cc. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 01 Tahun 2025 tanggal 10 Januari 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
- dd. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 07 Tahun 2025 tanggal 15 Oktober 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025; dan
- ee. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 34 Tahun 2025 tanggal 15 Oktober 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

1.3.1. Unsur Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas dalam Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, yang terdiri dari PPKD dan SKPD. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 terdiri dari:



Catatan Atas Laporan Keuangan **Pemerintah Kabupaten Barito Selatan**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

a. Laporan Realisasi Anggaran

LRA memuat informasi mengenai Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Data/informasi keuangan mengenai Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah didasarkan pada LRA SKPD dan data/informasi keuangan mengenai Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Belanja Tak Terduga, Belanja Transfer dan Pembiayaan (penerimaan dan pengeluaran) didasarkan pada LRA PPKD.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.

c. Neraca.

Neraca memuat informasi mengenai posisi Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Pada Neraca SKPD disajikan mengenai Aset Lancar, Aset Tetap, Aset Lainnya, Kewajiban, dan Ekuitas. Neraca PPKD menyajikan Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Kewajiban dan Ekuitas.

d. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

e. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non keuangan.

f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar dan ekuitas akhir.

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan dan daftar mengenai nilai suatu akun-akun yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan disajikan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 disusun berdasarkan penggabungan antara laporan keuangan SKPD. Laporan keuangan SKPD dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan, Laporan keuangan SKPD selaku BLUD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan sedangkan Laporan keuangan PPKD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.



Catatan Atas Laporan Keuangan **Pemerintah Kabupaten Barito Selatan**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

1.4. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Bab V Penjelasan atas Akun-Akun Laporan Keuangan

- 5.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.1.1. Pendapatan – LRA
 - 5.1.2. Belanja
 - 5.1.3. Surplus (Defisit) Realisasi Anggaran
 - 5.1.4. Pembiayaan
 - 5.1.5. SILPA
- 5.2. Penjelasan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 - 5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal
 - 5.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
 - 5.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
 - 5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
 - 5.2.5. Lain-lain
 - 5.2.6. Saldo Anggaran Lebih Akhir
- 5.3. Penjelasan Neraca
 - 5.3.1. Aset
 - 5.3.2. Kewajiban
 - 5.3.3. Ekuitas
- 5.4. Penjelasan Laporan Operasional
 - 5.4.1. Pendapatan – LO
 - 5.4.2. Beban
 - 5.4.3. Kegiatan Non Operasional
 - 5.4.4. Surplus/Defisit LO
- 5.5. Penjelasan Laporan Arus Kas
 - 5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi
 - 5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi
 - 5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
 - 5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
- 5.6. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
 - 5.6.1. Ekuitas Awal
 - 5.6.2. Surplus/Defisit – LO
 - 5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
 - 5.6.4. Ekuitas Akhir

Bab VI Informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2025 menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Selatan, yaitu:

- Persentase Penduduk Miskin sebesar 4,94%, terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 4,83%;
- Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,30%, terjadi penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 4,12%;
- Gini Ratio Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, dengan Gini Ratio tahun 2025 sebesar 0,266%;
- Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2025 sebesar 75,21% sementara di tahun 2024 sebesar 72,36%
- Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 4,15%;
- Tingkat Inflasi sebesar 2,70%
- Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku pada tahun 2025 adalah 9.378,8 (miliar rupiah) atau pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Selatan mengalami peningkatan sebesar 4,80% di tahun 2024; dan
- Tahun 2025 PDRB atas dasar harga berlaku, sektor pertambangan memberi sumbangan yang besar dalam pembentukan PDRB yaitu 18,94%, kemudian disusul secara berturut-turut oleh sektor pertanian 17,39% dan sektor transportasi pergudangan 11,42%.

2.1.1. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan - kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Provinsi/Kabupaten /Kota periode tertentu. Namun, memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan menggambarkan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Berikut disajikan data penduduk miskin Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2025.



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 2.1.1.1. Data Penduduk Miskin Kabupaten Barito Selatan

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/ (Turun) (2025-2024)	Naik/ (Turun) (2024-2023)
1	Kab/Kota (%)	4,72	4,83	4,94	0,11	0,11
2	Kab/Kota (Ribu Orang)	6,66	6,87	7,09	0,22	0,21
3	Provinsi (%)	5,11	5,17	5,19	0,02	0,06
4	Tingkat Kemiskinan Nasional (%)	9,36	8,57	8,47	(0,10)	(0,79)
5	Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,41	0,21	0,37	0,16	0,18
6	Indeks Keparahan Kemiskinan	0,06	0,03	0,08	0,05	(0,03)

Sumber Dokumen: BPS Kab. Barsel, Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2025

Tabel di atas menunjukkan adanya tren jumlah penduduk miskin periode Tahun 2023 s.d. 2025 yang mengalami fluktuatif dalam setiap tahunnya. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 mencapai sebesar 4,94% atau mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah penduduk miskin menjadi 7,09 (ribu orang). Jika dibandingkan rata-rata tingkat provinsi/nasional, menunjukkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Barito Selatan masih berada di atas provinsi dan di bawah capaian nasional. Oleh karena itu, perencanaan dan penganggaran program/kegiatan pengentasan kemiskinan tahun mendatang harus mendapat prioritas pemerintah daerah dalam upaya menekan angka kemiskinan. Berikut ini disajikan tabel tentang jumlah dan persentase penyebaran penduduk miskin di Kabupaten Barito Selatan.

Tabel 2.1.1.2 Data Kemiskinan di Kabupaten Barito Selatan Periode Tahun 2023 s/d 2025

Penduduk Miskin	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Naik/ (Turun) (2025-2024)	Naik/ (Turun) (2024-2023)
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%		
Kabupaten Barito Selatan	6,66	4,72	6,87	4,83	7,09	4,94	0,22	0,21

Sedangkan untuk tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di Kabupaten Barito Selatan selama tiga tahun terakhir disajikan pada tabel-tabel berikut.

No	Penduduk Miskin	Tahun			Naik/ (Turun) (2025-2024)	Naik/ (Turun) (2024-2023)
		2023	2024	2025		
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kab/Kota	0,41	0,21	0,37	0,22	0,21
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	5,11	5,17	5,19	0,06	0,02

Tabel di atas menunjukkan adanya Indeks kedalaman kemiskinan pada tahun 2025 naik sebesar 0,37% atau ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan, sedangkan pada tahun 2024 sebesar 0,21%. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan tahun 2025 sebagai berikut.

No	Penduduk Miskin	Tahun			Naik/ (Turun) (2025-2024)	Naik/ (Turun) (2024-2023)
		2023	2024	2025		
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kab/Kota	0,06	0,03	0,08	(0,03)	0,05
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,14	0,13	0,11	(0,01)	(0,02)
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,38	0,32	0,22	(0,06)	(0,01)



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel di atas menunjukkan adanya Indeks Keparahan Kemiskinan tahun 2025 sebesar 0,08% atau naik dibandingkan tahun 2024 yang hanya sebesar 0,03% memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin yang ada di kabupaten Barito Selatan.

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan telah melakukan beberapa upaya dalam rangka penanggulangan kemiskinan, antara lain sebagai berikut:

- Pemerintah Kabupaten Barito Selatan telah merencanakan program/kegiatan dalam rangka penanggulangan Pengetasan Kemiskinan Dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dengan alokasi anggaran sebesar Rp243.760.569.699,48 dan telah direalisasikan sebesar Rp235.969.120.675,00 atau sebesar 96,80%. Rincian program/kegiatan di bidang pengentasan kemiskinan tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1.1.3. Rekapitulasi Program/Sub Kegiatan Belanja Optimalisasi Pelaksanaan Pengetasan Kemiskinan Dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

NO	SKPD/PROGRAM/SUB KEGIATAN	ANGGARAN SUB KEGIATAN	REALISASI SUB KEGIATAN	(%)
I	II	III	IV	V
1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	429.501.700,00	289.388.964,00	67,38
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	429.501.700,00	289.388.964,00	67,38
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	276.858.700,00	144.287.004,00	52,12
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	152.643.000,00	145.101.960,00	95,06
2	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	694.331.200,00	617.363.852,00	88,91
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	83.999.800,00	83.696.800,00	99,64
	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	83.999.800,00	83.696.800,00	99,64
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	117.465.500,00	85.047.100,00	72,40
	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	117.465.500,00	85.047.100,00	72,40
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	392.556.400,00	356.873.052,00	90,91
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	204.926.700,00	185.011.872,00	90,28
	Kerja Sama Pemantaatan Data Kependudukan	187.629.700,00	171.861.180,00	91,60
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	100.309.500,00	91.746.900,00	91,46
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	100.309.500,00	91.746.900,00	91,46
3	DINAS KESEHATAN	35.151.304.895,00	32.628.788.260,00	92,82
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	35.151.304.895,00	32.628.788.260,00	92,94
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	363.569.000,00	289.330.000,00	79,58
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	127.625.000,00	77.400.000,00	60,65
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	284.835.250,00	171.770.100,00	60,31
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	469.144.000,00	204.191.000,00	43,52
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	89.266.000,00	86.775.000,00	97,21
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	49.890.000,00	25.369.000,00	50,85
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	88.040.000,00	69.708.000,00	79,18
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	112.625.000,00	79.236.000,00	70,35
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	151.610.000,00	71.759.000,00	47,33
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	40.260.000,00	28.020.000,00	69,60
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	66.904.000,00	48.558.500,00	72,58
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	89.288.000,00	32.076.000,00	35,92
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	10.000.000,00	9.896.000,00	98,96



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

NO	SKPD/PROGRAM/SUB KEGIATAN	ANGGARAN SUB KEGIATAN	REALISASI SUB KEGIATAN	(%)
I	II	III	IV	V
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	175.880.000,00	171.146.920,00	96,76
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	54.689.000,00	48.887.000,00	89,39
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	25.570.155,00	25.112.000,00	98,21
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	686.130.290,00	508.018.540,00	74,04
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	32.264.979.200,00	30.681.535.200,00	95,09
4	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	4.685.763.000,00	4.592.080.110,00	98,00
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	17.728.000,00	16.392.700,00	92,47
	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	17.728.000,00	16.392.700,00	92,47
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	44.337.000,00	42.641.000,00	96,17
	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	44.337.000,00	42.641.000,00	96,17
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	59.769.000,00	57.128.810,00	95,58
	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	13.389.000,00	12.144.000,00	90,70
	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	46.380.000,00	44.984.810,00	96,99
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	4.138.030.000,00	4.135.232.300,00	99,93
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	3.362.530.000,00	3.360.983.300,00	99,95
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	775.500.000,00	774.249.000,00	99,84
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	53.787.000,00	49.401.900,00	91,85
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	53.787.000,00	49.401.900,00	91,85
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	72.112.000,00	66.283.400,00	91,92
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	72.112.000,00	66.283.400,00	91,92
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	300.000.000,00	225.000.000,00	75,00
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	300.000.000,00	225.000.000,00	75,00
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	30.472.396.800,00	30.402.728.130,00	99,77
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	23.460.333.800,00	23.391.190.230,00	99,71
	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	1.477.896.000,00	1.465.396.000,00	99,15
	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	745.300.000,00	736.300.000,00	98,79
	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	8.828.700.200,00	8.805.200.200,00	99,73
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	3.092.689.400,00	3.091.244.400,00	99,95
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	799.950.000,00	793.978.000,00	99,25
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi Kawasan Rawa	65.506.200,00	64.718.000,00	98,80
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	1.900.292.000,00	1.884.575.630,00	99,17
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	6.350.000.000,00	6.350.000.000,00	100,00
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	200.000.000,00	199.778.000,00	99,89
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	7.012.063.000,00	7.011.537.900,00	99,99
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	100.000.000,00	99.889.000,00	99,89
	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	6.912.063.000,00	6.911.648.900,00	99,99
6	DINAS PENDIDIKAN	30.810.395.500,00	28.862.667.324,00	93,68
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	30.810.395.500,00	28.862.667.324,00	93,68
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.372.000.000,00	2.362.376.000,00	99,59
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	200.000.000,00	0,00	0,00
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.260.000.000,00	2.222.853.000,00	98,36
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.204.000.000,00	1.192.120.000,00	99,01
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	750.000.000,00	735.100.000,00	98,01
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	450.000.000,00	446.000.000,00	99,11



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

NO	SKPD/PROGRAM/SUB KEGIATAN	ANGGARAN SUB KEGIATAN	REALISASI SUB KEGIATAN	(%)
I	II	III	IV	V
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	192.000.000,00	191.770.000,00	99,88
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	12.383.343.000,00	12.413.194.920,00	100,24
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	605.930.000,00	605.930.000,00	100,00
	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	48.933.500,00	36.198.000,00	73,97
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	739.052.000,00	716.548.000,00	96,96
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	7.095.920.000,00	7.059.846.000,00	99,49
	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	230.000.000,00	202.551.404,00	88,07
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	1.836.067.000,00	385.880.000,00	21,02
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	367.500.000,00	218.100.000,00	59,35
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	75.650.000,00	74.200.000,00	98,08
7	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.137.694.000,00	988.570.000,00	86,89
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	7.460.000,00	7.460.000,00	100,00
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	7.460.000,00	7.460.000,00	100,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.116.600.000,00	967.790.000,00	86,67
	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1.116.600.000,00	967.790.000,00	86,67
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	13.634.000,00	13.320.000,00	97,70
	Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitas dan Pembinaan Pendampingan ibu Hamil dan ibu Pasca Persalinan	13.634.000,00	13.320.000,00	97,70
8	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	296.727.600,00	204.414.200,00	68,89
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	137.293.000,00	127.593.000,00	92,93
	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	137.293.000,00	127.593.000,00	92,93
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	159.434.600,00	76.821.200,00	48,18
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	159.434.600,00	76.821.200,00	48,18
9	DINAS PERHUBUNGAN	940.180.000,00	938.708.550,00	99,84
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	40.180.000,00	40.180.000,00	100,00
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	40.180.000,00	40.180.000,00	100,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	900.000.000,00	898.528.550,00	99,84
	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	900.000.000,00	898.528.550,00	99,84
10	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	14.418.273.585,48	14.402.731.696,00	99,89
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	481.241.925,00	476.479.225,00	99,01
	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	16.750.050,00	14.362.350,00	85,75
	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	464.491.875,00	462.116.875,00	99,49
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	26.376.000,00	26.192.500,00	99,30
	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	26.376.000,00	26.192.500,00	99,30
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	394.950.000,00	394.135.000,00	99,79
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	394.950.000,00	394.135.000,00	99,79
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	13.515.705.660,48	13.505.924.971,00	99,93
	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1.149.422.800,00	1.147.876.707,00	99,87
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	12.366.282.860,48	12.358.048.264,00	99,93
11	DINAS SOSIAL	4.028.363.275,00	3.151.037.521,00	78,22
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.068.068.000,00	225.686.670,00	21,13
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	29.136.000,00	28.020.900,00	96,17



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

NO	SKPD/PROGRAM/SUB KEGIATAN	ANGGARAN SUB KEGIATAN	REALISASI SUB KEGIATAN	(%)
I	II	III	IV	V
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.038.932.000,00	197.665.770,00	19,03
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	603.240.275,00	577.780.383,00	95,78
	Penyediaan Permakanan	5.075.750,00	0,00	0,00
	Penyediaan Alat Bantu	49.400.000,00	48.275.008,00	97,72
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	84.682.500,00	80.854.100,00	95,48
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	75.680.000,00	70.340.500,00	92,94
	Pemberian Layanan Kedaruratan	388.402.025,00	378.310.775,00	97,40
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	2.161.340.000,00	2.155.444.868,00	99,73
	Penjangkauan Anak-Anak Terantar	34.945.000,00	34.702.000,00	99,30
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	121.380.000,00	121.315.000,00	99,95
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100.245.000,00	99.024.000,00	98,78
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.904.770.000,00	1.900.403.868,00	99,77
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	195.715.000,00	192.125.600,00	98,17
	Penyediaan Makanan	46.025.000,00	45.996.000,00	99,94
	Pelayanan Dukungan Psikososial	149.690.000,00	146.129.600,00	97,62
12	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	1.600.755.000,00	1.582.698.600,00	98,87
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	185.188.500,00	185.083.700,00	99,94
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	169.471.500,00	169.435.300,00	99,98
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	15.717.000,00	15.648.400,00	99,56
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	15.015.000,00	15.015.000,00	100,00
	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	15.015.000,00	15.015.000,00	100,00
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1.400.551.500,00	1.382.599.900,00	98,72
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	1.305.358.700,00	1.301.175.500,00	99,68
	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	95.192.800,00	81.424.400,00	85,54
13	KECAMATAN DUSUN HILIR	50.000.000,00	49.994.000,00	99,99
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	50.000.000,00	49.994.000,00	99,99
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	50.000.000,00	49.994.000,00	99,99
14	KECAMATAN DUSUN SELATAN	11.050.000,00	11.030.000,00	99,82
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	11.050.000,00	11.030.000,00	99,82
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	11.050.000,00	11.030.000,00	99,82
15	KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
16	KECAMATAN KARAU KUALA	8.880.000,00	8.880.000,00	100,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	8.880.000,00	8.880.000,00	100,00
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	8.880.000,00	8.880.000,00	100,00
17	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	115.822.413.444,00	114.065.844.436,00	98,48
	PROGRAM PENATAAN DESA	1.270.614.944,00	970.083.316,00	75,43
	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	1.205.470.944,00	909.336.516,00	75,43
	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	32.572.000,00	30.373.400,00	93,25
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	32.572.000,00	30.373.400,00	93,25
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	108.373.205.500,00	107.081.007.160,00	98,81



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

NO	SKPD/PROGRAM/SUB KEGIATAN	ANGGARAN SUB KEGIATAN	REALISASI SUB KEGIATAN	(%)
I	II	III	IV	V
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	118.382.000,00	114.621.496,00	96,82
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	108.203.386.000,00	106.915.284.164,00	98,81
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	51.437.500,00	51.101.500,00	99,35
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	6.178.593.000,00	6.014.753.960,00	97,35
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	5.241.310.000,00	5.140.673.200,00	98,08
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	68.543.500,00	67.539.000,00	98,53
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	868.739.500,00	806.541.760,00	92,84
18	DINAS PERIKANAN	3.209.419.700,00	3.169.768.432,00	98,76
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	2.359.380.800,00	2.344.875.950,00	99,39
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	668.187.600,00	666.975.050,00	99,82
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	983.242.000,00	970.817.900,00	98,74
	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	294.442.100,00	293.748.000,00	99,76
	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	413.509.100,00	413.335.000,00	99,96
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	850.038.900,00	824.892.482,00	97,04
	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	445.115.000,00	429.964.976,00	96,60
	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	12.060.000,00	12.056.000,00	99,97
	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	10.636.000,00	10.371.900,00	97,52
	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	48.299.900,00	48.029.509,00	99,44
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	98.294.000,00	96.912.200,00	98,59
	Peningkatan Ketersediaan ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000,00	73.175.700,00	97,57
	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.688.000,00	15.626.800,00	99,61
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	138.066.000,00	132.007.397,00	95,61
	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	6.880.000,00	6.748.000,00	98,08
	TOTAL	243.769.449.699,48	235.968.694.075,00	96,80

- b. Kebijakan Pemerintah di dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui strategi dan program. Strategi yang dilaksanakan dalam penanggulangan kemiskinan terdiri dari 4 (empat) strategi yaitu:
1. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat.
 2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan Masyarakat perkotaan maupun pedesaan
 3. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan: dan
 4. Sinergi antar level pemerintahan perlu terus diperkuat supaya penanganan kebijakan program penanggulangan kemiskinan. semakin terarah dan tepat sasaran
- c. Program penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui pemenuhan kebutuhan hak dasar, pengurangan beban pengeluaran hidup serta pemberdayaan. Sasaran penanggulangan kemiskinan adalah rumah tangga, keluarga, dan/atau individu dengan kategori miskin dan miskin ekstrem dikelompokkan kedalam 2 (dua) kelompok
1. Kelompok program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan, dan program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

2. Kelompok program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga dan individu bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas taraf hidup masyarakat miskin.
- d. Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Barito Selatan dalam menurunkan jumlah penduduk miskin masih menghadapi hambatan dan kendala dalam pencapaian target indikator menurunkan angka kemiskinan, adapun hambatan dan kendala dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Barito Selatan sebagai berikut:
 1. Belum optimalnya sinergitas penanggulangan kemiskinan antara Pemerintah Pusat/provinsi dan Daerah;
 2. Kesadaran masyarakat miskin yang relatif rendah untuk keluar dari kondisinya saat ini sehingga masih mengharapkan bantuan dari pemerintah;
 3. Masih tingginya jumlah dan tingkat kemiskinan yakni 7,09 (ribu orang) atau 4,94 persen, lebih tinggi dari kondisi tahun 2024 yakni 6,87 (ribu orang) atau 4,83 persen; dan
 4. Keterbatasan kesempatan kerja terhadap akses lapangan pekerjaan yang menyebabkan masih rendahnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yaitu sebesar 4,30 persen dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebesar 65,50 persen.

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan selain melaksanakan program penanggulangan kemiskinan juga melaksanakan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2023 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Didalam pelaksanaan PPKE Kabupaten Barito Selatan akan melakukan pendataan dan penetapan ulang keluarga miskin untuk lanjutan perencanaan program untuk tahun selanjutnya.

2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka terdiri dari:

- a. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan;
- b. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha;
- c. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan
- d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Selatan, Tingkat Pengangguran Terbuka pada Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 adalah sebesar 4,30%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.2.1. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Barito Selatan

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/Turun (%)
I	II	III	IV	V	VI
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota (%)	4,33	4,12	4,30	0,18
2.	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	4,10	4,01	3,97	(0,04)
3.	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	5,35	4,90	4,85	(0,05)
4.	Peringkat Provinsi	*)	*)	*)	*)
5.	Peringkat Nasional	*)	*)	*)	*)

Keterangan: *) tidak tersedia data Sumber Dokumen: BPS Kab. Barsei

Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 4,30%, sedangkan TPT pada Tahun 2024 adalah



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

sebesar 4,12% atau lebih rendah jika dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2025. Dengan demikian TPT Kabupaten Barito Selatan masih lebih tinggi dibandingkan TPT Provinsi Kalimantan Tengah dan lebih rendah dibanding Nasional yang sebesar 3,97% dan sebesar 4,85%.

Tabel 2.1.2.2. Rekapitulasi Program/Kegiatan dalam Upaya Menekan Angka Pengangguran Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025

NO	SKPD/PROGRAM/SUB KEGIATAN	ANGGARAN SUB KEGIATAN	REALISASI SUB KEGIATAN	(%)
I	II	III	IV	V
1	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	1.920.740.550,00	1.902.238.250,00	99,04
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	55.532.000,00	55.430.500,00	99,82
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (Rtk)	55.532.000,00	55.430.500,00	99,82
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	221.700.500,00	221.631.900,00	99,97
	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	205.983.500,00	205.983.500,00	99,92
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	15.717.000,00	15.648.400,00	99,56
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	113.918.000,00	113.885.100,00	99,97
	Pelayanan Antar Kerja Di Daerah Kabupaten/kota	15.015.000,00	15.015.000,00	100,00
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	87.154.000,00	87.121.100,00	99,96
	Pelindungan Pmi (Pra Dan Purna Penempatan) Di Daerah Kabupaten/kota	11.749.000,00	11.749.000,00	100,00
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1.529.590.050,00	1.511.290.750,00	98,80
	Pengesahan Peraturan Perusahaan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/kota	1.327.770.200,00	1.323.248.400,00	99,66
	Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja Dan Penutupan Perusahaan Di Daerah Kabupaten/kota	201.819.850,00	188.042.350,00	93,17
	TOTAL	1.920.740.550,00	1.902.238.250,00	99,04

2.1.3. Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks Gini atau *Gini Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

1. Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama.
2. Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Selatan, realisasi pencapaian Gini Ratio Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 dan 2025 adalah sebesar 0,29 poin, dan 0,28 poin, sebagaimana dijelaskan Table di bawah ini.

Tabel 2.1.3.1. Gini Ratio Kabupaten Barito Selatan

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/turun (%)
1	Tingkat Kab/Kota	0,289	0,284	0,266	(0,018)
2	Tingkat Provinsi	0,317	0,301	0,292	(0,009)



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/turun (%)
3	Tingkat Nasional	0,388	0,301	0,292	(0,09)
3	Peringkat Provinsi	*)	*)	*)	*)
4	Peringkat Nasional	*)	*)	*)	*)

Sumber Dokumen: BPS Barito Selatan/BPS Pusat Statistik

2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- Rendah (< 60)
- Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
- Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
- Sangat Tinggi (> 80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Selatan, realisasi pencapaian IPM Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 adalah sebesar 75,21 poin dengan kategori tinggi sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.4.1. Indeks Pembangunan Manusia

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/turun (%)
1	Kabupaten/Kota	71,65	72,36	75,21	2,85
2	Provinsi	73,73	74,28	74,86	0,58
3	Indonesia/Nasional	74,39	75,02	75,90	0,88
4	Peringkat Provinsi	*)	*)		*)
5	Peringkat Nasional	*)	*)		*)

Sumber Dokumen BPS Kab. Barsel

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Barito Selatan adalah sebesar 75,21 poin yang merupakan peringkat ke 4 di Provinsi Kalimantan Tengah. Dibandingkan tahun 2024 sebesar 72,36 poin mengalami kenaikan sebesar 2,85 poin. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya angka harapan hidup saat lahir (AHH), atau dan harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan standar hidup berkaitan dengan PNB per kapita. Rincian kenaikan sebagai berikut:

Tabel 2.1.4.2. Variabel pencapaian IPM

No	Unsur IPM	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/(Turun)
I	II	III	IV	V	VI
1	Rata-rata lama sekolah				
	Barito Selatan	12,80	9,22	9,35	3,58
	Provinsi	12,76	8,81	8,96	3,95
2	Harapan Lama Sekolah				



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

No	Unsur IPM	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/(Turun)
	Barito Selatan	12,80	13,00	13,01	0,20
	Provinsi	12,76	12,77	12,78	0,01
3	Angka Harapan Hidup				
	Barito Selatan	67,75	72,79	73,00	5,04
	Provinsi	70,27	73,73	74,01	3,46
4	Pengeluaran per kapita disesuaikan (Ribu Rupiah)				
	Barito Selatan	12.067	12.508	12,736	0,441
	Provinsi	11.878	12,303	12,612	0,425

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan telah mengalokasikan program/kegiatan dalam upaya untuk meningkatkan umur harapan hidup sejak lahir pada APBD TA 2025 sebesar Rp211.117.188.732,00 dan telah merealisasikannya sebesar Rp186.649.088.765,00 atau 88.41%. Rincian program/kegiatan tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.1.4.3. Program/Kegiatan dalam Upaya Meningkatkan Umur Harapan Hidup Kabupaten Barito Selatan TA 2025

NO	SKPD/PROGRAM/SUB KEGIATAN	ANGGARAN SUB KEGIATAN	REALISASI SUB KEGIATAN	(%)
I	II	III	IV	V
1	DINAS KESEHATAN	60.201.538.227,00	56.378.273.003,00	93,65
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	58.598.598.727,00	54.929.820.378,00	93,74
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Kewenangan Daerah Kabupaten/kota	20.250.903.353,00	19.530.015.570,00	96,44
	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	37.697.041.374,00	34.755.788.908,00	92,20
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	33.374.000,00	31.945.000,00	95,72
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	617.280.000,00	612.070.900,00	99,16
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.163.141.500,00	1.108.337.925,00	95,29
	Perencanaan Kebutuhan Dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk Ukp Dan Ukm Di Wilayah Kabupaten/kota	182.836.500,00	180.127.697,00	98,52
	Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	980.305.000,00	928.210.228,00	94,69
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	186.362.000,00	185.704.500,00	99,65
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan Dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (Umot)	30.000.000,00	29.426.200,00	98,09
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Dan Nomor P-irt Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga	30.000.000,00	29.985.500,00	99,95
	Pemeriksaan Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market Pada Produksi Dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	126.362.000,00	126.292.800,00	99,95
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	253.436.000,00	154.410.200,00	60,93
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/kota	72.006.000,00	70.957.200,00	98,54
	Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/kota	40.650.000,00	39.500.000,00	97,17
	Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (Ukbrn) Tingkat Daerah Kabupaten/kota	140.780.000,00	43.953.000,00	31,22
2	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.540.960.808,00	1.425.256.550,00	92,49
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	7.500.000,00	5.855.000,00	78,07
	Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (Kg) Dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/kota	7.500.000,00	5.855.000,00	78,07
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.533.460.808,00	1.419.401.550,00	92,56
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (Kie) Pengendalian Penduduk Dan Kb Sesuai Kearifan Budaya Lokal	330.000.000,00	324.673.200,00	98,39
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Kb/petugas Lapangan Kb (Pkb/plkb)	849.830.808,00	849.635.450,00	99,98



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

NO	SKPD/PROGRAM/SUB KEGIATAN	ANGGARAN SUB KEGIATAN	REALISASI SUB KEGIATAN	(%)
I	II	III	IV	V
	Pengendalian Dan Pendistribusian Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan Kb Di Daerah Kabupaten/kota	203.930.000,00	177.892.900,00	87,23
	Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan Dan Pembinaan Kesetaraan Ber-kb	149.700.000,00	67.200.000,00	44,89
	TOTAL	61.742.499.035,00	57.803.529.553,00	93,62

Tabel 2.1.4.4. Program/Kegiatan dalam Upaya Meningkatkan pendidikan (angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah) Kabupaten Barito Selatan TA 2025

NO	SKPD/PROGRAM/SUB KEGIATAN	ANGGARAN SUB KEGIATAN	REALISASI SUB KEGIATAN	(%)
1	DINAS PENDIDIKAN	66.183.760.450,00	60.732.944.421,00	91,76
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	66.183.760.450,00	60.732.944.421,00	91,76
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	29.763.091.500,00	27.748.717.971,00	93,23
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	20.751.439.000,00	19.168.335.689,00	92,37
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)	15.301.729.950,00	13.597.790.761,00	88,86
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/kesetaraan	367.500.000,00	218.100.000,00	59,35
2	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	259.270.100,00	165.070.176,00	63,67
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	259.270.100,00	165.070.176,00	63,67
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	172.187.100,00	83.147.176,00	48,29
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/kota	87.083.000,00	81.923.000,00	94,07
	TOTAL	66.443.030.550,00	60.898.014.597,00	91,65

2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan.

Tabel 2.1.5.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barito Selatan

No	Uraian	Kabupaten/Kota						Provinsi Tahun 2025	Nasional Tahun 2025
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
1	PDRB (harga konstan 2010) (rupiah)	4.240.610,20	4.331.028,60	4.602.951,40	4.753.493,70	4.975.998,80	5.178.300,00	124.378,80	13.580.524,70
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-2,9	2,13	6,28	3,27	4,60	4,15	4,80	5,11
3	Peringkat Provinsi	12 dari 14	12 dari 14	6 dari 14	10 dari 14	09 dari 14	04 dari 14	04 dari 14	0

Sumber Dokumen: BPS Kab. Barsel/Kalteng

Selama kurun waktu tahun 2020 – 2025 perekonomian Kabupaten Barito Selatan mengalami penurunan dan peningkatan. Pada periode Tahun 2020 pertumbuhan perekonomian Kabupaten Barito Selatan mengalami penurunan -2,90% dan pada kurun waktu tahun 2023 pertumbuhan perekonomian Kabupaten Barito Selatan mengalami



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

peningkatan sebesar 3,27%. Kemudian pada tahun 2024 pertumbuhan perekonomian Kabupaten Barito Selatan meningkat lagi sebesar 4,70% Kemudian pada tahun 2025 pertumbuhan perekonomian Kabupaten Barito Selatan menurun lagi sebesar 4,15%.

2.1.6. Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Barito Selatan dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi empat kategori yang meliputi:

- Inflasi ringan (*creeping inflation*): inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun;
- Inflasi sedang (*Gallopning Inflation*): inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun;
- Inflasi berat (*High Inflation*): kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan; dan
- Hiperinflasi (*Hyper Inflation*): jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Inflasi yang dihitung oleh BPS yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kota Palangka Raya. Secara umum, kondisi inflasi pada daerah tersebut sebagai berikut.

Tabel 2.1.6.1. Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah

Wilayah Inflasi	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Kalimantan Tengah	3,13	1,03	2,64	0,24	0,86	0,35	0,66	1,21
Sampit	1,18	1,18	0,27	0,28	0,66	0,17	0,7	1,47
Palangka Raya	0,88	0,88	0,31	0,22	0,99	0,47	0,63	1,07

Sumber Dokumen: BPS Kalteng

2.1.7. Struktur Perekonomian Kabupaten Barito Selatan

Struktur perekonomian Kabupaten Barito Selatan dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.7.1. PDRB Kabupaten Barito Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2021-2025

Kategori	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.212.789,20	1.305.078,80	1.372.954,90	1.470.199,99	1.631.100,00
B	Pertambangan dan Penggalian	1.056.495,30	2.123.596,90	2.010.384,20	1.864.999,92	1.776.200,00
C	Industri Pengolahan	390.478,90	433.488,60	418.927,30	437.279,45	488.219,00
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4.126,60	4.330,70	4.678,10	4.999,71	5.600,55
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11.800,00	12.778,70	14.026,50	14.497,36	15.608,72
F	Konstruksi	364.921,80	395.032,20	446.401,40	494.772,24	540.547,18



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Kategori	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	548.929,00	578.398,30	638.541,50	695.772,41	771.943,45
H	Transportasi dan Pergudangan	751.608,30	833.540,80	916.033,37	1.081.820,35	1.070.647,19
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	140.637,90	151.568,50	916.170,80	182.373,16	191.472,39
J	Informasi dan Komunikasi	107.767,20	112.880,00	163.159,60	116.244,52	122.645,79
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	364.840,30	374.106,40	112.746,20	430.694,03	465.823,70
L	Real Estate	174.570,50	179.523,60	401.033,70	201.077,07	214.944,21
M, N	Jasa Perusahaan	1.088,40	1.128,60	1.347,22	1.400,83	1.543,20
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	536.417,60	535.139,40	1.310,10	638.632,82	711.675,00
P	Jasa Pendidikan	584.835,20	623.000,90	578.664,40	721.287,74	796.981,42
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	302.750,50	335.307,00	360.556,40	381.286,34	401.700,00
R, S, T, U	Jasa lainnya	127.076,50	132.726,50	148.418,70	158.955,64	172.765,31
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		6.681.133,20	8.131.625,90	8.505.354,39	8.896.293,58	9.379.417,11

Sumber Dokumen: BPS Kab. Barsel/Kalteng

2.2. Kebijakan Keuangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara Pemerintahan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten yang kemudian lebih jauh mengatur tata kelola keuangan daerah dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan hal ini, ruang lingkup Keuangan Daerah meliputi:

- Hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- Penerimaan Daerah;
- Pengeluaran Daerah;
- Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
- Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum

Kepala Daerah berwenang mengelola keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah Sebagai pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan, kepala daerah memiliki kewenangan untuk merencanakan, mengajukan rancangan, menugaskan, menetapkan, dan melaksanakan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. APBD memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Barito Selatan. APBD menjadi dasar pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerah dalam satu tahun anggaran serta merupakan penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran pemerintah daerah, termasuk juga tugas dan fungsi setiap organisasi perangkat daerah.

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan



Catatan Atas Laporan Keuangan **Pemerintah Kabupaten Barito Selatan**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan atas dasar, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat Kabupaten Barito Selatan. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun berikutnya diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik:

2.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa Pendapatan Daerah tersusun atas:

- a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- b) Pendapatan transfer
- c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih daerah. Target Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan yang mana PAD meliputi: (a) pajak daerah; (b) retribusi daerah; (c) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (d) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan transfer sebagaimana di atas terbagi menjadi dua: (a) transfer Pemerintah Pusat; dan (b) transfer antar-daerah. Terakhir, Lain-lain Pendapatan yang sah dibagi menjadi: (a) hibah; (b) dana darurat; dan/atau (c) lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Daerah merupakan kebijakan keuangan bagian pendapatan adalah untuk mencapai target dan berupaya meningkatkan penerimaan pendapatan pada seluruh obyek pendapatan, sehingga memenuhi kapasitas/kemampuan anggaran daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Proyeksi rencana pendapatan daerah yang digunakan adalah perkiraan yang terukur, rasional, dan mempunyai kepastian dasar hukum.

Untuk memperkuat posisi dan kontribusi PAD dalam APBD, maka kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun 2025 dalam rangka memperkuat struktur penerimaan daerah diarahkan pada antara lain:

- a. Meningkatkan manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan pendapatan daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku serta memanfaatkan teknologi terkini; Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur untuk pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini bidang pendapatan daerah pada Badan Pendapatan Daerah;
- b. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal;
- c. Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dalam menyelesaikan urusan yang berhubungan dengan penerimaan daerah;
- d. Pendayagunaan aset daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas;
- e. Menata ulang aset daerah yang dapat dijadikan sumber pendapatan daerah;



Catatan Atas Laporan Keuangan **Pemerintah Kabupaten Barito Selatan**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

- f. Optimalisasi hasil usaha Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang saat ini telah ada agar memberikan kontribusi yang optimal kepada PAD pada khususnya dan penerimaan daerah pada umumnya; dan
- g. Mengadakan peninjauan kembali atas berbagai Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan mempermudah birokrasi guna mempermudah investasi.
- Secara lebih rinci kebijakan Meningkatkan pengelolaan Pendapatan Daerah difokuskan pada:
- 1) Identifikasi dan penggalan sumber-sumber obyek pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD);
 - 2) Optimalisasi pemungutan disertai dengan pengawasan dan pengendalian yang ketat serta sistematis;
 - 3) Peningkatan sosialisasi kepada subyek dan obyek pajak maupun retribusi serta melakukan pendekatan persuasif;
 - 4) Memprioritaskan alokasi anggaran untuk pelayanan publik yang mampu meningkatkan kapasitas masyarakat dan mendorong terhadap peningkatan pendapatan masyarakat maupun daerah;
 - 5) Pembinaan yang intensif kepada petugas dan unit penghasil;
 - 6) Memaksimalkan peran SKPD teknis terkait kecamatan atau lembaga/institusi lainnya yang akan membantu dan mendukung kelancaran pemungutan pajak dan/atau retribusi daerah;
 - 7) Koordinasi ke Pemerintah Pusat dan Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka meningkatkan alokasi atau bagian yang akan diterima oleh Kabupaten Barito Selatan untuk setiap obyek dari dana perimbangan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 8) Melakukan Komunikasi yang intensif kepada lembaga di tingkat pusat dan provinsi, khususnya pada lembaga yang berwenang mengatur dan mengalokasikan dana perimbangan bagi kabupaten/kota;
 - 9) Pengkajian dan penyesuaian Perda dan Perbup yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah; dan
 - 10) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Gerakan Transaksi Non Tunai sesuai dengan Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017.

2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Struktur Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan mengacu pada PP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 34 Tahun 2025 tanggal 15 Oktober 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Arah dan kebijakan umum bagian belanja adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah untuk memenuhi rencana anggaran Belanja Daerah dalam periode tahun anggaran yang berkenaan: seperti (Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer) untuk seluruh bagian belanja pada setiap fungsi bidang urusan pemerintahan, baik yang bersifat wajib, Belanja Mengikat maupun urusan pilihan yang implementasinya dilaksanakan oleh SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Selatan melalui pelaksanaan agenda prioritas pembangunan di Tahun 2025.



Catatan Atas Laporan Keuangan **Pemerintah Kabupaten Barito Selatan**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

- A. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat dan menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan; Mengalokasikan Anggaran Belanja Wajib yang terdiri dari:
1. mengalokasi anggaran belanja yang besarannya diatur sesuai amanat peraturan perundang-undangan (*Mandatory Spending*) seperti belanja fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari belanja daerah.
 2. mengalokasi anggaran belanja fungsi kesehatan sekurang-kurangnya 10 persen dari Belanja Daerah diluar gaji,
 3. mengalokasi anggaran belanja modal ditujukan untuk memenuhi kebutuhan belanja yang digunakan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah, sekurang kurangnya anggaran belanja 10 persen dari Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
 4. mengalokasi anggaran pengawasan paling sedikit 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari belanja daerah yang dialokasikan mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
 5. mengalokasi anggaran pendidikan dan pelatihan paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah
 6. mengalokasi anggaran belanja pegawai yang terdiri dari: Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan PNS, Tunjangan Profesi Guru PNSD, Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Belanja Penunjang Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD, Belanja Insentif Pemungutan pajak Daerah dan Belanja Insentif Pemungutan pajak Daerah dan Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah; dan Alokasi anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Kabupaten/Kota.
 7. Menyesuaian Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan pemenuhan kewajiban atas kurang salur Belanja Bagi hasil pajak kepada Kabupaten/Kota sesuai amanat Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 8. Optimalisasi Belanja Bantuan Keuangan untuk membantu pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian target kinerja maupun pelayanan publik;
 9. Transparansi untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan informasi seluas-luasnya tentang APBD;
- B. Mengalokasikan anggaran Belanja Mengikat yang terdiri dari:
1. Alokasi anggaran Belanja pada Perangkat Daerah/Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 2. Alokasi anggaran Belanja Bunga;
 3. Alokasi anggaran belanja yang bersumber dari pajak rokok bagian Provinsi, DBHCHT, DAK Fisik dan DAK Non Fisik dimana penggunaannya diatur perundang-undangan;
 4. Alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain Catatan atas Laporan Keuangan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah.



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

- C. mengalokasi anggaran belanja yang diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah sehari-hari sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat serta pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan Peraturan Bupati Barito Selatan tentang RPD Tahun 2023-2026 dengan prioritas Tema pembangunan Tahun 2025 adalah *"Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas untuk pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan dan membuka kesempatan kerja yang luas"*

2.2.3. Kebijakan Keuangan Pembiayaan

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penerimaan pembiayaan daerah dihimpun berdasarkan: (a) SiLPA; (b) pencairan Dana Cadangan; (c) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; (d) penerimaan Pinjaman Daerah; (e) penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; (f) penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup: (a) pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo; (b) penyertaan modal daerah; (c) pembentukan Dana Cadangan; (d) pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau (e) pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Arah dan kebijakan umum bagian pembiayaan daerah di Kabupaten Barito Selatan diarahkan untuk:

1. Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran dan jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun lalu; dan.
2. Mengembangkan investasi daerah dan penyertaan modal dengan prinsip kehati-hatian.

Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp148.155.484.644,77 dengan realisasi besar Rp149.577.199.457,77 atau 100,95%.

2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD

Penentuan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD), dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) disusun dengan memperhatikan hirarki level kinerja yang terdiri atas strategic objectives, tactical objectives, dan operational objectives. Setiap level memiliki keluaran yang berbeda, dimulai dari operational objectives melalui output di tingkat kegiatan dan subkegiatan; tactical objectives melalui immediate outcome di tingkat program dan intermediate outcome di tingkat tujuan/sasaran Perangkat Daerah; dan final/ultimate outcomes yang menggambarkan capaian visi, misi, tujuan, dan sasaran kepala daerah dalam pembangunan 5 (lima) tahun kedepan. Target IKU, IKD, dan IKK ditetapkan untuk periode 2025–2030. Capaian tahun 2030 berfungsi sebagai indikator transisi yang menjadi tanggung jawab awal kepala daerah berikutnya, sekaligus menjamin kesinambungan pembangunan lintas periode.

Dalam penentuan indikator kinerja, proses cascading juga dilakukan untuk menurunkan mandat kinerja daerah baik dari level pemerintahan maupun dokumen perencanaan. Indikator kinerja dalam RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 memperhatikan indikator dari RPJPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2045, RPJMN Tahun 2025–2029, dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029. Hal ini bertujuan untuk menjamin keselarasan sasaran pembangunan daerah dengan tujuan pembangunan. Adapun rincian cascading indikator kinerja dijabarkan sebagai berikut.



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas Kepala Daerah dioperasionalkan melalui Program Perangkat Daerah. Program merupakan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah yang diturunkan dalam kegiatan dan subkegiatan dengan mempertimbangkan sumber daya serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Penyusunan program dilakukan berdasarkan hasil pemetaan permasalahan yang dirumuskan melalui pendekatan cascading berbasis outcome. Setiap program dipilih secara selektif guna optimalisasi kerangka alokasi anggaran belanja daerah sesuai dengan kapasitas fiskal.

Strategi dan arah kebijakan menjadi pedoman penting yang mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun, sebagaimana dituangkan dalam dokumen RPJMD untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Keduanya disusun secara sistematis untuk menjawab tantangan pembangunan serta mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah. Melalui rumusan strategi dan arah kebijakan yang tepat, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan pembangunan selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan sehingga mampu menciptakan pembangunan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan. Berikut tabel strategi dan arah kebijakan RPJMD 2025 – 2029.

Tabel 2.3.1. Arah Kebijakan RPJMD 2025–2029

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
I	II	III	IV
A.	<i>Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang agamis, sehat, cerdas dan terampil.</i>		
1	Meningkatnya aksesibilitas Pendidikan yang berkualitas dan berkarakter	Meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan yang bermutu dan inklusif.	Peningkatan partisipasi sekolah melalui wajib PAUD 1 tahun dan sekolah 12 tahun untuk melalui beasiswa pendidikan gratis bagi pelajar berprestasi dan keluarga kurang mampu; pakaian/seragam sekolah gratis; dan pembangunan sekolah rakyat serta sekolah unggulan garuda.
			Intensifikasi peningkatan partisipasi pendidikan tinggi melalui kebijakan satu keluarga satu sarjana dengan pendirian perguruan tinggi serta pengadaan prodi perguruan tinggi (STEAM) sesuai sektor potensial wilayah.
			Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi dan skema integrasi SMK dengan BLUD untuk menciptakan tenaga kerja yang ahli, terampil, siap kerja, dan mampu bersaing (DUDI).
			Peningkatan dan pemerataan akses pendidikan formal serta informal dengan memperkuat penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
		Meningkatkan kualitas literasi dan numerasi masyarakat secara menyeluruh.	Penguatan budaya literasi dan numerasi untuk membentuk pola pikir kritis dan inovatif melalui penyediaan media pembelajaran yang adaptif terhadap jenjang dan lingkungan belajar.
			Edukasi literasi keuangan bagi masyarakat multi segmen untuk menurunkan aktivitas ilegal dan merugikan masyarakat yang berkaitan dengan produk keuangan.
			Pemenuhan mutu dan layanan pendidikan yang berkualitas dengan penguatan nilai-nilai keagamaan dan muatan kebudayaan lokal berbasis falsafah “Belom Bahadat”.
		Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi lulusan pendidikan.	Penguatan kapasitas tenaga kerja terdidik melalui peningkatan partisipasi pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi.
			Penguatan kualitas pendidikan melalui peningkatan profesionalisme dan kompetensi tenaga kependidikan serta pemerataan distribusi guru sesuai kebutuhan mata pelajaran. Peningkatan kompetensi melalui Balai Latihan Kerja dan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh lapisan masyarakat.



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Memperkuat infrastruktur dan mekanisme tata Kelola Pendidikan yang efektif.	Penguatan infrastruktur pendidikan melalui peningkatan kualitas ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, fasilitas sanitasi dan TIK, serta media pembelajaran sebagai sarana pendukung mutu pendidikan.
			Optimalisasi tata kelola pendidikan dasar dan menengah pertama melalui penataan struktur organisasi, pembenahan alur koordinasi, serta penyempurnaan sistem manajemen layanan pendidikan.
2	Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat dan cakupan layanan kesehatan dasar	Memperkuat kapasitas ketahanan kesehatan.	Peningkatan derajat kesehatan dan gizi masyarakat melalui pemberian makanan bergizi gratis serta penyediaan layanan pemeriksaan Kesehatan gratis.
			Percepatan perluasan upaya promotif-preventif, pembudayaan, dan penanaman pola perilaku hidup sehat.
		Optimalisasi pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat.	Percepatan penanganan, pengobatan, dan penuntasan penyakit menular dan tidak menular.
			Percepatan penurunan stunting terutama pada wilayah dengan tingkat prevalensi kategori tinggi.
			Peningkatan edukasi kesehatan bagi ibu hamil yang terintegrasi dengan pendampingan pada masa pra dan pasca persalinan untuk mendukung kesehatan ibu dan anak.
		Memperkuat akses dan kualitas layanan kesehatan yang inklusif	Perluasan cakupan dan keterjangkauan layanan kesehatan ibu dan anak melalui penguatan layanan primer, peningkatan kunjungan kehamilan dan imunisasi, serta mobilisasi kader di tingkat desa.
			Peningkatan aksesibilitas fasilitas kesehatan dan pengembangan pelayanan kesehatan berbasis teknologi seperti <i>telemedicine</i> .
			Percepatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang berkualitas, kompeten, dan profesional yang didukung pemberian bantuan/insentif dan afirmasi pendayagunaan tenaga medis.
			Perluasan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional bagi seluruh lapisan masyarakat melalui kepesertaan BPJS secara gratis.
			Penguatan pelayanan kesehatan melalui penataan tata kelola manajerial, penguatan regulasi internal, dan perbaikan standar operasional di seluruh jenjang fasilitas kesehatan.
			Pemerataan layanan kesehatan dengan memastikan ketersediaan dokter dan tenaga kesehatan yang proporsional serta fasilitas puskesmas, rumah sakit, dan apotek yang mudah diakses.
B.	<i>Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.</i>		
1	Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan ekosistem secara berkelanjutan	Pelestarian cadangan air baku	Penguatan ketahanan cadangan air baku
		Pelestarian fungsi ekologis hutan.	Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan.
2	Upaya ketahanan bencana	Meningkatkan kapasitas mitigasi dan sistem peringatan dini bencana.	Penguatan kapasitas mitigasi kebencanaan serta penguatan system deteksi dini berbasis teknologi dan data
		Pengendalian melalui solusi berbasis alam sebagai ketahanan bencana.	Pengembangan solusi berbasis alam untuk pengendalian risiko bencana alam, khususnya banjir dan kebakaran hutan
3	Meningkatnya daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi pariwisata.	Pengembangan infrastruktur penunjang pariwisata.	Penguatan infrastruktur akomodasi dan layanan pendukung pariwisata yang berdaya saing
		Diversifikasi ekonomi melalui pengembangan pariwisata unggulan	Pengembangan pariwisata berbasis jasa lingkungan
4	Meningkatnya kontribusi dan kinerja usaha lokal dalam perekonomian daerah	Meningkatkan daya saing produk lokal.	Pengembangan 1 desa 1 produk berdasarkan potensi daerah.



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatkan kualitas infrastruktur pasar dan sentra UMKM.	Optimalisasi pengembangan pasar dan sentra UMKM sebagai pusat aktivitas ekonomi
		Optimalisasi sistem rantai pasok dan manajemen logistik.	Pengembangan layanan logistik untuk mendukung peningkatan perdagangan.
		Peningkatan kapasitas industri	Pengembangan dan penguatan pusat industri pengolahan produk untuk sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
		Peningkatan nilai ekonomi aset daerah.	Pengembangan dan optimalisasi peran koperasi, BUMD dan BULD dalam perekonomian daerah
		Peningkatan daya saing produk lokal.	Optimalisasi potensi produksi tanaman hutan berbasis kearifan lokal dengan prinsip berkelanjutan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku
5	Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	Penguatan Puskesmas dan Poskesdes, mobilisasi tenaga kesehatan, Bantuan siswa miskin, pembangunan ruang kelas baru, Pengembangan UMKM, hilirisasi produk pertanian/perkebunan, Pembangunan jalan desa, SPAM, dan sanitasi, Pelatihan ASN, digitalisasi layanan publik, Program bantuan sosial, pemberdayaan kelompok rentan (MultiDimensi)	Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan dasar, Pemerataan akses pendidikan berkualitas, Penguatan ekonomi lokal berbasis potensi daerah, Peningkatan infrastruktur dasar, Reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas ASN, Penguatan perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat (Multi Dimensi)
6	Meningkatnya kualitas dan inklusivitas ketenagakerjaan daerah	Pengembangan tenaga kerja produktif dan profesional yang sesuai dengan kebutuhan sektor strategis daerah.	Peningkatan kapasitas tenaga kerja melalui pengembangan kompetensi dan keterampilan sesuai kebutuhan
		Penguatan lapangan kerja formal berbasis ekspansi usaha produktif	Peningkatan dan pengembangan lapangan kerja formal melalui perluasan sektor usaha.
		Perlindungan tenaga kerja kelompok rentan dari adanya risiko sosial.	Peningkatan akses dan kepesertaan tenaga kerja terhadap jaminan social ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja rentan.
7	Terwujudnya struktur dan kinerja ekonomi daerah yang kuat dan berdaya saing	Penguatan posisi ekonomi daerah dalam rantai nilai global.	Peningkatan rantai nilai global melalui skema kerjasama regional dan internasional.
			Penguatan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah melalui industri halal, keuangan syariah, dan dana sosial syariah.
		Pengembangan Barito Selatan sebagai daerah penyangga IKN.	Pembangunan dan pengembangan Barito Selatan sebagai gerbang Kalimantan Tengah untuk mendukung IKN sebagai hub ekonomi yang mendorong aktivitas ekonomi maju dan kompetitif.
8	Meningkatnya kapasitas keuangan daerah dan perluasan inklusi ekonomi yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal	Peningkatan kapasitas fiskal daerah.	Peningkatan dan penguatan kondisi fiskal daerah melalui optimalisasi PAD sesuai dengan potensi daerah, peningkatan proporsi belanja program pembangunan, serta pemanfaatan sumber pembiayaan alternatif.
		Pembenahan pendapatan daerah dan sumber pembiayaan pembangunan	Pengelolaan keuangan daerah yang efektif untuk perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.
C. Mengembangkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya.			
1	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman layak huni	Meningkatkan pemerataan akses air bersih dan sanitasi.	Pemerataan akses terhadap air bersih dan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) terintegrasi serta sanitasi aman di kawasan permukiman.
			Optimalisasi, pembinaan, dan pengawasan cakupan dan kualitas drainase lingkungan permukiman.
			Penyediaan sarana pengelolaan sistem air limbah domestik terpadu dan berkelanjutan untuk skala regional, skala kota, dan skala kawasan.
			Pengembangan tata kelola sampah yang menyeluruh dan terpadu dari sumber timbulan hingga tempat pemrosesan akhir secara berkelanjutan dan inklusif.
		Meningkatkan akses jaringan listrik	Peningkatan konektivitas dan distribusi jaringan tenaga kelistrikan serta pembangunan infrastruktur transmisi



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			dan interkoneksi tenaga listrik,terkhususnya bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu.
		Membangun fasilitas pelayanan publik.	Pengembangan fasilitas pelayanan dasar dalam meningkatkan penguatan kapasitas ketahanan dan tata kelola pelayanan kesehatan, pendidikan, pemerintahan, industri, pariwisata, dan sektor lainnya.
			Pembangunan wilayah perkotaan yang maju, layak, hijau, dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, lingkungan,dan tata kelola yang terintegrasi.
2	Terwujudnya konektivitas wilayah untuk mendukung pergerakan barang dan jasa	Mengembangkan konektivitas wilayah berkelanjutan.	Optimalisasi pembangunan jalan nasional yang menjadi konektivitas antarwilayah sehingga mempermudah pergerakan barang, jasa, dan manusia serta meningkatkan aktivitas perekonomian daerah.
			Pembangunan konektivitas jalan menuju wilayah Ibu Kota Nusantara dalam rangka meningkatkan mobilitas dan aktivitas masyarakat untuk menangkap peluang perekonomian yang lebih tinggi.
		Mengadakan moda transportasi umum.	Pengembangan moda transportasi yang terintegrasi dan terjangkau dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat.
		Memperbaiki dan membangun jalan, jembatan, dan jalur irigasi.	Penguatan infrastruktur dasar jembatan dalam rangka memenuhi keterhubungan wilayah yang dibatasi oleh aliran sungai.
			Perbaikan dan/atau pelebaran infrastruktur jalan arteri primer dan kolektor primer dalam rangka meningkatkan mobilitas masuk ke Barito Selatan sebagai upaya untuk mendorong kemajuan dan perkembangan wilayah.
			Pembangunan jaringan irigasi primer sebagai upaya peningkatan ketahanan dan produktivitas pangan, terkhususnya pertanian, dalam rangka mendukung Barito Selatan sebagai lumbung pangan.
		Meningkatkan ketersediaan dan pelayanan infrastruktur transportasi	Pembangunan jaringan transportasi berupa terminal sebagai penghubung mobilitas barang dan jasa, seperti Terminal Tarusan, terminal khusus, dan terminal penumpang tipe C.
			Pembangunan pelabuhan pengumpul untuk meningkatkan mobilitas dan akses transportasi untuk barang dan jasa pada skala regional.
			Pembangunan pelabuhan perikanan sebagai sarana bongkar muat perikanan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan aktivitas perikanan.
			Optimalisasi pembangunan bandara dalam rangka meningkatkan keterhubungan dan konektivitas wilayah antarpulau untuk memperluas skala aktivitas perekonomian regional dan nasional.
			Optimalisasi pembangunan infrastruktur pertambangan batubara dalam meningkatkan potensi dan pencatatan sumber daya hasil pertambangan.
D.	<i>Memantapkan kondisi sosial budaya daerah berbasis kearifan lokal.</i>		
1	Memperkuat nilai sosial, wawasan kebangsaan, dan pelestarian budaya lokal	Menguatkan harmoni sosial, keagamaan, ketertiban, dan demokrasi yang berkeadilan.	Peningkatan pengakuan dan penghormatan terhadap lembaga lembaga adat dan hak ulayat masyarakat.
			Penguatan kerukunan inter dan antar umat beragama dan layanan keagamaan transformatif untuk mewujudkan kehidupan beragama maslahat.
			Penguatan stabilitas sosial melalui peningkatan sistem keamanan dan penanganan kriminalitas yang responsif, disertai internalisasi nilai kebangsaan melalui pendidikan ideologi Pancasila dan pembinaan politik beretika, serta penguatan peran organisasi kemasyarakatan secara sinergis.
		Pemanfaatan kesenian serta percepatan pengelolaan dan restorasi situs kebudayaan.	Perlindungan dan pemanfaatan cagar budaya secara berkelanjutan disertai penyelenggaraan festival budaya yang terintegrasi dengan agenda daerah untuk memperkuat identitas budaya dan partisipasi masyarakat.
			Pengadaan ruang publik yang dapat diakses oleh seluruh elemen masyarakat sebagai wadah bagi masyarakat untuk berinteraksi dan melestarikan budaya.



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
2	Terciptanya kehidupan sosial yang setara dan inklusif melalui penguatan keluarga serta pemenuhan hak gender	Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.	Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dalam pembangunan, dan perlindungan dari kekerasan.
			Memperluas sosialisasi di berbagai instansi dan kalangan masyarakat agar menjwai spirit Belom Bahadat dalam berkompetensi di berbagai bidang guna menumbuhkan masyarakat Kalteng yang berdaya saing.
		Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.	Pemberdayaan lembaga masyarakat dalam ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
			Peningkatan pelayanan, advokasi serta komunikasi, informasi, dan edukasi keluarga berencana.
		Meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.	Penguatan sistem respons dan pemulihan perlindungan anak yang komprehensif.
		Menekan kesenjangan sosial dengan kebijakan publik inklusif.	Penguatan jaring pengaman sosial berbasis pendekatan produktivitas yang adaptif, fleksibel, dan berkelanjutan.
			Peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak keluarga rentan, penyandang disabilitas, anak terlantar, dan lanjut usia.
E. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik			
1	Integrasi standar pelayanan dan sistem tata kelola pemerintahan berbasis digital	Digitalisasi dan integrasi pelayanan publik yang responsif	Peningkatan mutu layanan publik melalui integrasi platform digital dan penguatan fungsi Mal Pelayanan Publik sebagai pusat layanan terpadu yang responsif.
			Pengembangan pusat data untuk optimalisasi dan pembaruan data sebagai dasar pengambilan kebijakan yang terukur dan tepat sasaran.
			Penguatan tata kelola data pembangunan melalui integrasi sistem database sektoral yang konsisten, baik antar perangkat daerah dan antar level pemerintahan.
2	Meningkatnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Penguatan kapasitas aparatur dan maturitas tata kelola birokrasi yang adaptif.	Penguatan reformasi birokrasi melalui pengembangan smart government yang mendorong tata kelola pemerintahan yang adaptif, transparan, dan responsif.
			Penguatan pengelolaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas aparatur yang profesional dan bebas dari tindakan korupsi.
			Penguatan struktur kelembagaan dan penempatan aparatur daerah secara tepat fungsi dan tepat kompetensi guna mendorong kinerja organisasi yang efektif.
		Penguatan supremasi hukum yang transparan, adil, dan netral.	Penguatan reformasi hukum melalui penegakan hukum yang adil, transparan, dan aksesibel bagi seluruh lapisan masyarakat.
		Optimalisasi sinergitas perencanaan yang terpadu dan partisipatif.	Optimalisasi pelaksanaan zonasi wilayah yang telah ditetapkan guna mempercepat pembangunan lintas sektor sesuai potensi kewilayahan.
			Harmonisasi pembangunan berkelanjutan melalui sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
			Penguatan mekanisme pengendalian pembangunan, melalui implementasi manajemen risiko serta monitoring dan evaluasi capaian kinerja pemerintahan.
			Peningkatan upaya pentahelix melalui pelibatan masyarakat adat dan umum dalam forum perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
			Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan mendorong penataan wilayah administratif pemerintahan yang adaptif terhadap kondisi geografis, beban kerja kewilayahan, dan dinamika kependudukan.
F. Ketahanan pangan dan energi daerah yang berkelanjutan			
1	Terwujudnya ketahanan pangan yang berkelanjutan berbasis sumber daya lokal	Mengembangkan kawasan hilirisasi komoditas pangan.	Percepatan pengintegrasian kawasan hilirisasi dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Barito Selatan



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Advokasi kebijakan yang mendukung hilirisasi pangan, termasuk perizinan yang mudah, standar kualitas produk, dan insentif fiskal.
			Penyusunan kajian untuk pemetaan identifikasi komoditas unggulan dan potensi pengembangan wilayah
		Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas komoditas pangan.	Penyusunan rencana strategis yang terukur hilirisasi pangan, mencakup timeline, target, skema pembiayaan, dan kebutuhan anggaran
			Penyelenggaraan pelatihan bagi petani dan pekerja terkait teknik pengolahan pangan, manajemen produksi, dan teknologi pengolahan.
2	Terwujudnya ketahanan energi melalui penggunaan penerapan ekonomi hijau dan Energi Baru Terbarukan (EBT)	Mendorong integrasi sistem pertanian berkelanjutan yang mendukung ketahanan energi.	Pengembangan model pertanian terpadu yang mengintegrasikan aspek pangan dan energi.
		Mengembangkan pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) secara optimal.	Penyelarasan tata kelola energi terbarukan melalui penelaahan dokumen RUEN, RUED, dan RUPTL sebagai dasar perencanaan kebutuhan energi di Barito Selatan
			Penyusunan kajian dan perencanaan komprehensif potensi sumber daya EBT (Surya, angin, biomassa, dan hidro) meliputi kelayakan teknis, jadwal, pembiayaan, serta manajemen risiko.
			Penyesuaian regulasi dan standar nasional serta daerah terkait pengembangan EBT.
			Kolaborasi dengan akademisi dan LSM untuk penelitian, pengembangan, dan edukasi masyarakat mengenai energi terbarukan.
			Penyusunan masterplan pemerataan energi dan perancangan sistem energi terbarukan yang adaptif terhadap kondisi geografis dan kebutuhan lokal
		Pembangunan Industri hijau yang berkelanjutan.	Pengembangan industri hijau dan sektor ekonomi baru bernilai tambah tinggi secara berkelanjutan melalui dukungan inovasi dan teknologi
		Penguatan ketahanan energi dengan pendekatan terintegrasi.	Penguatan ketahanan energi melalui pendekatan terpadu FEW Nexus (Food-Energy-Water).
			Pengembangan potensi energi terbarukan berbasis energi biomassa, energi surya (solar), energi mikrohidro, dan energi gambut.

Pencapaian indikator kinerja dari masing-masing penyelenggaraan urusan SKPD disajikan tersendiri dalam Buku Laporan Kinerja SKPD (LAKIP).



Catatan Atas Laporan Keuangan **Pemerintah Kabupaten Barito Selatan**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Pada bagian ini akan disajikan analisis capaian kinerja keuangan yang digambarkan dalam ringkasan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Kabupaten Barito Selatan secara keseluruhan sebagai akuntabilitas keuangan terhadap capaian indikator dalam mewujudkan tujuan yang ditetapkan.

Dari gambaran realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dapat dijelaskan sebagai berikut.

3.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara Pemerintahan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten yang kemudian lebih jauh mengatur tata kelola keuangan daerah dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan hal ini, ruang lingkup Keuangan Daerah meliputi:

- 1) Hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- 2) Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- 3) Penerimaan Daerah;
- 4) Pengeluaran Daerah;
- 5) Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
- 6) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Kepala Daerah berwenang mengelola keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah atas kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Keuangan daerah tersebut dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagai pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan, kepala daerah memiliki kewenangan untuk merencanakan, mengajukan rancangan, menugaskan, menetapkan, dan melaksanakan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun realisasi pencapaian target kinerja keuangan menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan diklasifikasikan menurut Urusan Wajib dan Urusan Pilihan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 01 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 dan Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2025 tanggal 15 Oktober 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Pencapaian kinerja menurut urusan Pemerintahan Daerah telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah berikut laporan Penyelenggaraan masing-masing urusan oleh SKPD terkait:

Penyajian ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan disajikan berdasarkan urusan wajib dan pilihan. Ikhtisar realisasi dimaksud adalah sebagaimana disajikan secara



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

ringkas pada tabel realisasi pendapatan dan realisasi belanja, Berikut disajikan anggaran murni sampai dengan perubahan anggaran pada Tahun 2025 serta perbandingannya Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.1.1 Pendapatan dan Realisasi Belanja

Uraian	Anggaran Sebelum 2025	Anggaran Sesudah 2025	Kenaikan/ (Penurunan)	APBD Perubahan 2024
I	II	III	IV	V
PENDAPATAN DAERAH	1.499.619.676.999,00	1.648.597.165.175,23	148.977.488.176,23	1.850.935.885.078,00
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	152.650.448.097,00	120.216.516.022,23	(32.433.932.074,77)	90.112.759.982,00
Pendapatan Transfer	1.324.884.324.000,00	1.286.584.463.942,00	(38.299.860.058,00)	1.750.480.034.315,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	22.084.904.902,00	241.796.185.211,00	219.711.280.309,00	10.343.090.781,00
Jumlah Pendapatan	1.499.619.676.999,00	1.648.597.165.175,23	148.977.488.176,23	1.850.935.885.078,00
BELANJA	1.715.516.665.460,00	1.796.752.649.820,00	81.235.984.360,00	1.949.005.323.992,00
Belanja Operasional	1.011.016.115.369,50	1.075.083.720.236,50	64.067.604.867,00	1.143.558.554.925,22
Belanja Modal	503.526.341.321,50	525.317.095.814,50	21.790.754.493,00	577.536.028.573,78
Belanja tidak terduga	15.000.000.000,00	10.377.625.000,00	(4.622.375.000,00)	4.160.352.466,00
Belanja Transfer	185.974.208.769,00	185.974.208.769,00	0,00	223.750.388.027,00
Jumlah Belanja	1.715.516.665.460,00	1.796.752.649.820,00	81.235.984.360,00	1.949.005.323.992,00
Surplus /defisit	(215.896.988.461,00)	(148.155.484.644,77)	67.741.503.816,23	(98.069.438.914,00)
PEMBIAYAAN	215.896.988.461,00	148.155.484.644,77	(67.741.503.816,23)	98.069.438.914,00
Penerimaan Pembiayaan	215.896.988.461,00	164.192.653.173,77	(51.704.335.287,23)	110.519.438.914,00
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	16.037.168.529,00	16.037.168.529,00	12.450.000.000,00
Jumlah pembiayaan netto	215.896.988.461,00	148.155.484.644,77	(67.741.503.816,23)	98.069.438.914,00
SILPA	0,00	0,00	0,00	0,00

Berdasarkan tabel di atas dapat uraikan sebagai berikut:

1. Terjadi kenaikan target anggaran pendapatan pada APBD Perubahan 2025 sebesar Rp148.977.488.176,23 yang mana anggaran pendapatan sebelum sebesar Rp1.499.619.676.999,00 setelah perubahan anggaran pendapatan sebesar Rp1.648.597.165.175,23.
2. Pada bagian anggaran belanja terjadi kenaikan target pada APBD Perubahan 2025 yaitu sebesar Rp81.235.984.360,00 yang mana anggaran belanja sebelum sebesar Rp1.715.516.665.460,00 setelah perubahan anggaran sebesar Rp1.796.752.649.820,00. dan
3. Pada Pembiayaan netto terjadi penurunan target anggaran pada APBD Perubahan 2025 sebesar (Rp67.741.503.816,23) karena penyesuaian atas penerimaan Pembiayaan yaitu Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya.

Berikut disajikan gambaran realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 dan perbandingan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024.



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 3.1.2 Pendapatan dan Realisasi Belanja

No	Uraian	Anggaran Murni 2025	APBD Perubahan 2025	Realisasi (Rp)		Persentase	
				Tahun 2025	Tahun 2024	Realisasi 2025	Kenaikan/ (Penurunan) 2025-2024
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
A	PENDAPATAN DAERAH	1.499.619.676.999,00	1.648.597.165.175,23	1.543.309.437.665,78	1.831.871.547.012,98	93,61	(15,75)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	152.650.448.097,00	120.216.516.022,23	111.097.900.846,78	83.690.122.826,98	92,41	32,75
2	Pendapatan Transfer	1.324.884.324.000,00	1.286.584.463.942,00	1.426.117.527.001,00	1.743.463.544.883,00	110,85	(18,20)
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	22.084.904.902,00	241.795.185.211,00	6.094.009.818,00	4.717.879.303,00	2,52	29,17
	Jumlah Pendapatan	1.499.619.676.999,00	1.648.597.165.175,23	1.543.309.437.665,78	1.831.871.547.012,98	93,61	(15,75)
B	BELANJA	1.715.516.665.460,00	1.796.752.649.820,00	1.682.460.442.997,86	1.765.648.332.753,40	93,64	(4,71)
1	Belanja Operasional	1.011.016.115.369,50	1.075.083.720.236,50	1.001.982.776.374,86	1.020.479.418.028,50	93,20	(1,81)
2	Belanja Modal	503.526.341.321,50	525.317.095.814,50	514.327.377.771,00	532.177.064.624,90	97,91	(3,35)
3	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000,00	10.377.625.000,00	5.522.666.080,00	423.718.824,00	53,22	1.203,38
4	Belanja Transfer	185.974.208.769,00	185.974.208.769,00	160.627.622.772,00	212.568.131.276,00	86,37	(24,43)
	Jumlah Belanja	1.715.516.665.460,00	1.796.752.649.820,00	1.682.460.442.997,86	1.765.648.332.753,40	93,64	(4,71)
	Surplus /Defisit	(215.896.988.461,00)	(148.155.484.644,77)	(139.151.005.332,08)	66.223.214.259,58	93,92	(310,12)
C	PEMBIAYAAN	215.896.988.461,00	148.155.484.644,77	149.500.480.030,11	97.969.438.914,19	100,91	52,60
1	Penerimaan Pembiayaan	215.896.988.461,00	164.192.653.173,77	164.115.933.746,11	110.419.438.914,19	99,95	48,63
2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	16.037.168.529,00	14.615.453.716,00	12.450.000.000,00	91,13	17,39
	Jumlah pembiayaan netto	215.896.988.461,00	148.155.484.644,77	149.500.480.030,11	97.969.438.914,19	100,91	52,60
	SILPA	0,00	0,00	10.349.474.698,03	164.192.653.173,77	0,00	(93,70)

1. Pada bagian pendapatan dari target yang ditetapkan anggaran pendapatan sebelum sebesar Rp1.499.619.676.999,00 setelah perubahan sebesar Rp1.648.597.165.175,23, terealisasi sebesar Rp1.543.309.437.665,78 atau 93,61% sehingga realisasi pendapatan kurang dari anggaran perubahan yang ditetapkan yaitu sebesar Rp105.287.727.509,45;
2. Pada bagian anggaran belanja sebelum sebesar Rp1.715.516.665.460,00 setelah perubahan anggaran, ditetapkan belanja sebesar Rp1.796.752.649.820,00 dengan terealisasi sebesar Rp1.682.460.442.997,86 atau 93,64%; dan
3. Pada bagian pembiayaan netto terealisasi sebesar 100,91% yaitu dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp148.155.484.644,77 dan direalisasikan sebesar Rp149.500.480.030,11 atau 100,91%

Adanya pencapaian target pendapatan dan belanja serta pembiayaan menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp10.349.474.698,03 SiLPA ini akan memberikan fleksibilitas pengelolaan APBD untuk tahun mendatang.



Catatan Atas Laporan Keuangan **Pemerintah Kabupaten Barito Selatan**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

3.2. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN YANG DITETAPKAN

Rendahnya realisasi APBD menghadirkan berbagai dampak negatif, seperti penundaan pembangunan, kurangnya pelayanan publik yang berkualitas, dan rendahnya kualitas hidup masyarakat.

3.2.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain:

- a. sumber pendapatan yang terbatas
- b. perencanaan anggaran yang tidak tepat sasaran dan kurang terukur akibatnya menyebabkan realisasi anggaran tidak optimal
- c. permasalahan administrasi dan tata Kelola seperti lemahnya sistem akuntabilitas dan transparansi, juga dapat menghambat penyaluran anggaran secara efisien
- d. ketidaktepatan dalam pelaporan dan pengawasan sehingga menyebabkan penyaluran anggaran tidak terpantau dengan baik dan berpotensi menimbulkan keterlambatan penyerapan anggaran belanja
- e. rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan sehingga anggaran dapat mengakibatkan ketidaksesuaian antara program anggaran dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat
- f. Sumber pendapatan daerah yang terbatas

Untuk memantapkan pendapatan atau penerimaan daerah agar rencana belanja pemerintah tidak terganggu maka pemerintah melakukan upaya-upaya antara lain:

1. Mengoptimalkan pendataan dan pemetaan potensi subyek dan obyek pajak dan retribusi daerah;
2. Menerapkan digitalisasi dalam pengelolaan dan penerimaan pembayaran pajak dan retribusi daerah untuk mewujudkan pengelolaan pendapatan asli daerah yang tertib,
3. Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan melakukan promosi, kerja sama dengan stakeholder dan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat memanfaatkan pelayanan yang disediakan pemerintah;
4. Membuat inovasi dan melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah dan retribusi daerah;
5. Melakukan monitoring, pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah agar potensi pajak daerah dan retribusi daerah dapat diperoleh secara maksimal termasuk melibatkan Tim Optimalisasi PAD;
6. Melaksanakan penagihan secara aktif kepada wajib pajak yang memiliki tunggakan;
7. Menggali dan mengidentifikasi potensi-potensi yang belum terdata dan belum disasar melalui pengembangan investasi dan potensi daerah;

3.2.2. BELANJA DAERAH

terdapat Hambatan dan kendala dalam pencapaian target yang telah Ditetapkan, dari anggaran belanja daerah, Secara umum permasalahan tersebut diantaranya pada SKPD Pemerintah Kabupaten Barito Selatan meliputi:

1. Ketidak efektifan Proses Perencanaan dan Penyusunan Anggaran
2. keraguan dalam memulai kegiatan akibat perencanaan tidak matang.



Catatan Atas Laporan Keuangan **Pemerintah Kabupaten Barito Selatan**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

3. kurangnya pemahaman sumber daya manusia di dalam penerapan regulasi di bidang pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah.
4. keterlambatan pelaksanaan lelang
5. penjadwalan kegiatan atau subkegiatan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kurang tepat,
6. kegiatan fisik menunggu selesainya kegiatan perencanaan atau *detail engineering design* (DED). Hal ini kerap mengakibatkan beberapa kegiatan kontraktual belum dapat dilaksanakan termasuk kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK)
7. biasanya dalam membelanjakan kas daerah memiliki pola pengajuan tagihan akhir tahun, setelah penyelesaian fisik 100 persen.
8. Pengadaan barang/jasa belum mengajukan permohonan pembayaran atas penyelesaian fisik sesuai dengan termin yang diatur dalam perjanjian kontrak dengan pihak ketiga
9. realisasi belanja khususnya pengadaan konstruksi cenderung lambat dan beberapa jenis belanja belum tercatat pada jurnal belanja.
10. Kurangnya Transparansi dan Keterbukaan Informasi



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip - prinsip, dasar - dasar, konvensi - konvensi dan praktik - praktik spesifik yang dipakai oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan tersebut mencerminkan prinsip kehati-hatian dan mencakup semua hal yang material dan sesuai dengan ketentuan dalam PSAP. Dan Kebijakan akuntansi yang diberlakukan di Kabupaten Barito Selatan di tahun 2025 mengacu Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 50 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah nomor 22 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi yang dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

a. Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi;
2. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan dan persyaratan minimum isi laporan keuangan; dan
3. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Pengakuan, pengukuran dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam kebijakan akuntansi yang khusus.

4.1. ENTITAS AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

4.1.1. Entitas Akuntansi

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Entitas Akuntansi untuk unit pemerintahan wajib menyusun Laporan keuangan tahunan, yang setidaknya-tidaknya terdiri dari:

- 1) LRA;
- 2) Neraca;
- 3) LPE;
- 4) LO dan
- 5) CaLK



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Pada tahun anggaran 2025, entitas pelaporan keuangan daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) cq. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, adapun Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Barito Selatan merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan. Berdasarkan peraturan tersebut, susunan perangkat daerah Kabupaten Barito Selatan terdiri atas 35 Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) yaitu:

Tabel 4.1.1.1. SKPD pada Pemerintah kabupaten Barito Selatan

NO	KODE SKPD	NAMA ENTITAS AKUNTANSI TAHUN 2025	NAMA ENTITAS AKUNTANSI TAHUN 2024
A	B	C	D
1	1.01.0.00.0.00.01	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
2	1.02.0.00.0.00.01	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
3	1.03.0.00.0.00.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4	1.04.2.10.0.00.01	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
5	1.05.0.00.0.00.01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
6	1.05.0.00.0.00.02	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
7	1.05.1.06.0.00.01	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
8	1.06.0.0.0.00.01	DINAS SOSIAL	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
9	2.08.2.14.0.00.01	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
10	2.09.3.27.0.00.01	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
11	2.11.0.00.0.00.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
12	2.12.0.00.0.00.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
13	2.13.0.00.0.00.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PERHUBUNGAN
14	2.15.0.00.0.00.01	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
15	2.16.2.20.2.21.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
16	2.17.3.31.3.30.01	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
17	2.18.0.00.0.00.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

NO	KODE SKPD	NAMA ENTITAS AKUNTANSI TAHUN 2025	NAMA ENTITAS AKUNTANSI TAHUN 2024
A	B	C	D
18	2.22.0.00.0.00.01	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
19	2.23.2.24.0.00.02	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	SEKRETARIAT DAERAH
20	3.25.0.00.0.00.01	DINAS PERIKANAN	SEKRETARIAT DPRD
21	3.32.2.07.0.00.01	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
22	4.01.0.00.0.00.01	SEKRETARIAT DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
23	4.02.0.00.0.00.01	SEKRETARIAT DPRD	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
24	5.01.5.05.0.00.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	INSPEKTORAT
25	5.02.0.00.0.00.01	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	KECAMATAN DUSUN HILIR
26	5.02.0.00.0.00.01	BADAN PENDAPATAN DAERAH	KECAMATAN DUSUN SELATAN
27	5.03.0.00.0.00.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	KECAMATAN DUSUN UTARA
28	6.01.0.00.0.00.01	INSPEKTORAT	KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI
29	7.01.0.00.0.00.01	KECAMATAN DUSUN HILIR	KECAMATAN JENAMAS
30	7.01.0.00.0.00.02	KECAMATAN DUSUN SELATAN	KECAMATAN KARAU KUALA
31	7.01.0.00.0.00.03	KECAMATAN DUSUN UTARA	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
32	7.01.0.00.0.00.04	KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI	
33	7.01.0.00.0.00.05	KECAMATAN JENAMAS	
34	7.01.0.00.0.00.06	KECAMATAN KARAU KUALA	
35	8.01.0.00.0.00.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

4.1.2. Entitas Pelaporan Laporan Keuangan

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah

- 1) Laporan Realisasi Anggaran;
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- 3) Neraca;
- 4) Laporan Operasional;
- 5) Laporan Arus Kas;



Catatan Atas Laporan Keuangan **Pemerintah Kabupaten Barito Selatan**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

- 6) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- 7) Catatan Atas Laporan Keuangan

Program Perangkat Daerah dibagi berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Adapun urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, terdiri dari:

1. **Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**, meliputi 6 (enam) urusan yakni:
 1. Urusan pemerintahan bidang Pendidikan diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan;
 2. Urusan pemerintahan bidang kesehatan diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan; dan Upt Rsud Jaraga Sasameh serta 12 (dua belas) Upt Puskesmas yang tersebar di 6 kecamatan
 3. Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
 4. Urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman diselenggarakan oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan;
 5. Urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 6. Urusan pemerintahan bidang sosial diselenggarakan oleh Dinas Sosial.
2. **Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**, meliputi 18 (delapan belas) urusan yakni:
 1. Urusan pemerintahan bidang tenaga kerja diselenggarakan oleh Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja.
 2. Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
 3. Urusan pemerintahan bidang pangan diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian;
 4. Urusan pemerintahan bidang pertanahan dianggap sebagai bagian dari tugas pokok pemerintahan yang harus dilaksanakan dan tidak memiliki keterkaitan dengan penyediaan layanan dasar;
 5. Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup;
 6. Urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
 7. Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
 8. Urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
 9. Urusan pemerintahan bidang perhubungan diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan;
 10. Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian;



Catatan Atas Laporan Keuangan **Pemerintah Kabupaten Barito Selatan**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

11. Urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah diselenggarakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan;
 12. Urusan pemerintahan bidang penanaman modal diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 13. Urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olah Raga Serta Pariwisata;
 14. Urusan pemerintahan bidang statistik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, jenis statistik terdiri atas statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. Statistik dasar dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sementara statistik sektoral diselenggarakan oleh instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan BPS. Pelaksanaan tugas-tugas statistik dilakukan melalui penyusunan dokumen perencanaan daerah, analisis ekonomi makro, analisis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengelolaan database daerah;
 15. Urusan pemerintahan bidang persandian diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian;
 16. Urusan pemerintahan bidang kebudayaan diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olah Raga Serta Pariwisata;
 17. Urusan pemerintahan bidang perpustakaan diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan;
 18. Urusan pemerintahan bidang kearsipan diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan.
3. **Urusan Pemerintahan Pilihan**, meliputi 6 (enam) urusan yakni:
1. Urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan diselenggarakan oleh Dinas Perikanan;
 2. Urusan pemerintahan bidang pariwisata diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olah Raga Serta Pariwisata;
 3. Urusan pemerintahan bidang pertanian diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian;
 4. Urusan pemerintahan bidang perdagangan diselenggarakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan;
 5. Urusan pemerintahan bidang Perindustrian diselenggarakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan;
 6. Urusan pemerintahan bidang Perindustrian diselenggarakan;
4. **Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**, meliputi 2 (dua) urusan yakni:
1. Sekretariat Daerah diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah;
 2. Sekretariat DPRD diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD.
5. **Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**, meliputi 5 (lima) urusan yakni:
1. Unsur perencanaan diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah;
 2. Unsur keuangan diselenggarakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah;
 3. Unsur kepegawaian diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 4. Unsur pendidikan dan pelatihan diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

5. Unsur penelitian dan pengembangan diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6. Unsur pengawasan urusan pemerintahan, yaitu Inspektorat Daerah
Inspektorat Daerah diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah
7. Unsur Kewilayahan yaitu urusan Kecamatan.
8. Unsur pemerintahan umum, yaitu Kesatuan Bangsa dan Politik.

4.2. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Kabupaten Barito Selatan adalah sebagai berikut:

1. Basis Kas (Cash Basis) untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL dan Laporan Arus Kas Pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan serta Belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan.
2. Basis Akrual (Accrual Basis) untuk penyusunan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, penerapan SAP dalam laporan keuangan pemerintah berbasis akrual diberlakukan efektif untuk pelaporan keuangan Tahun Anggaran 2025. Dalam rangka penerapan SAP tersebut, untuk penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 dilakukan beberapa penyesuaian antara lain: pengklasifikasian dan pengelompokan penyajian pos-pos pada Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan SAL dan Laporan Arus Kas. pemilihan metode penilaian dan pencatatan akun-akun Neraca dan Laporan Operasional, penyisihan piutang tak tertagih untuk menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan serta pemberlakuan kapitalisasi dan penyusutan aset, dan amortisasi aset tetap tak berwujud untuk menggambarkan terjadinya penurunan nilai.
2. Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:.

4.3.1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur Pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan dengan anggarannya. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

1. Pendapatan-LRA

- A. Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah
- B. Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
- C. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
- D. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- E. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- F. Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum
- G. . Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA. 28. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode
- H. penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama.
- I. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

2. Belanja

- A. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.
- B. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- C. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- D. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi.
- E. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga.
- F. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.
- G. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

- H. Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.
- I. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
- J. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA

3. Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh pemerintah

a. Penerimaan Pembiayaan

- 1. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.
- 2. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- 3. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 4. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.

b. Pengeluaran Pembiayaan

- 1. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu dan pembentukan dana cadangan.
- 2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
- 3. Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya

4.3.2. Laporan Perubahan SAL

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) memberikan informasi tentang Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang merupakan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya yang merupakan akumulasi SiLPA/SiKPA tahun anggaran sebelumnya. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih dan SiLPA/SiKPA tahun anggaran berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih harus menyajikan:

- 1. Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya;



Catatan Atas Laporan Keuangan **Pemerintah Kabupaten Barito Selatan**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih; dan
3. SiLPA/SiKPA Tahun berjalan.

4.3.3. Neraca

4.3.3.1. Aset Lancar

Aset Lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi. Aset lancar terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas BLUD, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Lainnya, Penyisihan Piutang dan Persediaan.

1) Kas di Kas Daerah

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas Kabupaten Barito Selatan yang berada di rekening Kas Daerah pada PT Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Buntok. Kas Daerah dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya.

2) Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang muka kerja (UUDP) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal neraca dan mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya

3) Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan dari Bendahara Penerimaan yang bersangkutan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan dari setoran para Wajib Pajak/Retribusi yang belum disetorkan ke Kas Daerah. Kas di Bendahara Penerimaan dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya.

4) Kas di Kas BLUD

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pada BLUD/RSUD. Kas di Kas BLUD merupakan saldo kas yang berada pada PT Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Buntok. Kas BLUD dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya.

5) Kas Dana Kapitasi JKN pada FKTP

Kas Dana Kapitasi JKN adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank atas dana Kapitasi yang ditransfer langsung oleh pusat kepada Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan JKN. Kas di Kas Dana Kapitasi JKN pada FKTP merupakan saldo kas yang berada pada Bank Negara Indonesia pada kantor Perwakilan Cabang sesuai dengan SK Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/50/2025.tentang Penetapan Rekening Bantuan Operasional Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kab. Barito Selatan, Kas Dana Kapitasi JKN dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya.



Catatan Atas Laporan Keuangan **Pemerintah Kabupaten Barito Selatan**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

6) Kas Lainnya

Kas lainnya adalah kas yang mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang pengelolaannya di luar mekanisme Kas Daerah

7) Kas Dana BOS

Kas Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Dana BOSP adalah dana alokasi khusus nonfisik untuk mendukung biaya operasional non personalia bagi Satuan Pendidikan. Penerimaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan diakui pada saat diterbitkannya SP2B (Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja). Sedangkan, belanja Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan diakui pada saat diterbitkannya SP3B (Surat Perintah/Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja).

8) Kas Dana BOK

Kas Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Dana BOK Puskesmas adalah dana bantuan yang digunakan untuk belanja operasional program prioritas upaya kesehatan masyarakat. Penerimaan BOK Puskesmas diakui pada saat diterbitkannya SP2B (Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan, belanja BOK Puskesmas diakui pada saat diterbitkannya SP3B (Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja). sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9) Piutang Pajak

Piutang Pajak adalah merupakan piutang atas pajak-pajak daerah yang dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak atau dokumen yang dipersamakan dengan itu yang pembayarannya belum diterima. Piutang Pajak dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah pajak-pajak yang belum dilunasi.

10) Piutang Retribusi

Piutang Retribusi merupakan piutang yang diakui atas jumlah yang belum terbayar sebesar nilai rupiah dari retribusi yang belum dilunasi berdasarkan bukti penetapan retribusi. Perkiraan Piutang Retribusi dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah dari retribusi yang belum dilunasi.

11) Piutang Lainnya

Piutang Lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Piutang Pajak dan Piutang Retribusi. Piutang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

12) Beban dibayar dimuka

Beban dibayar dimuka merupakan sejumlah pembayaran yang dibayar di awal atas sejumlah beban atau pengeluaran tertentu atau semua biaya dan beban yang telah dibayarkan yang belum merupakan kewajiban pada periode yang bersangkutan

13) Beban dibayar dimuka

1) Definisi Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi Pemerintah Daerah

2) Pengakuan Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.

3) Pengukuran Beban Dibayar Dimuka



Catatan Atas Laporan Keuangan **Pemerintah Kabupaten Barito Selatan**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/dibayarkan

- 4) Pengungkapan Beban Dibayar Dimuka
- 5) Beban dibayar dimuka diungkapkan sebagai akun yang terklasifikasi dalam aset lancar karena akun ini biasanya segera menjadi kewajiban dalam satu periode akuntansi

14) Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang merupakan penyisihan atas piutang agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (net realizable value). Perhitungan penyisihan piutang didasarkan pada umur

15) Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Saldo persediaan adalah jumlah stok opname persediaan yang masih ada pada tanggal neraca. Persediaan berupa obat-obatan dan bahan habis pakai kesehatan dicatat dengan metode pencatatan secara perpetual. Sedangkan persediaan selain obat-obatan dan bahan habis pakai kesehatan dicatat dengan metode pencatatan secara periodik. Persediaan yang dicatat secara periodik dinilai berdasarkan biaya perolehan terakhir apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. Sedangkan persediaan yang dicatat dengan metode pencatatan perpetual dinilai dengan menggunakan metode First in First Out (FIFO). Beban persediaan atas persediaan yang dicatat dengan metode periodik dicatat pada saat pembelian dan pada akhir tahun dilakukan penyesuaian sebesar persediaan akhir periode (dicatat dengan menggunakan pendekatan beban). Sedangkan beban persediaan atas persediaan yang dicatat dengan metode perpetual, dicatat berdasarkan pemakaian yang direkap setiap bulan (menggunakan pendekatan aset).

16) Investasi Jangka Panjang

a. Investasi Non Permanen – Dana Bergulir

Investasi Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan dan digulirkan kepada masyarakat oleh pengguna atau kuasa pengguna anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lain. Investasi Dana Bergulir dinilai sebesar jumlah nilai bersih yang dapat. Penyajian dana bergulir berdasarkan dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, dan Investasi nonpermanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

Jika investasi pemerintah yang dicatat dengan nilai nominal atau biaya perolehan mengalami penurunan nilai, maka penurunannya harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Penurunan nilai terjadi jika nilai tercatat investasi lebih besar dibandingkan dengan nilai wajar investasi tersebut.



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

b. Investasi Permanen

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Bentuk investasi permanen antara lain adalah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah menggambarkan jumlah yang dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan untuk penyertaan modal dalam perusahaan negara/daerah

Untuk pencatatan dengan metode ekuitas, nilai penyertaan modal pemerintah daerah dihitung dari nilai ekuitas yang ada di laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan dikalikan dengan persentase kepemilikan.

2) Investasi Permanen Lainnya

Investasi Permanen yang tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori Penyertaan Modal Pemerintah diklasifikasikan sebagai Investasi Permanen Lainnya. Investasi ini dicatat sebesar harga perolehan ditambah biaya lainnya yang dikeluarkan untuk investasi permanen lainnya.

4.3.3.2. Aset Tetap

1. Definisi Aset Tetap

- a. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- b. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

2. Pengakuan Aset Tetap

- a. pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.
- b. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - (1) Berwujud;
 - (2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - (3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - (4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - (5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
 - (6) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan

3. Pengukuran Aset Tetap

- Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.
- Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf di atas bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
- Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan



Catatan Atas Laporan Keuangan **Pemerintah Kabupaten Barito Selatan**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

- atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
- Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
 - Komponen Biaya Perolehan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam Aset Tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Tanah diakui sebagai aset pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Biaya ini meliputi harga pembelian atau biaya pembebasan tanah serta biaya untuk memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan

2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin mencakup antara lain: alat berat, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, alat persenjataan, komputer, alat eksplorasi, alat pemboran, alat produksi, pengolahan dan pemurnian, alat bantu eksplorasi, alat keselamatan kerja, alat peraga, dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan. Peralatan dan Mesin dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Peralatan dan Mesin dicatat dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Harga perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja dan bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan Bangunan di Neraca meliputi antara lain bangunan gedung, monumen, bangunan menara dan rambu-rambu. Gedung dan Bangunan dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi peralihan hak kepemilikan. Gedung dan Bangunan dicatat dengan nilai historis/harga perolehan. Harga perolehan gedung dan bangunan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja dan bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Sementara itu, Gedung dan Bangunan yang dibangun melalui kontrak konstruksi.



Catatan Atas Laporan Keuangan **Pemerintah Kabupaten Barito Selatan**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultasi dan pajak. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Untuk aset yang telah diklasifikasikan ke dalam Aset Lainnya dan kemudian direhab berat, maka pencatatan dan

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Jalan, Irigasi dan Jaringan di Neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Jalan, Irigasi dan Jaringan dicatat sebagai aset pemerintah saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis/perolehan, yaitu harga perolehan. Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultasi, biaya pengosongan, pajak, kontrak konstruksi dan pembongkaran. Harga perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja dan bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan

5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya mencakup Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap di atas yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset Tetap Lainnya di Neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga. Aset Tetap Lainnya dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Aset Tetap Lainnya dicatat dengan nilai historis/harga perolehan. Harga perolehan Aset Tetap Lainnya yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja dan bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap Lainnya didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.



Catatan Atas Laporan Keuangan **Pemerintah Kabupaten Barito Selatan**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

7. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan menggambarkan akumulasi jumlah penurunan nilai ekonomis Aset Tetap pada tanggal laporan keuangan. Penyusutan aset tetap dihitung berdasarkan periode semesteran dimana dihitung sejak tahun perolehan barang tersebut. Aktiva tetap kecuali tanah, hewan, tumbuhan dan buku disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus. Persentase penyusutan dihitung sesuai dengan masa manfaat sebagai berikut.

4.3.3.3. Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana Cadangan,

1. Aset Tidak Berwujud

Aset tidak Berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. Jenis-jenis Aset Tak Berwujud antara lain: software, lisensi, hak paten/cipta, hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang. Aset tidak berwujud dicatat dengan nilai perolehannya atau nilai wajar jika tidak terdapat nilai perolehannya. Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama 5 tahun.

2. Aset Lain-lain

Aset Lain-Lain adalah aset-aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Rugi dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari Aset Lain-Lain adalah Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah. Aset Lain-Lain dicatat dengan nilai nominal dari aset yang bersangkutan. Untuk aset tetap yang diklasifikasikan ke dalam Aset Lain-Lain dicantumkan sebesar nilai tercatatnya, yaitu nilai perolehan setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya. Untuk aset lainnya berupa gedung yang telah direhab berat, maka nilai perolehannya dihapuskan dari daftar aset lain-lain.

4.3.3.4. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga, selanjutnya disebut Utang PFK merupakan utang Pemerintah Daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan Pemerintah Daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen dan Taperum
2. Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh BUD atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu seperti gaji dan tunjangan pegawai serta pengadaan barang dan jasa termasuk barang modal atau pada saat terbitnya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)

b. Utang Bunga

Utang Bunga adalah unsur biaya berupa bunga yang harus dibayarkan kepada pemegang surat-surat utang karena pemerintah mempunyai utang jangka pendek yang antara lain berupa Surat Perbendaharaan Negara, utang jangka panjang yang berupa utang luar negeri, utang obligasi negara, utang jangka panjang sektor perbankan dan utang jangka panjang lainnya



Catatan Atas Laporan Keuangan **Pemerintah Kabupaten Barito Selatan**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

c. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Neraca

d. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain

e. Utang Belanja

Utang Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal diakui pada saat barang/jasa sudah diterima, namun belum dibayar pada saat Laporan Keuangan dan/atau pada saat kewajiban timbul selama pagu anggaran masih tersedia kecuali belanja listrik, air, telepon. Utang belanja termasuk diantaranya Utang Belanja Pegawai, Utang Belanja Barang dan Jasa, dan Utang Belanja Modal yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut.

f. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu utang jangka pendek diatas adalah kewajiban yang harus dilunasi oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng dan penambahan aset yang diperoleh dari penerimaan hak yang belum saatnya diterima akan dipertanggungjawabkan kemudian utang jangka pendek lainnya dibukukan sebesar nilai nominal.

4.3.3.5. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan dan diperoleh dari sumber-sumber dalam negeri. Yang termasuk dalam utang dalam negeri diantaranya adalah:

1. Utang Dalam Negeri

Utang Dalam Negeri adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan dan diperoleh dari sumber-sumber dalam negeri

- Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman, utang dalam negeri diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah/saat terjadi transaksi penjualan obligasi
- Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman

4.3.3.6. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Barito Selatan pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

4.3.4. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan, beban, dan operasional-operasional dari entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

4.3.4.1. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional, dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pemerintah. Pendapatan-LO dikelompokkan dari dua sumber yaitu Unsur yang dicakup secara langsung dalam LO terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Pendapatan-LO diakui pada saat:
 1. timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
 2. pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
- b. Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:
 1. tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas
 2. ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi
 3. dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro.
 4. sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assessment* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan)
 5. sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko Pemerintah Daerah tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.
- c. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah
- d. Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:
 1. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan.

Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak Pemerintah Daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan
 2. Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan
Pencatatan pendapatan pada saat penyusunan laporan keuangan berdasarkan dua kondisi:
 - a. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas
Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

daerah (misalnya SKPD/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perpres/Permenkeu/ Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi Pemerintah Daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

b. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan - LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

4.3.4.2. Beban-LO

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- a. timbulnya kewajiban;
- b. terjadinya konsumsi aset; dan
- c. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Dalam hal pengakuan beban atas transaksi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Atas pengeluaran belanja pegawai, belanja tidak langsung dan belanja perjalanan dinas, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, belanja kontribusi pejabat negara, uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, beban diakui saat terjadinya pengeluaran kas. Pengakuan ini juga berlaku untuk belanja yang dilakukan oleh entitas akuntansi yang sudah menjadi BLUD;
- b. Atas pengeluaran belanja pengadaan barang dan jasa dengan mekanisme LS, beban diakui pada saat terbitnya dokumen Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa, atau dokumen yang dipersamakan seperti surat tagihan listrik, telepon dan air. Pengakuan ini juga berlaku untuk belanja yang dilakukan oleh entitas akuntansi yang sudah menjadi BLUD;
- c. Atas pengeluaran belanja dengan mekanisme UP/GU/TU, beban diakui pada saat bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat pertanggungjawaban (SPJ). Pengakuan ini juga berlaku untuk belanja yang dilakukan oleh entitas akuntansi yang sudah menjadi BLUD;
- d. Beban atas pengeluaran yang dikelola sendiri oleh unit kerja dalam entitas akuntansi diakui saat pengesahan beban oleh BUD;
- e. Beban hibah, subsidi, transfer dan bantuan sosial diakui pada saat SP2D LS diterbitkan;
- f. Beban tak terduga diakui pada saat SP2D LS diterbitkan;
- g. Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:
 - 1. Beban Pegawai diakui saat timbulnya kewajiban berdasarkan dokumen yang sah misal daftar gaji, tetapi pada akhir periode akuntansi belum dibayar;
 - 2. Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan;



Catatan Atas Laporan Keuangan **Pemerintah Kabupaten Barito Selatan**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

3. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan;
4. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan, untuk keperluan pelaporan keuangan nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan;
5. Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagi hasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas;
6. Sisa persediaan pada akhir tahun setelah dilakukan stok opname persediaan sebagai pengurang atas beban persediaan;
7. Beban dibayar dimuka sebagai penyesuaian atas beban tersebut sebesar yang bukan merupakan kewajiban pada tahun pelaporan; dan
8. Koreksi atas beban termasuk penerimaan kembali beban yang terjadi pada periode beban yang sama dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan sebagai pendapatan pengembalian belanja-LO yang dibukukan oleh PPKD

4.3.5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama Tahun Anggaran 2025 yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non-keuangan, pembiayaan dan non-anggaran.

Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama Tahun Anggaran 2025 dan saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2025.

Metode penyusunan Laporan Arus Kas adalah Metode Langsung yaitu dilakukan dengan cara menyajikan kelompok-kelompok penerimaan dan pengeluaran kas dari aktivitas operasi secara lengkap dilanjutkan dengan kegiatan aktivitas investasi aset non-keuangan dan pembiayaan serta non anggaran.

Susunan dan isi Laporan Arus Kas terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu:

1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah barito Selatan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus masuk kas terdiri dari rincian Pendapatan Asli Daerah, rincian Pendapatan Transfer, dan rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sedangkan, arus keluar kas terdiri dari rincian Belanja Operasi, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Bagi Hasil – Transfer.

2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus masuk kas dari aktivitas investasi dari hasil penjualan aset tetap dan aset lainnya, penjualan investasi dan pencairan dana cadangan. Sedangkan Arus keluar kas dari aktivitas investasi adalah belanja pembelian aset tetap dan aset lainnya, pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal Pemerintah Daerah.



Catatan Atas Laporan Keuangan **Pemerintah Kabupaten Barito Selatan**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah daerah dan klaim pemerintah daerah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Penerimaan dari aktivitas pendanaan dapat berasal dari pinjaman. Sedangkan pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman.

4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas non-anggaran antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum daerah.

4.3.6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan keuangan pokok yang menggambarkan ekuitas real dari suatu entitas akuntansi/pelaporan beserta kenaikan atau penurunan ekuitas yang disebabkan surplus/defisit LO dan koreksi yang menambah maupun mengurangi Ekuitas dalam satu periode, Laporan Perubahan Ekuitas mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

1. Ekuitas Awal;
2. Surplus/Defisit-LO pada periode bersangkutan;
3. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas. misalnya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap; dan
4. Ekuitas Akhir.

4.3.7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan- ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut.

1. Mengungkapkan informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
2. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
3. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
4. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
5. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;



Catatan Atas Laporan Keuangan **Pemerintah Kabupaten Barito Selatan**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

6. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
7. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

4.4. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan. Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

BAB V

PENJELASAN ATAS AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN

5.1. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan ini menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dalam satu periode pelaporan. Secara lebih rinci Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Barito Selatan pada TA 2025 diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1. PENDAPATAN DAERAH	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	1.543.309.437.665,78	1.831.871.547.012,98

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah, Bendahara Penerimaan, BLUD dan Penerimaan Non RKUD yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan merupakan sumber pendanaan bagi pemerintah. Demikian pula bagi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, pendapatan dapat berasal dari potensi daerah yang bersangkutan maupun dari provinsi dan pusat. Pendapatan dapat dibagi menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Anggaran dan realisasi Pendapatan Daerah, Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.543.309.437.665,78 atau 93,61% dari pagu anggaran setelah Perubahan sebesar Rp1.648.597.165.175,23. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan TA 2024 sebesar Rp1.831.871.547.012,98, maka realisasi pendapatan TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp288.562.109.347,20 atau 15,75%.

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 hanya mencapai 93,61% dari pagu anggaran setelah perubahan. Beberapa faktor utama yang menyebabkan tidak tercapainya target pendapatan antara lain:

1. **Penurunan Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat/Provinsi** Adanya penyesuaian kebijakan fiskal nasional serta keterlambatan penyaluran dana transfer mengurangi jumlah penerimaan yang diharapkan.
2. **Keterbatasan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)**
 - o Potensi pajak daerah dan retribusi belum tergali secara maksimal.
 - o Tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah.
 - o Sistem pemungutan belum sepenuhnya berbasis digital sehingga efisiensi dan akurasi penerimaan belum optimal.
3. **Kondisi Ekonomi Regional** Perlambatan aktivitas ekonomi di sektor unggulan daerah (perkebunan, pertambangan, perdagangan) berdampak pada penurunan kontribusi PAD.



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Rincian realisasi Pendapatan TA 2025 disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 5.1.1. Pendapatan Daerah

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun			Kenaikan/ (Penurunan)
			2025 (Rp)	(%)	2024 (Rp)	
1	Pendapatan Asli Daerah	120.216.516.022,23	111.097.900.846,78	92,41	83.690.122.826,98	27.407.778.019,80
2	Pendapatan Transfer	1.286.584.463.942,00	1.426.117.527.001,00	110,85	1.743.463.544.883,00	(317.346.017.882,00)
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	241.796.185.211,00	6.094.009.818,00	2,52	4.717.879.303,00	1.376.130.515,00
Jumlah		1.648.597.165.175,23	1.543.309.437.665,78	93,61	1.831.871.547.012,98	(288.562.109.347,20)

Penjelasan :

- Pendapatan Asli Daerah di Tahun 2025 hanya tercapai 92,41% sebelumnya diperkirakan dengan kondisi yang sudah menjadi endemi kegiatan ekonomi akan berjalan lebih baik dan kinerja kategori lapangan usaha akan terakselerasi namun beberapa sektor usaha yang menjadi andalan penerimaan pajak daerah belum bisa berjalan maksimal seperti Pajak Hiburan dan Pajak Parkir, termasuk juga penerimaan retribusi. Inflasi yang terjadi di Tahun 2025 juga sangat berpengaruh terhadap pencapaian realisasi pendapatan dan penyerapan atas perencanaan anggaran yang telah disusun sebelumnya. Inflasi ini mengakibatkan daya beli masyarakat makin rendah khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan kecil dan tetap sehingga kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya lebih mengutamakan kebutuhan primer dari pada sekunder dan tersier. Hal ini memengaruhi pendapatan asli daerah khususnya yang menyasar sektor tersier seperti objek wisata jasa usaha lainnya.
- Pendapatan Transfer melebihi dari target yang ditetapkan pada perubahan anggaran di karenakan adanya peningkatan pendapatan dari dana bagi hasil yaitu : DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam (SDA)
- Adapun Lain-lain Pendapatan yang Sah yang hanya tercapai sebesar 32,67%.

5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	111.097.900.846,78	83.690.122.826,98

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito Selatan TA 2025 sebesar Rp111.097.900.846,78 atau 92,41% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp120.216.516.022,23 Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2024 sebesar Rp83.690.122.826,98 maka realisasi TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp27.407.778.019,80 atau 32,75%. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Rincian Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2025 disajikan dalam Rincian sebagai berikut:



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.1.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun			Kenaikan/ (Penurunan)
			2025 (Rp)	(%)	2024 (Rp)	
1	Pajak Daerah	46.198.637.522,00	37.657.696.612,55	81,51	14.168.868.108,32	23.488.828.504,23
2	Retribusi Daerah	9.225.095.685,00	49.675.948.069,00	538,48	4.768.725.847,00	44.907.222.222,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.521.318.992,00	3.756.648.302,31	83,09	4.522.022.594,50	(765.374.292,19)
4	Lain-lain PAD yang Sah	60.271.463.823,23	20.007.607.862,92	33,20	60.230.506.277,16	(40.222.898.414,24)
Jumlah		120.216.516.022,23	111.097.900.846,78	92,41	83.690.122.826,98	27.407.778.019,80

Adapun Dasar hukum yang mendasari pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Barito Selatan adalah Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

5.1.1.1. Pajak Daerah

31 Desember 2025
37.657.696.612,55

31 Desember 2024
14.168.868.108,32

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Barito Selatan TA 2025 sebesar Rp37.657.696.612,55 atau 81,51% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp46.198.637.522,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2024 sebesar Rp14.168.868.108,32 maka realisasi TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp23.488.828.504,23 atau 165,78%. Pendapatan Pajak Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah. Rincian realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2025 sebagai berikut.

Tabel 5.1.3. Pendapatan Pajak Daerah

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
I	II	III	IV	V	VI	VII
1	Pajak Hotel dan Losmen	92.710.000,00	78.710.000,00	84,90	80.182.000,00	(1.472.000,00)
	BADAN PENDAPATAN DAERAH	92.710.000,00	78.710.000,00	84,90	0,00	78.710.000,00
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	0,00	0,00	80.182.000,00	(80.182.000,00)
2	Pajak Restoran/ Rumah Makan	6.000.000.000,00	4.762.137.376,00	79,37	4.230.780.408,00	531.356.968,00
	BADAN PENDAPATAN DAERAH	6.000.000.000,00	4.762.137.376,00	79,37	0,00	4.762.137.376,00
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	0,00	0,00	4.230.780.408,00	(4.230.780.408,00)
3	Pajak Hiburan	21.250.000,00	0,00	0,00	2.857.000,00	(2.857.000,00)
	BADAN PENDAPATAN DAERAH	21.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	0,00	0,00	2.857.000,00	(2.857.000,00)



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
I	II	III	IV	V	VI	VII
4	Pajak Reklame	516.173.776,00	267.512.320,00	51,83	146.335.569,00	121.176.751,00
	BADAN PENDAPATAN DAERAH	516.173.776,00	267.512.320,00	51,82	0,00	267.512.320,00
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	0,00	0,00	146.335.569,00	(146.335.569,00)
5	Pajak Penerangan Jalan Umum	9.000.000.000,00	6.279.322.586,00	69,77	5.688.575.834,00	590.746.752,00
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	0,00	0,00	5.688.575.834,00	(5.688.575.834,00)
	BADAN PENDAPATAN DAERAH	9.000.000.000,00	6.279.322.586,00	69,77	0,00	6.279.322.586,00
6	Pajak Parkir	55.716.400,00	52.704.800,00	94,59	36.682.800,00	16.022.000,00
	BADAN PENDAPATAN DAERAH	55.716.400,00	52.704.800,00	94,59	0,00	52.704.800,00
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	0,00	0,00	36.682.800,00	(36.682.800,00)
7	Pajak Air Bawah Tanah	25.000.000,00	2.186.713,57	8,75	600.000,00	1.586.713,57
	BADAN PENDAPATAN DAERAH	25.000.000,00	2.186.713,57	8,74	0,00	2.186.713,57
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	0,00	0,00	600.000,00	(600.000,00)
8	Pajak Sarang Burung Walet	15.000.000,00	15.515.000,00	103,43	5.500.000,00	10.015.000,00
	BADAN PENDAPATAN DAERAH	15.000.000,00	15.515.000,00	103,43	0,00	15.515.000,00
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	(5.500.000,00)
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	9.585.779.071,00	9.268.224.049,98	96,69	392.895.700,32	8.875.328.349,66
	BADAN PENDAPATAN DAERAH	9.585.779.071,00	7.863.472.049,98	82,03	0,00	7.863.472.049,98
	KECAMATAN DUSUN HILIR	0,00	0,00	0,00	13.170.370,00	(13.170.370,00)
	KECAMATAN DUSUN SELATAN	0,00	195.029.500,00	0,00	336.620.779,12	(141.591.279,12)
	KECAMATAN DUSUN UTARA	0,00	3.060.000,00	0,00	3.142.000,00	(82.000,00)
	KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI	0,00	0,00	0,00	9.252.751,20	(9.252.751,20)
	KECAMATAN KARAU KUALA	0,00	1.206.662.500,00	0,00	12.018.900,00	1.194.643.600,00
	KECAMATAN JENAMAS	0,00	0,00	0,00	18.690.900,00	(18.690.900,00)
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	1.777.984.082,00	1.208.421.836,00	67,97	950.720.547,00	257.701.289,00
	BADAN PENDAPATAN DAERAH	1.777.984.082,00	1.208.421.836,00	67,96	0,00	1.208.421.836,00
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	0,00	0,00	950.720.547,00	(950.720.547,00)
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	7.636.270.266,00	4.697.168.031,00	61,51	2.633.738.250,00	2.063.429.781,00
	BADAN PENDAPATAN DAERAH	7.636.270.266,00	4.697.168.031,00	61,51	0,00	4.697.168.031,00
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	0,00	0,00	2.633.738.250,00	(2.633.738.250,00)
12	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	5.663.095.164,00	5.023.438.300,00	88,70	0,00	5.023.438.300,00

101



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
I	II	III	IV	V	VI	VII
	BADAN PENDAPATAN DAERAH	5.663.095.164,00	5.023.438.300,00	88,70	0,00	5.023.438.300,00
13	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	5.809.658.763,00	6.002.355.600,00	103,31	0,00	6.002.355.600,00
	BADAN PENDAPATAN DAERAH	5.809.658.763,00	6.002.355.600,00	103,31	0,00	6.002.355.600,00
	Jumlah	46.198.637.522,00	37.657.696.612,55	81,51	14.168.868.108,32	23.488.828.504,23

Penjelasan:

Metode pembayaran Pajak Daerah menggunakan metode Self Assessment dan Official Assessment. Self Assessment memberikan kepercayaan dan tanggungjawab kepada wajib pajak untuk mendaftarkan diri, menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang. Self Assessment terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Official Assessment merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Wajib pajak bersifat pasif karena utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh pemerintah. Official Assessment terdiri dari Pajak Reklame dan Pajak Air Bawah Tanah (Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah) serta Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan,

Sebab-sebab naik turunnya realisasi pendapatan pajak daerah Tahun Anggaran 2025 secara umum di jelaskan:

1. Pajak Hotel per Desember 2025 berjumlah 14 (empat belas) wajib pajak, Penurunan pendapatan terjadi karena ada karena menurunnya tingkat hunian kamar di hampir semua hotel di Barito Selatan, sehingga berdampak kepada meningkatnya pajak yang disetorkan ke daerah dan kurangnya kepatuhan wajib pajak (formil dan materiil) terhadap kewajiban perpajakan daerah;
2. Pajak Restoran per Desember 2025 Penurunan pendapatan dari yang di target terjadi karena menurunnya jumlah pengusaha makanan dan minuman di wilayah Kabupaten Barito Selatan, disertai minimnya daya beli masyarakat serta menurunnya kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan daerah sehingga pendapatan asli daerah dari sektor Restoran/Rumah Makan pun jadi menurun;
3. Pajak Hiburan per Desember 2025 disebabkan tempat hiburan seperti, Diskotek, Karaoke, Club malam dan sejenisnya tidak ada pengunjungnya disebabkan keamanan bagi pengunjung kurang terjamin dan adanya pertunjukan musik skala nasional yang tidak di pungut pajak di karenakan acara tersebut di laksanakan bertepatan hari jadi kabupaten Barito Selatan (hiburan rakyat)
4. Pajak Reklame di Tahun 2025 kurang dari target yang ditetapkan, hanya tercapai 51,82% disebabkan
 - Kurangnya Kesadaran Wajib Pajak karena minimnya edukasi dan juga minimnya sosialisasi dari pemerintah daerah itu sendiri mengenai pentingnya perizinan reklame dalam mendukung peningkatan Penghasilan Asli Daerah (PAD).



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

- Adanya Budaya Pragmatis, cenderung mengutamakan kecepatan dan juga melakukan hal yang praktis sehingga banyak wajib pajak yang enggan untuk mengikuti prosedur resmi dalam pengurusan izin reklame dan juga kewajiban perpajakan.
 - Pengawasan yang Lemah, Terbatasnya jumlah petugas pajak menyebabkan pengawasan terhadap wajib pajak tidak berjalan secara maksimal dan sanksi yang dijatuhkan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi aturan seringkali dianggap kurang memberikan efek jera yang signifikan.
5. Realisasi pendapatan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Menurun, seiring dengan
 - Partisipasi dari masyarakatnya yang masih menyepelkan dan belum membayar sesuai tanggal jatuh temponya atau melebihi jatuh temponya
 - keterbatasan sumber daya manusia untuk melakukan pengawasan
 6. Pajak Parkir per Desember 2025 kurang dari target yang ditetapkan di karenakan Masyarakat merasa bahwa tarif retribusi parkir yang mereka bayarkan tidak sebanding dengan fasilitas yang disediakan
 7. Pajak air bawah tanah terealisasi hanya 8,74% penggunaan air tanah menurun seiring dengan tingkat penghasilan yang semakin menurun;
 8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Galian C), pada tahun 2025 banyak Izin Usaha yang habis masa berlakunya dan masih kesulitan dalam melakukan proses perpanjangan izin. Sehingga berdampak untuk tahun 2025 tapi tetap jauh lebih meningkat pendapatan pajak dibandingkan tahun 2024 yang didapat dari pelaku usaha yang izinnya masih berlaku.
 9. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hanya 67,96% dengan kendala yang sama setiap tahunnya yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan Penentuan besarnya pajak tidak diketahui secara pasti oleh Kepala Desa dalam arti ingin membantu dalam proses penagihan kepada warga, serta keterbatasan biaya operasional untuk melaksanakan pemungutan PBBP2 kepada wajib pajak yang berada di luar kota/Kabupaten
 10. Realisasi BPHTB tahun 2025 sebesar 61,51% mengalami kenaikan dari tahun 2024 tetapi tidak tercapai dari target yang ditetapkan setelah perubahan anggaran Tahun 2025, namun demikian Pihak terkait seperti Badan Pendapatan daerah, tetap focus untuk masa yang akan datang agar pendapatan BPHTB jauh lebih meningkat,

5.1.1.1.2. Retribusi Daerah

31 Desember 2025

31 Desember 2024

49.675.948.069,00

4.768.725.847,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Selatan TA 2025 sebesar Rp49.675.948.069,00 atau 538,49% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp9.225.095.685,00. Jika dibandingkan secara umum dengan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 sebesar Rp4.768.725.847,00 maka realisasi TA 2025 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar Rp44.907.222.222,00 atau 941,70%.

Pendapatan Retribusi Daerah bersumber dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perijinan Tertentu yang tarifnya ditetapkan melalui Undang-Undang dan Peraturan Daerah, dengan rincian sebagai berikut:



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.1.4. Pendapatan Retribusi Daerah

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun			Kenaikan/ (Penurunan)
			2025 (Rp)	(%)	2024 (Rp)	
I	II	III	IV	V	VI	VII
1	Retribusi Jasa Umum	2.621.004.470,00	45.932.846.439,00	1.752,49	1.766.743.330,00	44.166.103.109,00
2	Retribusi Jasa Usaha	4.574.091.215,00	3.323.048.497,00	72,65	2.695.014.950,00	628.033.547,00
3	Retribusi Perijinan Tertentu	2.030.000.000,00	420.053.133,00	20,69	306.967.567,00	113.085.566,00
Jumlah		9.225.095.685,00	49.675.948.069,00	538,48	4.768.725.847,00	44.907.222.222,00

5.1.1.1.2.1. Retribusi Jasa Umum

31 Desember 2025
45.932.846.439,00

31 Desember 2024
1.766.743.330,00

Realisasi Retribusi Jasa Umum Kabupaten Barito Selatan TA 2025 sebesar Rp45.932.846.439,00 atau 1.752,49% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp2.621.004.470,00. Jika dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp1.766.743.330,00 maka realisasi TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp44.166.103.109,00 atau 2.499,86% Retribusi Jasa Umum merupakan Pendapatan Asli Daerah yang berhubungan langsung dengan pelayanan umum pemerintahan, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.5. Pendapatan Retribusi Jasa Umum

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun			Kenaikan/ (Penurunan)
			2025 (Rp)	(%)	2024 (Rp)	
I	II	III	IV	V	VI	VII
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	314.611.750,00	44.154.680.179,00	14.034,66	114.884.500,00	44.039.795.679,00
	Dinas Kesehatan:	314.611.750,00	44.154.680.179,00	14.034,66	114.884.500,00	44.039.795.679,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	87.100.000,00	94.068.000,00	108,00	85.259.000,00	8.809.000,00
	Dinas Lingkungan Hidup:	60.000.000,00	65.400.000,00	109,00	61.200.000,00	4.200.000,00
	Kecamatan Dusun Hilir	10.000.000,00	12.900.000,00	129,00	9.400.000,00	3.500.000,00
	Kecamatan Jenamas	3.600.000,00	0,00	0,00	2.649.000,00	(2.649.000,00)
	Kecamatan Karau Kuala	12.000.000,00	15.768.000,00	131,40	12.010.000,00	3.758.000,00
	KECAMATAN DUSUN UTARA	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	50.000.000,00	27.900.000,00	55,80	40.660.000,00	(12.760.000,00)
	Dinas Perhubungan:	50.000.000,00	27.900.000,00	55,80	40.660.000,00	(12.760.000,00)
4	Retribusi Pelayanan Pasar	2.069.292.720,00	1.646.673.260,00	79,57	1.525.939.830,00	120.733.430,00
	Dinas Koperasi, Perdagangan dan UKM:	1.991.030.720,00	1.573.129.260,00	79,01	1.470.137.830,00	102.991.430,00
	Kecamatan Dusun Hilir	20.000.000,00	18.360.000,00	91,80	8.350.000,00	10.010.000,00
	Kecamatan Jenamas	16.000.000,00	5.022.000,00	31,38	4.464.000,00	558.000,00



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun			Kenaikan/ (Penurunan)
			2025 (Rp)	(%)	2024 (Rp)	
I	II	III	IV	V	VI	VII
	Kecamatan Karau Kuala	38.000.000,00	48.543.000,00	127,74	42.306.000,00	6.237.000,00
	KECAMATAN DUSUN UTARA	4.262.000,00	1.619.000,00	37,98	682.000,00	937.000,00
5	Retribusi Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri	100.000.000,00	9.525.000,00	9,53	0,00	9.525.000,00
	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	100.000.000,00	9.525.000,00	9,53	0,00	9.525.000,00
Jumlah		2.621.004.470,00	45.932.846.439,00	1.752,49	1.766.743.330,00	44.166.103.109,00

Penjelasan:

Adapun sebab tinggi dan rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Retribusi Jasa Umum di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

1. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum terealisasi sebesar Rp27.900.000,00 atau 55,80% dari target yang ditetapkan setelah perubahan sebesar Rp50.000.000,00 dan mengalami penurunan dari tahun sebelum yaitu sebesar Rp12.760.000,00 atau 31,38% dikarenakan:
 - cuaca hujan dan Banjir yang terus menerus di Bulan April, Agustus dan Nopember tahun 2025, yang menyebabkan pendapatan mengalami penurunan
 - Rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar retribusi; dan
 - kurangnya pengawasan terhadap petugas parkir
2. Retribusi Pelayanan Pasar terealisasi sebesar Rp1.646.673.260,00 atau tercapai sebesar 79,58% dari target yang ditetapkan setelah perubahan target tahun 2025 sebesar Rp2.069.292.720,00 dan mengalami peningkatan kenaikan dari capaian tahun 2024 delta kenaikan sebesar Rp120.733.430,00 atau 7,91% capaian ini dikarenakan:
 - pasar grosir/pertokoan yang tidak dimanfaatkan secara optimal dan
 - kenakalan para pedagang terhadap kewajiban bayar pajak retribusi
3. Retribusi Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri terealisasi sebesar Rp9.525.000,00 atau 9,52% dari target yang ditetapkan setelah perubahan sebesar Rp100.000.000,00 dan mengalami penambahan dari tahun sebelum yaitu sebesar Rp9.525.000,00 atau 100%
 - Jumlah SDM masih terbatas dalam segi kuantitas maupun kualitas dalam melakukan pelayanan dan memungut retribusi
 - adanya pihak ketiga yang juga memberikan jasa pelayanan pengolahan limbah cair
 - Karena layanan ini tidak bersifat wajib untuk masyarakat. Masyarakat mempunyai pilihan untuk menggunakan jasa/layanan penyedotan kakus dari penyedia jasa dari swasta atau lainnya

5.1.1.1.2.2. Retribusi Jasa Usaha

31 Desember 2025
3.323.048.497,00

31 Desember 2024
2.695.014.950,00

Realisasi Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Barito Selatan TA 2025 sebesar Rp3.323.048.497,00 atau 72,65% dari anggaran setelah perubahan sebesar

M



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Rp4.574.091.215,00 Jika dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp2.695.014.950,00, maka realisasi TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp628.033.547,00 atau 23,30%. Retribusi Jasa Usaha merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang berhubungan dengan pemakaian aset daerah atau kekayaan daerah, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.6. Pendapatan Retribusi Jasa Usaha

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun			Kenaikan/ (Penurunan)
			2025 (Rp)	(%)	2024 (Rp)	
I	II	III	IV	V	VI	VII
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.598.462.915,00	732.890.497,00	45,85	656.685.450,00	76.205.047,00
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	500.000.000,00	159.250.000,00	31,85	100.385.000,00	58.865.000,00
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	10.000.000,00	11.905.000,00	119,05	3.000.000,00	8.905.000,00
	DINAS PERHUBUNGAN	10.000.000,00	4.000.000,00	40,00	3.000.000,00	1.000.000,00
	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	177.950.000,00	72.440.000,00	40,71	76.750.000,00	(4.310.000,00)
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	40.000.000,00	13.000.000,00	32,50	0,00	13.000.000,00
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	0,00	0,00	458.193.450,00	(458.193.450,00)
	BADAN PENDAPATAN DAERAH	833.172.915,00	458.275.497,00	55,00	0,00	458.275.497,00
	KECAMATAN DUSUN HILIR	5.000.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00	(3.150.000,00)
	KECAMATAN DUSUN SELATAN	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KECAMATAN KARAU KUALA	5.940.000,00	5.420.000,00	91,25	6.120.000,00	(700.000,00)
	KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI	5.000.000,00	8.600.000,00	172,00	6.087.000,00	2.513.000,00
	KECAMATAN DUSUN UTARA	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Retribusi Tempat Pelelangan	24.000.000,00	21.433.000,00	89,30	17.607.000,00	3.826.000,00
	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	0,00	0,00	0,00	17.607.000,00	(17.607.000,00)
	DINAS PERIKANAN	24.000.000,00	21.433.000,00	89,30	0,00	21.433.000,00
3	Retribusi Rumah Potong Hewan	6.000.000,00	4.830.000,00	80,50	5.075.000,00	(245.000,00)
	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	6.000.000,00	4.830.000,00	80,50	5.075.000,00	(245.000,00)
4	Retribusi Terminal	7.500.000,00	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
	DINAS PERHUBUNGAN	7.500.000,00	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
5	Retribusi Tempat Khusus Parkir	98.008.300,00	91.400.000,00	93,26	93.570.000,00	(2.170.000,00)
	DINAS PERHUBUNGAN	98.008.300,00	91.400.000,00	93,25	93.570.000,00	(2.170.000,00)
6	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	2.621.620.000,00	2.357.351.000,00	89,92	1.841.997.500,00	515.353.500,00
	DINAS PERHUBUNGAN	2.621.620.000,00	2.357.351.000,00	89,92	1.841.997.500,00	515.353.500,00



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun			Kenaikan/ (Penurunan)
			2025 (Rp)	(%)	2024 (Rp)	
I	II	III	IV	V	VI	VII
7	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	24.605.000,00	(24.605.000,00)
	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	0,00	0,00	0,00	24.605.000,00	(24.605.000,00)
8	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	110.000.000,00	52.405.000,00	47,64	0,00	52.405.000,00
	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	110.000.000,00	52.405.000,00	47,64	0,00	52.405.000,00
9	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	108.500.000,00	62.739.000,00	57,82	55.375.000,00	7.364.000,00
	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	75.400.000,00	29.154.000,00	38,67	55.375.000,00	(26.221.000,00)
	DINAS PERIKANAN	33.100.000,00	33.585.000,00	101,47	0,00	33.585.000,00
	Jumlah	4.574.091.215,00	3.323.048.497,00	72,65	2.695.014.950,00	628.033.547,00

Penjelasan secara singkat:

Pada kelompok Pendapatan Retribusi Jasa Usaha terdapat beberapa pendapatan yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan antara lain:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah seperti
 - Penyewaan tanah dan Bangunan karena tidak semua rumah dinas ditempati oleh pegawai
 - Penyewaan Bangunan Gedung selain acara resepsi perkawinan Gedung tersebut tidak di pungut pajak retribusi
 - Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor karena Masyarakat sudah banyak memiliki kendaraan pribadi
 - Retribusi Pemakaian Alat karena Adanya perusahaan swasta dalam penyewaan peralatan alat berat, menimbulkan persaingan antara DPUPR Kabupaten Barito Selatan dan keausan akibat umur sudah tua rata-rata lebih dari 6 tahun sehingga peralatan mesin kurang maksimal sehingga membuat para pengguna kurang tertarik
2. Retribusi Tempat Pelelangan ikan para penjual kesulitan membawa ikan hasil Lelang di karenakan pasar dalam proses Pembangunan dan pemeliharaan, sehingga pedagang lebih menyukai Tempat Pelelangan alternatif yang dekat dengan konsumen misalkan pasar subuh dan pasar terowongan sehingga berdampak pada sulit bagi petugas untuk menarik retribusi karena para penjual tidak di tempat yang di sediakan oleh pemerintah daerah
3. Retribusi Rumah Potong Hewan tidak tercapai dari target yang di putuskan dikarenakan: Jagal melakukan pemotongan di tempat sendiri dan tidak adanya tindakan yang tegas dari aparaturnya terkait mengakibatkan pelayanan rumah potong hewan di 1 (satu) tempat belum dimanfaatkan pedagang secara optimal. Serta belum ada nya Tempat pemotongan ungags (TPU) di kabupaten, sehingga mengurangi pendapatan retribusi daerah.



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

4. Retribusi Terminal tidak ada realisasi dikarenakan Belum optimalnya anggaran pembiayaan pengelolaan Terminal khususnya dalam hal pengadaan sarana dan prasarana yang lengkap sehingga para sopir enggan bayar pajak retribusi
5. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pengelolaan lokasi tempat rekreasi tersebut tidak bisa dilaksanakan secara optimal oleh pemerintah daerah, misalkan infrastruktur jalan menuju Lokasi wisata masih banyak yang berlobang, bahkan masih ada yang belum di aspal, oleh sebab itu para pengunjung/wisatawan merasa enggan kelokasi tersebut, sehingga menimbulkan kurangnya pendapatan pengelola tempat wisata sehingga berdampak kurangnya penghasilan retribusi pemerintah daerah
6. Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman tidak tercapai di sebabkan; Petani masih miskin dan banyak usia produktif meninggalkan pertanian, Aspek geografi berpotensi kadang kala terkena dampak bencana alam seperti banjir, kemarau yang berkepanjangan dan Belum membudayanya pemahaman tentang cara permohonan izin pemasukan dan pengeluaran benih/bibit

5.1.1.1.2.3. Retribusi Perijinan Tertentu	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	420.053.133,00	306.967.567,00

Realisasi Retribusi Perijinan Tertentu Kabupaten Barito Selatan TA 2025 sebesar Rp420.053.133,00 atau 20,69% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp2.030.000.000,00 Jika dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp306.967.567,00 maka realisasi TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp113.085.566,00 atau 36,84%. Retribusi Perijinan Tertentu merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang berhubungan dengan fungsi Pemerintah Daerah sebagai regulator dan otorisasi untuk memberikan ijin terhadap kegiatan yang dilaksanakan masyarakat, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.7. Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi			Kenaikan/ (Penurunan)
			Tahun 2025 (Rp)	(%)	Tahun 2024 (Rp)	
I	II	III	IV	V	VI	VII
1	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	60.000.000,00	39.527.448,00	65,88	0,00	39.527.448,00
	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	60.000.000,00	39.527.448,00	65,88	0,00	39.527.448,00
2	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.970.000.000,00	380.525.685,00	19,32	306.967.567,00	73.558.118,00
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.970.000.000,00	377.825.685,00	19,18	297.367.567,00	80.458.118,00
	KECAMATAN DUSUN SELATAN	0,00	2.700.000,00	0,00	9.600.000,00	(6.900.000,00)
	Jumlah	2.030.000.000,00	420.053.133,00	20,69	306.967.567,00	113.085.566,00



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Penjelasan Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi

1. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) tidak tercapainya pendapatan dari target di karenakan oleh tidak ada penambahan jumlah penerimaan karyawan di Perusahaan-perusahaan yang ada di Barito Selatan
2. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung tidak dapat tercapai sebanyak yang di targetkan karena adanya keterbatasan sumber daya manusia (SDM) pada PUPR dan DPMPSTP dalam melakukan verifikasi atas pengajuan PBG.

5.1.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	3.756.648.302,31	4.522.022.594,50

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Barito Selatan TA 2025 sebesar Rp3.756.648.302,31 atau 83,09% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp4.521.318.992,00. Jika dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp4.522.022.594,50 maka realisasi TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp765.374.292,19 atau (16,93)%. Realisasi pendapatan tersebut bersumber dari deviden dari PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Tengah dan PT. JAMKRIDA Kalimantan Tengah, sementara pada PDAM Tirta Barito mengalami kerugian Usaha sehingga tidak ada deviden yang dibagikan.

Beberapa faktor utama penyebab tidak tercapainya target antara lain:

1. **Penurunan Deviden dari PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Tengah dan PT. JAMKRIDA Kalimantan Tengah**
 - o Kinerja keuangan BPD dan PT. JAMKRIDA mengalami penurunan laba bersih sehingga deviden yang dibagikan lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya.
 - o Adanya kebijakan internal perusahaan terkait alokasi laba untuk penguatan modal, sehingga porsi deviden yang diterima daerah berkurang.
2. **Ketergantungan pada Satu Sumber Pendapatan** Realisasi pendapatan hanya bersumber dari deviden, tanpa diversifikasi investasi lain. Hal ini membuat penerimaan sangat bergantung pada kondisi keuangan satu entitas.
3. **Kondisi Ekonomi dan Regional** Perlambatan ekonomi daerah dan nasional berdampak pada sektor perbankan, asuransi dan pembiayaan termasuk menurunnya pendapatan bunga dan jasa keuangan yang memengaruhi laba perusahaan.
4. **Target Anggaran yang Relatif Tinggi** Penetapan target setelah perubahan anggaran tidak sepenuhnya mempertimbangkan tren kinerja perusahaan tahun sebelumnya, sehingga gap antara target dan realisasi semakin lebar.

Rincian realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah TA 2025, sebagai berikut.



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.1.8. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun			Kenaikan/ (Penurunan)
			2025 (Rp)	(%)	2024 (Rp)	
1	Deviden PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Tengah	4.521.318.992,00	3.721.318.992,00	83,09	4.522.018.416,50	(800.699.424,50)
2	Deviden PT Jamkrida Kalimantan Tengah		35.329.310,31		0,00	35.329.310,31
Jumlah		4.521.318.992,00	3.756.648.302,31	83,09	4.522.018.416,50	(765.370.114,19)

5.1.1.1.4. Lain-lain PAD yang Sah

31 Desember 2025
20.007.607.862,92

31 Desember 2024
60.230.506.277,16

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito Selatan TA 2025 sebesar Rp20.007.607.862,92 atau 33,20% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp60.271.463.823,23. Jika dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp60.230.506.277,16 maka realisasi TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp40.222.898.414,24 atau (66,78)%. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan pendapatan yang tidak termasuk dalam Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, rincian sebagai berikut.

Adapun tidak tercapainya realisasi dibandingkan anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dikarenakan adanya Reklasifikasi Pendapatan BLUD yang awalnya direalisasikan pada Lain-lain PAD yang sah senilai Rp44.061.305.179,00 direklasifikasi menjadi pendapatan retribusi sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Tabel 5.1.9. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun			Kenaikan/ (Penurunan)
			2025 (Rp)	(%)	2024 (Rp)	
I	II	III	IV	V	VI	VII
1	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	3.000.000,00	21.315.900,00	710,53	73.936.465,00	(52.620.565,00)
	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	0,00	0,00	0,00	312.500,00	(312.500,00)
	BADAN PENDAPATAN DAERAH	3.000.000,00	21.315.900,00	710,53	73.623.965,00	(52.308.065,00)
2	Penerimaan Jasa Giro Kas Daerah	4.062.411.736,00	3.035.098.108,00	74,71	2.684.333.661,00	350.764.447,00
	BADAN PENDAPATAN DAERAH	4.062.411.736,00	3.035.098.108,00	74,71	0,00	3.035.098.108,00
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	0,00	0,00	2.684.333.661,00	(2.684.333.661,00)



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun			Kenaikan/ (Penurunan)
			2025 (Rp)	(%)	2024 (Rp)	
I	II	III	IV	V	VI	VII
3	Pendapatan Bunga	226.614.746,30	1.565.334.439,91	690,75	12.298.169.404,22	(10.732.834.964,31)
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	1.558.140.408,00	-	12.298.169.404,22	(10.740.028.996,22)
	BADAN PENDAPATAN DAERAH	226.614.746,30	7.194.031,91	3,17	0,00	7.194.031,91
4	Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)
5	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	6.866.443.555,93	4.877.401.121,87	71,03	4.758.729.505,38	118.671.616,49
	BADAN PENDAPATAN DAERAH	6.866.443.555,93	5.983.542.918,17	87,14	0,00	5.983.542.918,17
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	(1.106.141.796,30)		4.758.729.505,38	(5.864.871.301,68)
6	Pendapatan Denda Pajak Restoran	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	BADAN PENDAPATAN DAERAH	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
7	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	150.000.000,00	149.435.428,00	99,62	74.873.907,00	74.561.521,00
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	0,00	0,00	74.873.907,00	(74.873.907,00)
	BADAN PENDAPATAN DAERAH	150.000.000,00	149.435.428,00	99,62	0,00	149.435.428,00
8	Denda Retribusi Pelayanan Pasar	20.000.000,00	22.419.160,00	112,10	14.991.587,00	7.427.573,00
	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	20.000.000,00	22.209.160,00	111,05	14.991.587,00	7.217.573,00
	KECAMATAN DUSUN UTARA	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
9	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.500.000,00	8.573.200,00	342,93	0,00	8.573.200,00
	BADAN PENDAPATAN DAERAH	2.500.000,00	4.643.200,00	185,73	0,00	4.643.200,00
	KECAMATAN KARAU KUALA	0,00	2.680.000,00	0,00	0,00	2.680.000,00
	KECAMATAN DUSUN UTARA	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
10	Pendapatan Dari Pengembalian Lainnya	13.142.000.000,00	10.328.026.505,14	78,58	4.853.769.245,56	5.474.257.259,58
	KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DINAS PENDIDIKAN		0,00			
	DINAS KESEHATAN		0,00			

Handwritten signature



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun			Kenaikan/ (Penurunan)
			2025 (Rp)	(%)	2024 (Rp)	
I	II	III	IV	V	VI	VII
	KECAMATAN DUSUN SELATAN		0,00			
	KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	0,00	0,00	4.853.769.245,56	(4.853.769.245,56)
	BADAN PENDAPATAN DAERAH	13.137.000.000,00	10.328.026.505,14	78,62	0,00	10.328.026.505,14
11	Pendapatan Jasa Layanan BLUD	35.798.493.785,00	0,00	123,08	35.466.702.502,00	(35.466.702.502,00)
	DINAS KESEHATAN	35.798.493.785,00	0,00	0,00	35.466.702.502,00	(35.466.702.502,00)
	Jumlah	60.271.463.823,23	20.007.607.862,92	0,00	60.230.506.277,16	(40.222.898.414,24)

5.1.1.2. Pendapatan Transfer

31 Desember 2025

1.426.117.527.001,00

31 Desember 2024

1.743.463.544.883,00

Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Barito Selatan TA 2025 sebesar Rp1.426.117.527.001,00 atau 110,85% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.286.584.463.942,00. Jika dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp1.743.463.544.883,00 maka realisasi TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp317.346.017.882,00 atau (18,20)%.

Pendapatan Transfer merupakan transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Penyesuaian. Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan Bagi Hasil Pajak. Rincian Pendapatan Transfer sebagai berikut.

Tabel 5.1.10. Pendapatan Transfer

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun			Kenaikan/ (Penurunan)
			2025 (Rp)	(%)	2024 (Rp)	
I	II	III	IV	V	VI	VII
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.228.684.996.740,00	1.349.833.314.386,00	109,86	1.682.796.719.789,00	(332.963.405.403,00)
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	57.899.467.202,00	76.284.212.615,00	131,75	60.666.825.094,00	15.617.387.521,00
	Jumlah	1.286.584.463.942,00	1.426.117.527.001,00	110,85	1.743.463.544.883,00	(317.346.017.882,00)

5.1.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

31 Desember 2025

1.349.833.314.386,00

31 Desember 2024

1.682.796.719.789,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Kabupaten Barito Selatan TA 2025 sebesar Rp1.349.833.314.386,00 atau 109,86% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.228.684.996.740,00. Jika dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp1.682.796.719.789,00, maka realisasi TA 2025 mengalami penurunan sebesar



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Rp332.963.405.403,00 atau (19,79)%. Rincian realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagai berikut.

Tabel 5.1.11. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun			Kenaikan/ (Penurunan)
			2025 (Rp)	(%)	2024 (Rp)	
I	II	III	IV	V	VI	VII
1	Dana Perimbangan	1.159.506.853.740,00	1.297.317.525.986,00	111,89	1.602.375.206.713,00	(305.057.680.727,00)
2	Dana Desa	69.178.143.000,00	52.515.788.400,00	75,91	73.702.409.076,00	(21.186.620.676,00)
3	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	6.719.104.000,00	(6.719.104.000,00)
Jumlah		1.228.684.996.740,00	1.349.833.314.386,00	109,86	1.682.796.719.789,00	(332.963.405.403,00)

5.1.1.2.1.1. Dana Perimbangan

31 Desember 2025
1.297.317.525.986,00

31 Desember 2024
1.602.375.206.713,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Kabupaten Barito Selatan TA 2025 sebesar Rp1.297.317.525.986,00 atau 111,88% dari anggaran sebesar Rp1.159.506.853.740,00. Jika dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp1.602.375.206.713,00 maka realisasi TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp305.057.680.727,00 atau (19,04)%. Rincian realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan sebagai berikut

Tabel 5.1.12. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun			Kenaikan/ (Penurunan)
			2025 (Rp)	(%)	2024 (Rp)	
I	II	III	IV	V	VI	VII
1	Dana Bagi Hasil (DBH)	497.539.368.740,00	691.761.517.556,00	139,04	864.534.116.455,00	(172.772.598.899,00)
2	Dana Alokasi Umum (DAU)	515.686.582.000,00	483.563.006.552,00	93,77	591.322.819.252,00	(107.759.812.700,00)
3	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	18.022.668.000,00	17.734.980.455,00	98,40	53.206.175.347,00	(35.471.194.892,00)
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	128.258.235.000,00	104.258.021.423,00	81,29	93.312.095.659,00	10.945.925.764,00
Jumlah		1.159.506.853.740,00	1.297.317.525.986,00	111,89	1.602.375.206.713,00	(305.057.680.727,00)

5.1.1.2.1.1.1. Dana Bagi Hasil (DBH)

31 Desember 2025 **31 Desember 2024**
691.761.517.556,00 **864.534.116.455,00**

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten Barito Selatan TA 2025 sebesar Rp691.761.517.556,00 atau 139,04% dari anggaran sebesar Rp497.539.368.740,00. Jika dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp864.534.116.455,00 maka realisasi TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp172.772.598.899,00 atau (19,98)%. Rincian realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai berikut.



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.1.13. Pendapatan Transfer-Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun			Kenaikan/ (Penurunan)
			2025 (Rp)	(%)	2024 (Rp)	
I	II	III	IV	V	VI	VII
1	Bagi Hasil dari PBB sektor Perhutanan	1.491.969.000,00	635.598.700,00	42,60	6.534.391.800,00	(5.898.793.100,00)
2	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP OP DN dan PPh Pasal 21	7.367.809.000,00	7.080.090.100,00	96,09	5.252.040.000,00	1.828.050.100,00
3	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	46.491.639.000,00	61.609.655.100,00	132,52	398.896.368.401,00	(337.286.713.301,00)
4	Bagi Hasil dari PBB Sektor Non Minyak Bumi dan Gas Bumi Lainnya	195.124.000,00	195.124.000,00	100,00	193.744.000,00	1.380.000,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	437.039.865.000,00	618.833.371.656,00	141,60	452.513.730.254,00	166.319.641.402,00
6	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	851.176.000,00	851.176.000,00	100,00	1.143.842.000,00	(292.666.000,00)
7	DBH Sawit	4.101.786.740,00	2.556.502.000,00	62,33	0,00	2.556.502.000,00
Jumlah		497.539.368.740,00	691.761.517.556,00	139,04	864.534.116.455,00	(172.772.598.899,00)

5.1.1.2.1.1.2. Dana Alokasi Umum (DAU)

31 Desember 2025 31 Desember 2024
483.563.006.552,00 591.322.819.252,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Barito Selatan TA 2025 sebesar Rp483.563.006.552,00 atau 93,77% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp515.686.582.000,00. Jika dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp591.322.819.252,00 maka realisasi TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp107.759.812.700,00 atau (18,22)%. Tidak tercapainya dari target yang ditetapkan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Umum (DAU) diantaranya karena adanya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Beberapa faktor utama penyebab tidak tercapainya target antara lain:

1. **Penyesuaian Kebijakan Fiskal Nasional** Pemerintah pusat melakukan rasionalisasi belanja negara sehingga alokasi DAU ke daerah mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
2. **Keterlambatan Penyaluran Dana** Beberapa tahap penyaluran DAU tidak terealisasi penuh dalam tahun anggaran berjalan, sehingga memengaruhi capaian akhir terutama pada DAU yang Ditentukan Penggunaannya.

Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu sebagai berikut.



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.1.15. Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun			Kenaikan/ (Penurunan)
			2025 (Rp)	(%)	2024 (Rp)	
I	II	III	IV	V	VI	VII
1	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	0,00	0,00	0,00	28.668.499.100,00	(28.668.499.100,00)
2	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi	0,00	0,00	0,00	3.059.405.000,00	(3.059.405.000,00)
3	DAK Bidang Kesehatan	0,00	0,00	0,00	7.721.125.112,00	(7.721.125.112,00)
4	DAK Bidang Pertanian	0,00	0,00	0,00	1.423.803.000,00	(1.423.803.000,00)
5	DAK Bidang Pendidikan	770.355.000,00	765.228.986,00	99,33	9.321.222.754,00	(8.555.993.768,00)
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan	11.990.250.000,00	11.707.688.469,00	97,64	3.012.120.381,00	8.695.568.088,00
7	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	5.262.063.000,00	5.262.063.000,00	100,00	0,00	5.262.063.000,00
Jumlah		18.022.668.000,00	17.734.980.455,00	98,40	53.206.175.347,00	(35.471.194.892,00)

5.1.1.2.1.1.4. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik **31 Desember 2025** **31 Desember 2024**
104.258.021.423,00 93.312.095.659,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp104.258.021.423,00 atau 81,28% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp128.258.235.000,00. Jika dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp93.312.095.659,00 maka realisasi TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp10.945.925.764,00 atau 11,73%. Meskipun Realisasi meningkat dari tahun sebelumnya tapi dari sisi target masih tidak tercapai dari anggaran yang ditetapkan karena kurang efisiennya perencanaan dalam penganggaran.

Faktor-faktor utama penyebab tidak tercapainya target antara lain:

- 1. Keterlambatan atau Tidak Tersalurnya Beberapa Komponen Dana**
 - o Dana BOK Puskesmas tidak tercatat realisasi sama sekali pada TA 2025, sehingga menurunkan capaian total.
 - o Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD hanya terealisasi 8,46% dari target karena adanya penundaan atau pembatasan penyaluran, kebijakan daerah terkait guru yang mendapat sertifikasi tidak di bayarkan tunjangan daerah.
- 2. Penyesuaian Kebijakan Transfer Non Fisik dari Pemerintah Pusat**
 - o Alokasi dana untuk beberapa program pendidikan dan kesehatan mengalami rasionalisasi sesuai prioritas nasional.
 - o Perubahan kebijakan tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan berdampak pada besaran transfer dan realisasi penyaluran pembayaran.
- 3. Keterbatasan Kapasitas Administrasi dan Teknis Daerah**
 - o Proses verifikasi dan pelaporan yang menjadi syarat pencairan dana tidak sepenuhnya terpenuhi tepat waktu.
 - o Hal ini menyebabkan sebagian dana tidak dapat disalurkan penuh dalam tahun anggaran berjalan.
- 4. Target Anggaran Setelah Perubahan Relatif Tinggi** Penetapan target pasca-perubahan tidak sepenuhnya mempertimbangkan tren realisasi tahun sebelumnya, sehingga gap antara target dan realisasi semakin lebar.



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Rincian realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagai berikut.

Tabel 5.1.16. Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun			Kenaikan/ (Penurunan)
			2025 (Rp)	(%)	2024 (Rp)	
I	II	III	IV	V	VI	VII
1	BOS Reguler	18.378.263.000,00	18.365.188.757,00	99,93	19.427.094.794,00	(1.061.906.037,00)
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.101.000.000,00	1.101.000.000,00	100,00	0,00	1.101.000.000,00
3	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP)	1.821.082.000,00	1.836.067.000,00	100,82	1.593.430.000,00	242.637.000,00
4	Tunjangan Profesi Guru PNSD	54.663.826.000,00	48.818.227.861,00	89,31	56.256.278.500,00	(7.438.050.639,00)
5	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1.879.750.000,00	159.112.500,00	8,46	1.475.437.500,00	(1.316.325.000,00)
6	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	19.375.622.000,00	15.267.939.622,00	78,80	10.909.896.765,00	4.358.042.857,00
7	Dana Tunjangan Khusus Guru	14.245.424.000,00	15.276.539.523,00	107,24	0,00	15.276.539.523,00
8	Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	2.821.030.000,00	2.676.762.360,00	94,89	2.907.248.100,00	(230.485.740,00)
9	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	367.500.000,00	364.771.800,00	99,26	742.710.000,00	(377.938.200,00)
10	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	13.212.326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-Pertanian	392.412.000,00	392.412.000,00	100,00	0,00	392.412.000,00
Jumlah		128.258.235.000,00	104.258.021.423,00	81,29	93.312.095.659,00	10.945.925.764,00

5.1.1.2.1.2. Dana Desa

31 Desember 2025
52.515.788.400,00

31 Desember 2024
73.702.409.076,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Desa Kabupaten Barito Selatan TA 2025 sebesar Rp52.515.788.400,00 atau 75,91% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp69.178.143.000,00. Jika dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp73.702.409.076,00, maka realisasi TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp21.186.620.676,00 atau (28,75)%. Rincian realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Desa sebagai berikut.

Tabel 5.1.17. Dana Desa

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun			Kenaikan/ (Penurunan)
			2025 (Rp)	(%)	2024 (Rp)	
I	II	III	IV	V	VI	VII
1	Dana Desa	69.178.143.000,00	52.515.788.400,00	75,91	73.702.409.076,00	(21.186.620.676,00)
Jumlah		69.178.143.000,00	52.515.788.400,00	75,91	73.702.409.076,00	(21.186.620.676,00)

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Desa tersebut merupakan Dana Desa yang disalurkan dari Pemerintah Pusat untuk diteruskan kepada 86 desa di Kabupaten Barito Selatan dengan rincian sebagai sebagaimana terlampir pada **Lampiran 1**.



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

5.1.1.2.1.3. Dana Insentif Daerah (DID)	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	0,00	6.719.104.000,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Insentif Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp0,00 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp6.719.104.000,00 maka realisasi TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp6.719.104.000,00 atau (100,00)%.

5.1.1.2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	76.284.212.615,00	60.666.825.094,00

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Kabupaten Barito Selatan TA 2025 sebesar Rp76.284.212.615,00 atau 131,75% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp57.899.467.202,00. Jika dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp60.666.825.094,00, maka realisasi TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp15.617.387.521,00 atau 25,74%. Rincian realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagai berikut.

Tabel 5.1.18. Pendapatan Transfer Antar Daerah

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun			Kenaikan/ (Penurunan)
			2025 (Rp)	(%)	2024 (Rp)	
I	II	III	IV	V	VI	VII
1	Pendapatan Bagi Hasil	57.899.467.202,00	75.848.612.615,00	131,00	60.666.825.094,00	15.181.787.521,00
2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA	0,00	435.600.000,00	0,00	0,00	435.600.000,00
	Jumlah	57.899.467.202,00	76.284.212.615,00	131,75	60.666.825.094,00	15.617.387.521,00

5.1.1.2.2.1. Pendapatan Bagi Hasil	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	75.848.612.615,00	60.666.825.094,00

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah-Pendapatan Bagi Hasil Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp75.848.612.615,00 atau 131,00% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp57.899.467.202,00. Jika dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp60.666.825.094,00 maka realisasi TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp15.181.787.521,00 atau 25,02%. Rincian realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah- Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagai berikut.

Tabel 5.1.19. Pendapatan Transfer Antar Daerah-Pendapatan Bagi Hasil Pajak

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun			Kenaikan/ (Penurunan)
			2025 (Rp)	(%)	2024 (Rp)	
I	II	III	IV	V	VI	VII
1	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	13.078.236.887,50	-	4.791.260.027,00	8.286.976.860,50
2	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	2.427.095.633,00	-	5.823.442.658,00	(3.396.347.025,00)
3	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	47.786.647.175,00	51.291.067.293,00	107,33	41.392.177.393,00	9.898.889.900,00
4	Bagi Hasil Dari Pajak Air Permukaan	780.727.498,00	494.715.181,50	63,37	349.972.137,00	144.743.044,50



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun			Kenaikan/ (Penurunan)
			2025 (Rp)	(%)	2024 (Rp)	
I	II	III	IV	V	VI	VII
5	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	9.332.092.529,00	8.557.497.620,00	91,70	8.309.972.879,00	247.524.741,00
	Jumlah	57.899.467.202,00	75.848.612.615,00	131,00	60.666.825.094,00	15.181.787.521,00

5.1.1.2.2. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya-LRA

31 Desember 2025
435.600.000,00

31 Desember 2024
0,00

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah- Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya-LRA Kabupaten Barito Selatan TA 2025 sebesar Rp435.600.000,00 atau 0,00% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp0,00 maka realisasi TA 2025 mengalami penambahan sebesar Rp435.600.000,00. Rincian realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah- Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya sebagai berikut.

Tabel 5.1.20. Pendapatan Transfer Antar Daerah- Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya-LRA

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun			Kenaikan/ (Penurunan)
			2025 (Rp)	(%)	2024 (Rp)	
I	II	III	IV	V	VI	VII
1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA	0,00	435.600.000,00	-	0,00	435.600.000,00
	Jumlah	0,00	435.600.000,00	-	0,00	435.600.000,00

5.1.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

31 Desember 2025
6.094.009.818,00

31 Desember 2024
4.717.879.303,0

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp6.094.009.818,00 atau 2,52% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp241.796.185.211,00. Jika dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp4.717.879.303,00 maka realisasi TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp1.376.130.515,00 atau 29,17%. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan pendapatan yang diterima dari Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.21. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun			Kenaikan/ (Penurunan)
			2025 (Rp)	(%)	2024 (Rp)	
I	II	III	IV	V	VI	VII
1	Pendapatan Hibah	12.577.505.043,00	30.000.000,00	0,23	138.000.000,00	(108.000.000,00)
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	229.218.680.168,00	6.064.009.818,00	2,65	4.579.879.303,00	1.484.130.515,00
	Jumlah	241.796.185.211,00	6.094.009.818,00	2,52	4.717.879.303,00	1.376.130.515,00



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

5.1.1.3.1. Pendapatan Hibah

31 Desember 2025
30.000.000,00

31 Desember 2024
138.000.000,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah- Pendapatan Hibah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp30.000.000,00 atau 0,23% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp12.577.505.043,00. Jika dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp138.000.000,00 maka realisasi TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp108.000.000,00 atau (78,26)%. Rincian realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah- Pendapatan Hibah sebagai berikut.

Tabel 5.1.22. Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun			Kenaikan/ (Penurunan)
			2025 (Rp)	(%)	2024 (Rp)	
I	II	III	IV	V	VI	VII
1	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Dalam Negeri	12.577.505.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	0,00	30.000.000,00	-	138.000.000,00	(108.000.000,00)
Jumlah		12.577.505.043,00	30.000.000,00	0,23	138.000.000,00	(108.000.000,00)

5.1.1.3.2. Lain-lain

**Pendapatan Sesuai
dengan Ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan**

31 Desember 2025
6.064.009.818,00

31 Desember 2024
4.579.879.303,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten Barito Selatan TA 2025 sebesar Rp6.064.009.818,00 dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp229.218.680.168,00. Jika dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp4.579.879.303,00 maka realisasi TA 2024 mengalami penambahan pendapatan sebesar Rp1.484.130.515,00 atau 32,41%. realisasi tersebut merupakan pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP dan Klaim Pelayanan Kesehatan/ JKN Non kapitasi.

Namun demikian dari sisi realisasi pendapatan dengan target anggaran yang ditetapkan masih belum tercapai disebabkan karena;

- Pada Saat Proses perencanaan yang belum matang ditambah dengan belum adanya tim perencana khusus, target kapitasi tidak memakai data riil peserta, Faktor Jumlah Peserta/Kapita berkurang, Faktor Pembayaran BPJS menurun menjadi kendala penyerapan dana untuk kebutuhan program dan kegiatan.
- Disiplin kerja pegawai juga menjadi kendala yang cukup berarti terlihat dari masih rendahnya tingkat kehadiran pegawai pada hari kerja yang menyebabkan rendahnya pelayanan dalam pendapatan dana kapitasi, Pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia perlu ditingkatkan terutama dalam bidang pengelolaan dana kapitasi.

Pengelolaan dana kapitasi masih menghadapi beberapa permasalahan pengelolaan terutama dalam hal perencanaan dan pelaksanaan. Belum adanya tim khusus yang



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

menangani perencanaan dana kapitasi JKN mengakibatkan perencanaan anggaran tidak terstruktur dan menghambat penyerapan pendapatan yang lebih rendah. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan pelatihan pengelolaan dana sangat penting untuk mengoptimalkan pendapatan dana kapitasi dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat agar pendapatan lebih meningkat.

Kemudian atas tidak tercapainya target Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat dikarenakan adanya reklasifikasi atas pencairan dana TDF yang seharusnya dianggarkan dan direalisasikan pada pendapatan transfer pemerintah pusat – Dana Bagi Hasil (DBH)

Adapun rincian realisasi dari Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut.

Tabel 5.1.23. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun			Kenaikan/ (Penurunan)
			2025 (Rp)	(%)	2024 (Rp)	
1	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	8.506.461.519,00	5.557.564.818,00	65,33	4.579.879.303,00	977.685.515,00
2	Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat	219.711.280.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pendapatan Klaim Pelayanan Kesehatan/Nonkapitasi	1.000.938.340,00	506.445.000,00	50,60	0,00	506.445.000,00
Jumlah		229.218.680.168,00	6.064.009.818,00	2,65	4.579.879.303,00	1.484.130.515,00

5.1.2. BELANJA DAERAH

31 Desember 2025
1.682.460.442.997,86

31 Desember 2024
1.765.648.332.753,40

Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan TA 2025 sebesar Rp1.682.460.442.997,86 atau 93,64% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.796.752.649.820,00. Jika dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp1.765.648.332.753,40 maka realisasi TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp83.187.889.755,54 atau (4,71)%. Rincian Belanja Daerah sebagai berikut

Tabel 5.1.24. Belanja Daerah

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun			Kenaikan/ (Penurunan)
			2025 (Rp)	(%)	2024 (Rp)	
I	II	III	IV	V	VI	VII
1	Belanja Operasi	1.075.083.720.236,50	1.001.982.776.374,86	93,20	1.020.479.418.028,50	(18.496.641.653,64)
2	Belanja Modal	525.317.095.814,50	514.327.377.771,00	97,91	532.177.064.624,90	(17.849.686.853,90)
3	Belanja Tidak Terduga	10.377.625.000,00	5.522.666.080,00	53,22	423.718.824,00	5.098.947.256,00
4	Transfer	185.974.208.769,00	160.627.622.772,00	86,37	212.588.131.276,00	(51.940.508.504,00)
Jumlah		1.796.752.649.820,00	1.682.460.442.997,86	93,64	1.765.648.332.753,40	(83.187.889.755,54)



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Rincian Belanja Daerah per SKPD sebagai berikut.

Tabel 5.1.25. Belanja Daerah per SKPD

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun			Kenaikan/ (Penurunan)
			2025 (Rp)	(%)	2024 (Rp)	
I	II	III	IV	V	VI	VII
1	Dinas Pendidikan	319.923.246.012,96	306.181.399.927,00	95,70	316.716.330.709,00	(10.534.930.782,00)
2	Dinas Kesehatan	159.760.460.542,00	153.075.009.387,00	95,82	172.995.695.743,00	(19.920.686.356,00)
	BLUD RSUD	46.971.908.886,00	54.527.903.433,70	116,09	31.169.653.020,50	23.358.250.413,20
	JKN BUNTOK (BLUD)	4.326.573.334,00	3.854.384.938,00	89,09	2.245.050.742,00	1.609.334.196,00
	JKN BARU	1.626.964.444,00	1.228.361.064,00	75,50	355.449.073,00	872.911.991,00
	JKN SABABILAH	1.626.457.657,00	1.168.375.423,00	71,84	304.370.045,00	864.005.378,00
	JKN TABAK KANILAN	1.837.054.175,00	1.307.431.658,00	71,17	351.792.085,00	955.639.573,00
	JKN KALAHEN	2.153.764.240,00	1.611.151.974,00	74,81	564.611.757,00	1.046.540.217,00
	JKN BANTAI BAMBURE	1.465.307.400,00	947.059.900,00	64,63	186.327.913,00	760.731.987,00
	JKN PATAS I	2.563.592.861,00	2.076.296.597,00	80,99	635.636.711,00	1.440.659.886,00
	JKN PENDANG	2.045.520.702,00	1.507.341.800,00	73,69	439.752.172,00	1.067.589.628,00
	JKN BABAI	1.514.031.575,00	898.129.374,00	59,32	379.617.281,00	518.512.093,00
	JKN BANGKUANG	1.907.018.741,00	1.237.511.809,00	64,89	483.889.143,00	753.622.666,00
	JKN MANGKATIP	2.212.994.215,00	1.578.686.092,06	71,34	521.464.718,00	1.057.221.374,06
	JKN JENAMAS	1.898.143.904,00	1.482.501.821,00	78,10	346.042.884,00	1.136.458.937,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	490.088.041.337,87	478.754.977.312,10	97,69	413.656.610.635,20	65.098.366.676,90
4	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	26.109.357.846,48	24.697.947.390,00	94,59	46.353.832.837,00	(21.655.885.447,00)
5	Satuan Polisi Pamong Praja	10.225.486.654,00	10.086.753.930,00	98,64	21.670.562.436,00	(11.583.808.506,00)
6	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	16.278.001.782,00	13.642.020.915,00	83,81	0,00	13.642.020.915,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.367.584.765,00	6.331.035.769,00	75,66	6.802.300.990,00	(471.265.221,00)
8	Dinas Sosial	10.142.595.154,40	6.520.171.750,00	64,29	0,00	6.520.171.750,00
9	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA	8.471.709.933,88	7.629.617.568,00	90,06	10.819.477.176,00	(3.189.859.608,00)
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	29.545.470.515,12	26.909.401.132,00	91,08	32.819.759.996,00	(5.910.358.864,00)
11	Dinas Lingkungan Hidup	15.631.673.051,00	15.418.060.372,00	98,63	15.156.408.660,00	261.651.712,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.875.773.590,08	6.384.076.702,00	92,85	7.282.501.961,00	(898.425.259,00)
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	125.540.388.464,56	120.993.697.164,00	96,38	164.602.962.243,00	(43.609.265.079,00)
14	Dinas Perhubungan	10.247.912.298,64	9.366.963.172,00	91,40	10.224.493.415,00	(857.530.243,00)
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	20.170.928.785,00	18.180.223.515,00	90,13	12.215.438.110,00	5.964.785.405,00
16	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	11.885.799.177,00	10.813.587.074,00	90,98	10.926.111.531,00	(112.524.457,00)
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.826.735.378,00	8.332.850.797,00	94,40	9.026.669.505,00	(693.818.708,00)
18	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	19.579.717.532,63	17.730.654.544,00	90,56	28.914.852.928,00	(11.184.198.384,00)



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun			Kenaikan/ (Penurunan)
			2025 (Rp)	(%)	2024 (Rp)	
I	II	III	IV	V	VI	VII
19	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	4.359.250.126,00	3.908.554.399,00	89,66	4.706.077.690,00	(797.523.291,00)
20	Dinas Perikanan	7.748.293.914,00	6.640.778.576,00	85,71	0,00	6.640.778.576,00
21	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7.320.554.088,00	6.780.248.836,00	92,62	8.603.136.444,00	(1.822.887.608,00)
22	Sekretariat Daerah	95.877.865.360,00	93.427.227.034,00	97,44	94.544.805.616,00	(1.117.578.582,00)
23	Sekretariat DPRD	57.793.626.414,00	55.633.576.723,00	96,26	55.210.288.601,00	423.288.122,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	14.139.728.858,00	12.662.934.542,00	89,56	11.909.838.581,00	753.095.961,00
25	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	150.199.696.520,00	121.985.403.598,00	81,22	178.795.808.409,00	(56.810.404.811,00)
26	Badan Pendapatan Daerah	20.365.719.852,00	10.427.861.196,00	51,20	0,00	10.427.861.196,00
27	Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.122.528.234,38	8.276.982.406,00	54,73	15.598.652.115,00	(7.321.669.709,00)
28	Inspektorat	12.422.179.748,00	10.794.805.763,00	86,90	12.809.947.817,00	(2.015.142.054,00)
29	Kecamatan Dusun Hilir	4.192.612.615,00	3.787.738.843,00	90,34	3.455.924.133,00	331.814.710,00
30	Kecamatan Dusun Selatan	6.486.490.536,00	5.517.954.890,00	85,07	6.744.793.664,00	(1.226.838.774,00)
31	Kecamatan Dusun Utara	4.187.125.328,00	3.839.589.848,00	91,70	3.596.242.070,00	243.347.778,00
32	Kecamatan Gunung Bintang Awai	4.129.946.526,00	4.018.263.625,00	97,30	4.497.003.763,00	(478.740.138,00)
33	Kecamatan Jenamas	3.656.968.582,00	3.215.736.867,00	87,93	3.174.752.792,00	40.984.075,00
34	Kecamatan Karau Kuala	4.351.246.416,00	3.726.368.090,00	85,64	3.483.063.696,00	243.304.394,00
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	14.578.601.748,00	13.342.833.458,00	91,52	41.456.472.739,00	(28.113.639.281,00)
Jumlah		1.796.752.649.820,00	1.682.460.442.997,86	93,64	1.766.754.474.549,70	(84.294.031.551,84)

5.1.2.1. Belanja Operasi

31 Desember 2025

1.001.982.776.374,86

31 Desember 2024

1.020.479.418.028,50

Realisasi Belanja Operasi Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.001.982.776.374,86 atau 93,20% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.075.083.720.236,50. Jika dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp1.020.479.418.028,50 maka realisasi TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp18.496.641.653,64 atau (1,81)%. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.26. Belanja Operasi

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun			Kenaikan/ (Penurunan)
			2025 (Rp)	(%)	2024 (Rp)	
I	II	III	IV	V	VI	VII
1	Belanja Pegawai	549.588.376.375,41	506.616.293.948,06	92,18	467.108.665.972,00	39.507.627.976,06
2	Belanja Barang dan Jasa	468.486.267.861,09	440.925.782.385,80	94,12	447.961.452.752,50	(7.035.670.366,70)



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun			Kenaikan/ (Penurunan)
			2025 (Rp)	(%)	2024 (Rp)	
I	II	III	IV	V	VI	VII
3	Belanja Subsidi	2.525.000.000,00	2.525.000.000,00	100,00	2.735.558.710,00	(210.558.710,00)
4	Belanja Hibah	42.232.076.000,00	40.037.795.041,00	94,80	80.845.739.144,00	(40.807.944.103,00)
5	Belanja Bantuan Sosial	12.252.000.000,00	11.877.905.000,00	96,95	21.828.001.450,00	(9.950.096.450,00)
Jumlah		1.075.083.720.236,50	1.001.982.776.374,86	93,20	1.020.479.418.028,50	(18.496.641.653,64)

Rincian Belanja Operasi per SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.1.27. Belanja Operasi per SKPD

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun			Kenaikan/ (Penurunan)
			2025 (Rp)	(%)	2024 (Rp)	
I	II	III	IV	V	VI	VII
1	Dinas Pendidikan	306.638.586.477,46	293.745.505.131,00	95,80	292.310.481.805,000	1.435.023.326,00
2	Dinas Kesehatan	144.000.517.492,00	137.813.246.473,00	95,70	142.427.109.177,00	(4.613.862.704,00)
	BLUD RSUD	37.779.908.886,00	46.679.929.745,70	123,56	29.883.339.270,50	16.796.590.475,20
	JKN BUNTOK	4.076.573.334,00	3.735.127.288,00	91,62	2.261.921.651	1.473.205.637,00
	JKN BARU	1.573.624.444,00	1.202.811.064,00	76,44	355.131.222,00	847.679.842,00
	JKN SABABILAH	1.590.277.657,00	1.168.375.423,00	73,47	304.371.842,00	864.003.581,00
	JKN TABAK KANILAN	1.780.469.375,00	1.296.156.658,00	72,80	351.657.909,00	944.498.749,00
	JKN KALAHIEH	2.092.166.240,00	1.581.151.974,00	75,57	564.579.321,00	1.016.572.653,00
	JKN BANTAI BAMBURE	1.465.307.400,00	947.059.900,00	64,63	186.327.867,00	760.732.033,00
	JKN PATAS I	2.451.974.861,00	1.983.978.597,00	80,91	635.641.827,00	1.348.336.770,00
	JKN PENDANG	1.992.265.702,00	1.486.961.800,00	74,64	439.755.846,00	1.047.205.954,00
	JKN BABAI	1.503.431.575,00	887.529.374,00	59,03	377.412.620,00	510.116.754,00
	JKN BANGKUANG	1.838.908.741,00	1.225.111.809,00	66,62	459.185.971,00	765.925.838,00
	JKN MANGKATIP	2.114.632.215,00	1.513.048.912,06	71,55	559.144.688,00	953.904.224,06
	JKN JENAMAS	1.811.575.904,00	1.404.522.998,00	77,53	348.902.598,00	1.055.620.400,00
3	Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang	70.269.321.251,87	65.460.772.558,10	93,16	52.477.480.012,00	12.983.292.546,10
4	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	13.646.302.786,48	12.241.680.330,00	89,71	18.750.489.873,00	(6.508.809.543,00)
5	Satuan Polisi Pamong Praja	10.225.486.654,00	10.086.753.930,00	98,64	17.585.901.342,00	(7.499.147.412,00)
6	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	14.532.410.982,00	11.952.204.015,00	82,25	0,00	11.952.204.015,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.582.594.546,00	5.627.995.810,00	74,22	5.274.160.990,00	353.834.820,00
8	Dinas Sosial	9.961.285.154,40	6.401.171.750,00	64,26	0,00	6.401.171.750,00
9	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA	8.471.709.933,88	7.629.617.568,00	90,06	10.470.909.176,00	(2.841.291.608,00)
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	25.800.274.915,12	23.165.279.532,00	89,79	27.673.807.796,00	(4.508.528.264,00)
11	Dinas Lingkungan Hidup	12.798.959.051,00	12.597.946.373,00	98,43	14.279.688.560,00	(1.681.742.187,00)
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.776.733.590,08	6.287.213.902,00	92,78	6.366.721.961,00	(79.508.059,00)
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	17.048.413.614,56	13.892.861.311,00	81,49	21.519.833.143,00	(7.626.971.832,00)
14	Dinas Perhubungan	9.139.867.348,64	8.266.521.043,00	90,44	8.428.886.515,00	(162.365.472,00)
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	12.400.817.185,00	10.864.021.543,00	87,61	10.872.742.168,00	(8.720.625,00)
16	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	11.546.047.177,00	10.474.185.074,00	90,72	10.788.368.531,00	(314.183.457,00)
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.396.197.810,00	6.927.618.796,00	93,66	6.951.169.505,00	(23.550.709,00)
18	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	18.907.726.432,63	17.062.207.144,00	90,24	24.211.804.928,00	(7.149.597.784,00)



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun			Kenaikan/ (Penurunan)
			2025 (Rp)	(%)	2024 (Rp)	
I	II	III	IV	V	VI	VII
19	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	4.177.674.126,00	3.735.482.395,00	89,42	4.130.728.690,00	(395.246.295,00)
20	Dinas Perikanan	7.362.721.741,00	6.258.683.826,00	85,01	0,00	6.258.683.826,00
21	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7.099.454.238,00	6.560.648.836,00	92,41	7.553.846.444,00	(993.197.608,00)
22	Sekretariat Daerah	90.663.378.423,00	88.247.589.068,00	97,34	89.895.332.348,00	(1.647.743.280,00)
23	Sekretariat DPRD	53.287.874.878,00	51.215.119.135,00	96,11	46.301.605.001,00	4.913.514.134,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	13.770.380.058,00	12.306.700.990,00	89,37	11.191.712.005,00	1.114.988.985,00
25	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	54.661.647.530,00	48.151.638.874,00	88,09	64.468.071.490,00	(16.316.432.616,00)
26	Badan Pendapatan Daerah	10.150.002.043,00	7.660.215.364,00	75,47	0,00	7.660.215.364,00
27	Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia	14.243.630.564,38	7.480.426.558,00	52,52	15.320.601.865,00	(7.840.175.307,00)
28	Inspektorat	12.067.151.848,00	10.459.357.763,00	86,68	11.057.608.617,00	(598.250.854,00)
29	Kecamatan Dusun Hilir	4.013.532.615,00	3.616.501.463,00	90,11	3.322.769.133,00	293.732.330,00
30	Kecamatan Dusun Selatan	6.277.690.536,00	5.309.900.857,00	84,58	6.232.246.764,00	(922.345.907,00)
31	Kecamatan Dusun Utara	3.826.000.328,00	3.494.323.849,00	91,33	3.403.210.492,00	91.113.357,00
32	Kecamatan Gunung Bintang Awai	3.100.374.026,00	3.007.668.626,00	97,01	3.497.597.138,00	(489.928.512,00)
33	Kecamatan Jenamas	3.054.636.382,00	2.598.686.867,00	85,07	2.628.138.492,00	(29.451.625,00)
34	Kecamatan Karau Kuala	3.968.562.416,00	3.351.573.140,00	84,45	3.078.345.696,00	273.227.444,00
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	14.144.639.748,00	12.919.690.938,00	91,34	41.280.675.739,00	(28.360.984.801,00)
Jumlah		1.075.083.720.236,50	1.001.982.776.374,86	93,21	1.020.479.418.028,50	(18.496.641.653,64)

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

31 Desember 2025

506.616.293.948,06

31 Desember 2024

467.108.665.972,00

Realisasi Belanja Pegawai Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp506.616.293.948,06 atau 92,18% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp549.588.376.375,41. Jika dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp467.108.665.972,00 maka realisasi TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp39.507.627.976,06 atau 8,46%. Realisasi belanja pegawai mencapai 30,11% dari belanja daerah tahun 2025, total belanja daerah tahun 2025 adalah sebesar Rp1.682.460.442.997,86 dan total belanja pegawai sebesar Rp506.616.293.948,06. Belanja pegawai telah melebihi maksimal belanja pegawai 30% adapun strategi untuk memenuhi batas maksimal belanja pegawai pada Kabupaten Barito Selatan adalah :

1. Penataan Formasi dan Analisis Beban Kerja
Melakukan evaluasi jabatan dan redistribusi pegawai sesuai kebutuhan riil, serta batasi rekrutmen baru hanya di sektor prioritas (pendidikan dan kesehatan).
2. Digitalisasi Layanan Pemerintahan
Memperluas penggunaan aplikasi dan sistem informasi manajemen untuk pelayanan publik dan administrasi, sehingga efisiensi meningkat dan kebutuhan tambahan pegawai berkurang.
3. Rasionalisasi Tunjangan dan Tambahan Penghasilan



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Menyesuaikan pemberian tunjangan dengan kemampuan fiskal daerah dan kaitkan dengan pencapaian kinerja, agar belanja pegawai lebih terkendali.

4. Optimalisasi Pendapatan Daerah (PAD dan Lain-lain)
 - a. Intensifikasi pajak dan retribusi berbasis potensi lokal dengan sistem pemungutan digital.
 - b. Dorong BUMD/BLUD lebih produktif melalui diversifikasi usaha dan tata kelola profesional.
 - c. Optimalkan pemanfaatan aset daerah (sewa, kerjasama pemanfaatan, investasi).
 - d. Bangun kemitraan dengan UMKM dan swasta untuk memperluas basis pajak dan retribusi.

Rincian Belanja Pegawai sebagai berikut.

Tabel 5.1.28. Belanja Pegawai

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun			Kenaikan/ (Penurunan)
			2025 (Rp)	(%)	2024 (Rp)	
I	II	III	IV	V	VI	VII
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	350.237.928.712,92	324.955.364.156,00	92,78	284.769.984.818,00	40.185.379.338,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	187.008.428.729,49	169.491.124.334,06	90,63	98.731.631.085,00	70.759.493.249,06
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	73.453.351.290,00	(73.453.351.290,00)
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	11.262.821.594,00	11.167.624.040,00	99,15	9.735.283.279,00	1.432.340.761,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	477.597.339,00	420.581.418,00	88,06	10.415.500,00	410.165.918,00
6	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	601.600.000,00	581.600.000,00	96,68	408.000.000,00	173.600.000,00
Jumlah		549.588.376.375,41	506.616.293.948,06	92,18	467.108.665.972,00	39.507.627.976,06

Kebijakan tersebut diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). "Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai Daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% dari total belanja APBD dari Pasal 146 Ayat 1 UU HKPD.

Adapun persentase belanja pegawai dibandingkan total belanja daerah sebesar 30,11% sehingga melebihi dari amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) yang mana Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai Daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% dari total belanja APBD dari Pasal 146 Ayat 1 UU HKPD dikarenakan adanya penambahan jumlah PPPK di Tahun 2025. Strategi agar bisa memenuhi seperti yang diamanatkan dalam UU sebaiknya melakukan penundaan penerimaan CPNS/PPPK untuk beberapa tahun kedepan, sambil menunggu masa PNS Pensiun, kecuali guru, Tenaga Kesehatan, penyuluh. Kalau untuk Jabatan administrasi cukup diisi dengan melakukan mutasi staf antar Instansi

Realisasi belanja pegawai per SKPD Tahun Anggaran 2025 dan 2024 disajikan dalam tabel berikut.



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.1.29. Belanja Pegawai per SKPD

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun			Kenaikan/ (Penurunan)
			2025 (Rp)	(%)	2024 (Rp)	
I	II	III	IV	V	VI	VII
1	Dinas Pendidikan	249.217.426.700,46	240.296.657.653,00	96,42	235.698.251.969,00	4.598.405.684,00
2	Dinas Kesehatan	91.376.304.398,00	88.832.783.259,00	97,22	82.065.010.146,00	6.767.773.113,00
	JKN BUNTOK	135.924.935,00	87.385.652,00	64,29	0,00	87.385.652,00
	JKN BARU	589.232.938,00	393.523.284,00	66,79	0,00	393.523.284,00
	JKN SABABILAH	491.721.207,00	289.602.304,00	58,90	0,00	289.602.304,00
	JKN TABAK KANILAN	588.132.460,00	386.443.058,00	65,71	0,00	386.443.058,00
	JKN KALAHEN	753.268.725,00	551.284.008,00	73,19	0,00	551.284.008,00
	JKN BANTAI BAMBURE	453.038.900,00	218.369.525,00	48,20	0,00	218.369.525,00
	JKN PATAS I	964.894.179,00	685.802.920,00	71,08	0,00	685.802.920,00
	JKN PENDANG	759.350.832,00	536.609.457,00	70,67	0,00	536.609.457,00
	JKN BABA I	578.922.835,00	325.886.764,00	56,29	0,00	325.886.764,00
	JKN BANGKUANG	741.832.326,00	521.127.527,00	70,25	0,00	521.127.527,00
	JKN MANGKATIP	742.339.611,00	566.026.908,06	76,25	0,00	566.026.908,06
	JKN JENAMAS	658.259.112,80	475.761.413,00	72,28	0,00	475.761.413,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11.504.945.816,00	9.820.332.782,00	85,36	8.512.079.998,00	1.308.252.784,00
4	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	6.479.256.556,00	5.399.387.797,00	83,33	3.921.396.033,00	1.477.991.764,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	6.439.307.876,00	6.341.479.692,00	98,48	0,00	6.341.479.692,00
6	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	8.603.305.832,00	6.455.094.823,00	75,03	8.654.446.251,00	(2.199.351.428,00)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.764.654.957,00	2.087.701.663,00	55,46	1.931.323.588,00	156.378.075,00
8	Dinas Sosial	4.082.197.612,00	1.672.350.722,00	40,97	0,00	1.672.350.722,00
9	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA	3.864.665.416,88	3.306.428.564,00	85,56	3.273.721.745,00	32.706.819,00
10	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	17.865.337.619,12	16.051.493.943,00	89,85	14.041.764.070,00	2.009.729.873,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	5.542.541.712,00	5.467.532.503,00	98,65	4.068.304.079,00	1.399.228.424,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.988.805.466,08	2.905.305.344,00	97,21	2.744.893.975,00	160.411.369,00
13	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.619.576.555,56	3.409.383.870,00	60,67	4.203.792.322,00	(794.408.452,00)
14	Dinas Perhubungan	6.392.329.194,00	5.600.169.498,00	87,61	4.235.897.336,00	1.364.272.162,00
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.013.169.235,00	3.175.002.829,00	79,11	2.932.559.957,00	242.442.872,00
16	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	4.989.191.390,00	4.319.037.692,00	86,57	3.505.728.914,00	813.308.778,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.961.161.623,00	3.587.074.117,00	90,56	3.283.256.175,00	303.817.942,00
18	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	4.067.016.072,13	3.544.353.259,00	87,15	3.275.038.105,00	269.315.154,00
19	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	2.552.328.944,00	2.420.646.795,00	94,84	2.285.116.547,00	135.530.248,00
20	Dinas Perikanan	2.025.638.991,00	1.117.639.260,00	55,17	0,00	1.117.639.260,00
21	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.463.297.780,00	2.995.733.586,00	86,50	2.708.032.756,00	287.700.830,00
22	Sekretariat Daerah	15.043.833.504,00	14.645.350.139,00	97,35	12.787.033.858,00	1.858.316.281,00
23	Sekretariat DPRD	14.434.315.518,00	14.197.424.789,00	98,36	12.558.048.843,00	1.639.375.946,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	5.257.528.620,00	4.614.601.156,00	87,77	4.405.841.523,00	208.759.633,00
25	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	27.170.764.466,00	22.998.928.569,00	84,65	23.608.328.090,00	(609.399.521,00)
26	Badan Pendapatan Daerah	2.947.228.646,00	1.205.642.548,00	40,91	0,00	1.205.642.548,00
27	Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.769.738.204,38	3.195.702.307,00	84,77	2.985.098.371,00	210.603.936,00



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun			Kenaikan/ (Penurunan)
			2025 (Rp)	(%)	2024 (Rp)	
I	II	III	IV	V	VI	VII
28	Inspektorat	6.753.632.648,00	6.621.126.653,00	98,04	5.837.267.388,00	783.859.265,00
29	Kecamatan Dusun Hilir	2.273.314.765,00	1.991.203.613,00	87,59	1.673.116.033,00	318.087.580,00
30	Kecamatan Dusun Selatan	4.294.517.536,00	3.384.419.547,00	78,81	3.450.190.486,00	(65.770.939,00)
31	Kecamatan Dusun Utara	2.448.039.230,00	2.199.334.298,00	89,84	1.752.117.147,00	447.217.151,00
32	Kecamatan Gunung Bintang Awai	1.812.447.476,00	1.767.857.303,00	97,54	1.649.584.255,00	118.273.048,00
33	Kecamatan Jenamas	1.759.417.021,00	1.341.467.663,00	76,25	1.243.602.979,00	97.864.684,00
34	Kecamatan Karau Kuala	2.411.096.936,00	1.867.953.494,00	77,47	1.395.006.766,00	472.946.728,00
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.943.123.998,00	2.741.869.398,00	93,16	2.422.816.267,00	319.053.131,00
Jumlah		549.588.376.375,41	506.616.293.948,06	92,18	467.108.665.972,00	39.507.627.976,06

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa	440.925.782.385,80	447.961.452.752,50

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp440.925.782.385,80 atau 94,12% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp468.486.267.861,09. Jika dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp447.961.452.752,50. Maka realisasi TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp7.035.670.366,70 atau 1,57%. Rincian Belanja Barang dan Jasa sebagai berikut.

Tabel 5.1.30. Belanja Barang dan Jasa

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun			Kenaikan/ (Penurunan)
			2025 (Rp)	(%)	2024 (Rp)	
I	II	III	IV	V	VI	VII
1	Belanja Barang	74.939.910.581,45	69.832.624.237,00	93,18	74.286.697.231,00	(4.454.072.994,00)
2	Belanja Jasa	203.654.589.751,00	182.440.986.362,00	89,58	193.396.054.362,00	(10.955.068.000,00)
3	Belanja Pemeliharaan	40.126.146.418,00	38.516.831.804,10	95,99	21.255.407.819,00	17.261.423.985,10
4	Belanja Perjalanan Dinas	87.401.137.025,64	80.029.649.962,00	91,57	89.840.941.375,00	(9.811.291.413,00)
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/Masyarakat	6.758.160.300,00	5.266.592.819,00	77,93	10.656.646.580,00	(5.390.053.761,00)
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	21.682.830.000,00	21.673.879.720,00	99,96	26.537.320.373,00	(4.863.440.653,00)
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	33.923.493.785,00	43.165.217.481,70	127,24	31.988.385.012,50	11.176.832.469,20
Jumlah		468.486.267.861,09	440.925.782.385,80	94,12	447.961.452.752,50	(7.035.670.366,70)

Rincian Belanja Barang dan Jasa Per SKPD sebagai berikut.

Tabel 5.1.31. Belanja Barang dan Jasa per SKPD

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun			Kenaikan/ (Penurunan)
			2025 (Rp)	(%)	2024 (Rp)	
I	II	III	IV	V	VI	VII
1	DINAS PENDIDIKAN	53.263.795.777,00	49.299.854.437,00	92,56	54.675.229.836,00	(5.375.375.399,00)
2	DINAS KESEHATAN	52.624.213.094,00	48.980.463.214,00	93,08	63.395.881.435,00	(14.415.418.221,00)
	RSUD JARAGA SASAMEH (BLUD)	37.779.908.886,00	46.679.929.745,70	123,56	29.883.339.270,50	16.796.590.475,20
	PUSKESMAS BUNTOK (JKN)	3.940.648.399,00	3.647.741.636,00	92,57	2.114.540.742,00	1.533.200.894,00
	PUSKESMAS BARU (JKN)	984.391.506,00	809.287.780,00	82,21	111.345.290,00	697.942.490,00



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun			Kenaikan/ (Penurunan)
			2025 (Rp)	(%)	2024 (Rp)	
I	II	III	IV	V	VI	VII
	PUSKESMAS SABABILAH (JKN)	1.098.556.450,00	878.773.119,00	79,99	121.697.604,00	757.075.515,00
	PUSKESMAS TABAK KANILAN (JKN)	1.192.336.915,00	909.713.600,00	76,30	116.660.000,00	793.053.600,00
	PUSKESMAS KALAHIEH (JKN)	1.338.897.515,00	1.029.867.966,00	76,92	199.739.213,00	830.128.753,00
	PUSKESMAS BANTAI BAMBURE(JKN)	1.012.268.500,00	728.690.375,00	71,99	92.385.050,00	636.305.325,00
	PUSKESMAS PATAS I (JKN)	1.487.080.682,00	1.298.175.677,00	87,30	209.665.900,00	1.088.509.777,00
	PUSKESMAS PENDANG (JKN)	1.232.914.870,00	950.352.343,00	77,08	163.902.519,00	786.449.824,00
	PUSKESMAS BABAI (JKN)	924.508.740,00	561.642.610,00	60,75	141.992.110,00	419.650.500,00
	PUSKESMAS BANGKUANG (JKN)	1.097.076.415,00	703.984.282,00	64,17	139.990.170,00	563.994.112,00
	PUSKESMAS MANGKATIF (JKN)	1.372.292.604,00	947.022.004,00	69,01	154.447.960,00	792.574.044,00
	PUSKESMAS JENAMAS (JKN)	1.153.316.791,20	928.761.585,00	80,53	123.884.400,00	804.877.185,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	58.764.375.435,87	55.640.439.776,10	94,68	43.965.400.014,00	11.675.039.762,10
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	7.167.046.230,48	6.842.292.533,00	95,47	14.829.093.840,00	(7.986.801.307,00)
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	3.786.178.778,00	3.745.274.238,00	98,92	0,00	3.745.274.238,00
6	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	5.929.105.150,00	5.497.109.192,00	92,71	8.931.455.091,00	(3.434.345.899,00)
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.747.939.589,00	3.540.294.147,00	94,46	3.237.841.952,00	302.452.195,00
8	DINAS SOSIAL	4.699.087.542,40	3.549.071.028,00	75,53	0,00	3.549.071.028,00
9	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PP DAN PA	4.527.044.517,00	4.243.189.004,00	93,73	7.097.187.431,00	(2.853.998.427,00)
10	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	7.464.937.296,00	6.738.785.589,00	90,27	12.940.843.726,00	(6.202.058.137,00)
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	7.256.417.339,00	7.130.413.870,00	98,26	10.211.384.481,00	(3.080.970.611,00)
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.787.928.124,00	3.381.908.558,00	89,28	3.621.827.986,00	(239.919.428,00)
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	11.328.837.059,00	10.413.477.441,00	91,92	17.164.790.821,00	(6.751.313.380,00)
14	DINAS PERHUBUNGAN	2.747.538.154,64	2.666.351.545,00	97,05	4.192.989.179,00	(1.526.637.634,00)
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8.387.647.950,00	7.689.018.714,00	91,67	7.940.182.211,00	(251.163.497,00)
16	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	6.531.855.787,00	6.130.147.382,00	93,85	7.282.639.617,00	(1.152.492.235,00)
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3.435.036.187,00	3.340.544.679,00	97,25	3.667.913.330,00	(327.368.651,00)
18	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	7.550.160.360,50	7.323.713.885,00	97,00	10.141.866.823,00	(2.818.152.938,00)
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	1.625.345.182,00	1.314.835.600,00	80,90	1.845.612.143,00	(530.776.543,00)
20	DINAS PERIKANAN	5.112.282.750,00	4.916.244.566,00	96,17	0,00	4.916.244.566,00
21	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	3.636.156.458,00	3.564.915.250,00	98,04	4.845.813.688,00	(1.280.898.438,00)
22	SEKRETARIAT DAERAH	51.300.057.919,00	49.285.251.929,00	96,07	43.513.748.490,00	5.771.503.439,00
23	SEKRETARIAT DPRD	38.853.559.360,00	37.017.694.346,00	95,27	33.743.556.158,00	3.274.138.188,00



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun			Kenaikan/ (Penurunan)
			2025 (Rp)	(%)	2024 (Rp)	
I	II	III	IV	V	VI	VII
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	8.512.851.438,00	7.692.099.834,00	90,36	6.785.870.482,00	906.229.352,00
25	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	14.990.883.064,00	12.956.555.305,00	86,43	17.555.628.690,00	(4.599.073.385,00)
26	BADAN PENDAPATAN DAERAH	7.202.773.397,00	6.454.572.816,00	89,61	0,00	6.454.572.816,00
27	BADAN KEPEGAWAIAN, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	10.473.892.360,00	4.284.724.251,00	40,91	12.335.503.494,00	(8.050.779.243,00)
28	INSPEKTORAT	5.313.519.200,00	3.838.231.110,00	72,24	5.220.341.229,00	(1.382.110.119,00)
29	KECAMATAN DUSUN HILIR	1.740.217.850,00	1.625.297.850,00	93,40	1.549.653.100,00	75.644.750,00
30	KECAMATAN DUSUN SELATAN	1.983.173.000,00	1.925.481.310,00	97,09	2.782.056.278,00	(856.574.968,00)
31	KECAMATAN DUSUN UTARA	1.377.961.098,00	1.294.989.551,00	93,98	1.651.093.345,00	(356.103.794,00)
32	KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI	1.287.926.550,00	1.239.811.323,00	96,26	1.848.012.883,00	(608.201.560,00)
33	KECAMATAN JENAMAS	1.195.719.361,00	1.119.719.204,00	93,64	1.329.535.513,00	(209.816.309,00)
34	KECAMATAN KARAU KUALA	1.557.465.480,00	1.483.619.646,00	95,26	1.683.338.930,00	(199.719.284,00)
35	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4.709.140.750,00	4.685.446.540,00	99,50	4.401.570.328,00	283.876.212,00
Jumlah		468.486.267.861,09	440.925.782.385,80	94,12	447.961.452.752,50	(7.035.670.366,70)

5.1.2.1.2.1. Belanja Barang

31 Desember 2025
69.832.624.237,00

31 Desember 2024
74.286.697.231,00

Realisasi Belanja Barang Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp69.832.624.237,00 atau 93,18% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp74.939.910.581,45. Jika dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp74.286.697.231,00, maka realisasi TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp4.454.072.994,00 atau 6,00% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.32. Belanja Barang

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun			Kenaikan/ (Penurunan)
			2025 (Rp)	(%)	2024 (Rp)	
I	II	III	IV	V	VI	VII
1	Belanja Barang Pakai Habis	74.316.130.811,45	69.212.493.077,00	93,13	68.239.067.087,00	973.425.990,00
2	Belanja Barang Tidak Pakai Habis	36.358.800,00	35.633.200,00	98,00	21.859.000,00	13.774.200,00
3	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	587.420.970,00	584.497.960,00	99,50	6.025.771.144,00	(5.441.273.184,00)
Jumlah		74.939.910.581,45	69.832.624.237,00	93,18	74.286.697.231,00	(4.454.072.994,00)

M



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

5.1.2.1.2.1.1. Belanja Barang Pakai Habis **31 Desember 2025** **31 Desember 2025**
69.212.493.077,00 **68.239.067.087,00**

Realisasi Belanja Barang Habis Pakai Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp69.212.493.077,00 atau 93,13% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp74.316.130.811,45. Jika dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp68.239.067.087,00 maka realisasi TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp973.425.990,00 atau 1,43% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.33. Belanja Barang Pakai Habis

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun			Kenaikan/ (Penurunan)
			2025 (Rp)	(%)	2024 (Rp)	
I	II	III	IV	V	VI	VII
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	895.371.600,00	890.258.775,00	99,43	448.781.000,00	441.477.775,00
2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	683.941.406,00	652.585.988,00	95,42	541.369.194,00	111.216.794,00
3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.416.993.409,00	5.088.243.695,00	93,93	5.072.408.977,00	15.834.718,00
4	Belanja Bahan-Bahan Baku	917.583.500,00	917.477.120,00	99,99	2.694.476.215,00	(1.776.999.095,00)
	Belanja Bahan-Barang dalam Proses	765.785.500,00	765.608.500,00	99,98	0,00	765.608.500,00
5	Belanja Bahan- Bahan/Bibit Tanaman	477.780.000,00	477.503.000,00	99,94	436.538.000,00	40.965.000,00
6	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	21.822.500,00	21.784.000,00	99,82	35.799.800,00	(14.015.800,00)
7	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	16.772.425,00	11.800.000,00	70,35	0,00	11.800.000,00
8	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	1.692.450.000,00	1.678.204.690,00	99,16	1.947.300.000,00	(269.095.310,00)
9	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.481.115.480,00	1.792.914.765,00	51,50	4.733.554.033,00	(2.940.639.268,00)
10	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	494.057.500,00	375.076.830,00	75,92	269.308.635,00	105.768.195,00
11	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	348.643.338,00	316.120.791,00	90,67	0,00	316.120.791,00
12	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	503.308.540,00	488.023.709,00	96,96	24.479.034,00	463.544.675,00
13	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	9.100.000,00	9.100.000,00	100,00	9.200.000,00	(100.000,00)
14	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	0,00	0,00	0,00	56.400.000,00	(56.400.000,00)
15	Belanja Suku Cadang-Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	84.881.600,00	84.781.600,00	99,88	0,00	84.781.600,00
16	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.388.811.515,90	6.924.046.982,00	93,71	10.840.151.167,00	(3.916.104.185,00)
17	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	196.175.608,00	187.651.360,00	95,65	163.726.500,00	23.924.860,00
18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.170.882.424,35	6.698.510.727,00	93,41	1.284.842.338,00	5.413.668.389,00
19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	444.950.000,00	398.572.900,00	89,58	363.725.500,00	34.847.400,00
20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/ Administrasi Tender	0,00	0,00	0,00	73.493.950,00	(73.493.950,00)
21	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	20.110.000,00	19.885.000,00	98,88	27.990.155,00	(8.105.155,00)
22	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	3.581.703.600,00	3.314.710.236,00	92,55	1.875.271.290,00	1.439.438.946,00
23	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	1.707.926.207,00	1.640.457.585,00	96,05	4.946.459.525,00	(3.306.001.940,00)
24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	3.164.647.460,00	3.115.024.950,00	98,43	1.396.377.689,00	1.718.647.261,00



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun			Kenaikan/ (Penurunan)
			2025 (Rp)	(%)	2024 (Rp)	
I	II	III	IV	V	VI	VII
25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	0,00	0,00	0,00	398.835.000,00	(398.835.000,00)
26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/ Cendera Mata	1.498.114.919,00	1.484.732.060,00	99,11	854.638.055,00	630.094.005,00
27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.261.750.600,00	2.168.094.132,00	95,86	1.442.556.240,00	725.537.892,00
28	Belanja Obat-Obatan- Obat	2.547.477.552,20	2.318.313.680,00	91,00	1.032.498.523,00	1.285.815.157,00
29	Belanja Obat-Obatan- Obat-Obatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	435.601.100,00	(435.601.100,00)
30	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	2.240.530.000,00	2.028.534.200,00	90,54	2.821.915.076,00	(793.380.876,00)
31	Belanja Natura dan Pakan- Natura	37.380.000,00	37.180.750,00	99,47	0,00	37.180.750,00
32	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	146.920.000,00	146.920.000,00	100,00	49.400.000,00	97.520.000,00
33	Belanja Persediaan Dalam Proses- Persediaan Dalam Proses Lainnya	724.000,00	724.000,00	100,00	71.016.875,00	(70.292.875,00)
32	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.446.849.367,00	9.888.970.154,00	94,66	12.370.808.982,00	(2.481.838.828,00)
33	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.236.571.000,00	5.174.350.408,00	98,81	3.491.531.347,00	1.682.819.061,00
34	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	265.346.000,00	262.595.000,00	98,96	45.600.000,00	216.995.000,00
35	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	172.645.000,00	343.191.000,00	198,78	0,00	343.191.000,00
36	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.457.852.560,00	2.335.670.000,00	95,03	1.672.147.300,00	663.522.700,00
37	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	0,00	0,00	0,00	345.563.610,00	(345.563.610,00)
38	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	312.500.000,00	308.750.000,00	98,80	622.000.000,00	(313.250.000,00)
39	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	100.000.000,00	99.000.000,00	99,00	0,00	99.000.000,00
40	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	246.900.000,00	245.073.400,00	99,26	37.400.000,00	207.673.400,00
41	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.193.867.500,00	1.123.175.771,00	94,08	840.593.160,00	282.582.611,00
42	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1.176.723.700,00	1.136.375.200,00	96,57	751.315.000,00	385.060.200,00
43	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	205.520.000,00	205.139.200,00	99,81	35.200.000,00	169.939.200,00
44	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	4.680.000,00	4.680.000,00	100,00	124.150.000,00	(119.470.000,00)
45	Belanja Pakaian Penyelamatan	696.400.000,00	696.210.500,00	99,97	3.750.000,00	692.460.500,00
46	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	(20.000.000,00)
47	Belanja Pakaian KORPRI	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)
48	Belanja Pakaian Adat Daerah	559.700.000,00	552.317.100,00	98,68	460.761.500,00	91.555.600,00
49	Belanja Pakaian Batik Tradisional	2.070.270.000,00	1.882.078.100,00	90,91	1.984.626.317,00	(102.548.217,00)
50	Belanja Pakaian Olahraga	884.885.000,00	834.365.219,00	94,29	1.011.806.000,00	(177.440.781,00)
51	Belanja Pakaian Paskibraka	67.710.000,00	67.710.000,00	100,00	67.700.000,00	10.000,00
Jumlah		74.316.130.811,45	69.212.493.077,00	93,13	68.239.067.087,00	973.425.990,00

5.1.2.1.2.1.2. Belanja Barang Tidak Habis Pakai

31 Desember 2025
35.633.200,00

31 Desember 2024
21.859.000,00

Realisasi Belanja Barang Tidak Habis Pakai Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp35.633.200,00 atau 98,00% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp36.358.800,00 Jika dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Rp21.859.000,00 maka realisasi TA 2025 terjadi kenaikan sebesar Rp13.774.200,00 atau 63,01% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.34. Belanja Barang Tidak Habis Pakai

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun			Kenaikan/ (Penurunan)
			2025 (Rp)	(%)	2024 (Rp)	
I	II	III	IV	V	VI	VII
1	Belanja Komponen Komponen Peralatan	35.185.300,00	34.748.700,00	98,76	21.859.000,00	12.889.700,00
2	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	1.173.500,00	884.500,00	75,37	0,00	884.500,00
	Jumlah	36.358.800,00	35.633.200,00	98,00	21.859.000,00	13.774.200,00

**5.1.2.1.2.1.3. Belanja Aset Tetap yang
Tidak Memenuhi
Kriteria Kapitalisasi**

31 Desember 2025
584.497.960,00

31 Desember 2024
6.025.771.144,00

Realisasi Belanja Jasa Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp584.497.960,00 atau 99,50% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp587.420.970,00. Jika dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp6.025.771.144,00 maka realisasi TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp5.441.273.184,00 atau (90,30)% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.35. Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun			Kenaikan/ (Penurunan)
			2025 (Rp)	(%)	2024 (Rp)	
I	II	III	IV	V	VI	VII
1	Belanja Peralatan dan Mesin- Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan	0,00	0,00	0,00	21.507.802,00	(21.507.802,00)
2	Belanja Peralatan dan Mesin- Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	579.157.942,00	(579.157.942,00)
3	Belanja Peralatan dan Mesin- Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	0,00	0,00	0,00	80.940.000,00	(80.940.000,00)
4	Belanja Peralatan dan Mesin- Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	108.230.000,00	(108.230.000,00)
5	Belanja Peralatan dan Mesin- Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Alat Dapur	0,00	0,00	0,00	3.820.000,00	(3.820.000,00)
6	Belanja Peralatan dan Mesin- Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga Lainnya [()], Home Use]	0,00	0,00	0,00	51.687.400,00	(51.687.400,00)
7	Belanja Peralatan dan Mesin- Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	27.300.000,00	(27.300.000,00)
8	Belanja Peralatan dan Mesin- Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	0,00	35.950.000,00	(35.950.000,00)



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun			Kenaikan/ (Penurunan)
			2025 (Rp)	(%)	2024 (Rp)	
I	II	III	IV	V	VI	VII
9	Belanja Peralatan dan Mesin- Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Video dan Film	0,00	0,00	0,00	3.829.088.000,00	(3.829.088.000,00)
10	Belanja Peralatan dan Mesin- Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK	549.952.000,00	547.028.990,00	99,47	0,00	547.028.990,00
11	Belanja Peralatan dan Mesin- Komputer-Komputer Unit- Personal Computer	18.468.970,00	18.468.970,00	100,00	143.090.000,00	(124.621.030,00)
12	Belanja Peralatan dan Mesin- Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer	19.000.000,00	19.000.000,00	100,00	0,00	19.000.000,00
13	Belanja Gedung dan Bangunan- Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	0,00	0,00	0,00	1.145.000.000,00	(1.145.000.000,00)
Jumlah		587.420.970,00	584.497.960,00	99,50	6.025.771.144,00	(5.441.273.184,00)

5.1.2.1.2.2. Belanja Jasa

31 Desember 2025

182.440.986.362,00

31 Desember 2024

193.396.054.362,00

Realisasi Belanja Jasa Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp182.440.986.362,00 atau 89,58% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp203.654.589.751,00. Jika dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp193.396.054.362,00 maka realisasi TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp10.955.068.000,00 atau (5,66)% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.36 Belanja Jasa

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun			Kenaikan/ (Penurunan)
			2025 and (Rp)	(%)	2024 (Rp)	
I	II	III	IV	V	VI	VII
1	Belanja Jasa Kantor	116.772.925.448,00	105.926.679.248,00	90,71	97.618.865.650,00	8.307.813.598,00
2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	34.885.129.844,00	32.952.289.832,00	94,46	27.001.826.984,00	5.950.462.848,00
3	Belanja Sewa Tanah	198.000.000,00	197.220.000,00	99,61	0,00	197.220.000,00
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.876.517.500,00	2.734.723.667,00	95,07	3.757.772.000,00	(1.023.048.333,00)
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	10.333.501.115,00	8.220.248.129,00	79,55	16.023.077.237,00	(7.802.829.108,00)
6	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	129.500.000,00	115.100.000,00	88,88	6.000.000,00	109.100.000,00
7	Belanja Jasa Konsultansi	26.287.406.400,00	25.888.006.706,00	98,48	35.396.692.813,00	(9.508.686.107,00)
8	Belanja Jasa Konsultasi Non Kontruksi	3.069.555.444,00	3.043.367.144,00	99,15	1.288.420.800,00	1.754.946.344,00
9	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	4.788.000.000,00	127.500.000,00	2,66	5.630.125.000,00	(5.502.625.000,00)
10	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	4.266.474.000,00	3.235.851.636,00	75,84	6.657.673.878,00	(3.421.822.242,00)
11	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	3.830.000,00	0,00	0,00	15.600.000,00	(15.600.000,00)
12	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	43.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun			Kenaikan/ (Penurunan)
			2025 and (Rp)	(%)	2024 (Rp)	
I	II	III	IV	V	VI	VII
	Jumlah	203.654.589.751,00	182.440.986.362,00	89,58	193.396.054.362,00	(10.955.068.000,00)

5.1.2.1.2.3. Belanja Pemeliharaan

31 Desember 2025
38.516.831.804,10

31 Desember 2024
21.255.407.819,00

Realisasi Belanja Pemeliharaan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp38.516.831.804,10 atau 95,98% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp40.126.146.418,00. Jika dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp21.255.407.819,00 maka realisasi TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp17.261.423.985,10 atau 81,21%, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.37 Belanja Pemeliharaan per SKPD

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun			Kenaikan/Penurunan
			2025 (Rp)	(%)	2024 (Rp)	
I	II	III	IV	V	VI	VII
1	BELANJA PEMELIHARAAN TANAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	BELANJA PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN	5.043.781.000,00	4.584.780.603,00	90,90	4.551.330.997,00	33.449.606,00
	DINAS PENDIDIKAN	31.700.000,00	28.700.000,00	90,54	40.260.000,00	(11.560.000,00)
	DINAS KESEHATAN	56.000.000,00	52.679.125,00	94,07	12.085.000,00	40.594.125,00
	PUSKESMAS BUNTOK (JKN)	0,00	0,00		22.734.000,00	(22.734.000,00)
	PUSKESMAS BARU (JKN)	10.440.000,00	8.800.000,00	84,29	600.000,00	8.200.000,00
	PUSKESMAS SABABILAH (JKN)	9.220.000,00	2.100.000,00	22,78	7.400.000,00	(5.300.000,00)
	PUSKESMAS TABAK KANILAN (JKN)	8.610.000,00	6.516.000,00	75,68	1.400.000,00	5.116.000,00
	PUSKESMAS KALAHIEH (JKN)	25.300.000,00	16.411.000,00	64,87	7.220.000,00	9.191.000,00
	PUSKESMAS PATAS I (JKN)	19.750.000,00	16.845.000,00	85,29	10.948.800,00	5.896.200,00
	PUSKESMAS PENDANG (JKN)	41.480.000,00	37.834.700,00	91,21	5.100.000,00	32.734.700,00
	PUSKESMAS BANGKUANG (JKN)	24.000.000,00	18.000.000,00	75,00	27.300.000,00	(9.300.000,00)
	PUSKESMAS MANGKATIP (JKN)	28.240.000,00	0,00		6.200.000,00	(6.200.000,00)
	PUSKESMAS JENAMAS (JKN)	6.660.000,00	0,00		11.220.000,00	(11.220.000,00)
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	858.360.000,00	763.854.606,00	88,99	741.707.761,00	22.146.845,00
	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	18.130.000,00	17.925.000,00	98,87	102.260.800,00	(84.335.800,00)
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	11.520.000,00	11.500.000,00	99,83	745.122.025,00	(733.622.025,00)
	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	318.930.000,00	318.668.400,00	99,92	0,00	318.668.400,00
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	183.940.000,00	171.763.520,00	93,38	83.826.880,00	87.936.640,00
	DINAS SOSIAL	50.990.000,00	50.699.700,00	99,43	0,00	50.699.700,00
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	87.530.000,00	87.444.500,00	99,90	128.473.001,00	(41.028.501,00)
	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	87.260.000,00	(63.260.000,00)
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	287.640.000,00	287.619.200,00	99,99	328.613.630,00	(40.994.430,00)
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	139.330.000,00	129.530.800,00	92,97	68.867.800,00	60.663.000,00



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun			Kenaikan/Penurunan
			2025 (Rp)	(%)	2024 (Rp)	
I	II	III	IV	V	VI	VII
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	24.180.000,00	15.710.000,00	64,97	155.251.800,00	(139.541.800,00)
	DINAS PERHUBUNGAN	18.260.000,00	18.000.000,00	98,58	100.560.555,00	(82.560.555,00)
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	57.790.000,00	43.450.000,00	75,19	86.981.610,00	(43.531.610,00)
	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	60.150.000,00	60.123.500,00	99,96	45.350.000,00	14.773.500,00
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	76.650.000,00	73.008.000,00	95,25	71.160.000,00	1.848.000,00
	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	17.130.000,00	5.130.000,00	29,95	41.000.000,00	(35.870.000,00)
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	19.750.000,00	16.960.000,00	85,87	40.057.700,00	(23.097.700,00)
	DINAS PERIKANAN	39.960.000,00	30.285.500,00	75,79	0,00	30.285.500,00
	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	19.130.000,00	15.510.000,00	81,08	82.252.700,00	(66.742.700,00)
	SEKRETARIAT DAERAH	1.334.680.000,00	1.333.086.902,00	99,88	758.881.893,00	574.205.009,00
	SEKRETARIAT DPRD	465.060.000,00	453.633.850,00	97,54	281.881.424,00	171.752.426,00
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	75.030.000,00	41.574.808,00	55,41	39.305.668,00	2.269.140,00
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	192.660.000,00	62.825.078,00	32,61	199.297.300,00	(136.472.222,00)
	BADAN PENDAPATAN DAERAH	43.000.000,00	42.900.000,00	99,77	0,00	42.900.000,00
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	56.741.000,00	45.271.600,00	79,79	43.166.550,00	2.105.050,00
	INSPEKTORAT	84.770.000,00	68.750.314,00	81,10	29.271.600,00	39.478.714,00
	KECAMATAN DUSUN HILIR	8.000.000,00	7.429.000,00	92,86	0,00	7.429.000,00
	KECAMATAN DUSUN SELATAN	17.690.000,00	8.915.000,00	50,40	14.535.000,00	(5.620.000,00)
	KECAMATAN DUSUN UTARA	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00	5.000.000,00
	KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI	57.330.000,00	57.330.000,00	100,00	56.840.000,00	490.000,00
	KECAMATAN JENAMAS	31.440.000,00	31.432.500,00	99,98	30.343.200,00	1.089.300,00
	KECAMATAN KARAU KUALA	47.110.000,00	47.063.000,00	99,90	16.714.300,00	30.348.700,00
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	50.500.000,00	50.500.000,00	100,00	19.880.000,00	30.620.000,00
3	BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN	13.717.556.770,00	12.760.437.710,00	93,02	10.778.664.582,00	1.981.773.128,00
	DINAS KESEHATAN	0,00	0,00	0,00	330.600.000,00	(330.600.000,00)
	DINAS KESEHATAN	77.500.000,00	0,00	0,00	188.629.222,00	(188.629.222,00)
	PUSKESMAS BARU (JKN)	4.484.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	(5.500.000,00)
	PUSKESMAS SABABILAH (JKN)	3.100.000,00	1.385.000,00	44,68	0,00	1.385.000,00
	PUSKESMAS TABAK KANILAN (JKN)	0,00	0,00	0,00	917.000,00	(917.000,00)
	PUSKESMAS KALAHIEEN (JKN)	20.615.000,00	3.930.000,00	19,06	10.160.000,00	(6.230.000,00)
	PUSKESMAS PATAS I (JKN)	31.000.000,00	4.932.400,00	15,91	9.300.000,00	(4.367.600,00)
	PUSKESMAS PENDANG (JKN)	12.400.000,00	3.500.000,00	28,23	5.000.000,00	(1.500.000,00)
	PUSKESMAS BANGKUANG (JKN)	9.300.000,00	7.580.000,00	81,51	20.150.000,00	(12.570.000,00)
	PUSKESMAS MANGKATIP (JKN)	0,00	0,00		6.200.000,00	(6.200.000,00)
	PUSKESMAS JENAMAS (JKN)	15.340.000,00	15.000.000,00	97,78	0,00	15.000.000,00
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	300.000.000,00	299.334.000,00	99,78	187.700.000,00	111.634.000,00
	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	65.000.000,00	65.000.000,00	100,00	105.000.000,00	(40.000.000,00)
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0,00	0,00	0,00	75.300.000,00	(75.300.000,00)



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun			Kenaikan/Penurunan
			2025 (Rp)	(%)	2024 (Rp)	
I	II	III	IV	V	VI	VII
	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	913.590.000,00	903.336.150,00	98,88	0,00	903.336.150,00
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	100.000.000,00	99.800.000,00	99,80	0,00	99.800.000,00
	DINAS SOSIAL	759.126.000,00	45.465.000,00	5,99	0,00	45.465.000,00
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	79.423.440,00	79.408.440,00	99,98	1.030.990.000,00	(951.581.560,00)
	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	582.057.500,00	581.300.000,00	99,87	254.892.000,00	326.408.000,00
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	(45.000.000,00)
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	0,00	0,00	174.049.000,00	(174.049.000,00)
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	86.450.000,00	49.800.000,00	57,61	224.780.000,00	(174.980.000,00)
	DINAS PERHUBUNGAN	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	0,00	0,00		2.015.000,00	(2.015.000,00)
	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	734.860.320,00	720.660.000,00	98,07	209.079.000,00	511.581.000,00
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	553.135.510,00	544.097.900,00	98,37	70.148.000,00	473.949.900,00
	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	1.153.488.000,00	1.134.212.000,00	98,33	700.296.000,00	433.916.000,00
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	199.656.000,00	199.000.000,00	99,67	176.850.000,00	22.150.000,00
	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	200.000.000,00	199.700.000,00	99,85	289.750.000,00	(90.050.000,00)
	SEKRETARIAT DAERAH	3.620.915.000,00	3.616.563.100,00	99,88	4.166.059.000,00	(549.495.900,00)
	SEKRETARIAT DPRD	3.603.484.000,00	3.603.212.400,00	99,99	1.398.506.000,00	2.204.706.400,00
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	168.320.000,00	167.820.420,00	99,70	124.148.260,00	43.672.160,00
	BADAN PENDAPATAN DAERAH	80.000.000,00	79.850.000,00	99,81	0,00	79.850.000,00
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	80.712.000,00	80.550.900,00	99,80	156.105.100,00	(75.554.200,00)
	INSPEKTORAT	223.600.000,00	215.000.000,00	96,15	165.597.000,00	49.403.000,00
	KECAMATAN DUSUN HILIR	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00	10.000.000,00
	KECAMATAN DUSUN SELATAN	0,00	0,00	0,00	569.550.000,00	(569.550.000,00)
	KECAMATAN DUSUN UTARA	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	66.394.000,00	(36.394.000,00)
4	BELANJA PEMELIHARAAN JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI	21.001.071.538,00	20.808.532.491,10	99,08	5.170.733.500,00	15.637.798.991,10
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	20.671.071.538,00	20.478.692.491,10	99,07	3.496.278.500,00	16.982.413.991,10
	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00	100.000.000,00	(20.000.000,00)
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0,00	0,00	0,00	1.016.350.000,00	(1.016.350.000,00)
	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	0,00	0,00	0,00	159.905.000,00	(159.905.000,00)
	SEKRETARIAT DAERAH	240.000.000,00	239.840.000,00	99,93	398.200.000,00	(158.360.000,00)
	KECAMATAN KARAU KUALA	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00	10.000.000,00
5	BELANJA PEMELIHARAAN ASET TETAP LAINNYA	0,00	0,00	0,00	270.225.740,00	(270.225.740,00)
	DINAS PENDIDIKAN	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	(8.500.000,00)

AM



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun			Kenaikan/Penurunan
			2025 (Rp)	(%)	2024 (Rp)	
I	II	III	IV	V	VI	VII
	DINAS KESEHATAN	0,00	0,00	0,00	816.000,00	(816.000,00)
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0,00	0,00	0,00	46.772.000,00	(46.772.000,00)
	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	0,00	0,00	0,00	10.614.000,00	(10.614.000,00)
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	0,00	0,00	7.388.000,00	(7.388.000,00)
	DINAS KETAHANAN PANGAN, DAN PERTANIAN	0,00	0,00	0,00	1.392.000,00	(1.392.000,00)
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	0,00	0,00	3.057.500,00	(3.057.500,00)
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0,00	0,00	0,00	2.090.000,00	(2.090.000,00)
	DINAS PERHUBUNGAN	0,00	0,00	0,00	42.640.000,00	(42.640.000,00)
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	0,00	0,00	15.659.000,00	(15.659.000,00)
	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	0,00	0,00	0,00	7.102.000,00	(7.102.000,00)
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	(1.600.000,00)
	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	(75.000.000,00)
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0,00	0,00	0,00	2.584.000,00	(2.584.000,00)
	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	0,00	21.600.000,00	(21.600.000,00)
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	0,00	0,00	0,00	318.240,00	(318.240,00)
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	0,00	0,00	13.768.000,00	(13.768.000,00)
	KECAMATAN KARAU KUALA	0,00	0,00	0,00	1.185.000,00	(1.185.000,00)
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	0,00	0,00	5.640.000,00	(5.640.000,00)
6	BELANJA PEMELIHARAAN ASET TIDAK BERWUJUD	363.737.110,00	363.081.000,00	99,82	484.453.000,00	(121.372.000,00)
	DINAS PENDIDIKAN	223.776.000,00	223.776.000,00	100,00	223.776.000,00	0,00
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0,00	0,00	0,00	29.975.000,00	(29.975.000,00)
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	0,00	0,00	182.750.000,00	(182.750.000,00)
	BADAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000,00	99.345.000,00	99,35	0,00	99.345.000,00
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	39.961.110,00	39.960.000,00	100,00	47.952.000,00	(7.992.000,00)
Jumlah 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6		40.126.146.418,00	38.516.831.804,10	95,99	21.255.407.819,00	17.261.423.985,10

5.1.2.1.2.4. Belanja Perjalanan Dinas

31 Desember 2025
80.029.649.962,00

31 Desember 2024
89.840.941.375,00

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp80.029.649.962,00 atau 91,57% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp87.401.137.025,64 jika dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp89.840.941.375,00 maka realisasi TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp9.811.291.413,00 atau (10,92)%, dengan rincian sebagai berikut.



**Catatan Atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.1.38 Belanja Perjalanan Dinas per SKPD

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun			Kenaikan/ (Penurunan)
			2025 (Rp)	(%)	2024 (Rp)	
I	II	III	IV	V	VI	VII
1	DINAS PENDIDIKAN	2.437.982.500,00	2.077.745.341,00	85,22	2.547.502.260,00	(469.756.919,00)
2	DINAS KESEHATAN	6.205.842.131,00	4.987.177.106,00	80,36	9.450.522.304,00	(4.463.345.198,00)
	RSUD JARAGA SASAMEH	101.867.500,00	101.022.640,00	99,17	465.134.193,00	(364.111.553,00)
	PUSKESMAS BUNTOK	1.242.375.000,00	1.144.250.000,00	92,10	317.648.200,00	826.601.800,00
	PUSKESMAS BARU	542.480.000,00	500.550.000,00	92,27	49.255.000,00	451.295.000,00
	PUSKESMAS SABABILAH	746.391.000,00	612.905.000,00	82,12	38.780.000,00	574.125.000,00
	PUSKESMAS TABAK KANILAN	801.820.000,00	692.185.000,00	86,33	24.825.000,00	667.360.000,00
	PUSKESMAS KALAHEN	800.070.000,00	647.760.000,00	80,96	66.470.000,00	581.290.000,00
	PUSKESMAS BANTA/ BAMBURE	653.229.000,00	558.545.000,00	85,51	27.084.000,00	531.461.000,00
	PUSKESMAS PATAS I	886.910.000,00	816.400.000,00	92,05	98.525.000,00	717.875.000,00
	PUSKESMAS PENDANG	728.140.000,00	593.820.000,00	81,55	50.064.000,00	543.756.000,00
	PUSKESMAS BABAI	525.092.000,00	346.170.000,00	65,93	50.700.000,00	295.470.000,00
	PUSKESMAS BANGKUANG	549.096.500,00	432.646.400,00	78,79	49.274.000,00	383.372.400,00
	PUSKESMAS MANGKATIF	688.650.000,00	595.857.050,00	86,53	82.054.000,00	513.803.050,00
	PUSKESMAS JENAMAS	569.595.000,00	490.149.000,00	86,05	52.320.000,00	437.829.000,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5.072.695.998,00	4.370.623.545,00	86,16	4.608.592.610,00	(237.969.065,00)
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	839.851.500,00	778.410.437,00	92,68	1.172.859.323,00	(394.448.886,00)
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.118.574.000,00	1.118.242.008,00	99,97	2.006.024.354,00	(887.782.346,00)
6	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	988.790.000,00	983.149.886,00	99,43	0,00	983.149.886,00
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	851.122.000,00	818.800.635,00	96,20	1.019.871.573,00	(201.070.938,00)
7	DINAS SOSIAL	1.235.786.250,00	1.229.476.712,00	99,49	0,00	1.229.476.712,00
8	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.576.657.000,00	1.520.958.450,00	96,47	1.738.532.803,00	(217.574.353,00)
9	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	1.393.636.000,00	1.093.357.707,00	78,45	3.085.333.414,00	(1.991.975.707,00)
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.314.849.500,00	1.307.803.053,00	99,46	1.638.271.475,00	(330.468.422,00)
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.153.966.000,00	1.122.922.638,00	97,31	1.305.675.106,00	(182.752.468,00)
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.935.434.000,00	1.902.487.003,00	98,30	4.267.501.219,00	(2.365.014.216,00)
13	DINAS PERHUBUNGAN	957.107.662,64	956.507.550,00	99,94	1.767.933.251,00	(811.425.701,00)
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	968.155.000,00	884.185.168,00	91,33	1.227.334.015,00	(343.148.847,00)
15	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	1.319.922.980,00	1.282.643.067,00	97,18	1.958.410.749,00	(675.767.682,00)
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	997.266.000,00	996.887.991,00	99,96	1.674.772.314,00	(677.884.323,00)
17	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	1.763.813.000,00	1.715.655.008,00	97,27	3.530.511.052,00	(1.814.856.044,00)
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	374.807.000,00	266.077.751,00	70,99	506.644.996,00	(240.567.245,00)
19	DINAS PERIKANAN	701.625.000,00	690.486.082,00	98,41	0,00	690.486.082,00
20	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	723.697.000,00	720.532.308,00	99,56	1.610.950.482,00	(890.418.174,00)
21	SEKRETARIAT DAERAH	10.535.225.380,00	10.363.286.990,00	98,37	13.645.531.453,00	(3.282.244.463,00)
22	SEKRETARIAT DPRD	19.408.870.000,00	18.019.655.203,00	92,84	12.330.523.818,00	5.689.131.385,00



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun			Kenaikan/ (Penurunan)
			2025 (Rp)	(%)	2024 (Rp)	
I	II	III	IV	V	VI	VII
23	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	1.903.835.000,00	1.679.185.693,00	88,20	2.916.012.050,00	(1.236.826.357,00)
24	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	3.353.160.124,00	3.047.344.639,00	90,88	5.273.633.199,00	(2.226.288.560,00)
25	BADAN PENDAPATAN DAERAH	1.829.667.500,00	1.700.463.909,00	92,94	0,00	1.700.463.909,00
26	BADAN KEPEGAWAIAN, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.352.138.000,00	1.336.660.125,00	98,86	2.032.368.210,00	(695.708.085,00)
27	INSPEKTORAT	2.449.702.000,00	1.798.272.906,00	73,41	2.691.351.831,00	(893.078.925,00)
28	KECAMATAN DUSUN HILIR	439.386.000,00	435.490.900,00	99,11	393.733.000,00	41.757.900,00
29	KECAMATAN DUSUN SELATAN	620.197.000,00	595.564.250,00	96,03	622.845.800,00	(27.281.550,00)
30	KECAMATAN DUSUN UTARA	248.748.000,00	208.955.772,00	84,00	434.984.236,00	(226.028.464,00)
31	KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI	214.440.000,00	213.429.790,00	99,53	559.374.793,00	(345.945.003,00)
32	KECAMATAN JENAMAS	259.676.000,00	259.161.654,00	99,80	427.936.613,00	(168.774.959,00)
33	KECAMATAN KARAU KUALA	337.029.000,00	336.680.700,00	99,90	426.878.791,00	(90.198.091,00)
34	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.681.766.500,00	1.679.107.895,00	99,84	1.596.390.888,00	82.717.007,00
	Jumlah	87.401.137.025,64	80.029.649.962,00	91,57	89.840.941.375,00	(9.811.291.413,00)

**5.1.2.1.2.5. Belanja Uang dan/atau
Jasa untuk Diberikan
kepada Pihak Ketiga/
Pihak Lain/ Masyarakat**

31 Desember 2025
5.266.592.819,00

31 Desember 2024
10.656.646.580,00

Realisasi Belanja Uang dan/Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp5.266.592.819,00 atau 77,93% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp6.758.160.300,00. Jika dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp10.656.646.580,00 maka realisasi TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp5.390.053.761,00 atau (50,58)%, dengan rincian per SKPD sebagai berikut.

Tabel 5.1.39. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun			Kenaikan/ (Penurunan)
			2025 (Rp)	(%)	2024 (Rp)	
I	II	III	IV	V	VI	VII
1	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.848.560.300,00	4.388.920.818,00	90,52	3.141.879.680,00	1.247.041.138,00
1	DINAS PENDIDIKAN	484.000.000,00	478.490.000,00	98,86	409.250.000,00	69.240.000,00
2	DINAS KESEHATAN	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00	20.000.000,00
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	1.022.000.000,00	962.401.960,00	94,17	2.343.714.680,00	(1.381.312.720,00)
5	DINAS SOSIAL	49.038.000,00	48.275.008,00	98,44	63.125.000,00	(14.849.992,00)
6	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	25.450.000,00	(5.450.000,00)
7	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	240.000.000,00	240.000.000,00	100,00	0,00	240.000.000,00



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun			Kenaikan/ (Penurunan)
			2025 (Rp)	(%)	2024 (Rp)	
I	II	III	IV	V	VI	VII
8	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00	10.000.000,00
9	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	30.000.000,00	24.025.000,00	80,08	5.000.000,00	19.025.000,00
10	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00	20.000.000,00
11	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	219.000.000,00	219.000.000,00	100,00	180.240.000,00	38.760.000,00
12	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	32.750.000,00	32.750.000,00	100,00	17.600.000,00	15.150.000,00
13	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	(7.500.000,00)
14	DINAS PERIKANAN	1.909.972.300,00	1.896.282.350,00	99,28	0,00	1.896.282.350,00
15	SEKRETARIAT DAERAH	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,00	30.000.000,00
16	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	220.000.000,00	180.390.000,00	82,00	90.000.000,00	90.390.000,00
17	BADAN PENDAPATAN DAERAH	155.000.000,00	155.000.000,00	100,00	0,00	155.000.000,00
18	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	350.000.000,00	20.506.500,00	5,86	0,00	20.506.500,00
19	KECAMATAN DUSUN HILIR	19.800.000,00	19.800.000,00	100,00	0,00	19.800.000,00
20	KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	2.000.000,00
21	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00	10.000.000,00
II	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.909.600.000,00	877.672.001,00	45,96	7.514.766.900,00	(6.637.094.899,00)
1	DINAS PENDIDIKAN	0,00	0,00	0,00	948.735.000,00	(948.735.000,00)
2	DINAS KESEHATAN	34.600.000,00	26.100.000,00	75,43	79.000.000,00	(52.900.000,00)
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0,00	0,00	0,00	226.200.000,00	(226.200.000,00)
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	0,00	0,00	0,00	4.844.000,00	(4.844.000,00)
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	48.244.000,00	(38.244.000,00)
	DINAS SOSIAL	10.000.000,00	0,00	0,00	1.870.158.000,00	(1.870.158.000,00)
6	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	(7.200.000,00)
7	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	0,00	0,00	308.580.000,00	(308.580.000,00)
8	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	0,00	0,00	0,00	70.240.000,00	(70.240.000,00)
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	12.000.000,00	9.972.000,00	83,10	128.604.000,00	(118.632.000,00)
10	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	0,00	0,00	74.000.000,00	(74.000.000,00)
11	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	0,00	0,00	0,00	419.000.000,00	(419.000.000,00)
12	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0,00	0,00	0,00	16.600.000,00	(16.600.000,00)
13	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	50.000.000,00	45.000.001,00	90,00	143.850.000,00	(98.849.999,00)
14	SEKRETARIAT DAERAH	935.000.000,00	137.000.000,00	14,65	1.695.276.000,00	(1.558.276.000,00)
15	SEKRETARIAT DPRD	435.000.000,00	380.600.000,00	87,49	325.050.000,00	55.550.000,00

AM



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun			Kenaikan/ (Penurunan)
			2025 (Rp)	(%)	2024 (Rp)	
I	II	III	IV	V	VI	VII
16	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	0,00	0,00	0,00	6.968.000,00	(6.968.000,00)
17	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	(70.000.000,00)
18	INSPEKTORAT	0,00	0,00	0,00	41.900.000,00	(41.900.000,00)
19	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	406.000.000,00	252.000.000,00	62,07	788.945.900,00	(536.945.900,00)
20	KECAMATAN DUSUN HILIR	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00	6.000.000,00	11.000.000,00
21	KECAMATAN DUSUN SELATAN	0,00	0,00	0,00	46.272.000,00	(46.272.000,00)
22	KECAMATAN KARAU KUALA	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00	(13.500.000,00)
23	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	0,00	0,00	175.600.000,00	(175.600.000,00)
Jumlah		6.758.160.300,00	5.266.592.819,00	77,93	10.656.646.580,00	(5.390.053.761,00)

Penjelasan:

1. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
 - Rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Barito Selatan yang ke-66 tahun Pelaksanaan Barsel Expo dan Festival Budaya Dahani Dahanai (FBDD) tahun 2025 yang mana kegiatan ini melibatkan seluruh komponen masyarakat, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan. Untuk ikut serta dalam cabang lomba demi memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Barito Selatan yang ke-66, sementara itu, dalam rangka Festival Budaya Dahani Dahanai Tuntung Tulus tahun 2025. digelar bermabagai macam lomba permainan tradisional, diantaranya : Balogo, Bagasing, Seak sawut, malamang, maneweng manetek, Manyipet, Magenta dan Lomba Tari Serta Semua Jenis Olahraga
 - Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
 - Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
 - Penyediaan Prasarana Usaha Budidaya Perikanan dan Perikanan Tangkap
2. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat:
 - Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
 - Bimtek/Pelatihan kepada Masyarakat
 - Makan Minum Rapat Kegiatan
 - Sewa Gedung dan Jasa Keamanan

5.1.2.1.2.6. Belanja Barang dan Jasa	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
BOS	21.673.879.720,00	26.537.320.373,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Bos Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp21.673.879.720,00 atau 99,96% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp21.682.830.000,00. Jika dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp26.537.320.373,00 maka realisasi TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp4.863.440.653,00.



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

5.1.2.1.2.7. Belanja Barang dan Jasa BLUD	31 Desember 2025 43.165.217.481,70	31 Desember 2024 31.988.385.012,50
--	---	---

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan telah merealisasikan Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tahun 2025 senilai Rp43.165.217.481,70 atau 127,24% dari anggaran senilai Rp33.923.493.785,00. Jika dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp31.988.385.012,50 maka realisasi TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp11.176.832.469,20.

Anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD tersebut diantaranya merupakan milik RSUD Jara Sasameh dengan nilai anggaran dan realisasi atas Belanja Barang dan Jasa BLUD masing-masing yaitu senilai Rp31.256.876.386,00 dan Rp40.623.744.345,70 atau sebesar 129,97% dari anggaran.

Berdasarkan realisasi anggaran Belanja Barang dan Jasa RSUD Jaraga Sasameh diketahui bahwa realisasi anggaran Barang dan Jasa melebihi ambang batas RBA sebesar 29,97% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1.40. Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada RSUD Jaraga Sasameh Melebihi Rencana Bisnis Anggaran

No	Rekening Belanja	Anggaran	Realisasi	Pelampauan	Persentase
a	b	c	d	E=d-c	f
Belanja Barang dan Jasa					
1	Belanja Jasa Pelayanan	14.127.326.386,00	16.479.303.352,00	(2.351.976.966,00)	(16,65)
2	Belanja Bahan Pakai Habis Kesehatan	10.382.000.000,00	15.060.367.353,70	(4.678.367.353,70)	(45,06)
3	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.124.700.000,00	1.672.059.535,00	(547.359.535,00)	(48,67)
4	Belanja Material/Perlengkapan/Bahan	183.600.000,00	242.692.000,00	(59.092.000,00)	(32,19)
5	Belanja Jasa Kantor	4.641.250.000,00	6.206.001.355,00	(1.564.751.355,00)	(33,71)
6	Belanja Pemeliharaan	677.000.000,00	768.618.990,00	(91.618.990,00)	(13,53)
7	Belanja Barang dan Jasa Lainnya	121.000.000,00	194.701.760,00	(73.701.760,00)	(60,91)
Total		31.256.876.386,00	40.623.744.345,70	(9.366.867.959,70)	(29,97)

5.1.2.1.3. Belanja Bunga	31 Desember 2025 0,00	31 Desember 2024 0,00
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Realisasi Belanja Bunga Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp0,00 dan TA 2024 Rp0,00 atau tidak terdapat Anggaran dan Realisasi Belanja Bunga.

5.1.2.1.4. Belanja Subsidi	31 Desember 2025 2.525.000.000,00	31 Desember 2024 2.735.558.710,00
-----------------------------------	--	--

Realisasi Belanja Subsidi Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.525.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp2.525.000.000,00. Jika dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp2.735.558.710,00 maka realisasi TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp210.558.710,00 atau (7,70)%. Belanja subsidi berupa Uang dari APBD 2025 yang diberikan ke BUMD bukan sebagai penyertaan modal, tapi sebagai kompensasi Belanja subsidi ditujukan untuk Menutup selisih antara harga pokok produksi PDAM dengan harga jual ke masyarakat yang telah ditetapkan pemda lebih rendah dari tarif seharusnya.



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

5.1.2.1.5. Belanja Hibah

31 Desember 2025
40.037.795.041,00

31 Desember 2024
80.845.739.144,00

Realisasi Belanja Hibah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp40.037.795.041,00 atau 94,80% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp42.232.076.000,00. Jika dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp80.845.739.144,00 maka realisasi TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp40.807.944.103,00 atau (50,48)% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.41. Belanja Hibah

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun			Kenaikan/ (Penurunan)
			2025 (Rp)	(%)	2024 (Rp)	
I	II	III	IV	V	VI	VII
1	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00	50.000.000,00
2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.192.364.000,00	3.071.993.041,00	96,23	29.616.907.900,00	(26.544.914.859,00)
3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	300.000.000,00	280.000.000,00	93,33	950.000.000,00	(670.000.000,00)
4	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	31.972.337.000,00	30.843.427.000,00	96,47	47.889.450.000,00	(17.046.023.000,00)
5	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	4.866.500.000,00	3.941.500.000,00	80,99	590.000.000,00	3.351.500.000,00
6	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.850.875.000,00	1.850.875.000,00	100,00	1.799.381.244,00	51.493.756,00
Jumlah		42.232.076.000,00	40.037.795.041,00	94,80	80.845.739.144,00	(40.807.944.103,00)

5.1.2.1.6. Belanja Bantuan Sosial

31 Desember 2025
11.877.905.000,00

31 Desember 2024
21.828.001.450,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp11.877.905.000,00 atau 96,95% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp12.252.000.000,00. Jika dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp21.828.001.450,00 maka realisasi TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp9.950.096.450,00 atau (45,58)% Belanja Bantuan Sosial merupakan Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.42. Belanja Bantuan Sosial

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun			Kenaikan/ (Penurunan)
			2025 (Rp)	(%)	2024 (Rp)	
I	II	III	IV	V	VI	VII
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	12.170.000.000,00	11.865.905.000,00	97,50	16.673.006.000,00	(4.807.101.000,00)
2	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	82.000.000,00	12.000.000,00	14,63	5.154.995.450,00	(5.142.995.450,00)
Jumlah		12.252.000.000,00	11.877.905.000,00	96,95	21.828.001.450,00	(9.950.096.450,00)



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

5.1.2.2. Belanja Modal	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	514.327.377.771,00	532.177.064.624,90

Belanja Modal merupakan belanja atas pengadaan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Realisasi Belanja Modal Kabupaten Barito Selatan TA 2025 sebesar Rp514.327.377.771,00 atau 97,91% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp525.317.095.814,50. Jika dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp532.177.064.624,90 maka realisasi TA 2025 terjadi penurunan sebesar Rp17.849.686.853,90 atau (3,35)% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.43. Belanja Modal

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun			Kenaikan/ (Penurunan)
			2025 (Rp)	(%)	2024 (Rp)	
I	II	III	IV	V	VI	VII
1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.753.632.158,50	50.944.552.172,00	93,04	76.322.201.311,00	(25.377.649.139,00)
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	176.967.028.701,00	172.512.642.353,00	97,48	146.211.601.103,80	26.301.041.249,20
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	290.285.910.955,00	287.563.196.250,00	99,06	309.157.085.006,10	(21.593.888.756,10)
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	221.329.000,00	218.199.996,00	98,59	44.337.204,00	173.862.792,00
6	Belanja Modal Aset Lainnya	3.089.195.000,00	3.088.787.000,00	99,99	441.840.000,00	2.646.947.000,00
	Jumlah	525.317.095.814,50	514.327.377.771,00	97,91	532.177.064.624,90	(17.849.686.853,90)

5.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	0,00	0,00

Realisasi Belanja Modal Tanah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	50.944.552.172,00	76.322.201.311,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp50.944.552.172,00 atau 93,04% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp54.753.632.158,50. Jika dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp76.322.201.311,00 maka realisasi TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp25.377.649.139,00 atau 33,25% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.44. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun			Kenaikan/ (Penurunan)
			2025 (Rp)	(%)	2024 (Rp)	
I	II	III	IV	V	VI	VII
1	Belanja Modal Alat Besar	2.547.781.000,00	2.525.048.500,00	99,11	3.644.201.450,00	(1.119.152.950,00)
2	Belanja Modal Alat Angkutan	18.245.324.719,00	17.313.596.599,00	94,89	31.183.367.725,00	(13.869.771.126,00)
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	3.330.000,00	3.330.000,00	100,00	609.763.700,00	(606.433.700,00)
4	Belanja Modal Alat Pertanian	53.500.000,00	51.121.250,00	95,55	1.151.889.350,00	(1.100.768.100,00)
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	9.438.751.340,00	8.709.658.347,00	92,28	9.771.135.318,00	(1.061.476.971,00)
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	12.552.042.300,00	11.974.162.725,00	95,40	5.257.276.355,00	6.716.886.370,00
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.284.500.000,00	1.280.501.052,00	99,69	9.669.902.671,00	(8.389.401.619,00)
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	546.098.000,00	508.315.023,75	93,08	1.248.294.659,00	(739.979.635,25)
9	Belanja Modal Komputer	7.683.619.249,50	7.188.929.596,25	93,56	11.250.748.833,00	(4.061.819.236,75)

01



**Catatan Atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun			Kenaikan/ (Penurunan)
			2025 (Rp)	(%)	2024 (Rp)	
I	II	III	IV	V	VI	VII
10	Belanja Modal Alat Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	234.223.250,00	(234.223.250,00)
11	Belanja Modal Alat Pengeboran	0,00	0,00	0,00	239.600.000,00	(239.600.000,00)
12	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	25.000.000,00	0,00	0,00	358.279.250,00	(358.279.250,00)
13	Belanja Modal Rambu-Rambu	191.886.000,00	186.586.929,00	97,24	229.200.000,00	(42.613.071,00)
14	Belanja Modal Peralatan Olahraga	31.799.550,00	31.495.000,00	99,04	48.000.000,00	(16.505.000,00)
15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.150.000.000,00	1.171.807.150,00	54,50	1.426.318.750,00	(254.511.600,00)
Jumlah		54.753.632.158,50	50.944.552.172,00	93,04	76.322.201.311,00	(25.377.649.139,00)

Rincian belanja modal peralatan dan mesin per SKPD sebagai berikut.

Tabel 5.1.45. Belanja Modal Peralatan dan Mesin per SKPD

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun			Kenaikan/ (Penurunan)
			2025 (Rp)	(%)	2024 (Rp)	
I	II	III	IV	V	VI	VII
1	DINAS PENDIDIKAN	1.238.896.535,50	734.487.000,00	59,29	3.584.861.000,00	(2.850.374.000,00)
2	DINAS KESEHATAN	2.752.443.050,00	2.420.514.714,00	87,94	14.169.028.934,00	(11.748.514.220,00)
	UPT RSUD JARAGA SASAMEH	4.122.375.000,00	3.170.291.688,00	76,90	-	3.170.291.688,00
	UPT PUSKESMAS BUNTOK	150.000.000,00	119.257.650,00	79,51	-	119.257.650,00
	UPT PUSKESMAS BARU	53.340.000,00	25.550.000,00	47,90	-	25.550.000,00
	UPT PUSKESMAS SABABILAH	36.180.000,00	-	0,00	-	0,00
	UPT PUSKESMAS TABAK KANILAN	56.584.800,00	11.275.000,00	19,93	-	11.275.000,00
	UPT PUSKESMAS KALAHUEN	61.598.000,00	30.000.000,00	48,70	-	30.000.000,00
	KEPALA UPT PUSKESMAS BANTAI BAMBURE	-	-	0,00	-	0,00
	UPT PUSKESMAS PATAS I	111.618.000,00	92.318.000,00	82,71	-	92.318.000,00
	UPT PUSKESMAS PENDANG	53.255.000,00	20.380.000,00	38,27	-	20.380.000,00
	UPT PUSKESMAS BABAI	10.600.000,00	10.600.000,00	100,00	-	10.600.000,00
	UPT PUSKESMAS BANGKUANG	68.110.000,00	12.400.000,00	18,21	-	12.400.000,00
	UPT PUSKESMAS MENGKATIP	98.362.000,00	65.637.180,00	66,73	-	65.637.180,00
	UPT PUSKESMAS JENAMAS	86.568.000,00	77.978.823,00	90,08	-	77.978.823,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	7.595.534.254,00	7.380.195.151,00	97,16	9.402.970.272,00	(2.022.775.121,00)
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	149.374.560,00	149.324.560,00	99,97	1.029.034.250,00	(879.709.690,00)
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-	0,00	4.084.661.094,00	(4.084.661.094,00)

AM



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun			Kenaikan/ (Penurunan)
			2025 (Rp)	(%)	2024 (Rp)	
6	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	313.940.600,00	266.316.900,00	84,83	-	266.316.900,00
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	784.990.219,00	703.039.959,00	89,56	878.540.000,00	(175.500.041,00)
8	DINAS SOSIAL	121.310.000,00	119.000.000,00	98,10	1.086.677.900,00	(967.677.900,00)
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	-	0,00	348.568.000,00	(348.568.000,00)
10	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	105.125.600,00	104.865.600,00	99,75	1.105.303.200,00	(1.000.437.600,00)
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.832.714.000,00	2.820.113.999,00	99,56	636.720.100,00	2.183.393.899,00
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	99.040.000,00	96.862.800,00	97,80	915.780.000,00	(818.917.200,00)
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	314.767.350,00	202.492.293,00	64,33	-	202.492.293,00
14	DINAS PERHUBUNGAN	226.386.000,00	219.964.629,00	97,16	581.491.900,00	(361.527.271,00)
15	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	7.770.111.600,00	7.316.201.972,00	94,16	1.342.695.942,00	5.973.506.030,00
16	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	162.480.000,00	162.330.000,00	99,91	137.743.000,00	24.587.000,00
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	449.500.000,00	445.932.001,00	99,21	240.500.000,00	205.432.001,00
18	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	537.373.600,00	534.047.400,00	99,38	70.159.000,00	463.888.400,00
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	180.650.000,00	173.072.004,00	95,81	397.449.000,00	(224.376.996,00)
20	DINAS PERIKANAN	108.894.750,00	108.894.750,00	100,00	0	108.894.750,00
21	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	221.099.850,00	219.600.000,00	99,32	490.850.000,00	(271.250.000,00)
22	SEKRETARIAT DAERAH	4.810.636.920,00	4.776.345.466,00	99,29	2.983.573.268,00	1.792.772.198,00
23	SEKRETARIAT DPRD	3.305.751.400,00	3.243.957.588,00	98,13	4.392.683.600,00	(1.148.726.012,00)
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,	369.348.800,00	356.233.552,00	96,45	718.126.576,00	(361.893.024,00)

AM



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun			Kenaikan/ (Penurunan)
			2025 (Rp)	(%)	2024 (Rp)	
	RISET DAN INOVASI DAERAH					
25	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	11.121.395.760,00	10.665.942.744,00	95,90	24.032.292.000,00	(13.366.349.256,00)
26	BADAN PENDAPATAN DAERAH	857.457.040,00	814.960.020,00	95,04	-	814.960.020,00
27	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	878.897.670,00	796.555.848,00	90,63	278.050.250,00	518.505.598,00
28	INSPEKTORAT DAERAH	355.027.900,00	335.448.000,00	94,48	1.752.339.200,00	(1.416.891.200,00)
29	KECAMATAN DUSUN HILIR	179.080.000,00	171.237.380,00	95,62	110.655.000,00	60.582.380,00
30	KECAMATAN DUSUN SELATAN	208.800.000,00	208.054.033,00	99,64	180.596.900,00	27.457.133,00
31	KECAMATAN DUSUN UTARA	361.125.000,00	345.265.999,00	95,61	112.357.000,00	232.908.999,00
32	KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI	437.732.500,00	426.219.999,00	97,37	450.906.625,00	(24.686.626,00)
33	KECAMATAN JENAMAS	233.510.400,00	248.450.000,00	106,40	262.072.300,00	(13.622.300,00)
34	KECAMATAN KARAU KUALA	327.684.000,00	319.794.950,00	97,59	369.718.000,00	(49.923.050,00)
35	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	433.962.000,00	423.142.520,00	97,51	175.797.000,00	247.345.520,00
Jumlah		54.753.632.158,50	50.944.552.172,00	93,04	76.322.201.311,00	(25.377.649.139,00)

Rincian belanja modal peralatan mesin per SKPD secara lengkap dan rinci dapat dilihat pada **Lampiran 2**

5.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

31 Desember 2025
172.512.642.353,00

31 Desember 2024
146.211.601.103,80

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp172.512.642.353,00 atau 97,48% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp176.967.028.701,00. Jika dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp146.211.601.103,80 maka realisasi TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp26.301.041.249,20 atau 17,99%, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.46 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun			Kenaikan/ (Penurunan)
			2025 (Rp)	(%)	2024 (Rp)	
I	II	III	IV	V	VI	VII
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	172.763.028.480,00	168.467.170.853,00	97,51	145.343.143.103,80	23.124.027.749,20
2	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	4.104.000.221,00	4.045.471.500,00	98,57	868.458.000,00	3.177.013.500,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		176.967.028.701,00	172.512.642.353,00	97,48	146.211.601.103,80	26.301.041.249,20



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Rincian belanja modal Gedung dan Bangunan sebagai berikut.

Tabel. 5.1.47 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per SKPD

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun			Kenaikan/ (Penurunan)
			2025 (Rp)	(%)	2024 (Rp)	
I	II	III	IV	V	VI	VII
I.	BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG	172.763.028.480,00	168.467.170.853,00	97,51	145.343.143.103,80	23.124.027.749,20
1.	BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG KANTOR	160.363.901.480,00	156.479.622.553,00	97,58	110.871.479.403,80	45.608.143.149,20
	DINAS KESEHATAN	11.967.250.000,00	11.803.265.000,00	98,63	14.341.544.544,00	(2.538.279.544,00)
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	137.465.513.500,00	133.865.181.553,00	97,38	62.048.430.865,80	71.816.750.687,20
	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	2.636.835.500,00	2.636.060.500,00	99,97	3.937.849.397,00	(1.301.788.897,00)
	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	1.431.650.200,00	1.423.500.000,00	99,43	0,00	1.423.500.000,00
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	0,00	0,00	449.700.000,00	(449.700.000,00)
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0,00	0,00	0,00	2.745.850.000,00	(2.745.850.000,00)
	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	411.140.000,00	410.700.000,00	99,89	310.100.000,00	100.600.000,00
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0,00	0,00	0,00	240.000.000,00	(240.000.000,00)
	DINS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	177.207.500,00	177.000.000,00	99,88	0,00	177.000.000,00
	DINAS PERHUBUNGAN	648.254.750,00	647.337.500,00	99,86	1.121.665.000,00	(474.327.500,00)
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	0,00	0,00	1.835.000.000,00	(1.835.000.000,00)
	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	0,00	0,00	0,00	1.651.776.000,00	(1.651.776.000,00)
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0,00	0,00	0,00	177.900.000,00	(177.900.000,00)
	DINAS PERIKANAN	49.868.000,00	49.700.000,00	99,66	0,00	49.700.000,00
	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0,00	0,00	0,00	199.780.000,00	(199.780.000,00)
	SEKRETARIAT DAERAH	243.850.000,00	243.502.500,00	99,86	627.400.000,00	(383.897.500,00)
	SEKRETARIAT DPRD	0,00	0,00	0,00	4.372.000.000,00	(4.372.000.000,00)
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.163.510.230,00	5.054.775.500,00	97,89	16.169.317.019,00	(11.114.541.519,00)
	KECAMATAN DUSUN SELATAN	0,00	0,00	0,00	331.950.000,00	(331.950.000,00)
	KECAMATAN DUSUN UTARA	0,00	0,00	0,00	80.674.578,00	(80.674.578,00)
	KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI	0,00	0,00	0,00	146.000.000,00	(146.000.000,00)
	KECAMATAN JENAMAS	168.821.800,00	168.600.000,00	99,87	84.542.000,00	84.058.000,00
2.	BELANJA MODAL BANGUNAN GUDANG	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DINAS SOSIAL	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	BELANJA MODAL BANGUNAN KESEHATAN	1.400.000.000,00	1.395.492.000,00	99,68	786.950.000,00	608.542.000,00
	DINAS KESEHATAN	0,00	0,00	0,00	786.950.000,00	(786.950.000,00)
	RSUD JARAGA SASAMEH	1.400.000.000,00	1.395.492.000,00	99,68	0,00	1.395.492.000,00
4.	BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH	591.840.000,00	584.375.000,00	98,74	49.870.000,0000	534.505.000,00
	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0,00	0,00	0,00	49.870.000,00	(49.870.000,00)
	KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI	591.840.000,00	584.375.000,00	98,74	0,00	584.375.000,00
5.	BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN	8.949.360.000,00	8.627.594.300,00	96,40	18.673.732.700,00	(10.046.138.400,00)
	DINAS PENDIDIKAN	8.949.360.000,00	8.627.594.300,00	96,40	18.673.732.700,00	(10.046.138.400,00)



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun			Kenaikan/ (Penurunan)
			2025 (Rp)	(%)	2024 (Rp)	
I	II	III	IV	V	VI	VII
6.	BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT OLAH RAGA	134.617.500,00	134.400.000,00	99,84	0,00	134.400.000,00
	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	134.617.500,00	134.400.000,00	99,84	0,00	134.400.000,00
7	BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/ KOPERASI/PASAR	177.272.000,00	177.072.000,00	99,89	0,00	177.072.000,00
	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	177.272.000,00	177.072.000,00	99,89	0,00	177.072.000,00
8.	BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG GARASI/POOL	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	35.000.000,00	0,00
	KECAMATAN KARAU KUALA	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	35.000.000,00	0,00
9	BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA	401.037.500,00	393.300.000,00	98,07	14.756.200.000,00	(14.362.900.000,00)
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0,00	0,00	0,00	14.733.700.000,00	(14.733.700.000,00)
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	381.037.500,00	373.300.000,00	97,97	0,00	373.300.000,00
	KECAMATAN DUSUN HILIR	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	(22.500.000,00)
	KECAMATAN KARAU KUALA	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00	20.000.000,00
10.	BELANJA MODAL BANGUNAN PARKIR	650.000.000,00	640.315.000,00	98,51	0,00	640.315.000,00
	UPT RSUD JARAGA SASAMEH	650.000.000,00	640.315.000,00	98,51	0,00	640.315.000,00
11.	BELANJA MODAL TAMAN	0,00	0,00	0,00	169.911.000,00	(169.911.000,00)
	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	0,00	0,00	0,00	169.911.000,00	(169.911.000,00)
II.	BELANJA MODAL TUGU TITIK KONTROL/PASTI	4.104.000.221,00	4.045.471.500,00	98,57	868.458.000,00	3.177.013.500,00
12.	BELANJA MODAL PAGAR	4.104.000.221,00	4.045.471.500,00	98,57	868.458.000,00	3.177.013.500,00
	DINAS PENDIDIKAN	2.154.000.000,00	2.135.181.500,00	99,13	599.220.000,00	1.535.961.500,00
	DINAS KESEHATAN	0,00	0,00	0,00	159.348.000,00	(159.348.000,00)
	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0,00	0,00	0,00	109.890.000,00	(109.890.000,00)
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	600.000.068,00	586.000.000,00	97,67	0,00	586.000.000,00
	SEKRETARIAT DAERAH	150.000.017,00	149.790.000,00	99,86	0,00	149.790.000,00
	SEKRETARIAT DPRD	1.200.000.136,00	1.174.500.000,00	97,87	0,00	1.174.500.000,00
III	BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN BLUD	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN BLUD	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DINAS KESEHATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPT PUSKESMAS BUNTOK	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	176.967.028.701,00	172.512.642.353,00	97,48	146.211.601.103,80	26.301.041.249,20

5.1.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

31 Desember 2025
287.563.196.250,00

31 Desember 2024
309.157.085.006,10

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp287.563.196.250,00 atau 99,06% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp290.285.910.955,00. Jika dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp309.157.085.006,10 maka realisasi TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp21.593.888.756,10 atau (6,98)% dengan rincian sebagai berikut.



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.1.48. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun			Kenaikan/ (Penurunan)
			2025 (Rp)	(%)	2024 (Rp)	
I	II	III	IV	V	VI	VII
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	221.583.978.732,00	219.803.233.750,00	99,20	235.885.331.474,00	(16.082.097.724,00)
2	Belanja Modal Bangunan Air	48.271.932.223,00	47.450.875.500,00	98,30	45.233.289.533,10	2.217.585.966,90
3	Belanja Modal Instalasi	7.050.000.000,00	7.038.889.000,00	99,84	16.510.200.000,00	(9.471.311.000,00)
4	Belanja Modal Jaringan	13.380.000.000,00	13.270.198.000,00	99,18	11.528.263.999,00	1.741.934.001,00
	Jumlah	290.285.910.955,00	287.563.196.250,00	99,06	309.157.085.006,10	(21.593.888.756,10)

Tabel 5.1.49. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Per SKPD

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun			Kenaikan/ (Penurunan)
			2025 (Rp)	(%)	2024 (Rp)	
I	II	III	IV	V	VI	VII
I	BELANJA MODAL JALAN DAN JEMBATAN	221.583.978.732,00	219.803.233.750,00	99,20	235.885.331.474,00	(16.082.097.724,00)
1.	BELANJA MODAL JALAN KABUPATEN	168.192.733.232,00	166.673.027.650,00	99,10	164.741.587.107,00	1.931.440.543,00
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	155.711.958.232,00	154.198.109.650,00	99,03	142.253.967.790,00	11.944.141.860,00
	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	9.251.845.000,00	9.246.362.000,00	99,94	22.487.619.317,00	(13.241.257.317,00)
	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	3.228.930.000,00	3.228.556.000,00	99,99	0,00	3.228.556.000,00
2.	BELANJA MODAL JALAN KHUSUS	0,00	0,00	0,00	3.216.929.000,00	(3.216.929.000,00)
	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	0,00	0,00	0,00	2.792.050.000,00	(2.792.050.000,00)
	DINAS SOSIAL	0,00	0,00	0,00	424.879.000,00	(424.879.000,00)
3.	BELANJA MODAL JALAN LAINNYA	49.904.082.500,00	49.644.483.400,00	99,48	32.070.496.605,00	17.573.986.795,00
	DINAS PENDIDIKAN	722.000.000,00	720.432.000,00	99,78	1.522.850.000,00	(802.418.000,00)
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	48.982.082.500,00	48.724.051.400,00	99,47	26.706.196.605,00	22.017.854.795,00
	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	0,00	0,00	0,00	3.238.950.000,00	(3.238.950.000,00)
	KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI	0,00	0,00	0,00	402.500.000,00	(402.500.000,00)
	KECAMATAN JENAMAS	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	200.000.000,00	0,00
4.	BELANJA MODAL JEMBATAN PADA JALAN KABUPATEN	3.487.163.000,00	3.485.722.700,00	99,96	32.693.718.762,00	(29.207.996.062,00)
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.487.163.000,00	3.485.722.700,00	99,96	32.693.718.762,00	(29.207.996.062,00)
5.	BELANJA MODAL JEMBATAN LAINNYA	0,00	0,00	0,00	3.162.600.000,00	(3.162.600.000,00)
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0,00	0,00	0,00	3.162.600.000,00	(3.162.600.000,00)
II	BELANJA MODAL BANGUNAN AIR	48.271.932.223,00	47.450.875.500,00	98,30	45.233.289.533,10	2.217.585.966,90
6.	BELANJA MODAL BANGUNAN PEMBAWA IRIGASI	15.260.889.600,00	14.936.864.600,00	97,88	12.362.095.154,30	2.574.769.445,70
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	15.260.889.600,00	14.936.864.600,00	97,88	11.948.360.154,30	2.988.504.445,70
	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	0,00	0,00	0,00	413.735.000,00	(413.735.000,00)
7.	BELANJA MODAL BANGUNAN PELENGKAP IRIGASI	2.687.625.423,00	2.671.816.000,00	99,41	0,00	2.671.816.000,00
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2.460.816.000,00	2.448.316.000,00	99,49	0,00	2.448.316.000,00



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun			Kenaikan/ (Penurunan)
			2025 (Rp)	(%)	2024 (Rp)	
I	II	III	IV	V	VI	VII
	DINAS PERIKANAN	226.809.423,00	223.500.000,00	98,54	0,00	223.500.000,00
8	BELANJA MODAL BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	16.948.067.200,00	16.474.918.700,00	97,21	26.655.054.878,80	(10.180.136.178,80)
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	16.714.663.000,00	16.241.778.700,00	97,17	26.562.604.878,80	(10.320.826.178,80)
	DINAS PERHUBUNGAN	233.404.200,00	233.140.000,00	99,89	92.450.000,00	140.690.000,00
9.	BELANJA MODAL BANGUNAN PELENGKAP AIR BERSIH/AIR BAKU	0,00	0,00	0,00	887.700.000,00	(887.700.000,00)
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0,00	0,00	0,00	768.000.000,00	(768.000.000,00)
	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	0,00	0,00	0,00	69.800.000,00	(69.800.000,00)
	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0,00	0,00	0,00	49.900.000,00	(49.900.000,00)
10.	BELANJA MODAL BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU LAINNYA	200.000.000,00	199.875.000,00	99,94	0,00	199.875.000,00
	UPT RSUD JARAGA SASAMEH	200.000.000,00	199.875.000,00	99,94	0,00	199.875.000,00
11	BELANJA MODAL BANGUNAN PENGAMAN AIR KOTOR	1.040.250.000,00	1.037.983.200,00	99,78	0,00	1.037.983.200,00
	DINAS KESEHATAN	1.040.250.000,00	1.037.983.200,00	99,78	0,00	1.037.983.200,00
12	BELANJA MODAL BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	12.135.100.000,00	12.129.418.000,00	99,95	5.328.439.500,00	6.800.978.500,00
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	12.135.100.000,00	12.129.418.000,00	99,95	5.128.539.500,00	7.000.878.500,00
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	0,00	0,00	199.900.000,00	(199.900.000,00)
III	BELANJA MODAL INSTALASI	7.050.000.000,00	7.038.889.000,00	99,84	16.510.200.000,00	(9.471.311.000,00)
13	BELANJA MODAL INSTALASI AIR BERSIH/AIR BAKU LAINNYA	7.050.000.000,00	7.038.889.000,00	99,84	14.598.700.000,00	(7.559.811.000,00)
	DINAS KESEHATAN	0,00	0,00	0,00	1.455.000.000,00	(1.455.000.000,00)
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	7.050.000.000,00	7.038.889.000,00	99,84	13.143.700.000,00	(6.104.811.000,00)
14	BELANJA MODAL INSTALASI AIR KOTOR LAINNYA	0,00	0,00	0,00	913.000.000,00	(913.000.000,00)
	DINAS KESEHATAN	0,00	0,00	0,00	913.000.000,00	(913.000.000,00)
15	BELANJA MODAL INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA DIESEL (PLTD)	0,00	0,00	0,00	998.500.000,00	(998.500.000,00)
	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	0,00	998.500.000,00	(998.500.000,00)
IV	BELANJA MODAL JARINGAN	13.380.000.000,00	13.270.198.000,00	99,18	11.528.263.999,00	1.741.934.001,00
16	BELANJA MODAL JARINGAN INDUK DISTRIBUSI	12.955.000.000,00	12.845.678.000,00	99,16	11.528.263.999,00	1.317.414.001,00
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	12.955.000.000,00	12.845.678.000,00	99,16	11.520.199.999,00	1.325.478.001,00
	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	0,00	0,00	0,00	8.064.000,00	(8.064.000,00)
17	BELANJA MODAL JARINGAN LISTRIK LAINNYA	425.000.000,00	424.520.000,00	99,89	0,00	424.520.000,00
	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	425.000.000,00	424.520.000,00	99,89	0,00	424.520.000,00
	Jumlah	290.285.910.955,00	287.563.196.250,00	99,06	309.157.085.006,10	(21.593.888.756,10)



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

5.1.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2025 **31 Desember 2024**
218.199.996,00 **44.337.204,00**

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp218.199.996,00 atau 98,59% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp221.329.000,00. Jika dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp44.337.204,00 maka realisasi TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp173.862.792,00 atau 392,14% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.50. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun			Kenaikan/ (Penurunan)
			2025 (Rp)	(%)	2024 (Rp)	
I	II	III	IV	V	VI	VII
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	221.329.000,00	218.199.996,00	98,59	25.185.204,00	193.014.792,00
2	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	19.152.000,00	(19.152.000,00)
Jumlah		221.329.000,00	218.199.996,00	98,59	44.337.204,00	173.862.792,00

Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Per SKPD sebagai berikut.

Tabel 5.1.51. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Per SKPD

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun			Kenaikan/ Penurunan
			2025 (Rp)	(%)	2024 (Rp)	
I	II	III	IV	V	VI	VII
1	BELANJA MODAL BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK LAINNYA/BELANJA MODAL BUKU UMUM	220.403.000,00	218.199.996,00	99,00	0,00	218.199.996,00
	DINAS PENDIDIKAN	220.403.000,00	218.199.996,00	99,00	0,00	218.199.996,00
2	BELANJA MODAL BUKU MATEMATIKA DAN PENGETAHUAN ALAM	926.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	926.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	BELANJA MODAL BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK LAINNYA	0,00	0,00	0,00	25.185.204,00	(25.185.204,00)
	DINAS PENDIDIKAN	0,00	0,00	0,00	25.185.204,00	(25.185.204,00)
4	BELANJA MODAL BARANG BERCORAK Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	0,00	0,00	0,00	19.152.000,00	(19.152.000,00)
	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	0,00	0,00	0,00	19.152.000,00	(19.152.000,00)
Jumlah		221.329.000,00	218.199.996,00	98,59	44.337.204,00	173.862.792,00

5.1.2.2.6. Belanja Modal Aset Lainnya

31 Desember 2025 **31 Desember 2024**
3.088.787.000,00 **441.840.000,00**

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.088.787.000,00 atau 99,98% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp3.089.195.000,00. Jika dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp441.840.000,00 maka realisasi TA 2025 mengalami kenaikan belanja sebesar Rp2.646.947.000,00 atau 599,07% dengan rincian sebagai berikut.



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Per SKPD sebagai berikut.

Tabel 5.1.52. Belanja Modal Aset Lainnya Per SKPD

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun			Kenaikan/ (Penurunan)
			2025 (Rp)	(%)	2024 (Rp)	
I	II	III	IV	V	VI	VII
1	BELANJA MODAL ASET TIDAK BERWUJUD-SOFTWARE	3.089.195.000,00	3.088.787.000,00	99,99	441.840.000,00	2.646.947.000,00
	UPT RSUD JARAGA SASAMEH	2.442.000.000,00	2.442.000.000,00	100,00	0,00	2.442.000.000,00
	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	0,00	0,00	0,00	148.840.000,00	(148.840.000,00)
	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0,00	0,00	0,00	149.000.000,00	(149.000.000,00)
	SEKRETARIAT DPRD	0,00	0,00	0,00	144.000.000,00	(144.000.000,00)
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	75.000.000,00	74.592.000,00	99,46	0,00	74.592.000,00
	BADAN PENDAPATAN DAERAH	572.195.000,00	572.195.000,00	100,00	0,00	572.195.000,00
	Jumlah	3.089.195.000,00	3.088.787.000,00	99,99	441.840.000,00	2.646.947.000,00

5.1.2.3. Belanja Tak Terduga

31 Desember 2025

5.522.666.080,00

31 Desember 2024

423.718.824,00

Belanja Tak Terduga dialokasikan dalam rangka penanganan atau penanggulangan akibat dari bencana alam, bencana sosial dan lain-lain. Realisasi Belanja Tak Terduga Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp5.522.666.080,00 atau 53,22% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp10.377.625.000,00. Jika dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp423.718.824,00 maka realisasi TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp5.098.947.256,00 atau 1203,38%, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.53. Belanja Tak Terduga

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun			Kenaikan/ (Penurunan)
			2025 (Rp)	(%)	2024 (Rp)	
I	II	III	IV	V	VI	VII
1	UPT RSUD JARAGA SASAMEH	377.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. BARSEL	10.000.000.000,00	5.522.666.080,00	55,23	423.718.824,00	5.098.947.256,00
	Jumlah	10.377.625.000,00	5.522.666.080,00	53,22	423.718.824,00	5.098.947.256,00

5.1.2.4. Transfer

31 Desember 2025

160.627.622.772,00

31 Desember 2024

212.568.131.276,00

Transfer terdiri dari Transfer Bagi Hasil Pendapatan dan Transfer Bantuan Keuangan. Realisasi Transfer TA 2025 sebesar Rp160.627.622.772,00 atau 86,37% dari anggaran sebesar Rp185.974.208.769,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp212.568.131.276,00, maka realisasi kegiatan mengalami penurunan sebesar Rp51.940.508.504,00 atau (24,43)%. Transfer terdiri dari Transfer Bagi Hasil Pendapatan dan Transfer Bantuan Keuangan, dengan rincian sebagai berikut.

Catatan Atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Rp212.568.131.276,00, maka realisasi kegiatan mengalami penurunan sebesar Rp53.320.999.316,00 atau 25,08% dari realisasi Tahun Anggaran 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.56. Transfer Bantuan Keuangan

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
I	II	III	IV	V	VI	VII
1	Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Provinsi	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00	10.000.000,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	(40.000.000,00)
3	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	177.178.143.000,00	159.237.131.960,00	89,87	212.528.131.276,00	(53.290.999.316,00)
	Jumlah	177.188.143.000,00	159.247.131.960,00	89,87	212.568.131.276,00	(53.320.999.316,00)

5.1.2.4.2.1. Belanja Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	<u>31 Desember 2025</u> 10.000.000,00	<u>31 Desember 2024</u> 0,00
---	--	---

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp10.000.000,00 atau 100% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp10.000.000,00. Jika dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp0,00 realisasi kegiatan mengalami penambahan sebesar Rp10.000.000,00. Belanja tersebut berupa Iuran forum Sekretaris Daerah se-Indonesia

5.1.2.4.2.2. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	<u>31 Desember 2025</u> 159.237.131.960,00	<u>31 Desember 2024</u> 212.568.131.276,00
---	---	---

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp159.237.131.960,00 atau 89,87% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp177.178.143.000,00. Jika dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp212.568.131.276,00, maka realisasi kegiatan mengalami penurunan sebesar Rp53.330.999.316,00 atau 25,09%. Transfer ini merupakan realisasi belanja Alokasi Dana Desa dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa sebesar Rp106.721.343.560,00 dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp108.000.000.000,00 dengan rincian di bawah, sedangkan Realisasi Belanja Dana Desa pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah sebesar Rp52.515.788.400,00 dari Anggaran setelah Perubahan sebesar Rp69.178.143.000,00 dengan Rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.57. Transfer Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa

No	Kecamatan	Desa	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2025	Realisasi 2024
I	II	III	V	VI	VII
1	Dusun Selatan	Baru	1.266.347.000,00	952.247.000,00	1.012.776.000,00
2	Dusun Selatan	Danau Ganting	808.385.000,00	528.604.400,00	782.460.000,00
3	Dusun Selatan	Mangaris	649.521.000,00	408.168.600,00	645.016.000,00



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

No	Kecamatan	Desa	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2025	Realisasi 2024
I	II	III	V	VI	VII
4	Dusun Selatan	Pamangka	685.881.000,00	466.940.400,00	691.484.000,00
5	Dusun Selatan	Teluk Telaga	626.952.000,00	413.931.000,00	649.306.000,00
6	Dusun Selatan	Danau Masura	661.043.000,00	510.745.400,00	681.853.000,00
7	Dusun Selatan	Lembeng	676.178.000,00	478.260.800,00	721.229.000,00
8	Dusun Selatan	Tanjung Jawa	851.823.000,00	565.974.600,00	901.155.000,00
9	Dusun Selatan	Murung Paken	611.289.000,00	341.090.400,00	630.913.000,00
10	Dusun Selatan	Telang Andrau	702.819.000,00	459.489.000,00	752.935.000,00
11	Dusun Selatan	Penda Asam	847.596.000,00	448.657.600,00	931.314.000,00
12	Dusun Selatan	Sababilah	782.835.000,00	522.005.400,00	978.392.000,00
13	Dusun Selatan	Mabuan	651.530.000,00	500.573.600,00	950.653.000,00
14	Dusun Selatan	Dangka	629.382.000,00	388.653.600,00	686.320.000,00
15	Dusun Selatan	Pamait	641.972.000,00	641.972.000,00	677.835.000,00
16	Dusun Selatan	Danau Sadar	699.722.000,00	639.209.600,00	994.141.000,00
17	Dusun Selatan	Pararapak	764.228.000,00	414.728.200,00	431.107.400,00
18	Dusun Selatan	Muara Talang	656.274.000,00	406.062.600,00	818.983.000,00
19	Dusun Selatan	Sanggu	684.626.000,00	684.626.000,00	1.083.774.000,00
20	Dusun Selatan	Muara Ripung	608.286.000,00	445.057.800,00	628.896.000,00
21	Dusun Selatan	Teluk Mampun	672.416.000,00	623.005.400,00	805.238.000,00
22	Dusun Selatan	Madara	961.115.000,00	591.536.600,00	676.061.000,00
23	Dusun Selatan	Kalahien	959.487.000,00	699.317.400,00	763.901.000,00
24	Dusun Selatan	Tetei Lanan	572.850.000,00	439.168.800,00	671.415.000,00
25	Dusun Utara	Rampa Mea	1.034.933.000,00	775.674.600,00	828.135.000,00
26	Dusun Utara	Tamparak Layung	978.221.000,00	753.004.600,00	849.577.000,00
27	Dusun Utara	Tamparak	718.340.000,00	453.786.800,00	707.192.000,00
28	Dusun Utara	Hulu Tampang	831.950.000,00	589.784.600,00	831.425.000,00
29	Dusun Utara	Hingan	698.049.000,00	572.889.000,00	748.074.000,00
30	Dusun Utara	Majundre	680.247.000,00	424.492.800,00	843.735.000,00
31	Dusun Utara	Maruga	711.242.000,00	494.541.800,00	750.535.000,00
32	Dusun Utara	Bundar	828.206.000,00	531.142.400,00	825.605.000,00
33	Dusun Utara	Panarukan	771.273.000,00	482.209.200,00	770.567.020,00
34	Dusun Utara	Danau Bambure	714.648.000,00	486.616.800,00	755.725.000,00
35	Dusun Utara	Marawan Baru	713.562.000,00	658.366.200,00	794.377.000,00
36	Dusun Utara	Gunung Rantau	989.111.000,00	747.942.600,00	1.162.772.000,00
37	Dusun Utara	Reong	858.644.000,00	609.152.600,00	946.286.000,00
38	Dusun Utara	Marawan Lama	951.081.000,00	615.520.800,00	831.228.000,00
39	Dusun Utara	Sungai Telang	677.013.000,00	470.688.000,00	1.511.177.000,00
40	Dusun Utara	Tarusan	1.022.445.000,00	650.607.000,00	1.205.669.656,00
41	Dusun Utara	Talekoi	664.167.000,00	386.047.200,00	927.446.000,00
42	Dusun Utara	Bantai Bambure	939.104.000,00	713.810.800,00	918.935.000,00

Handwritten signature



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

No	Kecamatan	Desa	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2025	Realisasi 2024
I	II	III	V	VI	VII
43	Gn. Bintang Awai	Muara Singan	1.040.139.000,00	827.449.000,00	725.432.000,00
44	Gn. Bintang Awai	Ngurit	1.019.480.000,00	679.229.000,00	751.949.000,00
45	Gn. Bintang Awai	Patas I	1.035.213.000,00	799.489.000,00	938.002.000,00
46	Gn. Bintang Awai	Tabak Kanilan	1.006.893.000,00	691.653.600,00	795.175.000,00
47	Gn. Bintang Awai	Ugang Sayu	923.621.000,00	576.600.800,00	745.332.000,00
48	Gn. Bintang Awai	Sire	713.246.000,00	447.506.600,00	717.095.000,00
49	Gn. Bintang Awai	Muka Haji	685.274.000,00	444.266.600,00	696.795.000,00
50	Gn. Bintang Awai	Kayumban	767.315.000,00	507.876.800,00	791.708.000,00
51	Gn. Bintang Awai	Patas II	628.035.000,00	405.610.200,00	680.057.000,00
52	Gn. Bintang Awai	Marga Jaya	596.748.000,00	391.593.000,00	629.532.000,00
53	Gn. Bintang Awai	Malungai Raya	876.581.000,00	594.209.000,00	1.062.788.000,00
54	Gn. Bintang Awai	Gagutur	957.587.000,00	835.335.800,00	829.502.000,00
55	Gn. Bintang Awai	Wungkur Baru	608.259.000,00	437.500.800,00	627.908.000,00
56	Gn. Bintang Awai	Bintang Ara	911.207.000,00	566.349.800,00	813.377.000,00
57	Gn. Bintang Awai	Palu Rejo	839.421.000,00	562.367.400,00	805.425.000,00
58	Gn. Bintang Awai	Sarimbuah	599.859.000,00	599.859.000,00	931.237.000,00
59	Gn. Bintang Awai	Ruhing Raya	581.667.000,00	419.124.600,00	643.627.000,00
60	Gn. Bintang Awai	Baruang	621.198.000,00	379.353.600,00	672.538.000,00
61	Gn. Bintang Awai	Sei Paken	683.135.000,00	499.466.600,00	675.693.000,00
62	Gn. Bintang Awai	Wayun	685.871.000,00	487.422.200,00	993.549.000,00
63	Gn. Bintang Awai	Bipak Kali	1.276.124.000,00	965.040.000,00	1.001.740.000,00
64	Karau Kuala	Bintang Kurung	1.301.894.000,00	844.159.400,00	1.076.429.000,00
65	Karau Kuala	Teluk Sampudau	698.412.000,00	467.995.200,00	680.313.000,00
66	Karau Kuala	Teluk Betung	1.031.720.000,00	970.201.400,00	981.716.000,00
67	Karau Kuala	Salat Baru	623.157.000,00	466.551.600,00	759.855.000,00
68	Karau Kuala	Tampijak	714.798.000,00	714.798.000,00	876.189.000,00
69	Karau Kuala	Janggi	677.784.000,00	677.784.000,00	923.515.000,00
70	Karau Kuala	Talio	821.406.000,00	605.409.000,00	1.219.368.000,00
71	Karau Kuala	Babai	1.281.332.000,00	1.281.332.000,00	1.326.029.000,00
72	Karau Kuala	Muara Arai	717.278.000,00	470.244.800,00	1.012.382.000,00
73	Karau Kuala	Malitin	688.338.000,00	433.435.200,00	845.523.000,00
74	Dusun Hilir	Batampang	954.345.000,00	613.414.200,00	863.108.000,00
75	Dusun Hilir	Teluk Timbau	724.916.000,00	724.916.000,00	829.035.000,00
76	Dusun Hilir	Lehai	737.411.000,00	457.254.200,00	1.166.996.000,00
77	Dusun Hilir	Damparan	898.212.000,00	898.212.000,00	1.305.019.000,00
78	Dusun Hilir	Batilap	994.424.000,00	994.424.000,00	816.546.000,00
79	Dusun Hilir	Sungai Jaya	1.174.934.000,00	1.174.934.000,00	890.394.000,00
80	Dusun Hilir	Kalanis	874.458.000,00	865.458.000,00	1.333.690.000,00
81	Dusun Hilir	Mangkatir	700.161.000,00	700.161.000,00	692.243.000,00



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

No	Kecamatan	Desa	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2025	Realisasi 2024
I	II	III	V	VI	VII
82	Dusun Hilir	Mahajandau	905.210.000,00	905.210.000,00	1.283.633.000,00
83	Jenamas	Tampulang	820.130.000,00	820.130.000,00	767.824.000,00
84	Jenamas	Tabatan	732.894.000,00	732.894.000,00	827.081.000,00
85	Jenamas	Rantau Bahuang	678.458.000,00	678.458.000,00	866.279.000,00
86	Jenamas	Rangga Ilung	914.805.000,00	914.805.000,00	1.055.163.000,00
Jumlah Dana Desa			69.178.143.000,00	52.515.788.400,00	73.702.409.076,00
Jumlah Alokasi Dana Desa			108.000.000.000,00	106.721.343.560,00	138.865.722.200,00

5.1.3. Pembiayaan Netto

31 Desember 2025
149.500.480.030,11

31 Desember 2024
97.969.438.914,19

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah dengan tujuan untuk menutup antara selisih pendapatan dan belanja, terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Realisasi Pembiayaan Netto untuk TA 2025 sebesar Rp149.500.480.030,11 atau 100,91% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp148.155.484.644,77. Jika dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp97.969.438.914,19, maka realisasi mengalami kenaikan sebesar Rp51.531.041.115,92 atau 52,60% dari realisasi TA 2024.

5.1.3.1. Penerimaan Pembiayaan

31 Desember 2025
164.115.933.746,11

31 Desember 2024
110.419.438.914,19

Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Penggunaan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) Tahun Lalu. Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2025 sebesar Rp164.115.933.746,11 atau 99,95% dari anggaran sebesar Rp164.192.653.173,77. Jika dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp110.419.438.914,19, maka realisasi mengalami kenaikan sebesar Rp53.696.494.831,92 atau 48,63% dari realisasi TA 2024.

5.1.3.1.1. Penggunaan SiLPA Tahun Lalu.

31 Desember 2025
164.192.653.173,77

31 Desember 2024
110.419.438.914,19

Realisasi Penggunaan SiLPA Tahun Lalu Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp164.192.653.173,77 atau 100% dari anggaran sebesar Rp164.192.653.173,77. Jika dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp110.419.438.914,19, maka realisasi mengalami kenaikan sebesar Rp53.773.214.259,58 atau 48,70% dari realisasi TA 2024.

5.1.3.1.2. Koreksi SiLPA

31 Desember 2025
(76.719.427,66)

31 Desember 2024
0,00

Koreksi SiLPA merupakan koreksi atas saldo awal Sisa Dana BOSP-BOS Reguler Tahun Anggaran 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp76.719.427,66 dan Rp0,00 koreksi tersebut bersumber dari Koreksi saldo awal TA.2025 pada 33 SD, SMP dan SKB dengan rincian sebagai berikut.



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.1.58. Transfer Bantuan SiLPA Sisa Dana BOSP-BOS Reguler

No	Satuan Pendidikan	Kecamatan	Sekolah	Status	Jenis Anggaran	Koreksi Atas Saldo awal
1	SD Negeri Janggi	Karau Kuala	SD	NEGERI	Bosp Reguler	113,00
2	SD Negeri Tabatan Jaya (Sd Ini Ditutup Saldo Disetorkan Ke Kasda)	Jenamas	SD	NEGERI	Bosp Reguler	(29.353.727,47)
3	SMP Negeri 1 Dusun Selatan	Dusun Selatan	SMP	NEGERI	Bosp Reguler	(1.280.200,00)
4	SMP Negeri 3 Dusun Selatan	Dusun Selatan	SMP	NEGERI	Bosp Reguler	(928.660,00)
5	SMP Negeri Satu Atap 3 Dusun Selatan	Dusun Selatan	SMP	NEGERI	Bosp Reguler	(1.807.410,00)
6	SMP Negeri Satu Atap 4 Dusun Selatan	Dusun Selatan	SMP	NEGERI	Bosp Reguler	(80.270,00)
7	SMP Negeri Satu Atap 5 Dusun Selatan	Dusun Selatan	SMP	NEGERI	Bosp Reguler	(75.420,00)
8	SMP Negeri 3 Gunung Bintang Awai	Gunung B. Awai	SMP	NEGERI	Bosp Reguler	(960.740,00)
9	SMP Negeri Satu Atap 1 Gunung Bintang Awai	Gunung B. Awai	SMP	NEGERI	Bosp Reguler	(408.680,00)
10	SMP Negeri Satu Atap 2 Gunung Bintang Awai	Gunung B. Awai	SMP	NEGERI	Bosp Reguler	(75.420,00)
11	SMP Negeri Satu Atap 3 Gunung Bintang Awai	Gunung B. Awai	SMP	NEGERI	Bosp Reguler	(145.040,00)
12	SMP Negeri Satu Atap 4 Gunung Bintang Awai	Gunung B. Awai	SMP	NEGERI	Bosp Reguler	(143.530,00)
13	SMP Negeri Satu Atap 6 Gunung Bintang Awai	Gunung B. Awai	SMP	NEGERI	Bosp Reguler	(50.820,00)
14	SMP Negeri Satu Atap 7 Gunung Bintang Awai	Gunung B. Awai	SMP	NEGERI	Bosp Reguler	(43.790,00)
15	SMP Negeri 1 Dusun Utara	Dusun Utara	SMP	NEGERI	Bosp Reguler	(459.750,00)
16	SMP Negeri 2 Dusun Utara	Dusun Utara	SMP	NEGERI	Bosp Reguler	(114.340,00)
17	SMP Negeri 3 Dusun Utara	Dusun Utara	SMP	NEGERI	Bosp Reguler	(243.270,00)
18	SMP Negeri 4 Dusun Utara	Dusun Utara	SMP	NEGERI	Bosp Reguler	(313.400,00)
19	SMP Negeri Satu Atap 2 Dusun Utara	Dusun Utara	SMP	NEGERI	Bosp Reguler	(75.420,00)
20	SMP Negeri Satu Atap 3 Dusun Utara	Dusun Utara	SMP	NEGERI	Bosp Reguler	(72.980,00)
21	SMP Negeri Satu Atap 4 Dusun Utara	Dusun Utara	SMP	NEGERI	Bosp Reguler	(111.180,00)
22	SMP Negeri Satu Atap 6 Dusun Utara	Dusun Utara	SMP	NEGERI	Bosp Reguler	(160.550,00)
23	SMP Negeri Satu Atap 7 Dusun Utara	Dusun Utara	SMP	NEGERI	Bosp Reguler	(121.340,00)
24	SMP Negeri 1 Karau Kuala	Karau Kuala	SMP	NEGERI	Bosp Reguler	(823.073,19)
25	SMP Negeri Satu Atap 1 Karau Kuala	Karau Kuala	SMP	NEGERI	Bosp Reguler	(145.960,00)
26	SMP Negeri Satu Atap 2 Karau Kuala	Karau Kuala	SMP	NEGERI	Bosp Reguler	(1.114.010,00)
27	SMP Negeri Satu Atap 4 Dusun Hilir	Dusun Hilir	SMP	NEGERI	Bosp Reguler	(267.590,00)
28	SMP Negeri 1 Jenamas	Jenamas	SMP	NEGERI	Bosp Reguler	(206.770,00)
29	SMP Negeri 2 Jenamas	Jenamas	SMP	NEGERI	Bosp Reguler	(298.920,00)
30	SMP Negeri Satu Atap 1 Jenamas	Jenamas	SMP	NEGERI	Bosp Reguler	(145.960,00)
31	SMP Negeri Satu Atap 2 Jenamas	Jenamas	SMP	NEGERI	Bosp Reguler	(92.440,00)
32	SMP Negeri Satu Atap 3 Jenamas	Jenamas	SMP	NEGERI	Bosp Reguler	(150.680,00)
33	Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (Skb) Barito Selatan	Dusun Selatan	SKB	NEGERI	Bosp Reguler	(36.448.200,00)
Jumlah						(76.719.427,66)



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

5.1.3.1.3. Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	0,00	0,00

Realisasi Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) TA 2025 sebesar Rp0,00 dan TA 2024 Rp0,00 atau tidak terdapat Anggaran dan Realisasi Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB).

5.1.3.2. Pengeluaran Pembiayaan	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	14.615.453.716,00	12.450.000.000,00

Pengeluaran Pembiayaan merupakan realisasi pengeluaran untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah dan pembayaran pokok pinjaman yang telah jatuh tempo. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp14.615.453.716,00 dan Rp12.450.000.000,00.

Tabel 5.1.59. Pengeluaran Pembiayaan

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
I	II	III	IV	V	VI	VII
1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	12.300.000.000,00	(12.300.000.000,00)
2	Pembayaran Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	(150.000.000,00)
3	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Pendek	16.037.168.529,00	14.615.453.716,00	91,13	0,00	14.615.453.716,00
	Jumlah	16.037.168.529,00	14.615.453.716,00	91,13	12.450.000.000,00	2.165.453.716,00

5.1.3.2.1. Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	0,00	12.300.000.000,00

Realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp12.300.000.000,00. Penyertaan modal Tahun Anggaran 2024 yaitu pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.

5.1.3.2.2. Pembayaran Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	0,00	0,00

Pembayaran Pembayaran Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) Tahun Anggaran 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00. Atau tidak terdapat anggaran dan realisasi selama pada TA 2025.

5.1.3.2.3. Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	14.615.453.716,00	150.000.000,00

Realisasi Sisa Pembayaran Pekerjaan Tahun 2024 pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah dan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olah Raga Serta Pariwisata Realisasi Tahun Anggaran 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp14.615.453.716,00 dan Rp150.000.000,00 Sedangkan pada Tahun 2024 utang Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Pekerjaan Belanja Modal Lanjutan Bangunan Gedung Kantor



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

BPKAD pada kegiatan Pengeluaran Pembiayaan yang dilaksanakan oleh CV. MITRA UTAMA. Utang pembayaran pembangunan fisik melebihi tahun anggaran yang tidak tercatat pada neraca tahun 2024 yang di bayarkan pada tahun anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut

Tabel 5.1.60. Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

No	SKPD	Uraian	Jumlah (Rp)	
			Tahun 2025	Tahun 2024
I	II	III	IV	V
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembayaran Sisa Pekerjaan (100%) Pekerjaan Penataan Halaman dan Pagar Kantor Kecamatan G.B Awai a.n. CV. RHEMA AGUNG ANUGRAH Pusat Buntok. Berdasarkan 760/381.a/ADD.SPK-AMPL/XII/PUPR-2024.	199.800.000,00	0,00
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembayaran Sisa Pekerjaan 100% Pekerjaan Pembangunan Kolam Renang di stadion Soekarno - Hatta a.n. CV. HIPKA GROUP KALIMANTAN TENGAH Pusat Palangka Raya. Berdasarkan Nomor kontrak :764/PKT-211/02/SPK-BPP/XII/PUPR-2024	199.585.554,00	0,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembayaran 95% dan 5% Pekerjaan Pengamanan Tebing Jalan Desa Penda Asam (Longsor) a.n. CV. EKATAMA PRIMA KONSTRUKSI Pusat Kuala Kapuas .Berdasarkan Addendum Kontrak Nomor 760/515.a/ADD-KTRK-SDA/XII/PUPR-2024	260.980.900,00	0,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembayaran Sisa Pekerjaan (100%) Lanjutan Pembangunan Pagar Polres di Sabailah a.n. CV. SAMBA PUTA MANDIRI Pusat Palangka Raya. Berdasarkan Addendum kontrak nomor: 764/718/ADD.SPK-BPP/XII/PUPR-2024	199.800.000,00	0,00
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembayaran 95% dan 5% Pekerjaan Penanganan Longsor Sungai Barito Gg. Swarga Jl. Karau a.n. Rezeky Pusat Kuala Kapuas. Berdasarkan Addendum No760/523.a/ADD-KTRK-SDA/XII/PUPR-2024	630.956.223,00	0,00
6	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembayaran 95% dan 5% Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Saluran Irigasi Sawah Luau Kadiki Dusun Mantarem a.n. PT. ANUGRAH GENERASI BERSAMA Pusat Palangka Raya. Berdasarkan Addendum Kontrak Nomor 760/501.a/ADD-KTRK-SDA/XII/PUPR-2024	336.744.844,00	0,00
7	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembayaran Sisa Pekerjaan 100% Pekerjaan Rekonstruksi Jl. Pendang - Jl Propinsi - P.Raya (Ruas 091) (DBH SAWIT). Berdasarkan Addendum Kontrak I Nomor : 760/18/PF-74/ADD-KTRK-BM /XI/PUPR-2024.	2.522.000.000,00	0,00
8	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembayaran Sisa Pekerjaan 100% Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Jaya a.n. CV. SUMBER JAYA Pusat Surabaya. Berdasarkan Addendum Final Nomor : 760/53/PF-06/ADD-KTRK-BM /III/PUPR-2025.	1.964.195.000,00	0,00
9	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembayaran Sisa Pekerjaan 100% Pekerjaan Rekonstruksi Jl. Madara - Provinsi Palangkaraya - Buntok (Ruas 164) a.n. CV. INTI PRATAMA Pusat Ampah. Berdasarkan Addendum Kontrak Nomor : 760/17.2/PF-26/ADD-KTRK-BM/X/PUPR-2024.	148.985.000,00	0,00
10	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembayaran sisa Pekerjaan (100%) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Mengkatitp - Dadahup (food estate) a.n. PT PANDJI PRATAMA INDONESIA PST. Banjarmasin. Berdasarkan Adendum Final No: 760/4.1/PF-18/ADD.KTRK-BM/VI/PUPR-2025 Tanggal 13 Juni 2025.	5.073.203.134,00	0,00



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

No	SKPD	Uraian	Jumlah (Rp)	
			Tahun 2025	Tahun 2024
11	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembayaran sisa Pekerjaan (100%) Pekerjaan Rekonstruksi Jl. Pendang - Jl. Provinsi Buntok - P.Raya (Ruas 091) (DBH SAWIT) a.n. NIONJAR NIDANGGOL Pusat Ampah, Berdasarkan Nomor : 760/17/PF-28/ADD.I-KTRK-BM/IX/PUPR-2024 Tgl 25 September 2024	202.235.000,00	0,00
12	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembayaran sisa Pekerjaan 100% Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Dalam Desa Sanggu a.n. CV. SULTAN ADIBA PERKASA Pusat Sibung, Berdasarkan Addendum Kontrak II No.760/19.2/PF-91/ADD.KTRK-BM/XII/PUPR-2024 Tanggal 24 Desember 2024	1.232.500.000,00	0,00
13	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Pembayaran Utang Tahun 2024 yang dibayar pada Tahun 2025 Pada Pekerjaan Belanja Modal Lanjutan Bangunan Gedung Kantor BPKAD Keg. Pengeluaran Pembiayaan (6.2.03) pada CV. MITRA UTAMA Pusat Buntok	1.497.518.061,00	0,00
14	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	Pembayaran Belanja Modal Jalan Khusus (Pembayaran 5% Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota)	146.950.000,00	0,00
15	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Pembayaran Dana LS Bantuan Keuangan Giat TMMD Ke-116 Kodim 1012 Buntok	0,00	150.000.000,00
Jumlah			14.615.453.716,00	150.000.000,00

5.1.4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

31 Desember 2025
10.349.474.698,03

31 Desember 2024
164.192.653.173,77

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp10.349.474.698,03 dan Rp164.192.653.173,77.

Tabel 5.1.61 Rincian Sisa Lebih Anggaran (SiLPA)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
I	II	III	IV	V
1	Saldo Akhir Kas di RKUD	3.505.740.031,87	0,00	3.505.740.031,87
	PT. BPK Cab. Buntok (DAU)	0,00	88.144.694.001,55	(88.144.694.001,55)
	PT. BPK Cab. Buntok (DAK)	0,00	4.313.049.924,02	(4.313.049.924,02)
	PT. BPK Cab. Buntok (PAD)	8.437.966,00	63.783.944.159,26	(63.775.506.193,26)
	PT. Bank Mandiri Cab. Buntok	390.157,48	0,00	390.157,48
	PT. BRI (Giro)	27.040.000,00	612.437,54	26.427.562,46
2	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00
3	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	7.217.349,00	60.060,00	7.157.289,00
4	Saldo Akhir Kas di BLUD	4.062.060.857,28	3.975.530.309,98	86.530.547,30
5	Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS	190.836.123,34	119.250.709,00	71.585.414,34
6	Kas Dana BOK Puskesmas	2.598.562.005,00	2.347.289.555,00	251.272.450,00
7	Saldo Akhir Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00	0,00
	Puskesmas Sababillah	3.897,20	5.292,20	(1.395,00)
	Puskesmas Kalahien	1.474,92	396,92	1.078,00
	Puskesmas Baru	16.728,00	347,00	16.381,00
	Puskesmas Buntok	0,00	0,00	0,00
	Puskesmas Pendang	9.956,00	4.467,00	5.489,00
	Puskesmas Bantai Bambure	7.373.645,00	201,00	7.373.444,00
	Puskesmas Tabak Kanilan	1.854,00	7.827,00	(5.973,00)
	Puskesmas Patas	3.984,00	237,00	3.747,00



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
I	II	III	IV	V
	Puskesmas Bangkuang	0,00	1.061,00	(1.061,00)
	Puskesmas Babai	49.632,00	833.262,00	(783.630,00)
	Puskesmas Mangkatip	21,00	37.680.313,00	(37.680.292,00)
	Puskesmas Jenamas	81.861.020,94	2.956.817,00	78.904.203,94
7	Saldo Akhir Kas Lainnya	15.000.000,00	38.000.000,00	(38.000.000,00)
8	Kelebihan Penerbitan SP2D oleh Bank	0,00	322.590.000,00	(322.590.000,00)
9	Koreksi Belanja yang menyebabkan kenaikan Kas terkait Realisasi SP2D melebihi Kontrak	0,00	1.106.141.796,30	(1.106.141.796,30)
10	selisih karena terpotong saat pemindahbukuan dari rek koran mandiri dgn rek koran rkud	25.000,00	0,00	25.000,00
Jumlah		10.504.631.703,03	164.192.653.173,77	(157.348.918.507,61)

Terdapat selisih antara sisa Kas dana Bos di karenakan ada Koreksi atas keterlambatan penyetoran pajak PPh 21, PPh 23 dan PPN Pusat pada Belanja Dana Bos dari kas Dana Bos di Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp155.157.005,00 sehingga dalam rincian tabel diatas tidak sama dengan rincian SiLPA di tahun berjalan.

Berdasarkan hasil perhitungan sisa dana yang dibatasi penggunaannya (*earmark*), diketahui masih terdapat sisa dana *earmark* sebesar Rp13.828.442.625,00 yang terdiri atas sisa dana DAK Fisik, DAK Non Fisik, DBH Sawit dan DBH DR. Atas sisa dana yang dibatasi penggunaannya tersebut terdapat sisa dana yang telah digunakan untuk membiayai belanja lain yang tidak sesuai peruntukannya, sehingga terdapat selisih kurang dengan sisa pada RKUD di Tahun 2025 sebesar Rp10.286.809.469,65 (Rp13.828.442.625,00 - Rp3.541.633.155,35) dengan rincian sebagai berikut.

NO	SUMBER DANA	SISA KAS
1	DAK Fisik	9.984.158.953,00
	Bid Pendidikan	595.212.309,00
	Bid Kesehatan	1.036.088.834,00
	Bid Air Minum	22.763.690,00
	Bid Sanitasi	18.235.698,00
	Bid Irigasi	554.936.068,00
	Bid Pertanian	401,00
	Bid Jalan	7.756.921.268,00
	Bid Kelautan & Perikanan	685,00
2	DAK Non Fisik	1.975.856.107,00
	Tunjangan Guru	865.711.530,00
	BOK KB	265.250.520,00
	Ketapang & Pertanian	64.557.500,00
	BOK Bid Kesehatan	780.336.557,00
3	DBH Earmark	1.868.427.565,00
	DBH Sawit	1.776.663.490,00
	DBH DR	91.764.075,00
Jumlah 1 + 2 + 3 =		13.828.442.625,00



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

5.2. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

5.2.1. Saldo Anggaran Lebih (awal)	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	164.192.653.173,77	110.519.438.914,19

Saldo Anggaran Lebih (awal) merupakan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih (awal) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp164.192.653.173,77 dan Rp110.519.438.914,19

SILPA sebesar Rp164.192.653.173,77 berasal dari kelebihan penerimaan pendapatan, sisa anggaran belanja, dan kelebihan pembiayaan netto sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Dari target Pendapatan sebesar Rp1.850.935.885.078,00, terealisasi sebesar Rp1.831.871.547.012,98 sehingga terdapat kekurangan penerimaan dari target Pendapatan sebesar Rp19.064.338.065,02; Selisih Pendapatan yang tidak tercapai tersebut terdiri atas rincian sebagai berikut:
 - Selisih kurang anggaran Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp6.422.637.155,02
 - Selisih kurang anggaran Pendapatan Transfer sebesar Rp7.016.489.432,00
 - Selisih kurang Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp5.625.211.478,00
2. Dari anggaran Belanja sebesar Rp1.949.005.323.992,00 terealisasi sebesar Rp1.765.648.332.753,40 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp183.356.991.238,60. Sisa Belanja tersebut terdiri atas rincian sebagai berikut:
 - Selisih lebih anggaran Belanja Operasi sebesar Rp123.079.136.896,72
 - Selisih lebih anggaran Belanja Modal sebesar Rp45.358.963.948,88;
 - Selisih lebih anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp3.736.633.642,00; dan
 - Selisih lebih anggaran Belanja Transfer sebesar Rp11.182.256.751,00
3. Terdapat Kekurangan Pembiayaan Neto sebesar Rp99.999.999,81 disebabkan oleh selisih kurang Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp99.999.999,81, yang merupakan pembebanan biaya administrasi atas Belanja Daerah, serta selisih kurang pada Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp0,00.

5.2.2. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	164.115.933.746,11	110.419.438.914,19

Penggunaan SAL sebesar Rp164.192.653.173,76 sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan merupakan saldo anggaran lebih yang telah di koreksi untuk digunakan sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp164.115.933.746,11 dan Rp110.419.438.914,19

5.2.3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	10.349.474.698,03	164.192.653.173,77

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. SiLPA untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp10.349.474.698,03 dan Rp164.192.653.173,77



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

31 Desember 2025
(76.719.427,66)

31 Desember 2024
0,00

Koreksi Sisa Dana BOSP-BOS Reguler akibat Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya adalah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp76.719.427,66 dan Rp0,00

5.2.5. Lain-Lain

31 Desember 2025
0,00

31 Desember 2024
0,00

Lain-lain merupakan koreksi atas penggunaan SiLPA tahun sebelumnya.

5.2.6. Saldo Anggaran Lebih (Akhir)

31 Desember 2025
10.349.474.698,03

31 Desember 2024
164.192.653.173,77

Saldo Anggaran Lebih (akhir) merupakan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih (akhir) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp10.349.474.698,03 dan Rp164.192.653.173,77

Jumlah SAL Per 31 Desember 2025 sebesar Rp10.504.631.703,03 terdiri dari saldo kas di:

1. Saldo Akhir Kas di RKUD Rp3.541.608.155,35
2. Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran Rp7.217.349,00
3. Saldo Akhir Kas di BLUD Rp4.062.060.857,28
4. Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS Rp190.836.123,34
5. Kas Dana BOK Puskesmas Rp2.598.562.005,00
6. Saldo Akhir Kas di Bendahara FKTP Rp 89.322.213,06
7. Saldo Akhir Kas Lainnya Rp15.000.000,00
8. selisih karena tpotongan saat pemindahbukuan dari rek koran mandiri dgn rek koran rkud Rp25.000,00
9. selisih antara sisa Kas dana Bos di karenakan keterlambatan setor pajak pusat pada Belanja Dana Bos di Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp155.157.005,00

5.3. PENJELASAN NERACA

5.3.1. ASET

31 Desember 2025
2.928.469.147.650,08

31 Desember 2024
2.786.279.353.873,09

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Total saldo Aset Pemerintah Kabupaten Barito Selatan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp2.928.469.147.650,08 dan Rp2.786.279.353.873,09. Aset terdiri dari Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap dan Aset Lainnya, dengan rincian sebagai berikut.



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.3.1. Aset

No	Aset	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
I	II	III	IV	V	VI
1	Aset Lancar	165.184.102.445,52	218.730.291.525,31	(53.546.189.079,79)	(24,48)
2	Investasi Jangka Panjang	197.710.131.777,00	151.635.529.952,00	46.074.601.825,00	30,39
3	Aset Tetap	2.502.502.157.908,62	2.252.105.027.105,22	250.397.130.803,40	11,12
4	Aset Lainnya	63.072.755.518,94	163.808.505.290,56	(100.735.749.771,62)	(61,50)
Jumlah		2.928.469.147.650,08	2.786.279.353.873,09	142.189.793.776,99	5,10

Berdasarkan rincian pada tabel di atas terlihat bahwa aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp142.189.793.776,99 atau 5,10%.

5.3.1.1. Aset Lancar

31 Desember 2025

165.184.102.445,52

31 Desember 2024

218.730.291.525,31

Aset Lancar diklasifikasikan jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, serta berupa kas dan setara kas. Aset Lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan terdiri dari Kas, Piutang Pendapatan, Penyisihan Piutang, Beban Dibayar Dimuka dan Persediaan. Saldo Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Barito Selatan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp165.184.102.445,52 dan Rp218.730.291.525,31 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.2. Aset Lancar

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Kas dan Setara Kas	10.504.631.703,03	163.870.063.173,77	(153.365.431.470,74)	(93,59)
2	Piutang Pajak Daerah	14.791.908.650,00	14.228.464.288,00	563.444.362,00	3,96
3	Piutang Retribusi Daerah	1.751.449.327,00	995.752.350,00	755.696.977,00	75,89
4	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.575.000,00	4.575.000,00	0,00	0,00
5	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	3.125.600.327,25	4.531.954.479,00	(1.406.354.151,75)	(31,03)
6	Piutang Transfer Antar Daerah	36.197.147.056,00	0,00	36.197.147.056,00	0,00
7	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	10.313.451,00	18.240.651,00	(7.927.200,00)	(43,46)
8	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	101.700.800,00	101.700.800,00	0,00	0,00
9	Piutang Lainnya	163.200.600,00	171.972.100,00	(8.771.500,00)	(5,10)
10	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal	0,00	1.274.690.297,14	(1.274.690.297,14)	(100,00)
11	Penyisihan Piutang	(13.748.785.075,46)	(12.851.667.108,49)	(897.117.966,97)	6,98
12	Persediaan	112.282.360.606,70	46.384.545.494,89	65.897.815.111,81	142,07
Jumlah		165.184.102.445,52	218.730.291.525,31	(53.546.189.079,79)	(24,48)

Saldo Aset lancar tahun 2025 sebesar Rp165.184.102.445,52 mengalami penurunan sebesar Rp53.546.189.079,79 atau 24,48% dari tahun 2024 sebesar Rp218.730.291.525,31 terdiri dari:



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

5.3.1.1.1. Kas di Kas Daerah

31 Desember 2025
3.541.633.155,35

31 Desember 2024
157.348.442.318,67

Kas di Kas Daerah merupakan Kas dan Setara Kas yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah (BUD). Jumlah Kas di Kas Daerah di Tahun 2025 Rp3.541.633.155,35. Rincian saldo kas di Kas Daerah dirincikan pada tabel berikut.

Tabel 5.3.3. Rincian Kas di Kas Daerah

No	Nama Bank	No Rekening	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	PT BPK Cab. Buntok (DAU)	2000101000005	0,00	88.144.694.001,55	(88.144.694.001,55)	0,00
2	PT BPK Cab. Buntok (RKUD)	2000101000024	3.505.765.031,87	5.419.191.720,32	(1.913.451.688,45)	(35,31)
3	PT BPK Cab. Buntok (PAD)	2000101000001	8.437.966,00	63.783.944.159,26	(63.775.506.193,26)	(99,99)
4	PT. Bank Mandiri Cabang Buntok (Giro)	1590099334442	390.157,48	0,00	390.157,48	0,00
5	BRI (Giro)	030301000844309	27.040.000,00	612.437,54	26.427.562,46	4315,14
Jumlah			3.541.633.155,35	157.348.442.318,67	(153.806.809.163,32)	(97,75)

- kelebihan penerbitan 9 (sembilan) SP2D LS (lebih bayar) oleh bank, sehingga dianggap akan menjadi piutang pihak ketiga walaupun lebih bayar tersebut sudah disetorkan ke kas daerah berdasarkan bukti setoran pada **Lampiran 3**.
- pada tahun 2024 terjadi koreksi kas pada saldo awal dikarenakan pada tahun sebelumnya kelebihan penerbitan 4 (empat) SP2D LS oleh bank, sehingga pada per 31 Desember 2024 tercatat saldo Kas di Kasda *audited* hanya sebesar Rp157.348.442.318,67 belum ditambah dengan jumlah lebih bayar yang dikategorikan menjadi piutang oleh pihak ketiga sebesar Rp322.590.000,00. Rincian posisi Kas Daerah berdasarkan Rekening Koran dan nilai SP2D yang *double* dibayarkan disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.3.4. Rincian lebih Bayar

NO	SKPD	NO BUKTI	URAIAN	NILAI (Rp)	PENYETORAN (Rp)	SISA	Ket
				2025			
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	62.04/04.0/00225 9/LS/1.03.0.00.0. 00.01.0000/PPR1 1/2/2025	Pembayaran Pekerjaan (95%) + Pembayaran Pemeliharaan (5%) Pekerjaan Penataan/ Pembangunan Mess Kejaksaan Negeri Buntok, An. CV. MAHKOTA PUTRI GEMILANG PUSAT BUNTOK.	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	STS No.0474/RDT/2026 tgl 06-03- 2026 Pengembalian lebih bayar atas pekerjaan Penataan/Pembangunan Mess Kejaksaan Negeri Buntok a.n CV. Mahkota Gemilang Pusat Buntok
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	62.04/04.0/00227 3/LS/1.03.0.00.0. 00.01.0000/PPR1 1/2/2025	Pembayaran Pekerjaan (95%) + Pembayaran Pemeliharaan (5%) Pekerjaan Rehab Berat Rumah Dinas Guru Mahajandau, An. CV. ANJUNGAN ARUNA Pusat Buntok.	99.950.000,00	99.950.000,00	0,00	STS No.0415/RDT/2026 tgl 13/01/2026 Pengembalian Kelebihan pembayaran atas pekerjaan Rehab berat rumah dinas guru Mahajandau CV. Anjungan Aruna Pusat Buntok
		62.04/04.0/00106 3/LS/1.03.0.00.0. 00.01.0000/PPR1 1/2/2025					
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	62.04/04.0/00088 2/LS/1.03.0.00.0. 00.01.0000/P8/10 /2025	Pembayaran Uang Muka (30%) Pekerjaan Rehab Berat SDN Danau Bambore CV. SETALAR PUTANG DURUI Pusat Buntok, Berdasarkan Kontrak Nomor : 760/269/KTRK-AMPLP/IX/PUPR-2025, tanggal 8 September 2025	146.250.000,00	146.250.000,00	0,00	STS No.0425/RDT/2026 tgl 28 Januari 2026 Pengembalian lebih bayar atas pekerjaan Rehab berat SDN Danau Bambore CV. SETALAR PUTANG DURUI Pusat Palangka Raya
		62.04/04.0/00226 4/LS/1.03.0.00.0.					



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

NO	SKPD	NO BUKTI	URAIAN	NILAI (Rp)	PENYETORAN (Rp)	SISA	Ket
		00.01.0000/PPR1/12/2025					
4	DINAS PEKERJAA N UMUM DAN PENATAAN RUANG	62.04/04.0/00090 9/LS/1.03.0.00.0. 00.01.0000/P8/10/2025 62.04/04.0/00226 2/LS/1.03.0.00.0. 00.01.0000/PPR1/12/2025	Pembayaran Uang Muka (30%) Pekerjaan Rehab Berat SDN Danau Bambore CV. SETALAR PUTANG DURUI Pusat Buntok, Berdasarkan Kontrak Nomor : 760/269/KTRK-AMPLP/IX/PUPR-2025, tanggal 8 September 2025	87.570.000,00	87.570.000,00	0,00	STS No.0463/RDT/2026 tgl 27-2- 2026 Pengembalian lebih bayar atas pekerjaan Rehab Kantor Kecamatan Dusun Selatan a.n CV. TATAU ANDRAU Pusat Jaar
5	DINAS PEKERJAA N UMUM DAN PENATAAN RUANG	62.04/04.0/00228 5/LS/1.03.0.00.0. 00.01.0000/PPR1/12/2025	Pembayaran Pekerjaan (95%) + Pembayaran Pemeliharaan (5%) Pekerjaan Rehabilitasi SD Negeri 1 Rangga Ilung An. CV. TETEI PAMELUM Pusat Buntok.	111.000,00	111.000,00	0,00	STS No.0475/RDT/2026 tgl 06-03- 2026 Pengembalian lebih bayar atas pekerjaan Rehabilitasi SD Negeri 1 Rangga Ilung a.n CV. Tetei Pamelum Pusat Buntok
6	DINAS PEKERJAA N UMUM DAN PENATAAN RUANG	62.04/04.0/00 1326/LS/1.03. 0.00.0.00.01.0 000/PPR1/12/ 2025	Pembayaran Pemeliharaan (5%) Pekerjaan Rehab Berat SDN Jelapat CV. CAHAYA BAKTI Pusat Buntok, Berdasarkan SPK Nomor 760/143/SPK-AMPLP/VII/PUPR-2025, Tanggal 28 Juli 2025	1.000,00	1.000,00	0,00	STS No.05276/RDT/2026 Pengembalian lebih bayar atas pekerjaan rehab berat SDN Jelapat an. CV. Cahaya Bakti Pusat Buntok Rp.1.000,-
7	DINAS PEKERJAA N UMUM DAN PENATAAN RUANG	62.04/04.0/00165 5/LS/1.03.0.00.0. 00.01.0000/PPR1/12/2025	Pembayaran Pemeliharaan (5%) Pekerjaan Rehab Berat SDN 1 Gagutur CV. RIWUT BARITO Pusat Buntok, Berdasarkan SPK Nomor 760/149/SPK-AMPLP/VII/PUPR-2025, Tanggal 30 Juli 2025	34.000,00	34.000,00	0,00	STS No.0527/RDT/2026 tgl 21- 04-2026 Pengembalian lebih bayar atas pekerjaan rehab berat SDN 1 Gagutur a.n CV. Riwut Barito Pusat Buntok sebesar Rp. 34.000,-
8	DINAS PEKERJAA N UMUM DAN PENATAAN RUANG	62.04/04.0/00225 2/LS/1.03.0.00.0. 00.01.0000/PPR1/12/2025	Pembayaran Pekerjaan (95%)+ Pembayaran Pemeliharaan (5%) Pekerjaan Rehabilitasi SDN 1 Sei Telang An. CV. TETEI PAMELUM Pusat Buntok, Berdasarkan SPK Nomor 760/736/SPK-AMPLP/XI/PUPR-2025, Tanggal 19 November 2025	22.000,00	22.000,00	0,00	STS No.0528/RDT/2026 tgl 21- 04-2026 Pengembalian lebih bayar atas pekerjaan rehab berat SDN 1 Sei Telang a.n CV. Tetei Pamelum Pusat Buntok sebesar Rp. 22.000,-
9	DINAS PEKERJAA N UMUM DAN PENATAAN RUANG	62.04/04.0/00219 9/LS/1.03.0.00.0. 00.01.0000/PPR1/12/2025	Pembayaran Pekerjaan (95%) + Pembayaran Pemeliharaan (5%) Pekerjaan Rehabilitasi SD negeri Bambore Raya, An. CV. YUDHA PERKASA Pusat Buntok.	50.000,00	50.000,00	0,00	STS No.0529/RDT/2026 tgl 21- 04-2026 Pengembalian lebih bayar atas pekerjaan rehab berat SDN 1 Bambore Raya a.n CV. Yudha Perkasa Pamelum Pusat Buntok sebesar Rp. 50.000,-
Jumlah				342.988.000,00	342.988.000,00	0,00	

Selisih tersebut disebabkan oleh kesalahan perhitungan pembayaran pada Dinas PUPR sehingga menjadi kelebihan penerbitan SP2D oleh RKUD. Atas nilai tersebut, telah dilakukan penyetoran seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Barito Selatan sebesar Rp342.988.000,00.

Selain itu, berdasarkan hasil temuan BPK TA 2024, pada Dinas PUPR terdapat realisasi SP2D melebihi nilai kontrak atas beberapa paket pekerjaan fisik, sehingga Pemerintah Kabupaten Barito Selatan telah menagih dan menerima setoran pengembalian senilai Rp1.106.141.796,30, dengan rincian sebagai berikut.



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

No	Nama Paket Pekerjaan	Nomor SP2D	Selisih Kelebihan Pembayaran	Nilai yang sudah di setor	Sisa yang belum disetor
1	Rehabilitasi Jembatan Nuni Kaladan Jukung) RT. 05. RW. 02 Desa Teluk Betung	62.04/04.0/001722/LS/1.03.0.00.0.0 0.0 1.0000/PPR2/12/2024	99.900.000,00	88.425.000,00	0,00
		62.04/04.0/001861/LS/1.03.0.00.0.0 0.0 1.0000/PPR2/12/2024		11.475.000,00	
2	Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R. Teluk Timbau	62.04/04.0/000432/LS/1.03.0.00.0.0 0.0 1.0000/P2/8/2024	235.500.000,00	235.500.000,00	0,00
		62.04/04.0/001626/LS/1.03.0.00.0.0 0.0 1.0000/PPR2/12/2024			
3	Rehab Aula Kantor Kejaksaan Barito Selatan	62.04/04.0/001781/LS/1.03.0.00.0.0 0.0 1.0000/PPR2/12/2024	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4	Lanjutan Pembangunan Aula Kantor Bupati Tahap II	62.04/04.0/000033/LS/1.03.0.00.0.0 0.0 1.0000/M/4/2024	602.461.796,00	430.329.854,00	0,00
		62.04/04.0/000151/LS/1.03.0.00.0.0 0.0 1.0000/M/5/2024			
		62.04/04.0/000568/LS/1.03.0.00.0.0 0.0 1.0000/P2/9/2024		172.131.942,00	
		62.04/04.0/000714/LS/1.03.0.00.0.0 0.0 1.0000/PR/10/2024			
		62.04/04.0/001025/LS/1.03.0.00.0.0 0.0 1.0000/PR/11/2024			
5	Pembangunan Gedung Kantor BPBD	62.04/04.0/000278/LS/1.03.0.00.0.0 0.0 1.0000/M/7/2024	0,30	0,30	0,00
		62.04/04.0/001843/LS/1.03.0.00.0.0 0.0 1.0000/PPR2/12/2024			
6	Rehabilitasi Kantor Dinsos PMD	62.04/04.0/000718/LS/1.03.0.00.0.0 0.0 1.0000/PR/10/2024	147.000.000,00	147.000.000,00	0,00
		62.04/04.0/001638/LS/1.03.0.00.0.0 0.0 1.0000/PPR2/12/2024			
		62.04/04.0/001069/LS/1.03.0.00.0.0 0.0 1.0000/PPR1/12/2024			
7	Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Purnama A3 Jl. Kaladan	62.04/04.0/000444/LS/1.03.0.00.0.0 0.0 1.0000/P2/8/2024	100.000,00	100.000,00	0,00
		62.04/04.0/000622/LS/1.03.0.00.0.0 0.0 1.0000/PR/9/2024			
		62.04/04.0/001271/LS/1.03.0.00.0.0 0.0 1.0000/PPR1/12/2024			
8	Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Itah I Jl. Kaladan	62.04/04.0/000956/LS/1.03.0.00.0.0 0.0 1.0000/PR/11/2024	9.990.000,00	899.000,00	0,00
		62.04/04.0/001301/LS/1.03.0.00.0.0 0.0 1.0000/PPR1/12/2024		9.091.000,00	
		62.04/04.0/001595/LS/1.03.0.00.0.0 0.0 1.0000/PPR2/12/2024			
9	Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Santosa Jl. Pelita IV	62.04/04.0/001683/LS/1.03.0.00.0.0 0.0 1.0000/PPR2/12/2024	100.000,00	100.000,00	0,00
10	Peningkatan Jalan Lingkungan Menuju	62.04/04.0/001311/LS/1.03.0.00.0.0 0.0 1.0000/PPR1/12/2024	100.000,00	100.000,00	0,00
11	Peningkatan Jalan Lingkungan GG. Kelulud RT. 03 Desa Baru	62.04/04.0/001245/LS/1.03.0.00.0.0 0.0 1.0000/PPR1/12/2024	9.990.000,00	9.000.000,00	0,00
		62.04/04.0/001664/LS/1.03.0.00.0.0 0.0 1.0000/PPR2/12/2024		990.000,00	

Berdasarkan hasil perhitungan sisa dana yang dibatasi penggunaannya (*earmark*), diketahui masih terdapat sisa dana *earmark* sebesar Rp13.828.442.625,00 atas sisa dana DAK Fisik, DAK Non Fisik, dan DBH Sawit dan DBH DR. Atas sisa dana yang dibatasi penggunaannya tersebut terdapat sisa dana yang telah digunakan untuk membiayai belanja lain yang tidak sesuai peruntukannya, sehingga terdapat selisih kurang dengan sisa pada RKUD di Tahun 2025 sebesar



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Rp10.286.809.469,65 (Rp13.828.442.625,00 - Rp3.541.633.155,35) dengan rincian sebagai berikut.

NO	SUMBER DANA	SISA KAS
1	DAK Fisik	9.984.158.953,00
	Bid Pendidikan	595.212.309,00
	Bid Kesehatan	1.036.088.834,00
	Bid Air Minum	22.763.690,00
	Bid Sanitasi	18.235.698,00
	Bid Irigasi	554.936.068,00
	Bid Pertanian	401,00
	Bid Jalan	7.756.921.268,00
	Bid Kelautan & Perikanan	685,00
2	DAK Non Fisik	1.975.856.107,00
	Tunjangan Guru	865.711.530,00
	BOK KB	265.250.520,00
	Ketapang & Pertanian	64.557.500,00
	BOK Bid Kesehatan	780.336.557,00
3	DBH Earmark	1.868.427.565,00
	DBH Sawit	1.776.663.490,00
	DBH DR	91.764.075,00
	Jumlah 1 + 2 + 3 =	13.828.442.625,00

5.3.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

31 Desember 2025
0,00

31 Desember 2024
0,00

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo uang tunai/uang di bank yang dalam penguasaan Bendahara Penerimaan. Jumlah Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00

5.3.1.1.3. Kas di Bendahara Pengeluaran

31 Desember 2025
7.217.349,00

31 Desember 2024
60.060,00

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang tunai/ uang di bank yang dalam penguasaan Bendahara Pengeluaran. Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp7.217.349,00 dan Rp60.060,00 dan telah melakukan pengembalian sisa Uang Persediaan/Ganti Uang pada tanggal 27 April 2026 yang mana kas tersebut atas temuan BPK belanja Tahun 2024

Tabel 5.3.5. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	7.217.349,00	60,00
2	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0,00	60.000,00
	Jumlah	7.217.349,00	60.060,00



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

5.3.1.1.4. Kas di BLUD

	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	4.062.060.857,28	3.975.530.309,98

Kas di BLUD merupakan saldo kas pada BLUD RSUD Jaraga Sasameh dan BLUD Buntok. Jumlah Kas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp4.062.060.857,28 dan Rp3.975.530.309,98. Saldo Kas di BLUD ini terdiri dari BLUD RSUD Jaraga Sasameh Rp3.876.992.162,98 dan BLUD Buntok Rp98.538.147,00 dengan rincian sebagai berikut dan terdapat penjelasan pada Lampiran 4.

Tabel 5.3.6. Uraian yang ada di kas BLUD

No.	Nama BLUD	Kas di Bendahara BLUD per 31 Des 2024	Pendapatan	Belanja	Sisa Kas di Bendahara BLUD 31 Des 2025
I	II	III	IV	V	VI
1	RSUD Jaraga Sasameh Buntok	3.876.992.162,98	41.461.985.226,00	41.676.293.845,70	3.662.683.543,28
2	BLUD Buntok	98.538.147,00	2.599.319.953,00	2.298.480.786,00	399.377.314,00
Jumlah		3.975.530.309,98	44.061.305.179,00	43.974.774.631,70	4.062.060.857,28

5.3.1.1.5. Kas di Bendahara Dana Kapitasi pada FKTP (JKN)

	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	89.322.213,06	2.388.779.776,12

Jumlah kas di Bendahara dana Kapitasi JKN per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp89.322.213,06 dan Rp2.388.779.776,12. Saldo Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN merupakan saldo Dana Kapitasi JKN sebesar Rp89.322.213,06 dan Dana BOK Puskesmas Rp2.598.562.005,00 dengan rincian sebagai berikut

Tabel 5.3.7. Uraian Kas yang Ada di Kas Bendahara Dana Kapitasi JKN

No.	Nama Puskesmas	Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN per 31 Des 2024	Pendapatan JKN dan Bunga Bank	Pengembalian Kas Tunai 2023 (belum diakui neraca saldo awal)	Belanja	Pengembalian Jasa/Bunga Tabungan Ke Kas Daerah	Sisa Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN per 31 Des 2025
I	II	III	IV	V	VI	VII	VII
Kas Dana Kapitasi pada FKTP							
1	SABABILAH	5.292,20	346.637.103,00	0,00	346.638.498,00	0,00	3.897,20
2	BARU	347,00	412.861.774,00	0,00	412.845.393,00	0,00	16.728,00
3	KALAHEN	396,92	679.196.414,00	0,00	679.195.336,00	0,00	1.474,92
4	TABAK KANILAN	7.827,00	363.751.572,00	0,00	363.757.545,00	0,00	1.854,00
5	PATAS I	237,00	719.543.308,00	0,00	719.539.561,00	0,00	3.984,00
6	BANTAI BAMBURE	201,00	219.382.792,00	0,00	212.009.348,00	0,00	7.373.645,00
7	PENDANG	4.467,00	524.582.407,00	0,00	524.576.918,00	0,00	9.956,00
8	BABAI	833.262,00	418.919.977,00	0,00	419.703.607,00	0,00	49.632,00
9	BANGKUANG	1.061,00	588.811.632,00	0,00	588.812.672,00	0,00	21,00
10	MENGKATIP	37.680.313,00	747.130.090,00	0,00	702.949.382,06	0,00	81.861.020,94
11	JENAMAS	2.956.817,00	539.738.707,00	0,00	542.695.524,00	0,00	0,00
Jumlah		41.490.221,12	5.560.555.776,00	0,00	5.512.723.784,06	0,00	89.322.213,06



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

5.3.1.1.6. Kas di Bendahara Dana BOS	31 Desember 2025 190.836.123,34	31 Desember 2024 119.250.709,00
--------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Jumlah Kas di Bendahara dana BOSP per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan masing-masing sebesar Rp190.836.123,34 dan Rp119.250.709,00 Saldo Kas di Bendahara Dana BOSP, adapun rincian saldo Kas di Bendahara Dana BOSP terdapat pada **Lampiran 5**.

Terdapat selisih antara sisa Kas dana Bos di karenakan ada Koreksi atas keterlambatan penyetoran pajak PPh 21, PPh 23 dan PPN Pusat pada Belanja Dana Bos dari kas Dana Bos di Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp155.157.005,00 sehingga dalam rincian tabel di atas tidak sama dengan rincian silpa di tahun berjalan.

5.3.1.1.7. Kas Lainnya	31 Desember 2025 15.000.000,00	31 Desember 2024 38.000.000,00
------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Kas Lainnya adalah kas yang mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang pengelolaannya di luar Kas Daerah. Pada Tahun Anggaran 2025 terdapat Kas Lainnya sebesar Rp15.000.000,00 yang berasal dari sisa saldo pendapatan hibah CSR dengan Rincian Sebagai Berikut.

No	KEGIATAN	REALISASI SALUR	SISA KAS DI TIM PELAKSANA KEGIATAN
1	Program Pembangunan infrastruktur yang menunjang PPM 02 Paket	30.000.000,00	15.000.000,00
TOTAL		30.000.000,00	15.000.000,00

Adapun penjelasan atas saldo kas sebagaimana tabel di atas adalah sebagai berikut :

1. Program Pembangunan infrastruktur yang menunjang PPM 02 Paket :
 - a. Kecamatan Jenamas Pengadaan sound system di Aula Kecamatan Jenamas Rp15.000.000,00 masuk dana Tgl 25 Oktober 2025 dan Belanja sesuai Kwitansi Belanja tgl 29 Oktober 2025.
 - b. Kecamatan Dusun Hilir Masuk Dana CSR Adaro Tahun 2025 ke Rekening Bendahara CSR tgl 23 Okt 2025, tetapi pembelian Televisi Layar Lebar (Smart TV) 75 " Rp15.000.000,- Kwitansi belanja nya tgl 09 Januari 2026 sehingga per 31 Desember 2025 masih di anggap sebagai saldo kas tunai.

5.3.1.1.8. Kas Dana BOK Puskesmas	31 Desember 2025 2.598.562.005,00	31 Desember 2024 2.347.289.555,00
-----------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

Kas Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Dana BOK Puskesmas yang mana Pengelolaan Dana BOK Puskesmas dilaksanakan melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka penyediaan informasi keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Realisasi Belanja pada Tahun Anggaran tahun 2025 dan Tahun 2024 sebesar Rp0,00 merupakan dana bantuan yang digunakan untuk belanja operasional program prioritas upaya kesehatan Masyarakat



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.3.8. Uraian Kas Dana BOK Puskesmas Tahun 2025 dan 2024

No.	Nama Puskesmas	Kas di Bendahara Dana BOK per 31 Des 2024 dan Pendapatan	Belanja	Sisa Kas di Bendahara Dana BOK per 31 Des 2025
I	II	III	IV	V
	Kas Dana BOK Puskesmas			
1	DINAS KESEHATAN	2.347.289.555,00	0,00	0,00
2	BLUD BUNTOK	1.869.555.935,00	1.555.904.152,00	313.651.783,00
3	SABABILAH	919.582.925,00	821.736.925,00	97.846.000,00
4	BARU	901.377.925,00	776.639.541,00	124.738.384,00
5	KALAHIEH	1.071.288.925,00	924.839.117,00	146.449.808,00
6	TABAK KANILAN	1.147.554.175,00	924.491.075,00	223.063.100,00
7	PATAS I	1.254.199.225,00	1.181.069.725,00	73.129.500,00
8	BANTAI BAMBURE	1.042.771.725,00	735.166.271,00	307.605.454,00
9	PENDANG	1.070.766.925,00	877.950.626,00	192.816.299,00
10	BABAI	795.813.925,00	478.640.897,00	317.173.028,00
11	BANGKUANG	889.179.425,00	544.388.450,00	344.790.975,00
12	MENKATIP	1.116.432.965,00	868.091.916,00	248.341.049,00
13	JENAMAS	1.126.121.925,00	917.165.300,00	208.956.625,00
	JUMLAH	15.551.935.555,00	10.606.083.995,00	2.598.562.005,00

5.3.1.1.9. Piutang Pendapatan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	56.145.895.211,25	21.327.349.965,14

Piutang Pendapatan

Piutang Pendapatan terdiri atas Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi Daerah, Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah dan Piutang Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp56.145.895.211,25 dan Rp21.327.349.965,14 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.9. Piutang Pendapatan

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Piutang Pajak Daerah	14.791.908.650,00	14.228.464.288,00	563.444.362,00	3,96
2.	Piutang Retribusi Daerah	1.751.449.327,00	995.752.350,00	755.696.977,00	75,89
3.	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.575.000,00	4.575.000,00	0,00	0,00
4.	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	3.125.600.327,25	4.531.954.479,00	(1.406.354.151,75)	(31,03)
5.	Piutang Transfer Antar Daerah	36.197.147.056,00	0,00	36.197.147.056,00	0,00
6.	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	10.313.451,00	18.240.651,00	(7.927.200,00)	(43,46)
7.	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	101.700.800,00	101.700.800,00	0,00	0,00
8.	Piutang Lainnya	163.200.600,00	171.972.100,00	(8.771.500,00)	(5,10)
9.	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal	0,00	1.274.690.297,14	(1.274.690.297,14)	(100)
	Jumlah	56.145.895.211,25	21.327.349.965,14	34.818.545.246,11	163,26



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

5.3.1.1.9.1. Piutang Pajak Daerah	<u>31 Desember 2025</u> 14.791.908.650,00	<u>31 Desember 2024</u> 14.228.464.288,00
--	--	--

Piutang pajak Daerah adalah Piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Sesuai kewenangannya, ada perbedaan jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Piutang pajak pada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan terdiri dari Piutang Pajak Pemerintah Pusat, Piutang Pajak Daerah Pemerintah Provinsi, Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut

Tabel 5.3.10. Piutang Pajak Daerah per Obyek Pajak Daerah

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Piutang Pajak Hotel	202.983.940,00	203.233.940,00	(250.000,00)	(0,12)
2	Piutang Pajak Restoran	103.049.608,00	101.599.608,00	1.450.000,00	1,43
3	Piutang Pajak Galian C	470.900.000,00	470.900.000,00	0,00	0,00
4	Piutang Pajak PBB-P2	14.014.975.102,00	13.452.730.740,00	562.244.362,00	4,18
	Jumlah	14.791.908.650,00	14.228.464.288,00	563.444.362,00	3,96

5.3.1.1.9.1.1. Piutang Pajak Hotel	<u>31 Desember 2025</u> 202.983.940,00	<u>31 Desember 2024</u> 203.233.940,00
---	---	---

Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp202.983.940,00 dan Rp203.233.940,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.11. Rincian Mutasi Piutang Pajak Hotel

No	Jenis Piutang	Saldo Akhir Tahun 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir Tahun 2025 (Rp)
1	PAJAK HOTEL TANPA RINCIAN 2018	202.983.940,00	0,00	0,00	202.983.940,00
2	HOTEL TIA 2024	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
	Jumlah	203.233.940,00	0,00	250.000,00	202.983.940,00

5.3.1.1.9.1.2. Piutang Pajak Restoran	<u>31 Desember 2025</u> 103.049.608,00	<u>31 Desember 2024</u> 101.599.608,00
--	---	---

Piutang Pajak Restoran/Rumah Makan per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 tidak ada tambah kurang masing-masing sebesar Rp103.049.608,00 dan Rp101.599.608,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.12. Rincian Mutasi Piutang Pajak Restoran/Rumah Makan

No	Jenis Piutang	Saldo Akhir Tahun 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir Tahun 2025 (Rp)
1	Restoran CV.EXAN PUTRA PERDANA	93.145.210,00	0,00	0,00	93.145.210,00
2	Restoran CV.EXAN PUTRA PERDANA	8.354.398,00	0,00	0,00	8.354.398,00



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

No	Jenis Piutang	Saldo Akhir Tahun 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir Tahun 2025 (Rp)
3	RUMAH MAKAN WARUNG	100.000,00	1.450.000,00	0,00	1.550.000,00
Jumlah		101.599.608,00	1.450.000,00	0,00	103.049.608,00

5.3.1.1.9.1.3. Piutang Pajak Galian C

31 Desember 2025	31 Desember 2024
470.900.000,00	470.900.000,00

Piutang Pajak Galian C per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar masing-masing Rp470.900.000,00 dan Rp470.900.000,00 merupakan piutang Galian C pada CV ALM di Kecamatan Karau Kuala.

Tabel 5.3.13. Mutasi Piutang Pajak Galian C

No	Uraian	Saldo Akhir Tahun 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pembayaran (Rp)	Saldo Akhir Tahun 2025 (Rp)
1	Piutang Pajak Galian C	470.900.000,00	0,00	0,00	470.900.000,00
Jumlah		470.900.000,00	0,00	0,00	470.900.000,00

5.3.1.1.9.1.4. Piutang Pajak PBB-P2

31 Desember 2025	31 Desember 2024
14.014.975.102,00	13.452.730.740,00

Piutang Pajak PBB-P2 per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp14.014.975.102,00 dan Rp13.452.730.740,00 terjadi tambah kurang piutang pajak PBB-P2 di tahun 2025 sebesar Rp1.814.021.729,00 dan Rp1.251.777.367,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.14. Piutang Pajak PBB-P2

No	Uraian	Saldo Akhir Tahun 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir Tahun 2025 (Rp)
1	2010	789.522.563,00	0,00	16.795.108,00	772.727.455,00
2	2011	791.079.938,00	0,00	10.598.629,00	780.481.309,00
3	2012	821.915.666,00	0,00	11.642.755,00	810.272.911,00
4	2013	1.247.948.877,00	0,00	26.379.608,00	1.221.569.269,00
5	2014	1.006.365.018,00	0,00	18.184.694,00	988.180.324,00
6	2015	991.051.204,00	0,00	25.951.970,00	965.099.234,00
7	2016	912.849.155,00	0,00	19.529.182,00	893.319.973,00
8	2017	942.199.359,00	0,00	19.610.883,00	922.588.476,00
9	2018	796.307.682,00	0,00	12.751.224,00	783.556.458,00
10	2019	872.015.258,00	0,00	27.009.560,00	845.005.698,00
11	2020	976.714.641,00	0,00	29.844.038,00	946.870.603,00
12	2021	482.825.546,00	0,00	30.047.238,00	452.778.308,00
13	2022	821.613.372,00	0,00	54.523.960,00	767.089.412,00
14	2023	914.874.953,00	0,00	67.601.846,00	847.273.107,00
15	2024	1.085.447.508,00	0,00	147.081.898,00	938.365.610,00
16	2025		1.814.021.729,00	734.224.774,00	1.079.796.955,00
Jumlah		13.452.730.740,00	1.814.021.729,00	1.251.777.367,00	14.014.975.102,00

5.3.1.1.9.2. Piutang Retribusi

31 Desember 2025	31 Desember 2024
1.751.449.327,00	995.752.350,00

Piutang Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan, Piutang Retribusi Kabupaten Barito Selatan terdiri dari Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Piutang Retribusi Pelayanan Pasar, Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan, dan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan. Piutang Retribusi per 31 Desember 2025 dan



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

2024 masing-masing sebesar Rp1.751.449.327,00 dan Rp995.752.350,00 dengan rincian sebagai berikut dan pada Lampiran 6.

Tabel 5.3.15. Piutang Retribusi

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar dan Kios	1.214.897.925,00	868.362.350,00	346.535.575,00	39,91
2	Piutang Retribusi Sewa Tanah, GOR, Kantin dll	53.345.000,00	69.350.000,00	(16.005.000,00)	(23,08)
3	Piutang Retribusi Sewa Rumah Dinas	92.685.000,00	58.040.000,00	34.645.000,00	59,69
4	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	390.521.402,00	0,00	390.521.402,00	100
Jumlah		1.751.449.327,00	995.752.350,00	755.696.977,00	75,89

Tabel 5.3.16. Rincian Piutang Retribusi Pelayanan Pasar dan Kios

No	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2022	31 Desember 2023	31 Desember 2024	31 Desember 2025
1	ROKU				6.015.000,00	4.650.000,00
2	BLOK ATAS	15.366.000	61.128.000,00	85.962.000,00	125.062.000,00	148.314.000,00
3	BLOK BAWAH	5.160.000	7.836.000,00	10.512.000,00	27.326.000,00	58.044.000,00
4	LOS BLOK BAWAH	2.808.000	2.808.000,00	11.594.000,00	22.416.000,00	23.772.000,00
5	TOILET	8.640.000	8.640.000,00	8.820.000,00	15.600.000,00	15.600.000,00
6	PEDAGANG SAYUR	10.353.000	14.529.000,00	22.620.000,00	24.447.000,00	25.056.000,00
7	PEDAGANG IKAN	26.883.000	55.245.000,00	74.907.000,00	81.084.000,00	81.432.000,00
8	PEDAGANG PISANG	5.394.000	8.700.000,00	11.484.055,00	11.484.055,00	11.484.055,00
9	PEDAGANG KELAPA	0,00	0,00	0,00	870.000,00	1.044.000,00
10	PEDAGANG BUAH	0,00	0,00	0,00	17.496.000,00	17.496.000,00
11	PEND. PASAR PLASA	0,00	1.265.800,00	3.211.920,00	4.595.520,00	5.435.520,00
12	PEND. KUE	0,00	792.000,00	792.000,00	810.000,00	810.000,00
13	PEND. TELUR	1.872.000	2.652.000,00	4.680.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00
14	TUNGGAKAN PER TAHUN	4.100.000	8.535.000	10.028.000	28.889.000	0,00
Jumlah Tunggakan setiap Tahun		80.576.000	172.130.800	244.610.975	371.044.575	398.087.575,00
JUMLAH PIUTANG DARI TAHUN 2021 S/D 2024						868.362.350
JUMLAH PIUTANG DARI TAHUN 2025						398.087.575,00
JUMLAH TUNGGAKAN DARI TAHUN 2021 S/D 2025						1.266.449.925
PEMBAYARAN TUNGGAKAN DARI TAHUN 2021 S/D 2025						51.552.000
JUMLAH PIUTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DAN KIOS TAHUN 2021 s/d 2025						1.214.897.925,00

Tabel 5.3.17. Rincian Piutang Retribusi Sewa Tanah. GOR. Kantin dll

No	Nama	Alamat Sewa Tanah Pemda	Piutang Tahun 2024	Pengurangan 2025	Penambahan 2025	Piutang Tahun 2025	Keterangan
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1	WIWIK KUSTI NINGSIH	Duk Capil (Photo Copy)	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	
2	RUSMIATA	Jl. Kantin BPKAD	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	
3	SAUDAH	Jl. Merdeka Raya	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Lunas Jan 2025
4	SARIWANTO	Jl. Merdeka Raya	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Lunas Jan 2025
5	KARDI	Jl. Merdeka Raya	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	Lunas Jan 2025



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

No	Nama	Alamat Sewa Tanah Pemda	Piutang Tahun 2024	Pengurangan 2025	Penambahan 2025	Piutang Tahun 2025	Keterangan
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
6	M. RIZA FAKHLEVI	Jl. Merdeka Raya (Taman)	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	DASIMAH	Jl. Merdeka Raya (Taman)	4.500.000,00	3.300.000,00	0,00	1.200.000,00	
8	LISA ARIANI	Jl. Merdeka Raya (Taman)	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	
9	BASRUNI	Jl. Merdeka Raya (Taman)	3.400.000,00	2.200.000,00	0,00	1.200.000,00	Lunas Jan 2025
10	MASRITA	Jl. Merdeka Raya (Taman)	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
11	NOOR HASANAH	Jl. Merdeka Raya	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	BIDIN	Jl. Kartini	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	TASRIM	Jl. Merdeka Raya (Taman)	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	
14	RUDIAR/ELLIYANOR	Jl. Kartini	0,00	0,00	0,00	0,00	Lunas Jan 2025
15	JUAYAH	Merdeka Raya (Taman)	0,00	0,00	0,00	0,00	Lunas Jan 2025
16	H. PAUJI DIMAN	Jl. Merdeka Raya	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	BAMBANG HERMANTO	Jl. Merdeka Raya (Taman)	0,00	0,00	825.000,00	825.000,00	
18	RIZKI NILA HERMAWATI	Jl. Merdeka Raya	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	ARIE RESEPATI DWI PRASETYO	Desa Sababillah	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	Juli s/d Des 2020
20	H. MUSLIM	Jl. Kartini/Gdg Garam	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	Tunggakan Thn 2014
21	SYARIFUDIN H BADARI	Jl. P. Raya Buntok	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	Meninggal
22	MASRITA	Jl. Tugu Buntok	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	Tunggakan Thn 2014
23	KARDI	Jl. Tugu (dpn Gereja)	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	Tunggakan Thn 2014
24	TITIN SUMARNI	Jl. Tugu (dpn Gereja)	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	Tunggakan Thn 2014
25	SARMIN	Jl. P. Raya Buntok	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	Tunggakan Thn 2014
26	HUSNIAH	Jl. Merdeka Raya/Gg Garam	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	Tunggakan Thn 2014
27	SAMSUDINOOR	Jl. Pelita Raya	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	Tunggakan Thn 2014
28	SUTRISNO	Jl. Merdeka Raya	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	Tunggakan Thn 2014
29	NARDI	Jl. Merdeka Raya	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	Tunggakan Thn 2014
30	SYAHRIL	Jl. Kartini	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	Tunggakan Thn 2014
31	SUNIN	Jl. Tugu	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	Tunggakan Thn 2014
32	SYAHID DARUSMAN/BENGKEL	Jl. P. Raya Buntok	1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00	Tunggakan Thn 2014
33	M. AWAB ABDULLAH	Jl. P. Raya Buntok	1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00	Tunggakan Tahun 2014
34	JOKO PURWONO	Jl. Pelita Raya	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	Tunggakan Tahun 2014
35	RUDIAR	Jl. Kartini	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	Tunggakan Tahun 2014
36	ROBIX DWINANDIANTOK	Jl. Pelita Raya	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	Tunggakan Tahun 2014
Jumlah			69.350.000,00	16.830.000,00	825.000,00	53.345.000,00	



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah

No	Uraian	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
1	Piutang Kemenkes Covid 19 Ub. Desember 2022	0,00	0,00
2	Piutang Klaim PT. RCI	7.942.000,00	0,00
3	Piutang PT. Madhani	31.878.081,00	0,00
4	Piutang Klaim PT.BPN	1.152.975,00	0,00
5	Piutang Klaim PT Armindo	1.639.500,00	0,00
6	Piutang Klaim PT WASCO	4.266.070,00	0,00
7	Piutang Klaim PT RIUNG	53.701.343,00	0,00
8	Piutang Klaim PT. Abadi Jaya L	2.007.780,00	0,00
9	Piutang Klaim PT. HASNUR	3.008.170,00	0,00
10	Piutang Klaim BPJS TK	8.073.104,00	0,00
11	Piutang Klaim INHEALTH MANDIRI	0,00	0,00
12	Piutang MCU Partai Gerindra	0,00	0,00
13	Piutang Klaim BPJS RJTL RITL Ub. Nov 2024	0,00	0,00
14	Piutang Klaim PT. RIUNG	0,00	0,00
15	BPJS-TK	3.992.742,00	0,00
16	BPJS-TK Tahun 2025	31.489.849,00	0,00
17	PT Riung	241.369.788,00	0,00
Jumlah		390.521.402,00	0,00

5.3.1.1.9.3. Piutang Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	4.575.000,00	4.575.000,00

Piutang Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp4.575.000,00 dan Rp4.575.000,00 Nilai tersebut merupakan piutang atas likuidasi PT Palangka Nusantara sesuai dengan Berita Acara RUPS Luar Biasa PT Palangka Nusantara dengan No. Akta 45 tanggal 21 April 2014 oleh Notaris An. Ellys Nathalina, SH., MH. Berdasarkan BA RUPS Luar Biasa tersebut diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Barito Selatan menerima Rp4.575.000,00 atas likuidasi PT Palangka Nusantara.

5.3.1.1.9.4. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	3.125.600.327,25	5.806.644.776,14

Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp3.125.600.327,25 dan Rp5.806.644.776,14. Piutang Pengembalian sisa nilai kelebihan potongan pajak penghasilan PPh 21 periode Mei - Desember 2015 akibat adanya perubahan PTKP yang sudah ditetapkan oleh KP2KP Buntok melalui Surat Kepala Kantor KP2KP Buntok Nomor SP-528/WPJ.29/PPK.16/2015 tanggal 21 November 2016 sebesar Rp1.662.357.336,00 dan Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Rp1.463.242.991,25 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.18. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Piutang Pendapatan dari Pengembalian	3.125.600.327,25	3.259.637.633,14	(134.037.305,89)	(4,11)
2	Piutang Pendapatan BLUD	0,00	2.547.007.143,00	(2.547.007.143,00)	(100)
Jumlah		3.125.600.327,25	5.806.644.776,14	(2.681.044.448,89)	(46,17)



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.3.19. Piutang Pendapatan dari Pengembalian

No	Uraian	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
I	II	III	IV
1	Piutang Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	1.662.357.336,00	1.662.357.336,00
2	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	322.590.000,00
4	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	1.055.300.595,26	925.870.282,81
5	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	0,00
6	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten	407.942.395,99	348.820.014,33
	Jumlah	3.125.600.327,25	3.259.637.633,14

Tabel 5.3.20. Piutang BLUD

No	Uraian	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
1	Piutang Kemenkes Covid 19 Ub. Desember 2022	0,00	0,00
2	Piutang Klaim PT. RCI	0,00	7.942.000,00
3	Piutang PT. Madhani	0,00	31.878.081,00
4	Piutang Klaim PT.BPN	0,00	1.152.975,00
5	Piutang Klaim PT Armindo	0,00	1.639.500,00
6	Piutang Klaim PT WASCO	0,00	4.266.070,00
7	Piutang Klaim PT RIUNG	0,00	35.644.698,00
8	Piutang Klaim PT. Abadi Jaya.L	0,00	2.007.780,00
9	Piutang Klaim PT. HASNUR	0,00	3.008.170,00
10	Piutang Klaim BPJS TK	0,00	8.073.104,00
11	Piutang Klaim INHEALTH MANDIRI	0,00	479.845,00
12	Piutang MCU Partal Gerindra	0,00	5.833.250,00
13	Piutang Klaim BPJS RJTL RITL Ub. Nov 2024	0,00	2.323.567.100,00
14	Piutang Klaim PT. RIUNG	0,00	117.521.828,00
15	BPJS-TK	0,00	3.992.742,0
16	BPJS-TK Tahun 2025	0,00	0,00
17	PT Riung	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	2.547.007.143,00

**5.3.1.1.9.5. Piutang Transfer
Pemerintah Pusat**

31 Desember 2025
0,00

31 Desember 2024
0,00

Piutang Pemerintah Pusat dana Bagi Hasil Pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 Piutang transfer pemerintah pusat per 31 Desember 2024 yang Piutang Dana Transfer Umum DBH SDA Kehutanan-PSDH sebesar Rp0,00

5.3.1.1.9.6. Piutang Transfer Antar Daerah

31 Desember 2025
36.197.147.056,00

31 Desember 2024
0,00

Saldo Piutang Transfer Antar Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp36.197.147.056,00 dan Rp0,00 Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2024. Piutang tersebut merupakan piutang atas Bagi Hasil Pajak Daerah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kepada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yaitu berupa 50% nilai transfer Triwulan III & Triwulan IV Tahun 2025 sesuai SK Gubernur Kalimantan Tengah



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

No. 100.3.1/101/2026 serta pemotongan sesuai MoU antara Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk bantuan bencana Sumatera (pencatatan nilai piutang dilakukan secara netto setelah dikurangi pemotongan).

5.3.1.1.9.7. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

31 Desember 2025

31 Desember 2024

10.313.451,00

18.240.651,00

Piutang Lainnya adalah Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran yang merupakan piutang atas penjualan angsuran Hewan Ternak. Piutang penjualan Rumah Dinas yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan dengan nilai per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp10.313.451,00 dan Rp18.240.651,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.21. Bagian Lancar Penjualan Angsuran

No	Uraian	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
1	Penjualan Angsuran Rumah Dinas	0,00	7.927.200,00
2	Penjualan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas	10.313.451,00	10.313.451,00
Jumlah		10.313.451,00	18.240.651,00

Tabel 5.3.22. Rincian Bagian Lancar Penjualan Angsuran Rumah Dinas

No	Uraian	Angsuran lancar per bulan yang akan jatuh tempo pada 2024 (jumlah bulan)	Pengurangan	Penambahan	Piutang 31 Desember 2025 (Rp)
1	M. Nanang Salahudin	0,00	0,00	0,00	0,00
2	M. Rayhani	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rangin Turang	7.927.200,00	7.927.200,00	0,00	0,00
Jumlah		7.927.200,00	7.927.200,00	0,00	0,00

5.3.1.1.9.8. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

31 Desember 2025

31 Desember 2024

101.700.800,00

101.700.800,00

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp101.700.800,00 dan Rp101.700.800,00 tidak ada perubahan data, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.23. Rincian Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	Penambahan/ Pengurangan	31 Desember 2025 (Rp)
1	a.n Ari Ampung	50.978.000,00	0,00	50.978.000,00
2	a.n Drs. Bage	19.456.000,00	0,00	19.456.000,00
3	a.n Hober B Bingan	10.266.800,00	0,00	10.266.800,00
4	a.n Yakut Ratih	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00
Jumlah		101.700.800,00	0,00	101.700.800,00



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

5.3.1.1.9.9. Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	0,00	1.274.690.297,14

Saldo Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar R0,00 dan Rincian piutang pendapatan dari pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.3.24. Rincian Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Belanja Modal**

No	SKPD	Nilai Tahun 2025	Nilai Tahun 2024	Keterangan
1	Dinas PUPR	9.000.000,00	0,00	STS No.0474/RDT/2026 tgl 06-03- 2026 Pengembalian lebih bayar atas pekerjaan Penataan/Pembangunan Mess Kejaksaan Negeri Buntok a.n CV. Mahkota Gemilang Pusat Buntok sebesar Rp. 9.000.000,-
2	Dinas PUPR	99.950.000,00	0,00	STS No.0415/RDT/2026 tgl 13/01/2026 Pengembalian Kelebihan pembayaran atas pekerjaan Rehab berat rumah dinas guru Mahanjandau CV. Anjungan Aruna Pusat Buntok sebesar Rp. 99.950.000,-
3	Dinas PUPR	146.250.000,00	0,00	STS No.0425/RDT/2026 tgl 28 Januari 2026 Pengembalian lebih bayar atas pekerjaan Rehab berat SDN Danau Bambore CV. SETALAR PUTANG DURUI Pusat Palangka Raya sebesar Rp. 146.250.000,-
4	Dinas PUPR	87.570.000,00	0,00	STS No.0463/RDT/2026 tgl 27-2- 2026 Pengembalian lebih bayar atas pekerjaan Rehab Kantor Kecamatan Dusun Selatan a.n CV. TATAU ANDRAU Pusat Jaar sebesar Rp. 87.570.000,-
5	Dinas PUPR	111.000,00	0,00	STS No.0475/RDT/2026 tgl 06-03- 2026 Pengembalian lebih bayar atas pekerjaan Rehabilitasi SD Negeri 1 Rangka Ilung a.n CV. Tetei Pamelum Pusat Buntok sebesar Rp. 111.000,-
6	Dinas PUPR	1.000,00		STS No.05276/RDT/2026 Pengembalian lebih bayar atas pekerjaan rehab berat SDN Jelapat an. CV. Cahaya Bakti Pusat Buntok Rp.1.000,-
7	Dinas PUPR	34.000,00		STS No.0527/RDT/2026 tgl 21- 04-2026 Pengembalian lebih bayar atas pekerjaan rehab berat SDN 1 Gagutur a.n CV. Riwtut Barito Pusat Buntok sebesar Rp. 34.000,-
8	Dinas PUPR	22.000,00		STS No.0528/RDT/2026 tgl 21- 04-2026 Pengembalian lebih bayar atas pekerjaan rehab berat SDN 1 Sei Telang a.n CV. Tetei Pamelum Pusat Buntok sebesar Rp. 22.000,-
9	Dinas PUPR	50.000,00		STS No.0529/RDT/2026 tgl 21- 04-2026 Pengembalian lebih bayar atas pekerjaan rehab berat SDN 1 Bambure Raya a.n CV. Yudha Perkasa Pamelum Pusat Buntok sebesar Rp. 50.000,-
10	Dinas PUPR	0,00	471.413.532,30	Kurang Volume atas pekerjaan Gedung dan Bangunan
11	Dinas Pendidikan	0,00	52.952.037,82	Kurang Volume atas pekerjaan Gedung dan Bangunan
12	Dinas Kesehatan	0,00	212.282.887,78	Kurang Volume atas pekerjaan Gedung dan Bangunan
13	BPKAD	0,00	189.221.824,91	Kurang Volume atas pekerjaan Gedung dan Bangunan
14	Dinas PUPR	0,00	348.820.014,33	Kurang Volume atas pekerjaan Jalan, Irigasi dan Jaringan
		342.988.000,00	1.274.690.297,14	

Penjelasan atas Rincian Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal terdapat pada **Lampiran 7**.

5.3.1.1.9.10. Piutang Lain-Lainnya	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	163.200.600,00	171.972.100,00



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Saldo Piutang Lain- Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp163.200.600,00 dan Rp171.972.100.

5.3.1.1.9.11. Penyisihan Piutang

31 Desember 2025 31 Desember 2024
(13.748.785.075,46) (12.851.667.108,49)

Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar (Rp13.748.785.075,46) dan (Rp12.851.667.108,49) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.25. Penyisihan Piutang

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Penyisihan Piutang Pajak PBB-P2	(11.672.411.529,27)	(11.138.516.325,84)	(533.895.203,43)	4,79
2	Penyisihan Piutang Pajak Hotel	(202.983.940,00)	(202.985.190,00)	1.250,00	0,00
3	Penyisihan Piutang Pajak Galian C	(470.900.000,00)	(470.900.000,00)	0,00	0,00
4	Penyisihan Piutang Retribusi Sewa Rumah Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Penyisihan Piutang Retribusi Sewa Tanah, GOR, Kantin dll	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar dan Kios	(1.015.854.137,50)	(682.840.062,50)	(333.014.075,00)	48,77
7	Penyisihan Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	(4.575.000,00)	(4.575.000,00)	0,00	0,00
8	Penyisihan Piutang Catering / Rumah Makan Restoran	(101.556.858,00)	(97.372.409,00)	(4.184.449,00)	4,30
9	Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya (BLUD)	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Pinjaman melalui BLUD	0,00	(1.598.652,00)	1.598.652,00	(100)
11	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(60.556.859,69)	(42.647.718,15)	(17.909.141,54)	41,99
12	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha- Pemakaian Kekayaan Daerah- Penyewaan Tanah dan Bangunan	(52.932.500,00)	(64.055.000,00)	11.122.500,00	(17,36)
13	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha- Pemakaian Kekayaan Daerah- Penyewaan Bangunan	(55.000.000,00)	(34.162.500,00)	(20.837.500,00)	61,00
14	Penyisihan Piutang Retribusi	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang- Dana Bergulir kepada Masyarakat	(10.313.451,00)	(10.313.451,00)	0,00	0,00
17	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	(101.700.800,00)	(101.700.800,00)	0,00	0,00
Jumlah		(13.748.785.075,46)	(12.851.667.108,49)	(897.117.966,97)	6,98

Metode pencatatan Piutang dengan menggunakan Metode Penyisihan Piutang Tak Tertagih.

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

1. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - c. Umur piutang kurang dari 1 tahun;
 - d. Wajib Pajak kooperatif;
 - e. Wajib Pajak likuid; dan/atau



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

- f. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
2. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun;
 - b. Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - c. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
3. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 3 tahun;
 - b. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - c. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
4. Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang diatas 3 tahun;
 - b. Wajib Pajak tidak ditemukan;
 - c. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure).

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

1. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;
2. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan;
3. Kualitas Diragukan, jika umur piutang lebih dari 3 bulan sampai dengan 12 bulan; dan
4. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

1. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
2. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
3. Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
4. Kualitas macet, jika piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan, atau Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Daerah/Negara.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan:

1. 0,5% (setengah perseratus) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar.
2. 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
3. 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
4. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
5.3.1.1.10. Persediaan	112.282.360.606,70	46.384.545.494,89

Persediaan merupakan , barang/bahan habis pakai yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah persediaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp112.282.360.606,70 sedangkan per 31 Desember 2024 sebesar



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Rp46.384.545.494,89. Saldo Persediaan di Tahun 2025 terdiri dari Persediaan Barang Habis Pakai Alat tulis kantor dan benda pos sebesar Rp68.712.434,00, persediaan barang habis pakai berupa obat dan BMHP sebesar Rp9.254.069.633,30 dan persediaan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat sebesar Rp102.959.578.539,40 Persediaan dinilai berdasarkan hasil perhitungan fisik (opname) terhadap persediaan dengan menggunakan harga perolehan terakhir dan/atau nilai wajar yang ditetapkan oleh bendahara barang masing-masing SKPD. Daftar Barang Persediaan per 31 Desember 2025 disajikan di tabel berikut:

Tabel 5.3.26. Rincian Persediaan per SKPD

NO	SKPD	Jumlah Persediaan Tahun2025 (RP)	Keterangan
1	BADAN PENDAPATAN DAERAH	7.413.000,00	Alat Tulis Kantor
2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	6.784.900,00	Alat Tulis Kantor
3	DINAS KESEHATAN	3.360.284,00	Alat Tulis Kantor
		4.920.804.793,91	Obat
5	UPT RSUD JARAGA SASAMEH	4.261.382.208,39	Obat
6	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	25.229.300,00	Alat Tulis Kantor
7	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	935.800,00	Alat Tulis Kantor
8	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	1.142.000,00	Alat Tulis Kantor
9	KECAMATAN DUSUN SELATAN	5.324.500,00	Alat Tulis Kantor
10	INSPEKTORAT DAERAH	1.772.000,00	Alat Tulis Kantor
11	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.604.000,00	Alat Tulis Kantor
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.284.800,00	Alat Tulis Kantor
13	SEKRETARIAT DPRD	262.950,00	Alat Tulis Kantor
14	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	71.882.631,00	Obat
		469.000,00	Benda Pos
15	KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI	1.120.400,00	Alat Tulis Kantor
16	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1.719.000,00	Alat Tulis Kantor
17	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	8.365.500,00	Alat Tulis Kantor
		925.000,00	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya
18	DINAS PERHUBUNGAN	99.933.333,34	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat
19	DINAS PENDIDIKAN	1.212.940.000,00	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya
20	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	88.542.584.300,48	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya
	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	201.983.577,58	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya
21	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	3.335.861.200,00	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya
22	SEKRETARIAT DAERAH	9.560.927.928,00	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya
23	KECAMATAN DUSUN UTARA	5.348.200,00	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya
		112.282.360.606,70	



Catatan Atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.3.27. DAFTAR BELANJA MODAL YANG MASUK KE BELANJA PERSEDIAAN

NO	KETERANGAN	31 Des 2024 (Rp)	Bertambah 2025	Berkurang 2025	31 Des 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO SELATAN	30.159.460.586,58	60.927.693.391,90	0,00	91.087.153.978,48
2	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BARITO SELATAN	0,00	3.303.836.200,00	0,00	3.303.836.200,00
3	DINAS PERHUBUNGAN KAB. BARITO SELATAN	0,00	99.933.333,34	0,00	99.933.333,34
4	SEKRETARIAT DAERAH KAB. BARITO SELATAN	7.015.358.250,00	0,00	0,00	7.015.358.250,00
5	KECAMATAN DUSUN UTARA	5.348.200,00	0,00	0,00	5.348.200,00
TOTAL		37.180.167.036,58	64.331.462.925,24	0,00	101.511.629.961,82

Mutasi Persediaan Aset yang akan di Hibah per 31 Desember 2025

Tabel. 5.3.28. Rincian Mutasi aset persediaan yang akan di hibah

I	SALDO AUDITED KDP TAHUN 2024		37.180.167.036,58
II	BERTAMBAH SELAMA 2025		
1	Bertambah dari kesalahan belanja 2025	64.331.462.925,24	
	TOTAL BERTAMBAH (KIB F)		64.331.462.925,24
III	BERKURANG SELAMA 2025		
1			
	TOTAL BERKURANG (KIB F)		0,00
IV	TOTAL AKHIR KIB F = I + II - III		101.511.629.961,82

Penambahan – Aset persediaan

Penambahan Aset Persediaan yang akan di hibah atas kesalahan belanja Modal Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan serta Jalan Irigasi dan Jaringan TA 2025 Sebesar Rp64.331.462.925,24 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp60.927.693.391,90, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebesar Rp3.303.836.200,00, Dinas Perhubungan Rp99.933.333,34.



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Pengurangan – Aset Persediaan

Sampai tersusunnya Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan selama 2025 belum melakukan pengurangan atas Aset Persediaan sebagaimana data diatas

5.3.1.2. INVESTASI JANGKA PANJANG

31 Desember 2025
197.710.131.777,00

31 Desember 2024
151.635.529.952,00

Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Non Permanen berupa Dana Bergulir dan Investasi Permanen berupa Penyertaan Modal. Jumlah Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp197.710.131.777,00 dan Rp151.635.529.952,00 Jika dibandingkan Tahun 2024. Investasi Jangka Panjang mengalami kenaikan sebesar Rp46.074.601.825,00 atau 30,39%.

Tabel 5.3.29. Investasi Jangka Panjang

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen-Dana Bergulir	39.275.750,00	39.275.750,00	0,00	0,00
2	Investasi Jangka Panjang Permanen-Penyertaan Modal	197.670.856.027,00	151.596.254.202,00	46.074.601.825,00	30,39
Jumlah		197.710.131.777,00	151.635.529.952,00	46.074.601.825,00	30,39

5.3.1.2.1. Dana Bergulir

31 Desember 2025
39.275.750,00

31 Desember 2024
39.275.750,00

Dana Bergulir merupakan investasi jangka panjang non permanen kepada masyarakat/kelompok usaha yang bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi. Sampai dengan 31 Desember 2025, saldo Dana Bergulir sebesar Rp39.275.750,00 dari total saldo dikategorikan macet tak tertagih berdasarkan hasil verifikasi lapangan Tim Penagihan tentang Penetapan Dana Bergulir Macet. Kriteria macet meliputi: penerima tidak diketahui keberadaannya, usaha sudah tutup >5 tahun, meninggal dunia tanpa ahli waris, dan telah dilakukan upaya penagihan maksimal namun tidak berhasil.

Dana Bergulir macet tidak mempengaruhi SILPA tahun berjalan karena sudah dikeluarkan dari Kas Daerah pada saat penyaluran tahun-tahun sebelumnya. Namun menurunkan kualitas aset dan menjadi perhatian dalam penilaian opini BPK.

Dana Bergulir merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Jumlah Investasi Non Permanen Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp39.275.750,00 dan Rp39.275.750,00.

Menurut Peraturan Bupati Barito Selatan No. 48 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi dana Bergulir Pemerintah Kabupaten Barito Selatan. pada BAB IV Pasal 5:



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

1. Ayat c. berbunyi "Penyajian dana Bergulir di Neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan diperoleh dengan mengurangkan perkiraan dana Bergulir Diragukan Tertagih.
2. Ayat e.3. yang berbunyi bahwa dana Bergulir tidak dapat ditagih apabila belum melakukan peluasan melebihi 3 (tiga) tiga tahun setelah tanggal jatuh tempo.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka nilai dana Bergulir UPPKS sampai dengan 31 Desember 2024 yang dikategorikan sebagai dana Bergulir yang kemungkinan masih bisa ditagih pada tahun 2025 sebesar Rp39.275.750,00 seharusnya berubah menjadi dana Bergulir tidak tertagih dan dikeluarkan dari Neraca sehingga nilai menjadi Rp0.00 Berdasarkan Konsultasi dengan BPKP dan BPK RI pada tahun 2018. hal tersebut tidak bisa dilakukan penghapusan dan harus dilakukan inventarisasi dan kunjungan ke lokasi untuk memastikan keberadaan kelompok.

Pada tahun 2019 telah dilakukan kunjungan ke kelompok UPPKS. dimana diperoleh keterangan sebagai berikut:

1. Keberadaan Kelompok sudah ada yang bubar;
2. Keanggotaan Kelompok sudah ada yang meninggal Dunia;
3. Usaha Kelompok sudah Macet atau Berhenti;
4. Anggota Kelompok adalah keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera

Dana Bergulir merupakan investasi jangka panjang non permanen kepada masyarakat/kelompok usaha yang bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi. Sampai dengan 31 Desember 2025 saldo Dana Bergulir sebesar Rp39.275.750,00 dari total saldo dikategorikan macet tak tertagih berdasarkan hasil verifikasi lapangan Tim Penagihan tentang Penetapan Dana Bergulir Macet. Kriteria macet meliputi: penerima tidak diketahui keberadaannya, usaha sudah tutup >5 tahun, meninggal dunia tanpa ahli waris, dan telah dilakukan upaya penagihan maksimal namun tidak berhasil.

5.3.1.2.2. Penyertaan Modal

31 Desember 2025	31 Desember 2024
197.670.856.027,00	151.596.254.202,00

Investasi Jangka Panjang Permanen adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan (tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali). yang merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Jumlah Investasi Permanen per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp197.670.856.027,00 dan Rp151.596.254.202,00

Tabel 5.3.30. Rincian Investasi Jangka Panjang Permanen- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	PT BPD Kalimantan Tengah	100.150.000.000,00	100.150.000.000,00	0,00	0,00
2	PDAM Kabupaten Barito Selatan	94.520.856.027,00	48.446.254.202,00	46.074.601.825,00	95,10
3	PD Jamkrida	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah		197.670.856.027,00	151.596.254.202,00	46.074.601.825,00	30,39

Penjelasan :



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Pada Tanggal 03 Desember 2020 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.
2. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2023 Tanggal 30 Agustus 2023 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Barito.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tanggal 26 Juni 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

5.3.1.2.2.1. PT BPD Kalteng (Cost Method)	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	100.150.000.000,00	100.150.000.000,00

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Selatan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah sebesar Rp100.150.000.000,00 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dan sebesar Rp100.150.000.000,00 pada tahun 2024. Penyajian nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Barito Selatan pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah per 31 Desember 2025 dilakukan dengan menggunakan metode biaya karena persentase kepemilikannya di bawah 20%.

**Tabel 5.3.31. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank
Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah**

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Saldo Awal	100.150.000.000,00	87.850.000.000,00	12.300.000.000,00	14
2	Penambahan Penyertaan Modal	0,00	12.300.000.000,00	(12.300.000.000,00)	0
3	Pengurangan	0,00	0,00	0,00	0
Saldo Akhir		100.150.000.000,00	100.150.000.000,00	0,00	0

5.3.1.2.2.2. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Barito Kabupaten Barito Selatan (Equity Method)	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	94.520.856.027,00	48.446.254.202,00

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Barito Kabupaten Barito Selatan merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 1991 tanggal 30 Maret 1991 tentang Pendirian PDAM Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan yang diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Kepegawaian PDAM Kabupaten Barito Selatan

Peraturan Daerah Barito Selatan Nomor 3 tahun 2023. Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Barito

Penyajian nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Barito Kabupaten Barito Selatan per 31 Desember 2025 dilakukan dengan menggunakan metode ekuitas dengan pertimbangan presentase kepemilikannya adalah sebesar 100%.



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.3.32. Perhitungan Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Barito Kabupaten Barito Selatan

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Saldo Awal	48.446.254.202,00	51.486.503.989,00	(3.040.249.787,00)	(5,90)
2	Koreksi dan Reklasifikasi	609.044.366,00	0,00	609.044.366,00	
3	Penambahan Penyertaan Modal dari Pemerintah Daerah	48.392.296.033,00	0,00	48.392.296.033,00	0,00
4	Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	(2.926.738.574,00)	(3.040.249.787,00)	113.511.213,00	(3,73)
	Saldo Akhir	94.520.856.027,00	48.446.254.202,00	46.074.601.825,00	95,10

Penyajian LKPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 dilampiri Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada bagian **Lampiran 8** yaitu Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Barito untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 berdasarkan Nomor :00025/2.0474/AU.8/11/0762.1/1/III/2026 Tanggal 9 Maret 2026 sudah berdasarkan hasil Audit dari Kantor Akuntan Publik (KAP).

Adapun terkait informasi penambahan nilai penyertaan modal senilai Rp48.392.296.033,00. Nilai tersebut merupakan paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR dan telah diserahkan kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Barito berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah tentang Serah Terima Barang Milik Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Nomor: 037.2/680/V/BPKAD/2025 tanggal 3 November Tahun 2025. NPHD beserta rincian tersebut ada pada bagian **Lampiran 9**.

5.3.1.2.2.3. PT JAMKRIDA Kalimantan **31 Desember 2025** **31 Desember 2024**
Tengah (Cost Method) **3.000.000.000,00** **3.000.000.000,00**

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Barito Selatan pada PT Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Tengah (PT Jamkrida Kalteng) sampai dengan Tahun 2025 adalah sebesar Rp3.000.000.000,00 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tanggal 26 Juni 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Penyajian nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Barito Selatan pada PT Jamkrida Kalteng sampai dengan per 31 Desember 2024 dilakukan dengan menggunakan metode biaya karena persentase kepemilikannya di bawah 20%

5.3.1.2.2.4. PD Danum Belum **31 Desember 2025** **31 Desember 2024**
(Equity Method) **0,00** **0,00**

PD Danum Belum merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Barito Selatan Nomor 03 Tahun 1994 tanggal 31 Maret 1994 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah danum Belum. Total penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan yang telah disetor ke PD danum Belum sebesar Rp1.925.000.000,00.

Penyajian nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan pada PD danum Belum Kabupaten Barito Selatan per 31 Desember 2023 dilakukan dengan menggunakan metode ekuitas dengan pertimbangan persentase kepemilikannya adalah sebesar 100%. Untuk tahun 2020 "PD. Danum Belum"



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

mengalami kerugian dan tidak dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan sehingga nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan pada PD danum Belum per 31 Desember 2025 adalah Nihil atau Nol karena ekuitasnya bersaldo negatif.

PD danum Belum pada periode buku TA 2018 – 2023 tidak menerbitkan Laporan Keuangan dan tidak dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Akuntan Publik. Laporan keuangan PD danum Belum terakhir yang diterbitkan pada periode tahun 2017.

Berdasarkan penelusuran LHP BPK atas pemeriksaan LKPD Kabupaten Barito Selatan TA 2010 – 2017 diketahui bahwa sampai dengan 31 Desember 2017 nilai penyertaan modal beserta kerugian tahun 2017 pada PD Danum Belum sebagai berikut.

Tabel 5.3.31 Perhitungan Penyertaan Modal pada PD Danum Belum per 31 Desember 2017

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Penyertaan Modal Pemerintah	1.925.000.000,00
2	Akumulasi Kerugian (31 Des 2017)	(2.455.334.810,00)
3	Kerugian Tahun Berjalan	(382.168.557,00)
	Saldo Penyertaan Modal 31 Des 2017	(912.503.367,00)

5.3.1.2.2.5. PT Palangka Nusantara (Cost Method)

31 Desember 2025	31 Desember 2024
0,00	0,00

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Barito Selatan pada PT Palangka Nusantara sebesar Rp25.000.000,00 merupakan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sesuai dengan Surat Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 005/007/Ek tanggal 5 Januari 2004 hal Persyaratan RUPS PT Palangka Nusantara Nomor: 575/008/Ek tanggal 5 Januari 2004 hal persyaratan Calon Komisaris PT. Palangka Nusantara, dan Nomor 582/039/Ek tanggal 12 Januari 2004 hal Hasil RUPS PT. Palangka Nusantara, dimana untuk Tahun Anggaran 2005 sampai dengan Tahun 2022 tidak terdapat tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

Penyajian nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Barito Selatan pada PT Palangka Nusantara dilakukan dengan menggunakan metode biaya karena persentase kepemilikannya di bawah 20%. Tetapi berdasarkan Berita Acara RUPS Luar Biasa PT Palangka Nusantara dengan Nomor Akta 45 tanggal 21 April 2014 atas Likuiditas PT Palangka Nusantara oleh Notaris Ellys Nathalina. SH. MH, maka nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Barito Selatan pada PT. Palangka Nusantara menjadi Rp0.00.

5.3.1.3. ASET TETAP

31 Desember 2025	31 Desember 2024
2.502.502.157.908,62	2.252.105.027.105,22

Aset Tetap terdiri dari:

- 1) Tanah.
- 2) Peralatan dan Mesin.



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

- 3) Gedung dan Bangunan.
- 4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan.
- 5) Aset Tetap Lainnya dan
- 6) Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Aset Tetap yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan per 31 Desember 2025 dan 2024. Perolehan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Barito Selatan berasal dari kapitalisasi Belanja Modal dan/atau belanja lainnya yang diatribusikan dalam nilai Aset Tetap tahun anggaran berkenaan. Saldo Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Barito Selatan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.502.502.157.908,62 Secara keseluruhan terjadi Kenaikan aset tetap sebesar Rp250.397.130.803,40 atau 11,12% dibanding dari tahun 2024 senilai Rp2.252.105.027.105,21 dengan uraian sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 5.3.33. Rincian Aset Tetap Per Jenis Aset

Jenis Aset	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
I	II	III	IV	V
Tanah	293.207.089.649,35	271.092.162.979,35	22.114.926.670,00	8,16
Peralatan dan Mesin	444.144.107.828,96	398.544.979.745,85	45.599.128.083,11	11,44
Gedung dan Bangunan	1.052.672.850.069,33	902.098.779.704,50	150.574.070.364,83	16,69
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.114.642.191.588,90	1.895.391.751.701,35	219.250.439.887,55	11,57
Aset Tetap Lainnya	4.858.377.158,98	4.451.198.388,03	407.178.770,95	9,15
Konstruksi Dalam Pengerjaan	90.545.502.789,88	92.542.029.414,76	(1.996.526.624,88)	(2,16)
Akumulasi Penyusutan	(1.497.567.961.176,78)	(1.312.015.874.828,62)	(185.552.086.348,16)	14,14
Jumlah	2.502.502.157.908,62	2.252.105.027.105,22	250.397.130.803,40	11,12

Tabel 5.3.34. DATA TRANSAKSI ASET KABUPATEN BARITO SELATAN

NO.	DATA ASET	SALDO AWAL AUDITED 2025	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6
1	TANAH	271.092.162.979,35	22.114.926.670,00	0	293.207.089.649,35
2	PERALATAN DAN MESIN	398.544.979.745,85	53.713.288.222,00	8.114.160.138,89	444.144.107.828,96
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	902.098.779.704,50	235.438.188.515,51	84.864.118.150,68	1.052.672.850.069,33
4	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	1.895.391.751.701,35	308.065.949.322,95	88.815.509.435,40	2.114.642.191.588,90
5	ASET TETAP LAINNYA	4.451.198.388,03	465.435.395,95	58.256.625,00	4.858.377.158,98
6	KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN	92.542.029.414,76	45.161.655.151,37	47.158.181.776,25	90.545.502.789,88
	JUMLAH	3.564.120.901.933,84	664.959.443.277,78	229.010.226.126,22	4.000.070.119.085,40

5.3.1.3.1. Tanah

<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
293.207.089.649,35	271.092.162.979,35

Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp293.207.089.649,35 dan Rp271.092.162.979,35 atau mengalami penambahan sebesar Rp22.114.926.670,00 atau 8,16% dibandingkan Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut.



Catatan Atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.3.35. Rincian Aset Tetap Tanah Per OPD

NO.	SKPD	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)	TREND (%)
I	II	III	IV	V
1	SEKRETARIAT DPRD	5.176.893.100,00	5.176.893.100,00	0,00
2	SEKRETARIAT DAERAH	10.066.089.793,95	10.066.089.793,95	0,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	189.593.816.203,48	170.885.884.533,48	10,95
4	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	13.483.098.001,32	12.876.734.001,32	4,71
5	DINAS PERHUBUNGAN	1.853.352.000,00	1.379.397.000,00	34,36
6	DINAS KUMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	218.200.000,00	218.200.000,00	0,00
7	DINAS KESEHATAN	1.398.000.400,00	1.398.000.400,00	0,00
8	BLUD RSUD JARAGA SASAMEH	3.016.762.000,00	3.016.762.000,00	0,00
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	556.800.000,00	556.800.000,00	0,00
10	DINAS PENDIDIKAN	35.735.531.765,13	35.655.795.765,13	0,22
11	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	164.100.000,00	164.100.000,00	0,00
12	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	536.600.000,00	536.600.000,00	0,00
13	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	201.597.426,79	201.597.426,79	0,00
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	250.596.158,00	250.596.158,00	0,00
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	225.000.000,00	0,00	(100,00)
16	DINAS SOSIAL	1.006.550.000,00	1.231.550.000,00	(18,27)
17	DINAS PERIKANAN	622.815.000,00	0,00	(100,00)
18	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN	5.352.332.275,72	5.610.332.275,72	(4,60)
19	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	5.109.831.985,00	3.457.946.985,00	47,77
20	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	7.985.550.150,00	7.755.310.150,00	2,97
21	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	353.600.000,00	353.600.000,00	0,00
22	BADAN PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00
23	INSPEKTORAT DAERAH	183.400.000,00	183.400.000,00	0,00
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	261.400.000,00	261.400.000,00	0,00
25	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	552.841.645,79	552.841.645,79	0,00
26	DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA	5.961.519.064,87	5.961.519.064,87	0,00

M



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

NO.	SKPD	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)	TREND (%)
I	II	III	IV	V
27	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	130.600.000,00	130.600.000,00	0,00
28	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	678.192.760,44	0,00	0,00
29	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	304.260.000,00	982.452.760,44	(69,03)
30	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0,00	0,00	0,00
31	KECAMATAN JENAMAS	94.500.000,00	94.500.000,00	0,00
32	KECAMATAN DUSUN HILIR	550.860.000,00	550.860.000,00	0,00
33	KECAMATAN KARAU KUALA	343.085.000,00	343.085.000,00	0,00
34	KECAMATAN DUSUN SELATAN	225.605.000,00	225.605.000,00	0,00
35	KECAMATAN DUSUN UTARA	289.678.000,00	289.678.000,00	0,00
36	KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI	724.031.918,86	724.031.918,86	0,00
Total		293.207.089.649,35	271.092.162.979,35	8,16

Tabel 5.3.36. Mutasi Aset Tetap Tanah disajikan pada tabel sebagai berikut:

I	SALDO AWAL		271.092.162.979,35
II	BERTAMBAH		
1	Reklas Masuk dari Aset Lainnya atas batal Hibah	18.333.403.670,00	
2	Koreksi Pencatan atas Serifikat yang telah dilakukan Penilaian	3.781.523.000,00	
	JUMLAH		22.114.926.670,00
III	BERKURANG		
	JUMLAH		
IV	JUMLAH SALDO AKHIR TANAH (I+II-III)		293.207.089.649,35

Rincian Serifikat yang telah dilakukan Penilaian **Lampiran 10**

Penambahan – Tanah

Pada Aset Tetap Tanah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan selama Tahun 2025 penambahan Reklas Masuk atas kesalahan penganggaran pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Rp18.333.403.670,00. Penilaian atas penerbitan sertifikat yang telah dilakukan penilaian Rp3.781.523.000,00. Pencatatan atas sertifikat yang telah dilakukan penilaian pada Dinas Pendidikan sebesar Rp79.736.000,00. Tanah Bangunan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan sebesar Rp606.364.000,00. Tanah pada Dinas Pekerjaan Umum atas sertifikat tanah di bawah jalan wilayah Kel. Hilir Sper, Kelurahan Buntok Kota dan Keluaran Jelapat sebesar Rp374.528.000 atas sertifikat tanah di bawah Jalan Kel. Jelapat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp230.240.000,00, Tanah Komplek Rumah Dinas Exs. SMEA/SMA (A&B), Dinas Koperasi

M



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp1.651.885.000,00, Tanah Bangunan Pasar Saik (A&B) pada Dinas Perikanan sebesar Rp364.815.000,00, Tanah Pasar SAIK/ UPT. Tempat Penjualan dan Pelelangan Ikan, Dinas Perhubungan sebesar Rp486.255.000,00, Tanah Dermaga Gudang Gudang Garam.

Pengurangan – Tanah

Pengurangan tanah selama Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Barito Selatan tidak ada melakukan pengurangan atas tanah yang dikuasai sampai Desember 2025.

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan ditemukan bahwa ada 22 Persil Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Barito Selatan masih terdapat permasalahan persambitan dengan ahli waris tanah serta tanah milik masyarakat tercaplok oleh (SDN 5 Bundar), terdapat lokasi tanah mau longsor pada (SDN Mantarem), terdapat lokasi tanah termasuk kawasan Gambut (PIPPIB) pada (Tanah SDN 1 Sanggu, Tanah SDN 12 buntok, dan tanah SDN Parigi) serta lokasi tanah tersebut termasuk kawasan HPK terdiri dari (Tanah SDN Muara Bamanen), lokasi tanah termasuk kawasan KSA/KPA terdiri dari (Tanah SDN Danau Harapan, dan Tanah SDN Muara Puning), lokasi tanah bersengketa dengan ahli waris terdapat pada (Tanah SDN 4 Bangkuang), juga terindikasi sertifikat tumpang tindih dengan sertifikat masyarakat pada (Tanah SDN Kananai dan Tanah SDN Rampa Mea), Terindikasi sertifikat tumpang tindih kemungkinan sudah diterbitkan namun sampai dengan saat ini sertifikatnya tidak ada (Tanah SMPN Satap 8 Dusun Utara), terindikasi sengketa dengan Kades/Kades tidak bersedia tanda tangan persetujuan persambitan (Tanah SDN 1 Damparan) dan terindikasi lokasi tanah tersebut termasuk Kawasan pada (SDN Hulu Tampang, Tanah SDN 2 Ngurit Desa Bulu, Tanah Gedung SDN Telang Gemilang, Tanah SDN Maruga dan Tanah SDN Batukol) dan terindikasi lokasi tanah tersebut termasuk kawasan Hutan Produksi (HP) pada Tanah Bangunan Gedung SDN Bintang Ara.

5.3.1.3.2. Peralatan dan Mesin

31 Desember 2025

31 Desember 2024

444.144.107.828,96

398.544.979.745,85

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 sebesar Rp444.144.107.828,96 mengalami kenaikan 11,44% atau sebesar Rp45.599.128.083,11 dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp398.544.979.745,85 diakibatkan adanya proses Belanja Modal dan/atau belanja lainnya yang diatribusikan ke dalam nilai aset tetap Tahun Anggaran berkenaan serta penambahan dari kapitalisasi Belanja Barang/Jasa Tahun Berjalan dan Proses Penghapusan atas Aset Tetap Rusak Berat dan Hibah, dapat dirinci pada masing – masing SOPD, sebagai berikut:

Tabel 5.3.37. Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per SKPD

NO	PERANGKAT DAERAH	2025	2024	TAMBAH/KURANG	TREND (%)
1	2	3	4	5	6
1	DINAS PENDIDIKAN	44.677.281.251,66	44.006.357.147,08	670.924.104,58	1,52
2	DINAS KESEHATAN	51.932.137.517,52	49.513.683.220,52	2.418.454.297,00	4,88
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JARAGA SASAMEH	108.900.683.002,29	106.052.941.314,29	2.847.741.688,00	2,69
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	27.052.364.176,37	20.048.338.625,37	7.004.025.551,00	34,94
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	5.764.385.252,59	5.600.573.692,59	163.811.560,00	2,92
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	3.687.062.745,25	16.132.750.430,50	(12.445.687.685,25)	(77,15)



Catatan Atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	2025	2024	TAMBAH/KURANG	TREND (%)
1	2	3	4	5	6
7	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	12.340.639.285,25		12.340.639.285,25	100,00
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	6.988.770.380,25	6.285.730.421,25	703.039.959,00	11,18
9	DINAS SOSIAL	1.330.176.815,69	4.588.618.184,28	(3.258.441.368,59)	(71,01)
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3.965.211.230,25	3.981.048.230,25	(15.837.000,00)	(0,40)
11	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	6.944.327.526,45	8.748.256.000,98	(1.803.928.474,53)	(20,62)
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	14.149.570.296,01	11.171.146.797,01	2.978.423.499,00	26,66
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.876.063.755,56	3.772.700.955,56	103.362.800,00	2,74
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3.501.154.401,52		3.501.154.401,52	100,00
15	DINAS PERHUBUNGAN	8.494.821.435,49	8.219.801.556,49	275.019.879,00	3,35
16	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	11.031.886.221,25	3.715.684.249,25	7.316.201.972,00	196,90
17	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.077.572.890,25	2.915.242.890,25	162.330.000,00	5,57
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.852.781.022,84	2.405.846.416,84	446.934.606,00	18,58
19	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA	2.407.811.343,85	1.858.875.743,85	548.935.600,00	29,53
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	2.213.893.679,66	2.056.929.780,66	156.963.899,00	7,63
21	DINAS PERIKANAN	1.313.977.110,25		1.313.977.110,25	100,00
22	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	1.752.658.958,30	1.591.948.958,29	160.710.000,01	10,10
23	SEKRETARIAT DAERAH	41.629.877.622,73	38.305.105.317,68	3.324.772.305,05	8,68
24	SEKRETARIAT DPRD	18.635.412.510,78	15.311.554.922,78	3.323.857.588,00	21,71
25	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	3.707.076.099,14	3.350.842.547,14	356.233.552,00	10,63
26	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	28.847.603.072,45	21.369.036.017,79	7.478.567.054,66	35,00
27	BADAN PENDAPATAN DAERAH	4.009.451.762,34		4.009.451.762,34	100,00
28	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.599.219.424,12	2.125.817.020,30	473.402.403,82	22,27
29	INSPEKTORAT	3.487.192.972,25	3.592.079.472,25	(104.886.500,00)	(2,92)
30	KECAMATAN DUSUN HILIR	1.761.409.381,15	2.928.482.601,15	(1.167.073.220,00)	(39,85)
31	KECAMATAN DUSUN SELATAN	1.762.151.692,70	1.505.297.659,70	256.854.033,00	17,06
32	KECAMATAN DUSUN UTARA	1.495.546.389,25	1.074.019.037,25	421.527.352,00	39,25
33	KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI	2.083.981.842,48	1.665.343.243,48	418.638.599,00	25,14
34	KECAMATAN JENAMAS	1.827.234.951,52	1.457.844.951,52	369.390.000,00	25,34
35	KECAMATAN KARAU KUALA	2.632.868.966,25	2.199.874.016,25	432.994.950,00	19,68
36	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.409.850.843,25	993.208.323,25	416.642.520,00	41,95
	TOTAL	444.144.107.828,96	398.544.979.745,85	45.599.128.083,11	11,44



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.3.38. Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin

I	SALDO AWAL AUDITED 2024		398.544.979.745,85
II	BERTAMBAH SELAMA 2025		
1	Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Berjalan (LRA) TA 2025	50.944.552.172,00	
2	Penerimaan Hibah Barang & CSR 2025	200.215.000,00	
3	BOS KINERJA	135.537.700,00	
4	BOS REGULER	1.108.290.500,00	
5	Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa (PEMELIHARAAN TA. 2025)	8.125.000,00	
6	Reklasifikasi belanja barang dan jasa menjadi peralatan dan mesin atas Kesalahan Penganggaran Tahun Berjalan	1.116.667.850,00	
7	Reklasifikasi dari pengadaan Gedung dan Bangunan ke Peralatan dan mesin	199.900.000,00	
	TOTAL BERTAMBAH		53.713.288.222,00
III	BERKURANG SELAMA 2025		
1	Pemberian Hibah Barang	418.585.714,28	
2	Usulan Penjualan Atas Lelang TA. 2025	510.376.000,00	
3	Kesalahan Pos Belanja Modal reklasifikasi ke Belanja Barang dan Jasa	45.187.000,00	
4	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun Berjalan ke Barang Habis Pakai	27.998.000,00	
5	Pembayaran Hutang ditahun Berjalan TA 2024 BLUD UPTD RSUD Jaraga Sasameh Buntok	275.000.000,00	
6	Koreksi atas Extracom keluar tahun Lalu	78.860.000,00	
7	Extracom keluar tahun 2025	657.059.220,00	
8	Reklasifikasi Keluar ke Aset Lainnya (Kondisi RB) TA. 2025	6.101.094.204,61	
	TOTAL BERKURANG		8.114.160.138,89
IV	TOTAL SALDO AKHIR KIB B = I + II - III		444.144.107.828,96

Mutasi Akumulasi Penyusutan s.d Tahun 2025 Aset Tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.3.39. Mutasi Akumulasi Penyusutan s.d Tahun 2025 Aset Tetap Peralatan dan Mesin

I	SALDO AWAL AKUMULASI PENYUSUTAN AUDITED 2024		(243.849.909.754,72)
II	BERTAMBAH SELAMA 2025		
1	Beban Penyusutan s.d TA 2025	(42.601.883.908,20)	
2	Koreksi atas Penambahan beban Barang dan Jasa	(92.819,75)	
3	Dikarenakan Salah Pencatatan Nilai Baik Karena Kapitalisasi atau Kurang Catat Nilai Aset	(2.750.326,29)	
4	Dikarenakan Perubahan Kondisi/Status Aset dari Aset Lainnya menjadi Aset Tetap	(297.719.788,37)	
	TOTAL BERTAMBAH		(42.902.446.842,61)
III	BERKURANG SELAMA 2025		
1	Terdapat Aset Tetap yang akan diusulkan lelang	(510.376.000,00)	
2	Dikarenakan Perubahan Kondisi/Status Aset dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya (Rusak Berat)	(6.144.906.832,54)	



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

I	SALDO AWAL AKUMULASI PENYUSUTAN AUDITED 2024	(243.849.909.754,72)
3	Koreksi atas kesalahan penghitungan pelatan dan mesin Tahun Sebelumnya	(334.974.180,05)
4	Dikarenakan atas pembulatan penghitungan akm. Penyusutan	(3,74)
5	Kesalahan perhitungan beban penyusutan Peralatan dan Mesin yang dilakukan pemeliharaan	(2.133.000,00)
	TOTAL BERKURANG	(6.992.390.016,33)
IV	TOTAL SALDO AKHIR AKUMULASI PENYUSUTAN KIB B = I + II - III	(279.759.966.581,00)

Pertambahan – Peralatan dan Mesin

Penambahan yang berasal dari Belanja Modal sesuai dengan realisasi Belanja Modal APBD Kabupaten Barito Selatan berupa Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp50.944.552.172, penambahan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Berjalan (LRA BLUD) TA 2025 sebesar Rp1.171.807.150,00, penambahan Dana Hibah PT. Adaro berupa Dana CSR TA 2025 sebesar Rp200.215.000,00 terdiri dari (Dinas Pendidikan sebesar Rp14.350.000,00 Dinas Kesehatan sebesar Rp48.225.000, Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp137.640.000,00) penambahan atas LRA Belanja Modal Peralatan dan Mesin dari Belanja JKN pada Dinas Kesehatan sebesar Rp346.139.003,00 penambahan atas dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja pada Dinas Pendidikan berupa Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp135.537.700,00 Penambahan dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler pada Dinas Pendidikan sebesar Rp1.108.290.500,00, penambahan dari Belanja Barang/Jasa atas Atribusi/Pemeliharaan tahun berjalan sebesar Rp8.125.000,00 terdiri dari (Dinas Perikanan sebesar Rp950.000,00 dan Dinas Sosial sebesar Rp7.175.000,00) penambahan Rp230.250.850,00 terdiri dari (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp1.250.000,00 Dinas Perhubungan sebesar Rp55.055.250, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Serta Pariwisata sebesar Rp25.745.600,00, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp19.000.000,00 Sekretariat DPRD sebesar Rp79.900.000,00 Kec. Dusun Selatan sebesar Rp48.800.000,00 dan dari Kec. Gunung Bintang Awai sebesar Rp500.000,00). Koreksi atas Reklasifikasi dari belanja Modal Gedung dan Bangunan – Bangunan Gedung Kantor ke Peralatan dan Mesin – Alat Studio – sound system pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp199.900.000,00 dan Penambahan dari Belanja Barang dan Jasa yang menjadi Peralatan dan Mesin pada Sekretariat Daerah sebesar Rp886.417.000,00.

Pengurangan – Peralatan dan Mesin

Pengurangan diakibatkan adanya Aset Rusak Berat Peralatan dan Mesin Tahun berjalan sebesar Rp4.372.954.460,61 terdiri dari (Dinas Pendidikan sebesar Rp751.511.095,42, Dinas Kesehatan sebesar Rp115.232.500,00, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebesar Rp79.389.999,99, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp63.538.860,07, Sekretariat Daerah sebesar Rp2.951.098.060,95, Inspektorat sebesar Rp126.200.000 dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Sumber Daya Manusia sebesar Rp285.983.944,18). Pengurangan diakibatkan Salah Pos Belanja Modal (seharusnya Belanja Barang dan Jasa) yang tidak diakui jadi Aset Tetap sebesar Rp45.377.000,00 terdiri dari (Dinas Kesehatan sebesar Rp190.000,00, UPTD RSUD Jaraga Sasameh sebesar Rp27.025.000,00 terdiri dari (UPTD RSUD Jaraga Sasameh sebesar Rp24.200.000, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp16.094.600,00, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp1.125.000, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata sebesar Rp1.557.400,00, dan Kec. Dusun Utara sebesar Rp1.700.000 dan Kec. Jenamas sebesar Rp510.000,00) terdapat koreksi pencatatan tahun sebelumnya Utang BLUD sebesar Rp275.000.000,00 terdapat pengurangan dari proses Ekstracomtable atas Pengadaan TA. 2025 sebesar Rp657.059.220,00 terdiri dari (Dinas Pendidikan sebesar Rp554.570.000, Dinas Kesehatan sebesar Rp38.889.420, UPTD RSUD Jaraga Sasameh sebesar Rp23.350.000, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp2.265.300, Inspektorat Daerah sebesar Rp15.484.500 dan Kec. Jenamas sebesar Rp22.500.000) dan terdapat koreksi Aset



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

tetap menjadi Koreksi atas Extracom keluar tahun 2024 sebesar Rp78.860.000,00 terdiri dari (Dinas Pendidikan sebesar Rp15.660.000 dan Kec. Dusun Hilir sebesar Rp63.200.000) dan Kesalahan Realisasi atas Pengadaan Belanja Modal Tahun 2025 ke Rekening Belanja Hibah dari Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Serta Pariwisata sebesar Rp9.300.000,00 dan Usulan Penghapusan atas Lelang pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp510.376.000,00 Pengurangan atas Koreksi Aset Rusak Berat (RB) ke Aset Lainnya – Aset Lain-Lain tahun berjalan terdapat pada (Dinas Kesehatan sebesar Rp344.687.200, Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp28.756.897,00 Sekretariat Daerah sebesar Rp220.933.541,67, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp194.285.714,28 pada Kec. Dusun Hilir sebesar Rp1.275.110.600,00, Kec. Dusun Utara Sebesar Rp35.238.647,00 dan Kec. Gunung Bintang Awai sebesar Rp29.356.400,00.

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Kabupaten Barito Selatan TA 2025 pada Peralatan dan Mesin masih belum memuat Penerimaan Barang Hibah masuk dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atas Program Percepatan Pelaksanaan Digitalisasi Pembelajaran di Sekolah Pengadaan Barang SMARTBOARD berupa *Interactive Flat Panel* (IFP) beserta kelengkapannya ke Sekolah penerima karena belum tervalidasinya data dan Dokumen Hibah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta pada Satuan Polisi Pamong Praja terdapat 1 (satu) Mobil Patroli atas Hibah dari Kementerian Kesehatan RI belum diketahui nilai perolehan dan akan dicatat kedalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan ditahun berikutnya.

5.3.1.3.3. Gedung dan Bangunan

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	1.052.672.850.069,33	902.098.779.704,50

Aset tetap berupa Gedung dan Bangunan saldo per 31 Desember 2025 sebesar **Rp1.052.672.850.069,33** mengalami kenaikan sebesar nilai **Rp150.574.070.364,83** atau **16,69%** dibandingkan Tahun 2024 sebesar **Rp902.098.779.704,50**, Penambahan ini berasal dari Penerimaan Hibah *Corporate Social Responsibility* (CSR), Belanja atribusi/pemeliharaan, Belanja Modal dan/atau belanja lainnya yang diatribusikan ke dalam nilai aset tetap tahun anggaran berkenaan. Namun demikian, pada beberapa Perangkat Daerah terdapat penurunan diakibatkan atas Hibah Persediaan, Aset Rusak Berat dan Reklasifikasi ke KIB B, KIB D dan KDP

Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.40 Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per SKPD

NO	SOPD	31 Des 2025 (Rp) Nilai Buku	31 Des 2024 (Rp) Nilai Buku	Kenaikan/ Penurunan	Trend %
1	2	3	4	5	6
1	DINAS PENDIDIKAN	274.666.464.302,44	249.502.679.576,44	25.163.784.726,00	10,09
2	DINAS KESEHATAN	110.032.959.395,93	96.613.252.823,23	13.419.706.572,70	13,89
3	UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JARAGA SASAMEH	41.654.676.530,88	40.684.655.820,00	970.020.710,88	2,38
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	63.179.739.232,88	55.265.997.938,27	7.913.741.294,61	14,32
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	81.285.968.152,07	62.948.522.726,90	18.337.445.425,17	29,13
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	3.107.826.473,93	8.935.988.281,93	-5.828.161.808,00	-65,22
7	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	8.428.003.008,18	-	8.428.003.008,18	100,00



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

NO	SOPD	31 Des 2025 (Rp) Nilai Buku	31 Des 2024 (Rp) Nilai Buku	Kenaikan/ Penurunan	Trend %
1	2	3	4	5	6
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	6.079.584.107,88	5.979.784.107,88	99.800.000,00	1,67
9	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	5.105.847.756,97	4.886.347.756,97	219.500.000,00	4,49
10	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN	26.013.194.491,63	28.216.619.805,54	-2.203.425.313,91	-7,81
11	DINAS PERIKANAN	6.190.438.435,55	-	6.190.438.435,55	100,00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	7.653.526.386,23	7.653.526.386,23	-	-
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.380.933.000,00	2.380.933.000,00	-	-
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8.338.950.300,00	-	8.338.950.300,00	100,00
15	DINAS SOSIAL	2.297.652.792,86	9.873.445.950,00	-7.575.793.157,14	-76,73
16	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4.851.812.440,00	4.803.079.000,00	48.733.440,00	1,01
17	DINAS PERHUBUNGAN	10.827.662.727,00	10.192.400.227,00	635.262.500,00	6,23
18	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	6.271.712.043,00	5.371.275.176,46	900.436.866,54	16,76
19	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	75.459.888.267,66	67.894.112.084,50	7.565.776.183,16	11,14
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	8.277.380.150,00	6.644.182.250,00	1.633.197.900,00	24,58
21	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA	67.533.079.169,27	59.519.972.780,63	8.013.106.388,64	13,46
22	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4.167.237.145,00	3.928.637.145,00	238.600.000,00	6,07
23	SEKRETARIAT DAERAH	91.000.059.864,43	68.334.223.641,85	22.665.836.222,58	33,17
24	INSPEKTORAT	7.174.115.514,32	781.517.000,00	6.392.598.514,32	817,97
25	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	7.058.404.200,00	6.867.929.790,00	190.474.410,00	2,77
26	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	35.790.915.750,95	27.346.731.467,09	8.444.184.283,86	30,88
27	BADAN PENDAPATAN DAERAH	6.428.606.569,00	-	6.428.606.569,00	100,00
28	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	6.231.273.407,41	5.570.953.228,00	660.320.179,41	11,85
29	SEKRETARIAT DPRD	42.622.678.578,44	39.233.507.092,44	3.389.171.486,00	8,64
30	KECAMATAN DUSUN SELATAN	6.520.795.606,00	5.355.939.231,00	1.164.856.375,00	21,75
31	KECAMATAN DUSUN HILIR	5.529.823.015,25	2.317.074.880,00	3.212.748.135,25	138,66
32	KECAMATAN DUSUN UTARA	3.029.138.093,00	3.079.088.093,00	-49.950.000,00	-1,62
33	KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI	5.857.564.159,19	2.447.111.011,14	3.410.453.148,05	139,37
34	KECAMATAN KARAU KUALA	4.515.208.651,98	3.369.590.783,00	1.145.617.868,98	34,00
35	KECAMATAN JENAMAS	4.782.267.850,00	4.613.667.850,00	168.600.000,00	3,65
36	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.327.462.500,00	1.486.032.800,00	841.429.700,00	56,62

M



Catatan Atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

NO	SOPD	31 Des 2025 (Rp) Nilai Buku	31 Des 2024 (Rp) Nilai Buku	Kenaikan/ Penurunan	Trend %
1	2	3	4	5	6
	TOTAL	1.052.672.850.069,33	902.098.779.704,50	150.574.070.364,83	16,69

Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.3.41. Rincian Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan

I	NILAI BUKU AUDITED 31 DES 2024		902.098.779.704,50
II	BERTAMBAH SELAMA 2025		
1	Perolehan Dari Belanja Modal TA. 2025	172.512.642.353,00	
2	Belanja Penerimaan CSR 2025	605.506.500,00	
3	BOS REGULER	6.000.000,00	
4	Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa 2025	9.139.335.224,38	
5	Data atribusi/pemeliharaan TA. 2025	9.342.912.860,88	
6	Reklasifikasi dari Jalan Irigasi dan Jaringan 2025	847.082.000,00	
7	Reklasifikasi dari Kontruksi Dalam Pengerjaan TA 2025	42.781.393.811,25	
8	Reklasifikasi dari Aset Lain - Lain TA 2025	203.315.766,00	
	TOTAL BERTAMBAH		235.438.188.515,51
III	BERKURANG SELAMA 2025		
1	Pemberian Hibah Barang (penghapusan 2025)	1.693.006.800,00	
2	Pemberian Hibah Barang TA 2025 ke Persediaan	1.121.123.333,34	
3	Kesalahan Belanja 2025 ke belanja barang dan jasa	1.923.575.000,00	
4	kelebihan bayar SP2D melebihi nilai Kontrak	342.988.000,00	
5	Reklasifikasi antar Aset Tetap dari B. Modal Gedung dan Bangunan Tahun Berjalan ke Jalan Irigasi dan Jaringan	879.060.000,00	
6	Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena Perubahan Kebijakan/Status Ditahun Berjalan (barang RB)	8.536.761.868,52	
7	Reklasifikasi antar Aset Tetap dari B. Modal Tahun Berjalan ke Peralatan dan Mesin	199.900.000,00	
8	Ekstrakompabel (Perub. Kebijakan Batas Kapitalisasi)	6.000.000,00	
9	Reklas Belanja Modal ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	27.069.144.379,00	
10	Reklas atas kurang Volume Pekerjaan Tahun 2025	1.074.223.930,59	
11	Reklas atas kesalahan belanja ke Persediaan untuk di Hbah	41.991.383.339,78	
12	Koreksi Double Catat CSR Tahun 2024	26.951.499,45	
	TOTAL BERKURANG		84.864.118.150,68
	TOTAL AKHIR KIB C = I + II - III		1.052.672.850.069,33

Tabel 5.3.42. Rincian Mutasi Akumulasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan

I	NILAI AKUMULASI AUDITED 31 DES 2024	-186.234.308.403,49
II	BERTAMBAH SELAMA 2025	

M



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

I	NILAI AKUMULASI AUDITED 31 DES 2024		-186.234.308.403,49
1	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun Berjalan	-18.514.958.774,25	
2	Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya	-1.634.788,18	
3	Dikarenakan Salah Pencatatan Antar Aset Tetap yang Berdampak pada Perubahan Masa Manfaat	-664.531.072,79	
4	Dikarenakan Perubahan Kondisi/Status Aset dari Aset Lainnya menjadi Aset Tetap (Rusak Berat)	-62.027.910,71	
5	Koreksi Pembulatan Akumulasi Penyusutan BANGUNAN GEDUNG KANTOR	-0,34	
TOTAL BERTAMBAH			-19.243.152.546,27
III	BERKURANG SELAMA 2025		
1	Dikarenakan Perubahan Kondisi/Status Aset dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya (Dihibah 2025)	-79.435.100,67	
2	Dikarenakan Perubahan Kondisi/Status Aset dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya (Rusak Berat)	-1.202.192.904,15	
3	Koreksi atas pembulatan penghitungan Akm. Penyusutan Gedung Kantor	-1,91	
4	Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya	-228.619.949,22	
5	Dikarenakan Salah Pencatatan Nilai Baik Karena Kapitalisasi atau Lebih Catat Nilai Aset	-29.961.825,00	
6	Dikarenakan Salah Pencatatan Antar Aset Tetap yang Berdampak pada Perubahan Masa Manfaat	-80.409.216,13	
7	Dikarenakan Perubahan Kondisi/Status Aset dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya (Rusak Berat)	-566.593.757,55	
TOTAL BERKURANG			-2.187.212.754,63
TOTAL AKHIR KIB C = I + II - III			-203.290.248.195,13

Pertambahan – Gedung dan Bangunan

Penambahan aset Gedung dan Bangunan merupakan Perolehan Dari Belanja Modal TA. 2025 sebesar Rp172.512.642.353,00, Penerimaan Barang atas Hibah *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Dinas Pendidikan sebesar Rp605.506.500,00, Penambahan Bos Reguler Rp6.000.000,00, Penambahan aset gedung dan bangunan atas Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp9.139.335.224,38, Penambahan atas atribusi/pemeliharaan TA. 2025 sebesar Rp9.342.912.860,88, penambahan aset Gedung dan bangunan atas Reklasifikasi dari Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp847.082.000,00, penambahan aset Gedung dan bangunan atas Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp42.781.393.811,25, penambahan aset Gedung dan bangunan atas Reklasifikasi dari Aset lain - lain sebesar Rp203.315.766,00.

Pengurangan – Gedung dan Bangunan

Pengurangan Gedung dan Bangunan pada Tahun Anggaran 2025 diakibatkan adanya Hibah sebesar Rp1.693.006.800,00, pengurangan atas Reklasifikasi Kesalahan Belanja Modal ke Persediaan sebesar Rp1.121.123.333,34, pengurangan aset Gedung dan Bangunan atas kesalahan Belanja ke Belanja Barang Dan Jasa sebesar Rp1.923.575.000,00, pengurangan Gedung dan Bangunan atas kelebihan bayar SP2D sebesar Rp342.988.000,00, Reklasifikasi antar Aset Tetap dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Berjalan ke Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp879.060.000,00, Reklasifikasi ke Aset lain - lain karena Perubahan Kebijakan/Status Ditahun Berjalan (Gedung RB) sebesar Rp8.536.761.868,52, Reklasifikasi antar Aset Tetap dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Berjalan ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp199.900.000,00, pengurangan atas Ekstrakomp sebesar Rp6.000.000,00, pengurangan Reklasifikasi antar Aset Tetap dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp27.069.144.379,00, reklasifikasi atas kurang volume pekerjaan Tahun 2025 sebesar Rp1.074.223.930,59, Reklas atas kesalahan belanja ke Persediaan untuk di hibah sebesar



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Rp41.991.383.339,78, dan Koreksi Double Catat *Corporate Social Responsibility* (CSR) Tahun 2024 sebesar Rp26.951.499,45.

Dalam Laporan Aset ini belum dicatat atas Hibah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia atas belanja Revitalisasi sekolah di Pemerintah Kabupaten Barito Selatan karena sampai tersusunnya Laporan belum mendapatkan Dokumen Hibah dari Kementerian dan akan dicatat Laporan Keuangan pada Tahun berikutnya.

5.3.1.3.4. Jalan, Jaringan, dan Irigasi

31 Desember 2025	31 Desember 2024
2.114.642.191.588,90	1.895.391.751.701,35

Aset tetap berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Saldo per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.114.642.191.588,90 mengalami kenaikan sebesar Rp219.250.439.887,55 atau 11,57% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp1.895.391.751.701,35. Penambahan dari kapitalisasi Belanja Modal dan/atau belanja lainnya yang diatribusikan ke dalam nilai aset tetap Tahun Anggaran berkenaan. Jumlah Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan per 31 Desember 2024 dan 2025 masing- masing dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.43. Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan jaringan Per SKPD

NO	SOPD	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	TREND (%)
1	2	4	3	5	6
1	DINAS PENDIDIKAN	1.086.491.872,77	1.086.491.872,77	0,00	0,00
2	DINAS KESEHATAN	9.337.444.318,25	8.142.175.754,00	1.195.268.564,25	14,68
3	UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JARAGA SASAMEH	3.303.469.596,00	3.068.594.596,00	234.875.000,00	7,65
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.920.564.707.788,43	1.714.428.360.968,50	206.136.346.819,93	12,02
5	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	138.332.168.781,53	127.963.035.527,28	10.369.133.254,25	8,10
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	459.510.300,00	472.426.900,00	(12.916.600,00)	(2,73)
7	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	12.916.600,00		12.916.600,00	100,00
8	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	94.362.272,00	94.362.272,00	0,00	0,00
9	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	10.036.197.993,50	18.904.398.707,69	(8.868.200.714,19)	(46,91)
10	DINAS PERIKANAN	8.868.200.714,19		8.868.200.714,19	100,00
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.611.737.999,00	1.611.737.999,00	0,00	0,00
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	98.010.000,00	98.010.000,00	0,00	0,00
13	DINAS SOSIAL	424.879.000,00	424.879.000,00	0,00	0,00
14	DINAS PERHUBUNGAN	1.314.081.455,00	1.314.081.455,00	0,00	0,00
15	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	1.205.141.700,00	1.205.141.700,00	0,00	0,00
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	11.252.000,00	11.252.000,00	0,00	0,00
17	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	3.358.227.000,00	3.358.227.000,00	0,00	0,00
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	54.258.000,00	54.258.000,00	0,00	0,00

M



Catatan Atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

NO	SOPD	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	TREND (%)
1	2	4	3	5	6
19	SEKRETARIAT DAERAH	4.700.837.786,23	3.687.024.237,11	1.013.813.549,12	27,50
20	INSPEKTORAT	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
21	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
22	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	29.600.000,00	297.806.000,00	(268.206.000,00)	(90,06)
23	BADAN PENDAPATAN DAERAH	268.206.000,00		268.206.000,00	100,00
24	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	149.800.000,00	149.800.000,00	0,00	0,00
25	SEKRETARIAT DPRD	3.891.414.500,00	3.891.414.500,00	0,00	0,00
26	KECAMATAN DUSUN SELATAN	1.110.455.769,00	1.110.455.769,00	0,00	0,00
27	KECAMATAN DUSUN HILIR	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	0,00
28	KECAMATAN DUSUN UTARA	715.599.505,00	614.596.805,00	101.002.700,00	16,43
29	KECAMATAN GB AWAI	197.304.465,00	197.304.465,00	0,00	0,00
30	KECAMATAN KARAU KUALA	1.358.624.882,00	1.358.624.882,00	0,00	0,00
31	KECAMATAN JENAMAS	1.879.359.946,00	1.679.359.946,00	200.000.000,00	11,91
32	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	51.931.345,00	51.931.345,00	0,00	0,00
Total		2.114.642.191.588,90	1.895.391.751.701,35	219.250.439.887,55	11,57

Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.3.44. Rincian Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan jaringan

I	SALDO AWAL AUDITED 2024		1.895.391.751.701,35
II	BERTAMBAH SELAMA 2025		
1	Perolehan Dari Belanja Modal Jaringan dan Irigasi (APBD/ DAK) TA 2025	287.563.196.250,00	
2	BOS REGULER TA. 2025	5.500.000,00	
3	Biaya Umum TA 2025	110.280.200,00	
4	Data Atribusi Pemeliharaan TA 2025	6.376.944.085,87	
5	Kapitalisasi Non Belanja Modal (Barjas)	1.506.337.531,83	
6	Reklasifikasi antar Aset Tetap dari aset lainnya ke JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	11.080.880.520,00	
7	Reklasifikasi antar Aset Tetap dari KDP ke JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	186.590.371,00	
8	Reklasifikasi Belanja dari Gedung ke JALAN IRIGASI DAN JARINGAN TA.2025 (Kesalahan Belanja)	879.060.000,00	
9	MUTASI BERTAMBAH ATAS PENGADAAN TA. 2025	357.160.364,25	
TOTAL BERTAMBAH			308.065.949.322,95
III	BERKURANG SELAMA 2025		
1	Pemberian atas Hibah	50.919.357.723,29	
2	Salah Pos Belanja Modal TA 2025 REKLAS KE ke Gedung dan Bangunan dari JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	847.082.000,00	
3	Reklasifikasi antar Aset Tetap dari B. Modal Tahun Berjalan ke KDP	14.222.517.700,00	
4	Reklas atas kesalahan belanja Ke Belanja Hibah	18.416.139.425,75	
5	Kekurangan Volume Pekerjaan	2.026.222.908,65	
6	Reklas Belanja Modal JALAN IRIGASI DAN JARINGAN TA 2025 ke Belanja Barang dan Jasa	2.364.125.364,25	
7	Ekstrakontabel Tahun 2025	20.064.313,46	
8	MUTASI BERTAMBAH ATAS PENGADAAN TA. 2025		
TOTAL BERKURANG			88.815.509.435,40
TOTAL SALDO AKHIR KIB B = I + II - III			2.114.642.191.588,90



Catatan Atas Laporan Keuangan **Pemerintah Kabupaten Barito Selatan**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Pertambahan – Jalan, Irigasi dan Jaringan

Penambahan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp287.563.196.250,00, merupakan penambahan Perolehan dari belanja modal jaringan dan irigasi (APBD/ DAK) TA 2025, Penambahan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pendidikan dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler TA. 2025 sebesar Rp5.500.000,00 Penambahan dari Biaya Umum TA 2025 Sebesar Rp110.280.000,00, terdiri dari (UPTD RSUD Jaraga Sasameh sebesar Rp35.000.000,00 dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp75.280.200,00) Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Data Atribusi/Pemeliharaan sebesar Rp6.376.944.085,87, terdiri dari (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp5.363.130.536,75 dan Pada Sekretariat Daerah sebesar Rp1.013.813.549,12), Penambahan Kapitalisasi Non Belanja Modal (Barjas) ke Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan atas Belanja Jasa Jadi Aset TA 2025 sebesar Rp1.506.337.531,83, terdiri dari (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp600.000.000,00 dan Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp805.334.831,83 dan Kec. Dusun Utara sebesar Rp101.002.700) Penambahan atas Pengadaan Tahun Berjalan TA 2025 pada Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp357.160.364,25 terdiri dari (Dinas Kesehatan sebesar Rp157.285.364,25 dan pada UPTD RSUD Jaraga Sasameh sebesar Rp199.875.000) Penambahan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan atas Reklasifikasi Belanja Modal dari Gedung dan Bangunan ke Jalan Irigasi Dan Jaringan TA 2025 sebesar Rp879.060.000,00, terdiri dari (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp689.260.000 dan Dinas Perumahan dan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp189.800.000,00) Penambahan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan atas Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp186.590.371,00, terdiri dari (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp11.080.880.520) Penambahan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan atas Reklasifikasi dari Aset lain-lain sebesar Rp11.080.880.520,00

Pengurangan – Jalan, Irigasi dan Jaringan

Pengurangan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan atas Pengurangan Reklasifikasi Belanja Modal TA 2025 atas Kekurangan Volume Pekerjaan terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp2.026.222.908,65, Pengurangan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan atas Reklasifikasi Belanja Modal Ke Belanja Hibah TA 2025 sebesar Rp50.919.357.723,29, terdiri dari (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp50.727.607.723,29 dan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp191.750.000) Pengurangan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan atas Reklasifikasi Belanja Modal Jalan Irigasi Dan Jaringan ke Gedung dan Bangunan TA 2025 sebesar Rp847.082.000,00, terdiri dari (Dinas Pendidikan sebesar Rp528.682.000 dan Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp94.900.000 dan pada Dinas Perikanan sebesar Rp223.500.000) Pengurangan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan atas Reklasifikasi Belanja Modal Jalan Irigasi Dan Jaringan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2025 sebesar Rp14.222.517.700,00, terdiri dari (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp14.222.517.700) Pengurangan atas Reklasifikasi Belanja Ke Belanja Hibah sebesar Rp18.416.139.425,75, terdiri dari (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp14.910.319.648,17, Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp201.983.577,58 dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp3.303.836.200) Pengurangan atas Reklasifikasi Belanja Modal Jalan Irigasi Dan Jaringan TA 2025 ke Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp2.364.125.364,25 terdiri dari (Dinas Kesehatan sebesar Rp199.875.000 dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp1.931.110.364,25) Pengurangan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan atas Extracom Keluar Dari Pengadaan TA.2025 sebesar Rp20.064.313,46, terdiri dari (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp14.564.313,46 dan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp5.500.000,00)



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut

Tabel 5.3.46. Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

I	SALDO AWAL AKUMULASI PENYUSUTAN AUDITED 2024		(881.931.656.670,41)
II	BERTAMBAH SELAMA 2025		
1	Beban Penyusutan TA 2025	(128.277.435.415,67)	
2	Koreksi Pencatatan atas pembulatan Akm. Penyusutan pada JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	(0,78)	
3	Reklasifikasi dari Aset Lainnya antar Aset Tetap Batal Hibah	(7.273.777.603,75)	
	TOTAL BERTAMBAH		(135.551.213.020,20)
III	BERKURANG SELAMA 2025		
1	Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya atas pengaruh kavitalisasi aset	(4.509.714,12)	
2	Dikarenakan Perubahan Kondisi/Status Aset dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya (Akan Dihibahkan)	(2.960.610.673,91)	
3	Pembulatan atas pengkitungan Akm. Penyusutan pada JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	(0,05)	
4	Koreksi atas pencatatan atas kesalahan penghitungan Akm. Penyusutan Tahun Lalu	(2.901,88)	
	TOTAL BERKURANG		(2.965.123.289,96)
IV	TOTAL SALDO AKHIR AKUMULASI PENYUSUTAN KIB D = I + II - III		(1.014.517.746.400,65)

5.3.1.3.5. Aset Tetap Lainnya **31 Desember 2025** **31 Desember 2024**
4.858.377.158,98 **4.451.198.388,03**

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 Sebesar Rp4.858.377.158,98 mengalami kenaikan sebesar Rp407.178.770,95 atau (9,15%) dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp4.451.198.388,03 terdiri dari Belanja Modal dan/atau belanja lainnya yang diatribusikan dalam nilai aset tetap tahun anggaran berkenaan, untuk masing – masing SOPD dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.3.47. Rincian Aset Tetap Lainnya Per SKPD

NO.	SOPD	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)	TAMBAH/KURANG	TREND (%)
I	II	III	IV	V	VI
1	Dinas Pendidikan	1.198.261.506,95	732.826.111,00	465.435.395,95	63,51
2	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan	1.868.881.200,00	1.868.881.200,00	0,00	0,00
3	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian	108.822.293,27	121.822.293,27	(13.000.000,00)	(10,67)
4	Dinas Lingkungan Hidup	25.750.000,00	25.750.000,00	0,00	0,00
5	Dinas Perhubungan	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00
6	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	3.510.000,00	3.510.000,00	0,00	0,00
7	Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	64.491.313,66	64.491.313,66	0,00	0,00
8	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.532.731.195,10	1.532.731.195,10	0,00	0,00
9	Sekretariat Daerah	17.550.000,00	24.132.825,00	(6.582.825,00)	(27,28)



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

10	Sekretariat DPRD	4.117.000,00	4.117.000,00	0,00	0,00
11	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00
12	Inspektorat Daerah	7.195.650,00	7.195.650,00	0,00	0,00
13	Kecamatan Dusun Hilir	2.062.000,00	2.062.000,00	0,00	0,00
14	Kecamatan Dusun Utara	0,00	38.673.800,00	(38.673.800,00)	(100,00)
15	Kecamatan Jenamas	1.122.000,00	1.122.000,00	0,00	0,00
16	Kecamatan Karau Kuala	2.883.000,00	2.883.000,00	0,00	0,00
Total		4.858.377.158,98	4.451.198.388,03	407.178.770,95	9,15

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.48. Rincian Golongan dan Kode Rekening Aset Tetap Lainnya

I	SALDO AWAL AUDITED 2023 (KIB E)		4.451.198.388,03
II	BERTAMBAH SELAMA 2025		
1	APBD 2025	218.199.996,00	
2	Bos Reguler	247.235.399,95	
	TOTAL BERTAMBAH (KIB E)		465.435.395,95
III	BERKURANG SELAMA 2025		
1	Rusak Berat	58.256.625,00	
	TOTAL BERKURANG (KIB E)		58.256.625,00
IV	TOTAL AKHIR KIB E = I + II - III (KIB E)		4.858.377.158,98

Penambahan – Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya dari Bos Reguler Tahun Anggaran 2025 mengalami penambahan sebesar Rp247.235.400,00 atas Bos Reguler dan serta penambahan dari Anggaran APBD sebesar Rp218.199.996,00

Pengurangan – Aset Tetap Lainnya

Pengurangan Aset Tetap Lainnya Rusak Berat (RB) pada OPD Sekretariat Daerah Tahun 2025 sebesar Rp6.582.825,00, Rusak Berat (RB) pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian sebesar Rp13.000.000,00 dan Rusak Berat (RB) pada Kec. Dusun Utara sebesar Rp38.673.800,00

5.3.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
90.545.502.789,88	92.542.029.414,76

Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2025 Sebesar Rp90.545.502.789,88 mengalami pengurangan sebesar Rp1.996.526.624,88 atau 2,16% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp92.542.029.414,76 terdiri dari Belanja Modal dan/atau belanja lainnya yang diatribusikan dalam nilai aset tetap Tahun Anggaran berkenaan. untuk masing - masing SKPD dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.3.49. Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan Per SKPD



Catatan Atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

No.	SOPD	Saldo Akhir 2025	Saldo Awal 2024	Kenaikan/ Penurunan	TREND (%)
1	DINAS KESEHATAN	804.699.090,00	2.159.292.690,00	(1.354.593.600,00)	(62,73)
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	80.243.916.257,38	76.463.957.588,88	3.779.958.668,50	4,94
3	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	575.367.183,33	575.367.183,33	-	-
4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4.260.749.103,00	4.260.749.103,00	-	-
5	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	2.116.284,93	0	2.116.284,93	100
6	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	17.300.000,00	17.300.000,00	-	-
8	DINAS PERHUBUNGAN	79.425.000,00	9.945.600,00	69.479.400,00	698,59
9	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	769.539.871,24	0	769.539.871,24	100
10	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	3.792.390.000,00	7.643.517.249,55	(3.851.127.249,55)	-50,38
11	KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI		1.411.900.000,00	(1.411.900.000,00)	-100
Total		90.545.502.789,88	92.542.029.414,76	(1.996.526.624,88)	(2,16)

Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.3.50. Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

I	SALDO AUDITED KDP TAHUN 2024	92.542.029.414,76
II	BERTAMBAH SELAMA 2025	
1	Utang Pemerintah Daerah TA 2025	701.425.693,00
2	Biaya Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa atas Atribusi TA. 2025	3.168.597.379,37
4	Reklasifikasi dari Gedung ke KDP	27.069.114.379,00
5	Reklasifikasi dari JIJ ke KDP	14.222.517.700,00
	TOTAL BERTAMBAH (KIB F)	45.161.655.151,37
III	BERKURANG SELAMA 2025	
1	Koreksi atas kekurangan Volume pekerjaan	154.261.590,05
2	Salah Pos Belanja Modal (Seharusnya Hibah)	4.025.990.403,95
3	Reklas Ke KIB B atas kesalahan belanja	9.945.600,00
4	Reklasifikasi KDP ke Aset Tetap JIJ	186.590.371,00
5	Reklasifikasi KDP ke Aset Tetap (Gedung dan Bangunan)	42.781.393.811,25
	TOTAL BERKURANG (KIB F)	47.158.181.776,25
IV	TOTAL AKHIR KIB F = I + II - III	90.545.502.789,88



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.3.51. Rincian Golongan dan Kode Rekening Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan

KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan		189	90.545.502.789,88
1	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	189	90.545.502.789,88

Penambahan – Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan

Penambahan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Utang Pemerintah Daerah TA 2025 Sebesar Rp701.425.693,00 dari Biaya Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp3.168.597.379,37 Reklasifikasi dari Gedung ke KDP sebesar Rp27.069.114.379,00, dan Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Kontruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp14.222.517.700,00.

Pengurangan – Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan

Terjadi Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan yang diakibatkan adanya Koreksi atas kekurangan Volume pekerjaan Tahun 2025 Sebesar Rp154.261.590,05 Reklas Salah Pos Belanja Modal (Seharusnya Hibah) Sebesar Rp4.025.990.403,95 Reklas Ke Peralatan dan Mesin atas kesalahan belanja sebesar Rp9.945.600,00, Reklasifikasi KDP ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp186.590.371,00, dan Reklasifikasi Kontruksi Dalam Pekerjaan (KDP) ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp42.781.393.811,25

5.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan

31 Desember 2025 **31 Desember 2024**
(1.497.567.961.176,78) (1.312.015.874.828,62)

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 dan 2023 sebesar (1.497.567.961.176,78) dan (Rp1.312.015.874.828,62). Kabupaten Barito Selatan melakukan Perhitungan Penyusutan dengan menggunakan Metode Garis Lurus disusutkan pertahun. Rincian Penyusutan Aset Tetap sebagai berikut.

Tabel 5.3.52. Akumulasi Penyusutan

No.	Aset Tetap	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2025 (Rp)	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Trend (%)
I	II	III	IV	V	VI
1	Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	(279.759.966.581,00)	(243.849.909.754,72)	(35.910.056.826,28)	14,73
3	Gedung dan Bangunan	(203.290.248.195,13)	(186.234.308.403,49)	(17.055.939.791,64)	9,16
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	(1.014.517.746.400,65)	(881.931.656.670,41)	(132.586.089.730,24)	15,03
5	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		(1.497.567.961.176,78)	(1.312.015.874.828,62)	(185.552.086.348,16)	14,14

5.3.1.4. Aset Lainnya

31 Desember 2025 **31 Desember 2024**
63.072.755.518,94 **163.808.505.290,56**

Aset Lainnya merupakan nilai buku setelah dilakukan penyusutan tahun 2025 dan aset yang tidak dapat dikategorikan sebagai aset lancar, investasi dan aset tetap. Aset lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp63.072.755.518,94 dan Rp163.808.505.290,56 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.53 Aset Lainnya



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Jenis Aset	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
I	II	III	IV	V	VI
1	Tagihan Jangka Panjang	0,00	30.582.000,00	(30.582.000,00)	(100,00)
2	Aset Tidak Berwujud	14.476.791.614,00	8.536.003.670,00	5.940.787.944,00	69,60
3	Aset Lain-lain	88.959.711.317,84	133.932.728.454,50	(44.973.017.136,66)	(33,58)
4	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(8.140.857.453,32)	(7.044.527.561,68)	(1.096.329.891,64)	15,56
5	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(42.423.442.303,58)	(53.223.183.272,26)	10.799.740.968,68	(20,29)
6	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	10.200.552.344,00	81.576.902.000,00	(71.376.349.656,00)	(87,50)
JUMLAH		63.072.755.518,94	163.808.505.290,56	(100.735.749.771,62)	(61,50)

5.3.1.4.1. Tagihan Jangka Panjang

<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
0,00	30.582.000,00

Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp30.582.000,00

5.3.1.4.1.1. Tagihan Penjualan Angsuran

<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
0,00	30.582.000,00

Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp30.582.000,00 merupakan dari Tagihan Penjualan Angsuran Rumah Dinas.

5.3.1.4.2. Aset Tidak Berwujud

<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
14.476.791.614,00	8.536.003.670,00

Aset Tak Berwujud berupa Aplikasi, Software, Kajian dan Aset Tak Berwujud Lainnya di SOPD Pemerintah Kabupaten Barito Selatan didapat Nilai Perolehan per 31 Desember 2025 sebesar Rp14.476.791.614,00 mengalami kenaikan 69,60% atau sebesar Rp5.940.787.944,00 dibandingkan Nilai Perolehan per 31 Desember 2024 sebesar Rp8.536.003.670,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.54. Rincian Nilai Perolehan Per SKPD

NO	NAMA OPD	SALDO AKHIR 2025	SALDO AWAL 2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	TREND %
I	II	III	IV	V	VI
1	DINAS PENDIDIKAN	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2	UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JARAGA SASAMEH	3.203.700.000,00	761.700.000,00	2.442.000.000,00	320,60
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.689.262.250,00	4.689.262.250,00	0,00	0,00
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	280.840.000,00	280.840.000,00	0,00	0,00
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	288.100.500,00	0,00	288.100.500,00	100,00
6	DINAS PERHUBUNGAN	104.500.000,00	104.500.000,00	0,00	0,00
7	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	163.700.000,00	163.700.000,00	0,00	0,00



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

8	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00
9	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	442.040.000,00	442.040.000,00	0,00	0,00
10	SEKRETARIAT DAERAH	543.586.420,00	543.586.420,00	0,00	0,00
11	SEKRETARIAT DPRD	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	0,00
12	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	2.464.555.444,00	0,00	2.464.555.444,00	100,00
13	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	323.592.000,00	1.317.640.000,00	(994.048.000,00)	(75,44)
14	BADAN PENDAPATAN DAERAH	1.740.180.000,00	0,00	1.740.180.000,00	100,00
15	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	73.735.000,00	73.735.000,00	0,00	0,00
TOTAL		14.476.791.614,00	8.536.003.670,00	5.940.787.944,00	69,60

Aset Tak Berwujud di SOPD Pemerintah Kabupaten Barito Selatan didapat Nilai Buku per 31 Desember 2025 sebesar **Rp6.335.934.160,67** mengalami kenaikan **324,81%** atau sebesar **Rp4.844.458.052,35** dibandingkan Nilai Buku per 31 Desember 2024 sebesar **Rp1.491.476.108,32** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.55. Rincian Nilai Buku Per SKPD

NO	NAMA OPD	SALDO AKHIR 2025	SALDO AWAL 2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	TREND %
I	II	III	IV	V	VI
1	UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JARAGA SASAMEH	2.238.500.000,00	0,00	2.238.500.000,00	100,00
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	48.000.000,00	488.938.608,33	(440.938.608,33)	(90,18)
3	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	114.110.666,67	142.638.333,33	(28.527.666,66)	(20,00)
4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	278.497.150,00	0,00	278.497.150,00	100,00
5	DINAS PERHUBUNGAN	10.450.000,00	31.350.000,00	(20.900.000,00)	(66,67)
6	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	19.460.000,00	38.420.000,00	(18.960.000,00)	(49,35)
7	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	155.788.666,67	341.255.833,33	(185.467.166,66)	(54,35)
8	SEKRETARIAT DPRD	110.400.000,00	138.000.000,00	(27.600.000,00)	(20,00)
9	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	2.384.130.444,00	0,00	2.384.130.444,00	100,00
10	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	70.862.400,00	291.727.083,33	(220.864.683,33)	(75,71)
11	BADAN PENDAPATAN DAERAH	890.417.833,33	0,00	890.417.833,33	100,00
12	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	15.317.000,00	19.146.250,00	(3.829.250,00)	(20,00)
TOTAL		6.335.934.160,67	1.491.476.108,32	4.844.458.052,35	324,81

Tabel 5.3.56. Mutasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut:

I	SALDO AWAL AUDITED 31 DESEMBER 2024	8.536.003.670,00
II	BERTAMBAH SELAMA 2025	
1	BELANJA MODAL TA. 2025	3.088.787.000,00
2	DATA ATRIBUSI/PEMELIHARAAN	2.852.000.944,00

AM



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

3	MUTASI BERTAMBAH ATAS PENGADAAN TA. 2025	2.442.000.000,00	
4	KOREKSI ATAS PENYESUAIAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	(422.130.874,99)	
	TOTAL BERTAMBAH		7.960.657.069,01
III	BERKURANG SELAMA 2025		
1	MUTASI BELANJA PENGADAAN TA 2025	2.442.000.000,00	
2	AKUMULASI PENYUSUTAN 2024	7.044.527.561,68	
4	KOREKSI ATAS PENYESUAIAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	(62.454.083,34)	
3	BEBAN PENYUSUTAN 2025	736.653.100,00	
IV	TOTAL BERKURANG		10.160.726.578,34
V	TOTAL AMORTISASI = I+II-III		6.335.934.160,67

Penambahan – Aset Tak Berwujud

Penambahan Aset dari Belanja Modal TA. 2024 sebesar **Rp3.088.787.000,00**, terdiri atas Data Atribusi/Pemeliharaan Sebesar **Rp2.852.000.944,00**, Mutasi Bertambah atas pengadaan TA. 2025 Sebesar **Rp2.442.000.000,00**, Koreksi atas Penyesuaian Kebijakan Akutansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 50 Tahun 2025 Sebesar (**Rp422.751.708,33**)

Pengurangan – Aset Tak Berwujud

Pengurangan terdiri dari Mutasi Belanja Pengadaan TA. 2025 Sebesar **Rp2.442.000.000,00**, Akumulasi Penyusutan s/d Tahun 2024 sebesar **Rp7.044.527.561,68**, Koreksi atas Penyesuaian Kebijakan Akutansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 50 Tahun 2025 Sebesar (**Rp62.454.083,34**) serta Beban Penyusutan Tahun 2025 sebesar **Rp736.653.100,00**

5.3.1.4.3. Aset Lain-lain	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	40.837.043.812,79	80.709.545.182,24

Aset Lainnya merupakan nilai buku setelah dilakukan penyusutan tahun 2025 dan aset yang tidak dapat dikategorikan sebagai aset lancar, investasi dan aset tetap. Aset lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar **Rp40.837.043.812,79** dan **Rp80.709.545.182,24** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.3.57. Rincian Nilai Buku Aset Lain-lain per Perangkat Daerah

NO	KETERANGAN	31 Des 2025 (Rp) Nilai Buku	31 Des 2024 (Rp) Nilai Buku
I	II	III	IV
1	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN	5.417.701.224,78	20.092.827.719,42
2	DINAS KESEHATAN KAB. BARITO SELATAN	1.634.451.650,82	1.519.937.481,75
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JS BUNTOK	133.316.909,55	133.316.909,37
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO SELATAN	30.920.478.268,32	56.243.023.597,64
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN KAB. BARITO SELATAN	161.571.975,77	161.571.975,77
6	SATPOL PP KABUPATEN BARITO SELATAN	7.590.566,67	7.590.566,67
7	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KAB. BARSEL	0,00	0,00
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN	0,00	0,00
9	DINAS SOSIAL KAB. BARSEL	-0,04	21.023.977,32



Catatan Atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

10	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7.452.499,96	7.452.499,96
11	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BARITO SELATAN	432.184.746,28	234.617.316,57
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BARSEL	316.385.173,79	316.385.173,79
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BARITO SELATAN	0,02	0,02
14	DINAS PMD KABUPATEN BARITO SELATAN	8.523.977,31	0,00
15	DINAS PERHUBUNGAN KAB. BARITO SELATAN	403.112.744,24	592.466.682,91
16	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KAB. BARITO SELATAN	0,00	0,00
17	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. BARSEL	457.444.866,29	457.444.866,29
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KAB. BARSEL	0,00	0,00
19	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA KAB. BARSEL	759.134,65	759.134,65
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BARITO SELATAN	0,00	1.371.771,97
21	DINAS PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN	0,00	0,00
22	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BARITO SELATAN	0,00	0,00
23	SEKRETARIAT DAERAH KAB. BARITO SELATAN	436.254.110,01	427.197.651,58
24	SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN	254.090.392,58	386.346.320,79
25	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KAB. BARSEL	38.775.000,00	38.775.000,00
26	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	0,00
27	BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. BARSEL		0,00
28	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	9.097.550,00	20.344.543,46
29	INSPEKTORAT DAERAH KAB. BARSEL	0,00	0,00
30	KECAMATAN DUSUN HILIR	20.277.778,08	11.511.111,41
31	KECAMATAN DUSUN SELATAN	35.114.001,30	14.253.221,82
32	KECAMATAN DUSUN UTARA	77.370.049,99	3.541.249,99
33	KECAMATAN G.B. AWAI	49.195.200,00	1.890.416,67
34	KECAMATAN JENAMAS	14.816.409,07	14.816.409,07
35	KECAMATAN KARAU KUALA	1.079.583,35	1.079.583,35
36	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. BARSEL	0,00	0,00
TOTAL		40.837.043.812,79	80.709.545.182,24

**DATA /REKAPITULASI TRANSAKSI ASET LAINNYA BERDASARKAN NILAI
PEROLEHAN, NILAI AKM. PENYUSUTAN DAN
NILAI BUKU SEMUA OPD TAHUN 2025**

Uraian	31-Des-25	31-Des-24	Naik (Turun)	
	(Nilai Buku)	(Nilai Buku)	%	(Rp)
Aset Lain-lain	40.837.043.812,79	80.709.545.182,24	- 49,40	-39.872.501.369,45
Jumlah	40.837.043.812,79	80.709.545.182,24	- 49,40	-39.872.501.369,45



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.3.58. DATA TRANSAKSI ASET LAINNYA TAHUN 2025

NO	Uraian	Aset Lainnya (NILAI PEROLEHAN)		Akumulasi penyusutan		Nilai Buku	
I	II	III		IV		V	
I	SALDO AWAL AUDITED 2024		137.448.325.986,84		56.738.780.804,60		80.709.545.182,24
II	PENAMBAHAN						
1	Reklasifikasi atas Barang Milik Daerah yang akan dilakukan Proses Hibah	52.868.574.037,57		3.303.617.203,17		49.564.956.834,40	
2	Reklasifikasi atas Barang Milik Daerah yang akan dilakukan Penghapusan Kondisi Rusak Berat	14.817.552.941,30		7.914.322.788,68		6.852.830.152,62	
3	Reklasifikasi atas Barang Milik Daerah yang akan dilakukan Penjualan melalui proses Lelang	510.376.000,00		510.376.000,00			
4	Aset Dalam Penelusuran	38.800.000,00		3.686.000,00		35.114.000,00	
5	Koreksi/Double Catat/Kesalahan Jurnal						
6	Aset yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0,00					
7	Koreksi atas kesalahan penghitungan pada barang yang dilakukan pemeliharaannya (Akumulasi penyusutan)						
8	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Tahun Berjalan			1.745.604.567,64		-1.745.604.567,64	
9	Koreksi Beban Penyusutan Tahun 2024			1.359.093.029,00		-1.359.093.029,00	
10	Koreksi Beban Penyusutan Tahun 2025			762.954.124,23		-762.954.124,23	
	JUMLAH PENAMBAHAN		68.235.302.978,87		15.599.653.712,72		52.585.249.266,15
III	PENGURANGAN						
1	Penghapusan Atas Barang Milik Daerah yang dilakukan proses Hibah	52.420.614.523,29		3.040.045.774,60		49.380.568.748,69	
2	Penghapusan Barang Milik Daerah Kondisi Rusak Berat	33.042.235.031,45		12.170.430.037,26		20.821.404.994,19	
3	Terdapat Aset Tetap yang Dijual Tahun Berjalan	0,00					
5	Kesalahan pencatatan Aset yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	3.578.792.721,64		2.756.649,94		3.576.036.071,70	
4	Reklasifikasi Aset Lainnya Ke aset Tetap Atas Batal Lelang						
5	Koreksi Perhitungan Nilai Perolehan	214.810,36					
6	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Tahun Berjalan			112.493.336,94		-112.278.526,58	
7	Reklas ke Aset Tetap KIB A,B,C, D,E,F	29.816.513.999,17		8.902.447.498,34		20.914.066.500,83	
8	Koreksi Beban Penyusutan Tahun 2024			1.359.093.029,00		-1.359.093.029,00	
9	Koreksi Beban Penyusutan Tahun 2025			762.954.124,23		-762.954.124,23	
IV	JUMLAH BERKURANG		118.858.371.085,91		26.350.220.450,31		92.457.750.635,60
	SALDO AKHIR =II-III AUDITED 2025		86.825.257.879,80		45.988.214.067,01		40.837.043.812,79

Penambahan – Aset Lainnya

- a. Saldo awal Nilai Perolehan Aset Lainnya tahun 2024 sebesar Rp**137.448.325.986,84** pada tahun 2025 terjadi penambahan atas Reklasifikasi Barang Milik Daerah yang akan dilakukan Proses Hibah, Rusak Berat dan Barang yang direncanakan akan dilakukan proses Lelang serta koreksi dengan total penambahan sebesar Rp**68.235.302.978,87** penambahan ini sudah termasuk nilai koreksi atas Barang Rusak Berat, Hibah dan Dalam Penelusuran terdapat pada Sekretariat Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Badan Pendapatan Daerah,

AM



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Kecamatan Dusun Selatan, Kecamatan Dusun Hilir, Kecamatan Dusun Utara dan Kecamatan Gubung Bintang Awai.

- b. Saldo Awal Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya tahun 2024 sebesar Rp**56.738.780.804,60** pada tahun 2025 terjadi penambahan atas Reklasifikasi atas Barang Milik Daerah yang akan dilakukan Proses Hibah, Rusak Berat dan Barang yang akan dilakukan proses Lelang, koreksi Akumulasi Penyusutan tahun berjalan, koreksi atas beban penyusutan tahun 2024 dan koreksi atas beban penyusutan tahun 2025 dengan penambahan sebesar Rp**15.599.653.712,72** penambahan ini sudah termasuk Nilai koreksi atas Barang Rusak Berat, Hibah dan Dalam Penelusuran terdapat pada Sekretariat Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Badan Pendapatan Daerah, Kecamatan Dusun Selatan, Kecamatan Dusun Hilir, Kecamatan Dusun Utara dan Kecamatan Gubung Bintang Awai.

Pengurangan – Aset Lainnya

- a. Pengurangan Nilai Perolehan Aset Lainnya pada tahun 2025 terjadi atas Penghapusan Barang yang dihibah, Penghapusan atas Barang Rusak Berat (Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Aset Tatap Lainnya), koreksi atas Kesalahan pencatatan Aset yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan dan Reklas Ke Aset Tetap (Aset Tetap Tanah dan Jalan, Irigasi dan Jaringan) dengan total pengurangan sebesar Rp**118.858.371.085,91** Pengurangan tersebut termasuk pengurangan atas kesalahan pencatatan atas kekurangan Volume atas Pekerjaan Pembangunan pada tahun 2024 sebesar Rp.3.578.792.721,64 yang terjadi pada Dinas Pendidikan sebesar Rp63.195.189,30, pada Dinas PUPR sebesar Rp3.382.230.209,79 dan Sekretariat DPRD sebesar Rp133.367.322,56
- b. Pengurangan Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya tahun 2025 terjadi atas Penghapusan Barang yang dilakukan Hibah, Penghapusan atas Barang dalam kondisi Rusak Berat (Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan), koreksi atas Kesalahan pencatatan Aset yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan, Koreksi tahun berjalan, Reklas Ke Aset Tetap (Aset Tetap Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan maupun perpindahan pemberlakuan Perda) dan koreksi atas beban penyusutan tahun 2024 dan koreksi atas beban penyusutan tahun 2025 dengan total Pengurangan sebesar Rp**26.350.220.450,31**

Tabel 5.3.59. Beban Penyusutan Aset Lainnya tahun 2024 dan Tahun 2025

NO	KETERANGAN	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
		Beban Penyusutan	Beban Penyusutan
I	II	III	IV
1	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN	40.719.787,35	84.473.433,08
2	DINAS KESEHATAN KAB. BARITO SELATAN	0,00	0,00
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JS BUNTOK	0,00	0,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO SELATAN	625.267.222,51	1.188.126.368,73
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN KAB. BARITO SELATAN	0,00	2.550.833,33
6	SATPOL PP KABUPATEN BARITO SELATAN	627.333,33	1.264.000,00
7	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KAB. BARSEL	0,00	0,00
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN	0,00	0,00
9	DINAS SOSIAL KAB. BARSEL	0,00	0,00



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

10	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.917.640,00	2.917.640,00
11	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BARITO SELATAN	55.236.375,24	6.664.946,65
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BARSEL	0,00	0,00
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BARITO SELATAN	0,00	0,00
14	DINAS PMD KABUPATEN BARITO SELATAN	0,00	0,00
15	DINAS PERHUBUNGAN KAB. BARITO SELATAN	7.004.083,33	7.004.083,34
16	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KAB. BARITO SELATAN	0,00	0,00
17	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. BARSEL	10.333.490,80	10.333.490,80
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KAB. BARSEL	0,00	0,00
19	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA KAB. BARSEL	0,00	0,00
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BARITO SELATAN	0,00	0,00
21	DINAS PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN	0,00	0,00
22	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BARITO SELATAN	0,00	0,00
23	SEKRETARIAT DAERAH KAB. BARITO SELATAN	20.058.041,67	38.662.208,37
24	SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN	0,00	0,00
25	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KAB. BARSEL	0,00	0,00
26	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	0,00
27	BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. BARSEL	0,00	0,00
28	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	535.150,00	535.150,00
29	INSPEKTORAT DAERAH KAB. BARSEL	0,00	0,00
30	KECAMATAN DUSUN HILIR	0,00	0,00
31	KECAMATAN DUSUN SELATAN	0,00	12.678.999,69
32	KECAMATAN DUSUN UTARA	0,00	0,00
33	KECAMATAN G.B. AWAI	0,00	1.290.416,67
34	KECAMATAN JENAMAS	220.000,00	1.777.291,67
35	KECAMATAN KARAU KUALA	35.000,00	814.166,67
36	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. BARSEL	0,00	0,00
TOTAL		762.954.124,23	1.359.093.029,00

Terdapat selisih perhitungan akumulasi Penyusutan antara Simbada BMD atas Beban pada tahun 2024 sebesar **Rp1.359.093.029,00** terdapat pada Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, Dinas Perkimtan, Satpol PP, DP2KBP3A, DKPP, Dinas Perhubungan, Diskop dan UKM, Sekretariat Daerah, BKPSDM, Kec. Dusel, Kec. GB. Awai, Kec. Jenamas dan Kec. Karau Kuala, sedangkan pada Tahun 2025 sebesar **Rp762.954.124,23** terdapat pada Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, Satpol PP, DP2KBP3A, DKPP, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi dan UKM, Sekretariat Daerah, BKPSDM, Kecamatan Jenamas dan Kecamatan Karau Kuala dengan total beban keseluruhan sebesar **Rp2.122.047.153,23** hal disebabkan pada SIPD tidak ada ruang untuk melakukan proses Jurnal atas beban penyusutan dalam tahun 2024 dan tahun 2025 tersebut dan atas akan dilakukan penyesuaian pada Aplikasi dengan menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya hanya memperhitungkan Nilai Aset saja sesuai Neraca pada SIPD dengan rincian pada Perangkat Daerah sebagai berikut :

Tabel 5.3.60. Rincian pada SKPD Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

NO	PERANGKAT DAERAH	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
		Nilai Akumulasi Penyusutan	Nilai Akumulasi Penyusutan
1	SEKRETARIAT DPRD	2.805.877.644,00	2.806.989.038,35
2	SEKRETARIAT DAERAH	1.117.341.410,99	896.407.869,42
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	24.597.743.144,43	32.071.712.214,89
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	614.596.357,56	614.596.357,56
5	DINAS PERHUBUNGAN	450.363.755,77	582.810.517,10
6	KOMINFO	-	0,00
7	DINAS KESEHATAN	5.058.051.168,92	6.086.716.012,06
8	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JARAGA SASAMEH	1.893.648.760,95	1.893.648.761,13
9	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	209.978.800,04	209.978.800,04
10	DINAS PENDIDIKAN	4.384.230.681,09	8.687.175.567,97
11	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	-	58.077.421,61
12	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	-	0,00
13	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.781.175,00	3.781.175,00
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	31.899.999,98	31.899.999,98
15	DINAS SOSIAL KAB. BARSEL	0,04	192.890.065,85
16	DINAS PMD KAB. BARSEL	253.928.925,93	0,00
17	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	600.841.391,53	508.365.606,96
18	DINAS PERIKANAN KAB. BARSEL	510.376.000,00	0,00
19	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	145.329.633,71	145.329.633,71
20	BPKAD	-	0,00
21	BAPENDA KAB. BARSEL	28.756.897,00	0,00
22	DPMPSTP	-	0,00
23	INSPEKTORAT DAERAH	28.969.230,00	28.969.230,00
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	432.940.000,00	432.940.000,00
25	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	544.084.677,45	544.084.677,45
26	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA	212.523.577,35	212.523.577,35
27	KESBANG POL	-	0,00
28	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	220.379.543,33	220.379.543,33

AM



Catatan Atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

29	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		0,00
30	BKPSDM	1.605.450,00	69.667.535,42
31	KECAMATAN JENAMAS	32.255.061,23	32.255.061,23
32	KECAMATAN DUSUN HILIR	1.435.541.459,75	111.677.526,42
33	KARAU KUALA	67.305.416,65	67.305.416,65
34	KECAMATAN DUSUN SELATAN	121.386.832,30	149.977.386,78
35	DUSUN UTARA	60.739.897,01	10.706.250,01
36	KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI	123.737.175,00	67.915.558,33
JUMLAH		45.988.214.067,01	56.738.780.804,60

Tabel 5.3.61. Rincian Akumulasi Penyusutan atas bertambah dan berkurang selama tahun 2025

I		SALDO AWAL 2025	(56.738.780.804,60)
I	BERTAMBAH SELAMA 2025		
1	Beban Penyusutan TA 2025	(762.954.124,23)	
2	Penerimaan Hibah Barang (Peralatan dan Mesin)	(263.571.428,57)	
3	Reklasifikasi dari gedung dan bangunan atas Hibah	(79.435.100,67)	
4	Reklasifikasi dari Jalan Irigasi dan Jaringan atas Hibah	(2.960.610.673,93)	
5	Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin atas Barang yang akan dilakukan Penjualan (Lelang) ref. sheet P.66c	(510.376.000,00)	
6	Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin atas Barang Rusak Berat (RB)	(5.934.855.860,49)	
7	Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan atas Barang Rusak Berat (RB)	(1.792.762.862,34)	
8	Reklasifikasi antar Aset Lainnya Ditahun Berjalan	(190.390.065,85)	
9	Koreksi atas Pembulatan Akumulasi Penyusutan	(1.731.035.151,28)	
10	Koreksi Pencatatan Akumulasi Tahun Sebelumnya	(14.569.416,36)	
11	Koreksi Beban Penyusutan Tahun 2024	(1.359.093.029,00)	
BERTAMBAH SELAMA 2025			(15.599.653.712,72)
II	BERKURANG SELAMA 2025		
1	Penghapusan atas Barang yang dilakukan proses Hibah (Gedung dan Bangunan)	(79.435.100,67)	
2	Penghapusan atas barang yang dilakukan proses Hibah (Jalan Irigasi dan Jaringan)	(2.960.610.673,93)	
3	Penghapusan Barang kondisi Rusak Berat (RB) Peralatan dan Mesin	(7.564.276.399,13)	
4	Penghapusan Barang kondisi Rusak Berat (RB) Gedung dan Bangunan	(4.606.153.638,13)	
5	Reklasifikasi antar Aset Lainnya Ditahun Berjalan	(190.390.065,85)	
6	Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Jalan Irigasi dan Jaringan Ditahun Berjalan	(8.653.525.303,77)	
7	Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Gedung dan Bangunan Ditahun Berjalan	(58.532.128,72)	
8	Koreksi Pencatatan Saldo Awal tahun 2024	(2.756.649,94)	



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

9	Koreksi Beban Penyusutan tahun 2025	(535.150,00)	
10	Koreksi atas Pembulatan Akumulasi Penyusutan	(6.988.047,78)	
11	Koreksi kesalahan Perhitungan Akumulasi penyusutan pada barang yang dilakukan penghapusan (RB)	(104.970.139,16)	
12	Koreksi Beban Penyusutan Tahun 2024	(1.359.093.029,00)	
13	Koreksi Beban Penyusutan tahun 2025	(762.954.124,23)	
TOTAL BERKURANG			(26.350.220.450,31)
III	TOTAL SALDO AKHIR KIB ASET LAINNYA = I + II - III		(45.988.214.067,01)

5.3.1.4.3.1. Aset Rusak Berat

31 Desember 2025
26.400.433.189,87

31 Desember 2024
34.821.163.721,06

Aset Tetap rusak berat per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp26.400.433.189,87 dan Rp34.821.163.721,06.

5.3.1.4.3.2. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rusak Berat

31 Desember 2025
(18.900.032.871,65)

31 Desember 2024
(23.405.077.144,57)

Akumulasi Aset Tetap rusak berat per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar (Rp18.900.032.871,65) dan (Rp23.405.077.144,57)

5.3.1.4.3.3. Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Pemerintah

31 Desember 2025
57.421.186.395,04

31 Desember 2024
99.102.029.633,44

Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp57.421.186.395,04 dan Rp99.102.029.633,44

5.3.1.4.3.4. Akumulasi Penyusutan yang Tidak digunakan operasional Pemerintah

31 Desember 2025
(21.354.779.915,29)

31 Desember 2024
(29.818.106.127,69)

Akumulasi Penyusutan yang Tidak digunakan dalam operasional Pemerintah per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar (Rp21.354.779.915,29) dan (Rp29.818.106.127,69)

5.3.1.4.4. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

31 Desember 2025
(8.140.857.453,32)

31 Desember 2024
(7.044.527.561,68)

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar (Rp8.140.857.453,32) dan (Rp7.044.527.561,68)

5.3.1.4.5. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

31 Desember 2025
(42.423.442.303,58)

31 Desember 2024
(53.223.183.272,26)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar (Rp42.423.442.303,58) dan (Rp53.223.183.272,26).



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

5.3.1.4.6. Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility Transfer Ke Daerah (TDF-TKD)	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	10.200.552.344,00	81.576.902.000,00

Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD) per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp10.200.552.344,00 dan Rp81.576.902.000,00

5.3.2. KEWAJIBAN	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	5.606.470.386,10	9.637.487.809,89

Kewajiban terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp5.606.470.386,10 dan Rp9.637.487.809,89

5.3.2.1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	5.606.470.386,10	9.637.487.809,89

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp5.606.470.386,10 dan Rp9.637.487.809,89 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.62. Rincian Kewajiban Jangka Pendek

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
I	II	III	IV	V	VI
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	155.157.005,00	0,00	155.157.005,00	0,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Utang Belanja	4.749.887.688,10	4.466.800.163,88	283.087.524,22	6,34
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	701.425.693,00	5.170.687.646,01	1(998.135.925,01)	(19,30)
	JUMLAH	5.606.470.386,10	9.637.487.809,89	(4.031.017.423,79)	(41,83)

5.3.2.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	155.157.005,00	0,00

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp155.157.005,00 dan Rp0,00. Terdiri dari utang terlambat dalam penyetoran Pajak PPN Pusat sebesar Rp127.697.458,00 dan PPh Pusat 27.459.547,00

5.3.2.1.2. Pendapatan Diterima di Muka	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	0,00	0,00

Pendapatan Diterima Dimuka atas Pajak Reklame Papan Billboard pada BPKAD per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.3.2.1.3. Utang Belanja	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	4.749.887.688,10	4.466.800.163,88



Catatan Atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Utang Belanja per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp4.749.887.688,10 dan Rp4.466.800.163,88 merupakan utang belanja atas air. Listrik dan Telepon dan belanja yang belum dibayarkan. utang belanja barang dan jasa BLUD. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.63. Rincian Utang Belanja

No.	SKPD	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Tambah/(Kurang)	%
I	II	III	IV	V	VI
1	RSUD JARAGA SASAMEH (BLUD)	4.641.153.937,10	4.466.800.163,88	174.353.773,22	3,90
2	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.104.570,00	0,00	1.104.570,00	100
3	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	6.149.305,00	0,00	6.149.305,00	100
4	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5.997.304,00	0,00	5.997.304,00	100
5	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	225.000,00	0,00	225.000,00	100
6	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	5.708.620,00	0,00	5.708.620,00	100
7	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	227.800,00	0,00	227.800,00	100
8	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	8.415.855,00	0,00	8.415.855,00	100
9	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4.050.275,00	0,00	4.050.275,00	100
10	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	7.627.178,00	0,00	7.627.178,00	100
11	SEKRETARIAT DAERAH	4.696.800,00	0,00	4.696.800,00	100
12	SEKRETARIAT DPRD	30.054.275,00	0,00	30.054.275,00	100
13	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	14.546.967,00	0,00	14.546.967,00	100
14	BADAN PENDAPATAN DAERAH	12.267.213,00	0,00	12.267.213,00	100
15	INSPEKTORAT DAERAH	480.000,00	0,00	480.000,00	100
16	KECAMATAN DUSUN SELATAN	3.446.093,00	0,00	3.446.093,00	100
17	KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI	3.736.496,00	0,00	3.736.496,00	100
JUMLAH		4.749.887.688,10	4.466.800.163,88	283.087.524,22	6,34

5.3.2.1.4. Utang Jangka Pendek Lainnya

31 Desember 2025
701.425.693,00

31 Desember 2024
5.170.687.646,01



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp701.425.693,00 dan Rp5.170.687.646,01. pada Dinas PUPR yang akan dibayarkan di tahun 2026 yang terdiri dari:

1. Utang Pembayaran Pekerjaan Penataan/Pembangunan Gedung 3 Lantai RSU Jaraga Sasameh Buntok An. CV. RONA PERSADA Pusat Palangka Raya Berdasarkan Kontrak Nomor: 760/065/KTRK/VI/PUPR-2025 Tanggal 16 Juni 2025 nilai terutang Rp229.448.910,00;
2. Utang Pembayaran Pekerjaan Interior Ruang Transit dan Ruang Rapat Aula DPUPR An. CV.KALIMANTAN JAWA MEMBANGUN INDONESIA Pusat Palangka Raya berdasarkan Kontrak Nomor 760/537/KTRK-AMPLP/XII/PUPR-2025, tanggal 23 Desember 2025 nilai terutang sebesar Rp147.300.000,00
3. Utang Pembayaran Pekerjaan Lanjutan Mushola Kejari Barsel An. DUA KARUNIA Pusat Palangka Raya berdasarkan Kontrak Nomor 760/540/KTRK-AMPLP/XII/PUPR-2025, tanggal 23 Desember 2025 nilai terutang sebesar Rp51.281.250,00
4. Utang Pembayaran Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Rumah Dinas Kapolres Barsel an. CV. ITAH BORNEO CONSTRUCTION Pusat Palangka Raya, berdasarkan SPK Nomor : 764/PKT-125/06/KTRK-BPP/VII/PUPR-2025, Tanggal 14 Juli 2025 nilai terutang sebesar Rp19.410.760,00
5. Utang Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Kantin DPUPR Tahap II a.n. CV. ELYA Pusat Buntok, Berdasarkan KONTRAK/SPK Nomor: 764/PKT-286/06/KTRK-BPP/XII/PUPR-2025 tanggal 03 Desember 2025 Nilai terutang sebesar Rp29.809.773,00
6. Utang Pembayaran Pekerjaan Pengamanan Tebing Sungai Desa Muka Haji An. CV. BORNEO MADANI Pusat Palangka Raya. Nilai kurang bayar sebesar Rp29.250.000,00
7. Utang Pembayaran Pekerjaan Lanjutan Penanganan Longsor Sungai Barito Gg. Swarga Jl. Karau An. CV. Rezky Pusat Kuala Kapuas Nilai kurang bayar sebesar Rp194.925.000,00.

5.3.2.2. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	0,00	0,00

Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00. Tidak terdapat kewajiban jangka panjang selama Tahun 2025.

5.3.3. EKUITAS	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	2.922.862.677.263,98	2.776.641.866.063,20

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp2.922.862.677.263,98 dan Rp2.776.641.866.063,20



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

5.4. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL

5.4.1. Pendapatan-LO	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	1.506.344.790.864,64	1.542.979.261.963,02

Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi hak pemerintah daerah dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Realisasi Pendapatan-LO untuk Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.506.344.790.864,64 dan Rp1.542.979.261.963,02 Pendapatan LO periode Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp36.634.471.098,38 atau 2,37% dari periode Tahun 2024. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang disajikan dalam tabel berikut:dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.1. Pendapatan – LO

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/ (Penurunan)	%
		2025 (Rp)	2024 (Rp)		
I	II	III	IV	V	VI
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)- LO	108.584.775.145,64	86.691.542.777,02	21.893.232.368,62	25,25
2	Pendapatan Transfer-LO	1.390.938.324.401,00	1.450.826.839.883,00	(59.888.515.482,00)	(4,13)
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah- LO	6.821.691.318,00	5.460.879.303,00	1.360.812.015,00	24,92
JUMLAH		1.506.344.790.864,64	1.542.979.261.963,02	(36.634.471.098,38)	(2,37)

5.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah-LO	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	108.584.775.145,64	86.691.542.777,02

Pendapatan Asli Daerah-LO terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah - LO, Pendapatan Retribusi Daerah-LO, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan- LO dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp108.584.775.145,64 dan Rp86.691.542.777,02 mengalami kenaikan sebesar Rp21.893.232.368,62 atau 25,25% dari periode Tahun 2024. Rincian PAD-LO disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 5.4.2. Pendapatan Asli Daerah-LO

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/ (Penurunan)	%
		2025 (Rp)	2024 (Rp)		
I	II	III	IV	V	VI
1	Pajak Daerah-LO	38.221.140.974,55	15.139.603.495,36	23.081.537.479,19	152,46
2	Retribusi Daerah-LO	47.884.637.903,00	5.146.786.582,00	42.737.851.321,00	830,38
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	3.756.648.302,31	4.522.022.594,50	(765.374.292,19)	(16,93)
4	Lain-lain PAD yang Sah-LO	18.722.347.965,78	61.883.130.105,16	(43.160.782.139,38)	(69,75)
JUMLAH		108.584.775.145,64	86.691.542.777,02	21.893.232.368,62	25,25



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

5.4.1.1.1. Pajak Daerah-LO

31 Desember 2025	31 Desember 2024
38.221.140.974,55	15.139.603.495,36

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp38.221.140.974,55 dan Rp15.139.603.495,36 Pendapatan Pajak Daerah-LO periode Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 23.081.537.479,19 atau naik 152,46 % dari periode Tahun 2024. Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.3. Pendapatan Pajak Daerah-LO

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
I	II	III	IV	V	VI
1	Pajak Hotel-LO	78.460.000,00	80.312.000,00	(1.852.000,00)	(2,31)
2	Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO	4.763.587.376,00	4.230.780.408,00	532.806.968,00	12,59
3	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana-LO	0,00	2.857.000,00	(2.857.000,00)	(100,00)
4	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron- LO	267.512.320,00	222.786.883,04	44.725.436,96	20,08
5	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO	6.279.322.586,00	5.688.575.834,00	590.746.752,00	10,38
6	Pajak Parkir-LO	52.704.800,00	36.682.800,00	16.022.000,00	43,68
7	Pajak Air Tanah-LO	2.186.713,57	600.000,00	1.586.713,57	264,45
8	Pajak Sarang Burung Walet-LO	15.515.000,00	5.500.000,00	10.015.000,00	182,09
9	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO	9.268.224.049,98	392.895.700,32	8.875.328.349,66	2.258,95
10	PBBP2-LO	1.770.666.198,00	1.844.874.620,00	(74.208.422,00)	(4,02)
11	BPHTB-Pemindahan Hak-LO	4.697.168.031,00	2.633.738.250,00	2.063.429.781,00	78,35
12	Opsen PKB-LO	5.023.438.300,00	0,00	5.023.438.300,00	100,00
13	Opsen BBNKB-LO	6.002.355.600,00	0,00	6.002.355.600,00	100,00
JUMLAH		38.221.140.974,55	15.139.603.495,36	23.081.537.479,19	152,46

Atas Pendapatan Pajak Daerah-LO tersebut, terdapat selisih dengan realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LRA disebabkan adanya Piutang Pajak Hotel dan Piutang Pajak Restoran dengan perhitungan sebagai berikut.

Tabel 5.4.4. Selisih Pendapatan Pajak Daerah-LO dan Pendapatan Pajak Daerah-LRA

No	Uraian	Nilai
1	Pendapatan Pajak Daerah – LRA	37.657.696.612,55
2	Pendapatan Pajak Daerah – LO	38.221.140.974,55
Selisih		563.444.362,00

Tabel 5.4.5. Penjelasan Selisih Pendapatan Pajak Daerah-LO dan Pendapatan Pajak Daerah-LRA

No	Uraian	Nilai
1	Pengurangan/pembayaran Piutang Pajak Hotel Tahun 2024	(250.000,00)
2	Penambahan Piutang Pajak Restoran Tahun 2025	1.450.000,00



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Nilai
3	Penambahan Piutang Pajak PBBP2 Tahun 2025	562.244.362,00
	Jumlah	563.444.362,00

5.4.1.1.2. Retribusi Daerah-LO

31 Desember 2025
47.884.637.903,00

31 Desember 2024
5.146.786.582,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp47.884.637.903,00 dan Rp5.146.786.582,00 Pendapatan Retribusi Daerah periode Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp42.737.851.321,00 atau 830,38% dari periode Tahun 2024. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.4.6. Pendapatan Retribusi Daerah-LO

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
I	II	III	IV	V	VI
1	RETRIBUSI JASA UMUM-LO	44.122.896.273,00	2.089.244.065,00	42.033.652.208,00	2.011,91
-	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas- LO	2.692.694.953,00	114.179.500,00	2.578.515.453,00	2.258,30
-	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah-LO	39.305.499.485,00	0,00	39.305.499.485,00	100,00
-	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis-LO	0,00	705.000,00	(705.000,00)	(100,00)
-	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan -LO	94.068.000,00	85.259.000,00	8.809.000,00	10,33
-	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	27.900.000,00	40.660.000,00	(12.760.000,00)	(31,38)
-	Retribusi Pelataran-LO	495.075.000,00	444.301.000,00	50.774.000,00	11,43
-	Retribusi Kios-LO	1.498.133.835,00	1.404.139.565,00	93.994.270,00	6,69
-	Retribusi Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri	9.525.000,00	0,00	9.525.000,00	100,00
2	RETRIBUSI JASA USAHA-LO	3.341.688.497,00	2.750.574.950,00	591.113.547,00	21,49
-	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	528.730.497,00	560.890.450,00	(32.159.953,00)	(5,73)
-	Retribusi Pemakaian Ruangan-LO	59.550.000,00	47.970.000,00	11.580.000,00	24,14
-	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor-LO	4.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	33,33
-	Retribusi Pemakaian Alat-LO	159.250.000,00	100.385.000,00	58.865.000,00	58,64
-	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan-LO	21.433.000,00	17.607.000,00	3.826.000,00	21,73
-	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal-LO	0,00	100.000,00	(100.000,00)	(100,00)
-	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir-LO	91.400.000,00	93.570.000,00	(2.170.000,00)	(2,32)
-	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan-LO	4.830.000,00	5.075.000,00	(245.000,00)	(4,83)
-	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO	2.357.351.000,00	1.841.997.500,00	515.353.500,00	27,98
-	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	52.405.000,00	24.605.000,00	27.800.000,00	112,99
-	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman-LO	62.739.000,00	55.375.000,00	7.364.000,00	13,30



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
I	II	III	IV	V	VI
3	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU-LO	420.053.133,00	306.967.567,00	113.085.566,00	36,84
-	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	380.525.685,00	306.967.567,00	73.558.118,00	23,96
-	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	39.527.448,00	0,00	39.527.448,00	100,00
	JUMLAH	47.884.637.903,00	5.146.786.582,00	42.737.851.321,00	830,38

Tabel 5.4.7. Selisih Pendapatan Retribusi Daerah-LO dan Pendapatan Retribusi Daerah-LRA

No	Uraian	Nilai
1.	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	47.884.637.903,00
2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	49.675.948.069,00
	Selisih	(1.791.310.166,00)

Perbedaan tersebut dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.4.8. Penjelasan Selisih Pendapatan Retribusi Daerah-LO dan Pendapatan Retribusi Daerah-LRA

No	Uraian	Nilai
1	Pengurangan/pembayaran Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Tahun 2024	(2.156.485.741,00)
2	Pengurangan/pembayaran Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan Tahun 2024	(16.005.000,00)
3	Penambahan Piutang Retribusi Kios Tahun 2025	346.535.575,00
4	Penambahan Piutang Retribusi Penyewaan Bangunan Tahun 2025	34.645.000,00
	Jumlah	(1.791.310.166,00)

5.4.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO

31 Desember 2025	31 Desember 2024
3.756.648.302,31	4.522.022.594,50

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp3.756.648.302,31 dan Rp4.522.022.594,50

5.4.1.1.4. Lain-lain PAD Yang Sah-LO	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	18.722.347.965,78	61.883.130.105,16

Lain-lain Pendapatan Asli

Daerah Yang Sah-LO merupakan pendapatan di luar pendapatan pajak retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan realisasi penerimaan lain-lain PAD. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp18.722.347.965,78 dan Rp61.883.130.105,16 dengan rincian sebagai berikut.



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.4.9. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
I	II	III	IV	V	VI
1	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-LO	0,00	2.416.800,00	(2.416.800,00)	(100,00)
2	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-LO	10.746.300,00	73.623.965,00	(62.877.665,00)	(85,40)
3	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	3.035.098.108,00	2.684.333.661,00	350.764.447,00	13,07
4	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	1.565.334.439,91	5.567.658,22	1.559.766.781,69	28.014,77
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	3.602.710.824,73	4.758.729.505,38	(1.156.018.680,65)	(24,29)
6	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
7	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	149.435.428,00	74.873.907,00	74.561.521,00	99,58
8	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-LO	22.419.160,00	14.991.587,00	7.427.573,00	49,54
9	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-LO	8.573.200,00	0,00	8.573.200,00	100,00
10	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas-LO	582.703.019,14	4.358.076.164,56	(3.775.373.145,42)	(86,63)
11	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-LO	251.653.699,00	495.693.081,00	(244.039.382,00)	(49,23)
12	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat-LO	9.493.669.787,00	0,00	9.493.669.787,00	100,00
13	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-LO	0,00	12.292.601.746,00	(12.292.601.746,00)	(100,00)
14	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO	0,00	37.122.222.030,00	(37.122.222.030,00)	(100,00)
Jumlah		18.722.347.965,78	61.883.130.105,16	(43.160.782.139,38)	(69,75)

5.4.1.2. Pendapatan Transfer-LO **31 Desember 2025** **31 Desember 2024**
1.390.938.324.401,00 **1.450.826.839.883,00**

Pendapatan Transfer-LO adalah Pendapatan yang diterima dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Realisasi Pendapatan Transfer-LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.390.938.324.401,00 dan Rp1.450.826.839.883,00

Tabel 5.4.10. Pendapatan Transfer-LO

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
I	II	III	IV	V	VI
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	1.278.456.964.730,00	1.390.160.014.789,00	(111.703.050.059,00)	(8,04)



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	112.481.359.671,00	60.666.825.094,00	51.814.534.577,00	85,41
	Jumlah	1.390.938.324.401,00	1.450.826.839.883,00	(59.888.515.482,00)	(4,13)

5.4.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO

31 Desember 2025

1.278.456.964.730,00

31 Desember 2024

1.390.160.014.789,00

Realisasi Pendapatan Transfer-LO Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.278.456.964.730,00 dan Rp1.390.160.014.789,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.11. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
I	II	III	IV	V	VI
1	DBH PBB-LO	61.609.655.100,00	52.326.179.332,00	9.283.475.768,00	17,74
2	DBH PPh Pasal 21-LO	7.052.521.100,00	5.252.040.000,00	1.800.481.100,00	34,28
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	27.569.000,00	0,00	27.569.000,00	100
4	DBH SDA Minyak Bumi-LO	74.644.000,00	193.744.000,00	(119.100.000,00)	(61,47)
5	DBH SDA Gas Bumi-LO	120.480.000,00	0,00	120.480.000,00	100
6	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	547.457.022.000,00	607.793.041.330,00	(60.336.019.330,00)	(9,93)
7	DBH SDA Kehutanan- PSDH-LO	635.598.700,00	6.534.391.800,00	(5.898.793.100,00)	(90,27)
8	DBH SDA Perikanan-LO	851.176.000,00	1.143.842.000,00	(292.666.000,00)	(25,59)
9	DBH Sawit-LO	2.556.502.000,00	0,00	2.556.502.000,00	100,00
10	DAU-LO	483.563.006.552,00	563.679.401.321,00	(80.116.394.769,00)	(14,21)
11	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD- LO	547.028.990,00	846.089.000,00	(299.060.010,00)	(35,35)
12	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO	218.199.996,00	3.966.315.704,00	(3.748.115.708,00)	(94,50)
13	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- SMP-LO	0,00	4.198.920.050,00	(4.198.920.050,00)	(100,00)
14	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB-LO	0,00	309.898.000,00	(309.898.000,00)	(100,00)
15	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan- Pembangunan/ Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian-LO	0,00	1.423.803.000,00	(1.423.803.000,00)	(100,00)
16	DAK Fisik-Bidang Jalan- Reguler-Jalan-LO	0,00	28.668.499.100,00	(28.668.499.100,00)	(100,00)
17	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan-LO	0,00	3.059.405.000,00	(3.059.405.000,00)	(100,00)
18	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan-LO	11.707.688.469,00	7.721.125.112,00	3.986.563.357,00	51,63
19	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler-LO	5.262.063.000,00	0,00	5.262.063.000,00	100,00



Catatan Atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
I	II	III	IV	V	VI
20	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan AKI dan AKB-LO	0,00	3.012.120.381,00	(3.012.120.381,00)	(100,00)
21	DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	18.365.188.757,00	19.427.094.794,00	(1.061.906.037,00)	(5,47)
22	DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO	1.101.000.000,00	0,00	1.101.000.000,00	100,00
23	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	48.818.227.861,00	56.256.278.500,00	(7.438.050.639,00)	(13,22)
24	DAK Non Fisik-TKG PNSD-LO	15.276.539.523,00	0,00	15.276.539.523,00	100,00
25	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	159.112.500,00	1.475.437.500,00	(1.316.325.000,00)	(89,22)
26	DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO	1.836.067.000,00	1.593.430.000,00	242.637.000,00	15,23
27	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan-LO	364.771.800,00	742.710.000,00	(377.938.200,00)	(50,89)
28	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK-LO	15.267.939.622,00	10.909.896.765,00	4.358.042.857,00	39,95
29	DAK Non Fisik-BOKKB- BOKB-LO	2.676.762.360,00	2.907.248.100,00	(230.485.740,00)	(7,93)
30	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-LO	392.412.000,00	0,00	392.412.000,00	100,00
31	Insentif Fiskal-LO	52.515.788.400,00	6.719.104.000,00	45.796.684.400,00	681,59
Jumlah		1.278.456.964.730,00	1.390.160.014.789,00	(111.703.050.059,00)	(8,04)

5.4.1.2.1.1. Dana Perimbangan-LO

31 Desember 2025
1.225.941.176.330,00

31 Desember 2024
1.383.440.910.789,00

Dana Perimbangan-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp1.225.941.176.330,00 sedangkan Tahun Anggaran. 2024 sebesar Rp1.383.440.910.789,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.4.12. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
I	II	III	IV	V	VI
1	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL (DBH)-LO	620.385.167.900,00	673.243.238.462,00	(52.858.070.562,00)	(7,85)
2	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM (DAU)-LO	483.563.006.552,00	563.679.401.321,00	(80.116.394.769,00)	(14,21)
3	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK-LO	17.734.980.455,00	53.206.175.347,00	(35.471.194.892,00)	(66,67)
4	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK-LO	104.258.021.423,00	93.312.095.659,00	10.945.925.764,00	11,73
Jumlah		1.225.941.176.330,00	1.383.440.910.789,00	(157.499.734.459,00)	(11,38)

5.4.1.2.1.1.1. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-LO

31 Desember 2025
620.385.167.900,00

31 Desember 2024
673.243.238.462,00

Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp620.385.167.900,00 sedangkan TA. 2024 sebesar Rp673.243.238.462,00.



Catatan Atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.4.13. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
I	II	III	IV	V	VI
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	620.385.167.900,00	673.243.238.462,00	(52.858.070.562,00)	(7,85)
-	DBH PBB-LO	61.609.655.100,00	52.326.179.332,00	9.283.475.768,00	17,74
-	DBH PPh Pasal 21-LO	7.052.521.100,00	5.252.040.000,00	1.800.481.100,00	34,28
-	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	27.569.000,00	0,00	27.569.000,00	100,00
-	DBH SDA Minyak Bumi- LO	74.644.000,00	193.744.000,00	(119.100.000,00)	(61,47)
-	DBH SDA Gas Bumi-LO	120.480.000,00	0,00	120.480.000,00	100,00
-	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	547.457.022.000,00	607.793.041.330,00	(60.336.019.330,00)	(9,93)
-	DBH SDA Kehutanan- PSDH-LO	635.598.700,00	6.534.391.800,00	(5.898.793.100,00)	(90,27)
-	DBH SDA Perikanan-LO	851.176.000,00	1.143.842.000,00	(292.666.000,00)	(25,59)
-	DBH Sawit-LO	2.556.502.000,00	0,00	2.556.502.000,00	100,00
	Jumlah	620.385.167.900,00	673.243.238.462,00	(52.858.070.562,00)	(7,85)

5.4.1.2.1.1.2. Dana Alokasi Umum-LO	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	483.563.006.552,00	563.679.401.321,00

Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp483.563.006.552,00 sedangkan TA. 2024 sebesar Rp592.682.003.800,00.

Tabel 5.4.14. Pendapatan Dana Alokasi Umum-LO

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	%
I	II	III	IV	V	VI
1	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya-LO	372.671.193.000,00	0,00	372.671.193.000,00	100,00
2	DAU yang Ditentukan Penggunaannya-LO	110.891.813.552,00	563.679.401.321,00	(452.787.587.769,00)	(80,33)
-	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan-LO	1.400.000.000,00	0,00	1.400.000.000,00	100,00
-	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja-LO	27.211.934.552,00	0,00	27.211.934.552,00	100,00
-	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan-LO	39.651.364.000,00	0,00	39.651.364.000,00	100,00
-	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan-LO	42.628.515.000,00	0,00	42.628.515.000,00	100,00
	Jumlah	483.563.006.552,00	563.679.401.321,00	(80.116.394.769,00)	(14,21)

5.4.1.2.1.1.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)-	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>	LO
	121.993.001.878,00	146.518.271.006,00	



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan (DAK) Non Fisik-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp121.993.001.878,00 sedangkan Tahun 2024 sebesar Rp146.518.271.006,00.

5.4.1.2.1.1.3.1. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	17.734.980.455,00	53.206.175.347,00

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp17.734.980.455,00 sedangkan TA. 2024 sebesar Rp53.206.175.347,00. Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.4.15. Pendapatan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
I	II	III	IV	V	VI
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD- LO	547.028.990,00	846.089.000,00	(299.060.010,00)	(35,35)
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO	218.199.996,00	3.966.315.704,00	(3.748.115.708,00)	(94,50)
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- SMP-LO	0,00	4.198.920.050,00	(4.198.920.050,00)	(100,00)
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB-LO	0,00	309.898.000,00	(309.898.000,00)	(100,00)
5	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan- Pembangunan/ Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian-LO	0,00	1.423.803.000,00	(1.423.803.000,00)	(100,00)
6	DAK Fisik-Bidang Jalan- Reguler-Jalan-LO	0,00	28.668.499.100,0	(28.668.499.100,00)	(100,00)
7	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan-LO	0,00	3.059.405.000,00	(3.059.405.000,00)	(100,00)
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan-LO	11.707.688.469,00	7.721.125.112,00	3.986.563.357,00	51,63
9	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan AKI dan AKB-LO	0,00	3.012.120.381,00	(3.012.120.381,00)	(100,00)
10	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler-LO	5.262.063.000,00	0,00	5.262.063.000,00	0,00
Jumlah		17.734.980.455,00	53.206.175.347,00	(35.471.194.892,00)	(66,67)

5.4.1.2.1.1.3.2. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	104.258.021.423,00	93.312.095.659,00

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp104.258.021.423,00 sedangkan TA. 2024 sebesar Rp93.312.095.659,00. Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO dapat dilihat pada tabel berikut:



Catatan Atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.4.16. Pendapatan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
I	II	III	IV	V	VI
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	18.365.188.757,00	19.427.094.794,00	(1.061.906.037,00)	(5,47)
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO	1.101.000.000,00	0,00	1.101.000.000,00	100,00
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	48.818.227.861,00	56.256.278.500,00	(7.438.050.639,00)	(13,22)
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	159.112.500,00	1.475.437.500,00	(1.316.325.000,00)	(89,22)
5	DAK Non Fisik-TKG PNSD-LO	15.276.539.523,00	0,00	15.276.539.523,00	100,00
6	DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO	1.836.067.000,00	1.593.430.000,00	242.637.000,00	15,23
7	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan-LO	364.771.800,00	742.710.000,00	(377.938.200,00)	(50,89)
8	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK-LO	15.267.939.622,00	10.909.896.765,00	4.358.042.857,00	39,95
9	DAK Non Fisik-BOKKB- BOKB-LO	2.676.762.360,00	2.907.248.100,00	(230.485.740,00)	(7,93)
10	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-LO	392.412.000,00	0,00	392.412.000,00	100,00
Jumlah		104.258.021.423,00	93.312.095.659,00	10.945.925.764,00	11,73

5.4.1.2.1.2. Dana Desa-LO

31 Desember 2025

52.515.788.400,00

31 Desember 2024

0,00

Dana Desa-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp52.515.788.400,00 sedangkan TA. 2024 sebesar Rp0,00.

5.4.1.2.1.3. Dana Insentif Fiskal-LO

31 Desember 2025

0,00

31 Desember 2024

6.719.104.000,00

Dana Insentif Fiskal-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 sedangkan TA. 2024 sebesar Rp6.719.104.000,00.

5.4.1.2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO

31 Desember 2025

112.481.359.671,00

31 Desember 2024

60.666.825.094,00

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp112.481.359.671,00 dan Rp60.666.825.094,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.17. Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
I	II	III	IV	V	VI
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	13.078.236.887,50	4.791.260.027,00	8.286.976.860,50	172,96
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	2.427.095.633,00	5.823.442.658,00	(3.396.347.025,00)	(58,32)



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
I	II	III	IV	V	VI
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	87.256.021.942,50	41.392.177.393,00	45.863.844.549,50	110,80
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan- LO	726.907.588,00	349.972.137,00	376.935.451,00	107,70
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok- LO	8.557.497.620,00	8.309.972.879,00	247.524.741,00	2,98
6	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	435.600.000,00	0,00	435.600.000,00	100
Jumlah		112.481.359.671,00	60.666.825.094,00	51.814.534.577,00	85,41

5.4.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah- LO **31 Desember 2025** **31 Desember 2024**
6.821.691.318,00 **5.460.879.303,00**

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp6.821.691.318,00 dan Rp5.460.879.303,00.

Tabel 5.4.18. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
I	II	III	IV	V	VI
1	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	0,00	613.000.000,00	(613.000.000,00)	(100,00)
2	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	541.816.500,00	0,00	541.816.500,00	100,00
3	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO	215.865.000,00	268.000.000,00	(52.135.000,00)	(19,45)
4	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	5.557.564.818,00	4.579.879.303,00	977.685.515,00	21,35
5	Pendapatan Klaim Pelayanan Kesehatan/Nonkapitasi-LO	506.445.000,00	0,00	506.445.000,00	100
Jumlah		6.821.691.318,00	5.460.879.303,00	1.360.812.015,00	24,92

5.4.1.3.1. Pendapatan Hibah-LO **31 Desember 2025** **31 Desember 2024**
757.681.500,00 **881.000.000,00**

Realisasi Pendapatan Hibah-LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp757.681.500,00 dan Rp881.000.000,00

5.4.1.3.2. Dana Darurat-LO **31 Desember 2025** **31 Desember 2024**
0,00 **0,00**

Realisasi Dana Darurat-LO periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00.



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

5.4.1.3.3. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	6.064.009.818,00	4.579.879.303,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp6.064.009.818,00 dan Rp4.579.879.303,00

5.4.2. Beban	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	1.323.740.489.436,68	1.377.261.271.265,16

Beban terdiri dari Beban Operasi dan Beban Transfer. Jumlah Beban untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 1.323.740.489.436,68 dan Rp1.377.261.271.265,16

5.4.2.1. Beban Operasi	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	1.163.112.866.664,68	1.164.693.139.989,16

Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai. Beban Barang dan Jasa. Beban Bunga. Beban Subsidi. Beban Hibah. Beban Bantuan Sosial. Beban Penyisihan Piutang. Beban Lain-lain dan Beban Penyusutan. Jumlah Beban untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.163.112.866.664,68 dan Rp1.164.693.139.989,16 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.19. Beban Operasi

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Pegawai	506.616.293.948,06	467.092.694.472,00	39.523.599.476,06	8,46
2	Beban Barang dan Jasa	407.227.014.710,53	423.669.807.913,77	(16.442.793.203,24)	(3,88))
3	Beban Subsidi	2.525.000.000,00	2.735.558.710,00	(210.558.710,00)	(7,70)
4	Beban Hibah	43.838.603.841,00	86.558.007.894,01	(42.719.404.053,01)	(49,35)
5	Beban Bantuan Sosial	11.877.905.000,00	21.828.001.450,00	(9.950.096.450,00)	(45,58)
6	Beban Penyisihan Piutang	897.117.966,97	1.744.892.986,25	(847.775.019,28)	(48,59)
7	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	42.601.883.908,20	33.006.765.194,83	9.595.118.713,37	29,07
8	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	18.514.958.774,25	16.035.515.940,63	2.479.442.833,62	15,46
9	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	128.277.435.415,67	111.512.999.256,83	16.764.436.158,89	15,03
10	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	736.653.100,00	508.896.170,84	227.756.929,16	44,76
Jumlah		1.163.112.866.664,68	1.164.693.139.989,16	(1.580.273.324,48)	(0,14)

5.4.2.1.1. Beban Pegawai	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	506.616.293.948,06	467.092.694.472,00



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp506.616.293.948,06 dan Rp467.092.694.472,00.

Beban Pegawai masing-masing SKPD untuk TA. 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.4.20. Beban Pegawai

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
I	II	III	IV	V	VI
1	Beban Gaji Pokok ASN	248.408.508.636,00	216.258.765.933,00	32.149.742.703,00	14,87
2	Beban Tunjangan Keluarga ASN	20.813.719.937,00	18.884.282.165,00	1.929.437.772,00	10,22
3	Beban Tunjangan Jabatan ASN	5.250.145.000,00	5.339.584.460,00	(89.439.460,00)	(1,88)
4	Beban Tunjangan Fungsional ASN	11.322.586.800,00	11.222.451.810,00	100.134.990,00	0,89
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	6.612.757.770,00	4.340.845.155,00	2.271.912.615,00	52,34
6	Beban Tunjangan Beras ASN	13.127.542.424,00	11.162.902.656,00	1.964.639.768,00	17,60
7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.981.800.867,00	1.624.383.783,00	357.417.084,00	22,00
8	Beban Pembulatan Gaji ASN	3.574.345,00	3.105.258,00	469.087,00	15,11
9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	15.182.789.969,00	13.924.861.576,00	1.257.928.393,00	9,03
10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	634.304.171,00	553.781.066,00	80.523.105,00	14,54
11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	1.617.634.237,00	1.439.049.456,00	178.584.781,00	12,41
12	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	88.037.599.309,00	87.458.731.210,00	578.868.099,00	0,66
13	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.775.278.053,00	1.562.604.100,00	212.673.953,00	13,61
14	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	10.255.095.768,00	9.710.295.775,00	544.799.993,00	5,61
15	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	69.423.151.204,06	0,00	69.423.151.204,06	100,00
16	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	327.589.000,00	(327.589.000,00)	(100,00)
17	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	247.940.381,00	(247.940.381,00)	(100,00)
18	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	0,00	42.128.272.200,00	(42.128.272.200,00)	(100,00)
19	Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	0,00	16.656.350.100,00	(16.656.350.100,00)	(100,00)
20	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	0,00	1.967.250.000,00	(1.967.250.000,00)	(100,00)
21	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	4.071.901.709,00	(4.071.901.709,00)	(100,00)
22	Beban Honorarium	0,00	7.619.216.900,00	(7.619.216.900,00)	(100,00)
23	Beban Jasa Pengelolaan BMD	0,00	434.831.000,00	(434.831.000,00)	(100,00)
24	Beban Uang Representasi DPRD	561.540.000,00	556.920.000,00	4.620.000,00	0,83
25	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	34.015.800,00	40.023.900,00	(6.008.100,00)	(15,01)
26	Beban Tunjangan Beras DPRD	41.018.880,00	49.599.360,00	(8.580.480,00)	(17,30)
27	Beban Uang Paket DPRD	48.132.000,00	47.670.000,00	462.000,00	0,97
28	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000,00	807.534.000,00	6.699.000,00	0,83
29	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	75.637.800,00	56.362.950,00	19.274.850,00	34,20
30	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	12.606.300,00	9.454.725,00	3.151.575,00	33,33
31	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.150.000.000,00	3.129.000.000,00	21.000.000,00	0,67
32	Beban Tunjangan Reses DPRD	756.000.000,00	514.500.000,00	241.500.000,00	46,94



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
I	II	III	IV	V	VI
33	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	36.291.856,00	34.887.460,00	1.404.396,00	4,03
34	Beban Pembulatan Gaji DPRD	15.388,00	15.596,00	(208,00)	(1,33)
35	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	1.678.133.016,00	321.025.288,00	1.357.107.728,00	422,74
36	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	3.960.000.000,00	3.990.000.000,00	(30.000.000,00)	(0,75)
37	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	0,00	178.290.000,00	(178.290.000,00)	(100,00)
38	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	46.800.000,00	0,00	46.800.000,00	100,00
39	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	3.528.000,00	0,00	3.528.000,00	100,00
40	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	84.240.000,00	0,00	84.240.000,00	100,00
41	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	4.345.200,00	0,00	4.345.200,00	100,00
42	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.623.578,00	0,00	1.623.578,00	100,00
43	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.800,00	0,00	1.800,00	100,00
44	Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	264.452.440,00	10.415.500,00	254.036.940,00	2.439,03
45	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah	15.590.400,00	0,00	15.590.400,00	100,00
46	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	168.000.000,00	33.600.000,00	20,00
47	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	380.000.000,00	240.000.000,00	140.000.000,00	58,33
	JUMLAH	506.616.293.948,06	467.092.694.472,00	39.523.599.476,06	8,46

Tabel 5.4.21. Beban Pegawai pada SKPD

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
I	II	III	IV
1	DINAS PENDIDIKAN	240.296.657.653,00	235.698.251.969,00
2	DINAS KESEHATAN	88.832.783.259,00	82.065.010.146,00
	UPT PUSKESMAS BUNTOK	87.385.652,00	0,00
	UPT PUSKESMAS BARU	393.523.284,00	0,00
	UPT PUSKESMAS SABABILAH	289.602.304,00	0,00
	UPT PUSKESMAS TABAK KANILAN	386.443.058,00	0,00
	UPT PUSKESMAS KALAHLEN	551.284.008,00	0,00
	UPT PUSKESMAS BANTAI BAMBURE	218.369.525,00	0,00
	UPT PUSKESMAS PATAS I	685.802.920,00	0,00
	UPT PUSKESMAS PENDANG	536.609.457,00	0,00
	UPT PUSKESMAS BABAI	325.886.764,00	0,00
	UPT PUSKESMAS BANGKUANG	521.127.527,00	0,00
	UPT PUSKESMAS MENGKATIP	566.026.908,06	0,00
	UPT PUSKESMAS JENAMAS	475.761.413,00	0,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	9.820.332.782,00	8.512.079.998,00
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	5.399.387.797,00	3.921.396.033,00
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	6.341.479.692,00	8.654.446.251,00
6	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	6.455.094.823,00	
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.087.701.663,00	1.931.323.588,00
8	DINAS SOSIAL	1.672.350.722,00	4.203.792.322,00

an



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
I	II	III	IV
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3.306.428.564,00	3.273.721.745,00
10	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	16.051.493.943,00	14.041.764.070,00
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	5.467.532.503,00	4.068.304.079,00
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.905.305.344,00	2.744.893.975,00
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3.409.383.870,00	
14	DINAS PERHUBUNGAN	5.600.169.498,00	4.235.897.336,00
15	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	3.175.002.829,00	2.932.559.957,00
16	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	4.319.037.692,00	3.505.728.914,00
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3.587.074.117,00	3.283.256.175,00
18	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	3.544.353.259,00	3.275.038.105,00
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	2.420.646.795,00	2.285.116.547,00
20	DINAS PERIKANAN	1.117.639.260,00	0,00
21	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	2.995.733.586,00	2.708.032.756,00
22	SEKRETARIAT DAERAH	14.645.350.139,00	12.787.033.858,00
23	SEKRETARIAT DPRD	14.197.424.789,00	12.558.048.843,00
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	4.614.601.156,00	4.405.841.523,00
25	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	22.998.928.569,00	23.592.356.590,00
26	BADAN PENDAPATAN DAERAH	1.205.642.548,00	0,00
27	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3.195.702.307,00	2.985.098.371,00
28	INSPEKTORAT DAERAH	6.621.126.653,00	5.837.267.388,00
29	KECAMATAN DUSUN HILIR	1.991.203.613,00	1.673.116.033,00
30	KECAMATAN DUSUN SELATAN	3.384.419.547,00	3.450.190.486,00
31	KECAMATAN DUSUN UTARA	2.199.334.298,00	1.752.117.147,00
32	KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI	1.767.857.303,00	1.649.584.255,00
33	KECAMATAN JENAMAS	1.341.467.663,00	1.243.602.979,00
34	KECAMATAN KARAU KUALA	1.867.953.494,00	1.395.006.766,00
35	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.741.869.398,00	2.422.816.267,00
Jumlah		506.616.293.948,06	467.092.694.472,00

5.4.2.1.2. Beban Barang dan Jasa

31 Desember 2025
407.227.014.710,53

31 Desember 2024
423.669.807.913,77

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp407.227.014.710,53 dan Rp423.669.807.913,77. Beban Barang dan Jasa-LO dan Belanja Barang dan Jasa-LRA adalah mapping dari Beban/Belanja Persediaan. Beban/Belanja Jasa. Beban/Belanja Pemeliharaan dan Beban/Belanja Perjalanan Dinas. Atas realisasi Beban Barang dan Jasa-LO, terdapat selisih dengan realisasi Beban Barang dan Jasa -LRA dengan perhitungan sebagai berikut.



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.4.22. Beban Barang dan Jasa-LO

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
I	II	III	IV	V	VI
1	Beban Barang - Persediaan	71.293.317.211,47	83.130.552.058,26	(11.837.234.846,79)	(14,24)
2	Beban Jasa	162.926.968.501,58	171.879.313.870,11	(8.952.345.368,53)	(5,21)
3	Beban Pemeliharaan	27.591.938.641,56	13.051.400.267,02	14.540.538.374,54	111,41
4	Beban Perjalanan Dinas	80.030.774.962,00	89.848.041.375,00	(9.817.266.413,00)	(10,93)
5	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat	5.266.592.819,00	10.656.646.580,00	(5.390.053.761,00)	(50,58)
6	Beban Barang - Persediaan BOSP	16.502.851.320,00	22.565.739.133,00	(6.062.887.813,00)	(26,87)
7	Beban Barang - Persediaan BLUD	43.614.571.254,92	32.538.114.630,38	11.076.456.624,54	34,04
Jumlah		407.227.014.710,53	423.669.807.913,77	(16.442.793.203,24)	(3,88)

Tabel 5.4.23. Selisih Beban Barang dan Jasa-LO dan Belanja Barang dan Jasa-LRA

URAIAN	NILAI 2025	NILAI 2024
Beban Barang dan Jasa Tahun Berjalan (LO)	407.227.014.710,53	423.669.807.913,77
Belanja Barang dan Jasa Tahun Berjalan (LRA)	440.925.782.385,80	447.961.452.752,50
Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun Berjalan (Neraca)	4.749.887.688,10	4.466.800.163,88
Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 20NN-1 (Neraca)	4.466.800.163,88	3.917.070.546,00
Beban Barang dan Jasa Dibayar Dimuka Tahun Berjalan (Neraca)	0,00	0,00
Beban Barang dan Jasa Dibayar Dimuka Tahun 20NN-1 (Neraca)	0,00	0,00
Persediaan Barang Tahun Berjalan (Neraca)	112.282.360.606,70	46.384.545.494,89
Persediaan Barang Tahun 20NN-1 (Neraca)	46.384.545.494,89	9.836.777.922,69
Selisih	(31.915.959.912,32)	(11.706.393.115,59)
Penjelasan		
Jika terdapat selisih diidentifikasi dari:		
Pemakaian persediaan selama Tahun 2025 (persediaan awal tahun 2025)	13.710.472.860,22	0,00
Beban Barang Jasa (Pemeliharaan) yang menjadi Aset Tetap	(6.892.228.112,54)	(10.990.497.001,58)
Belanja/Beban Barang Jasa (Jasa Konsultan perencana dan pengawas) yang diatribusikan menjadi Aset Tetap	(25.545.265.275,67)	(19.486.892.053,47)
Belanja/Beban Barang Jasa Dana BOS yang diatribusikan menjadi Aset Tetap	(1.745.766.300,00)	(3.315.281.600,00)
Beban Barang Jasa yang menjadi Persediaan	(13.689.253.940,22)	8.641.321.867,31
Beban Barang Jasa BLUD/SKPD yang dibayar dari Utang BLUD/SKPD	32.694.800,00	(4.466.800.163,88)
Beban Barang Jasa BLUD/SKPD untuk membayar Utang BLUD/SKPD	(4.696.800,00)	
Aset Tetap di akui menjadi Beban Barang Jasa (ekstrakomptable)	3.107.666.977,71	13.489.926.451,14
Aset Tetap yang direklas Menjadi Persediaan (utk diHibahkan)	3.529.736.333,34	7.100.000,00
Koreksi nilai Aset Tetap Jalan berupa JUT namun akan diserahkan kepada masyarakat Desa (bukan jalan milik kabupaten)	3.505.819.777,58	
Aset Tetap GB yg ada pada DPUPR namun akan diserahkan kepada instansi lain diluar Pemda	60.927.693.391,90	



**Catatan Atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN		NILAI 2025	NILAI 2024
	Reklas Beban Barjas BOS ke Beban Hibah BOS atas pencatatan sekolah swasta yg dicatat sebagai beban Barjas BOS	(3.791.508.800,00)	
	Koreksi beban barjas Setda yg menjadi Aset tetap	(886.417.000,00)	
	Koreksi kesalahan penginputan nilai pengurangan bangunan gedung ke beban barang pakai habis dimana nilai belanja yg melebihi nilai kontrak terinput pada jurnal tersebut	(342.988.000,00)	
	koreksi pencatatan tahun lalu (koreksi ekuitas persediaan) baik bertambah maupun berkurang		497.658.838,89
	Pembayaran utang barjas tahun lalu		3.917.070.546,00
Jumlah Penjelasan Selisih		(31.915.959.912,32)	(11.706.393.115,59)

Tabel 5.4.24. Beban Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 Per SKPD

No	SKPD	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
I	II	III	IV
1	DINAS PENDIDIKAN	47.980.579.038,74	51.321.600.363,12
2	DINAS KESEHATAN	52.105.970.090,40	97.910.851.484,65
	UPT RSUD JARAGA SASAMEH	42.810.451.310,53	0,00
	UPT PUSKESMAS BUNTOK	3.647.741.636,00	0,00
	UPT PUSKESMAS BARU	809.287.780,00	0,00
	UPT PUSKESMAS SABABILAH	878.773.119,00	0,00
	UPT PUSKESMAS TABAK KANILAN	909.713.600,00	0,00
	UPT PUSKESMAS KALAHLEN	1.029.867.966,00	0,00
	UPT PUSKESMAS BANTAI BAMBURE	728.690.375,00	0,00
	UPT PUSKESMAS PATAS I	1.298.175.677,00	0,00
	UPT PUSKESMAS PENDANG	950.352.343,00	0,00
	UPT PUSKESMAS BABAI	561.642.610,00	0,00
	UPT PUSKESMAS BANGKUANG	703.984.282,00	0,00
	UPT PUSKESMAS MENGKATIP	947.022.004,00	0,00
	UPT PUSKESMAS JENAMAS	928.761.585,00	0,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	44.895.557.838,20	40.470.964.542,00
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	5.848.493.526,00	11.754.179.840,00
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	3.742.740.308,00	7.775.442.341,00
6	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	4.307.153.366,00	0,00
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.152.393.647,00	3.198.039.602,00
8	DINAS SOSIAL	3.545.751.028,00	16.840.316.021,00
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4.240.534.134,00	6.154.056.535,00
10	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	6.050.681.389,00	12.649.273.726,00
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	7.130.413.870,00	8.989.762.983,00
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.493.197.758,00	3.407.528.986,00
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	10.353.714.945,00	0,00
14	DINAS PERHUBUNGAN	2.677.152.961,66	4.156.707.179,00



Catatan Atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

No	SKPD	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
I	II	III	IV
15	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	7.689.962.714,00	7.939.152.811,00
16	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	5.341.314.952,00	7.280.583.117,00
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.665.270.579,00	3.550.192.170,00
18	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	6.233.564.840,00	9.025.576.523,00
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1.078.566.875,00	1.626.604.143,00
20	DINAS PERIKANAN	4.949.879.566,00	0,00
21	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	3.353.042.428,00	4.473.271.387,00
22	SEKRETARIAT DAERAH	45.646.209.729,00	37.716.852.490,00
23	SEKRETARIAT DPRD	34.752.914.185,00	33.859.693.158,00
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	5.037.069.980,00	6.646.083.522,00
25	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	12.342.559.672,00	15.155.464.690,00
26	BADAN PENDAPATAN DAERAH	6.280.232.029,00	0,00
27	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	4.247.949.251,00	12.335.503.494,00
28	INSPEKTORAT DAERAH	3.768.433.110,00	4.889.347.229,00
29	KECAMATAN DUSUN HILIR	1.678.497.850,00	1.549.653.100,00
30	KECAMATAN DUSUN SELATAN	1.874.802.903,00	2.233.116.278,00
31	KECAMATAN DUSUN UTARA	1.195.686.851,00	1.625.193.345,00
32	KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI	1.153.077.419,00	1.777.357.883,00
33	KECAMATAN JENAMAS	1.142.729.204,00	1.279.535.513,00
34	KECAMATAN KARAU KUALA	1.486.945.646,00	1.703.712.930,00
35	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4.600.420.540,00	4.374.190.528,00
Jumlah		407.227.014.710,53	423.669.807.913,77

5.4.2.1.3. Beban Bunga

31 Desember 2025

31 Desember 2024

0,00

0,00

Jumlah Beban Bunga untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,0.

5.4.2.1.4. Beban Subsidi

31 Desember 2025

31 Desember 2024

2.525.000.000,00

2.735.558.710,00

Jumlah Beban Subsidi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp2.525.000.000,00 dan Rp 2.735.558.710,00.

5.4.2.1.5. Beban Hibah

31 Desember 2025

31 Desember 2024

43.838.603.841,00

86.558.007.894,01

Jumlah Beban Hibah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp43.838.603.841,00 dan Rp86.558.007.894,01



Catatan Atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

5.4.2.1.6. Beban Bantuan Sosial	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	11.877.905.000,00	21.828.001.450,00

Jumlah Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp11.877.905.000,00 dan Rp21.828.001.450,00

5.4.2.1.7. Beban Penyisihan Piutang	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	897.117.966,97	1.744.892.986,25

Jumlah Beban Penyisihan Piutang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp897.117.966,97 dan Rp1.744.892.986,25

5.4.2.1.8. Beban Lain-lain	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	0,00	0,00

Beban lain-lain adalah Beban yang tercatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan yang tidak menghasilkan aset tetap dan aset lainnya. Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.4.2.1.9. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	42.601.883.908,20	33.006.765.194,83

Jumlah Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp42.601.883.908,20 dan Rp33.006.765.194,83 mengalami peningkatan sebesar Rp9.595.118.713,37 atau 29,07%.

5.4.2.1.10. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	18.514.958.774,25	16.035.515.940,63

Jumlah Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp18.514.958.774,25 dan Rp16.035.515.940,63 mengalami peningkatan sebesar Rp2.479.442.833,62 atau 15,46%.

5.4.2.1.11. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	128.277.435.415,67	111.512.999.256,83

Jumlah Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp128.277.435.415,67 dan Rp111.512.999.256,83 mengalami peningkatan sebesar Rp16.764.436.158,89 atau 15,03%.

5.4.2.1.12. Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	0,00	0,00

Jumlah Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00

5.4.2.1.13. Beban Penyusutan Aset Lainnya	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	0,00	0,00

Jumlah Beban Penyusutan Aset Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.



Catatan Atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

5.4.2.1.14. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	736.653.100,00	508.896.170,84

Jumlah Beban Penyusutan Aset Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp736.653.100,00 dan Rp508.896.170,84 mengalami peningkatan sebesar Rp227.756.929,16 atau 44,76%.

5.4.2.2. Beban Transfer	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	160.627.622.772,00	212.568.131.276,00

Beban Transfer terdiri dari Beban Bagi Hasil dan Beban Bantuan Keuangan. Beban Transfer untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp160.627.622.772,00 dan Rp212.568.131.276,00.

5.4.2.2.1. Beban Bagi Hasil	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	1.380.490.812,00	40.000.000,00

Beban Bagi Hasil untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.380.490.812,00 dan Rp40.000.000,00.

5.4.2.2.2. Beban Bantuan Keuangan	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	159.247.131.960,00	212.568.131.276,00

Beban Bantuan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp159.247.131.960,00 dan Rp212.568.131.276,00.

5.4.3. Kegiatan Non Operasional	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	(20.429.188.154,59)	(5.855.119.947,54)

Saldo Kegiatan Non Operasional yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing masing sebesar Rp20.429.188.154,59 dan Rp5.855.119.947,54.

5.4.3.1. Surplus Penjualan/ Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar-LO	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	0,00	0,00

Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.4.3.2. Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	0,00	0,00

Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.4.3.3. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	0,00	0,00

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya -LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.4.3.4. Defisit Penjualan/ Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar -LO	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	73.212.051.556,21	5.855.119.947,54



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp73.212.051.556,21 dan Rp5.855.119.947,54.

5.4.3.5. Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	0,00	0,00

Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.4.4. Beban Tak Terduga	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	5.522.666.080,00	423.718.824,00

Beban Tak Terduga yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp5.522.666.080,00 dan Rp423.718.824,00.

5.5. PENJELASAN LAPORAN ARUS KAS

5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	375.155.056.538,92	598.326.342.419,48

Arus Kas Bersih dari Aktivitas

Operasi meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas. yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu tahun anggaran. Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp375.155.056.538,92 dan Rp598.326.342.419,48

5.5.1.1. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	1.543.288.121.765,78	1.831.797.610.547,98

Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.543.288.121.765,78 dan Rp1.831.797.610.547,98

Tabel 5.5.1. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024	Kenaikan/ Penurunan
I	II	III	IV	V
1	Pendapatan Pajak Daerah	37.657.696.612,55	14.168.868.108,32	23.488.828.504,23
2	Pendapatan Retribusi Daerah	49.675.948.069,00	4.768.725.847,00	44.907.222.222,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.756.648.302,31	4.522.022.594,50	(765.374.292,19)
4	Lain-lain PAD yang sah	19.986.291.962,92	60.156.569.812,16	(40.170.277.849,24)
5	Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak	68.689.745.200,00	404.148.408.401,00	(335.458.663.201,00)
6	Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	623.071.772.356,00	460.385.708.064,00	162.686.064.302,00
7	Pendapatan dana Alokasi Umum	483.563.006.552,00	591.322.819.252,00	(107.759.812.700,00)
8	Pendapatan dana Alokasi Khusus	121.993.001.878,00	146.518.271.006,00	(24.525.269.128,00)
9	Pendapatan Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	6.719.104.000,00	(6.719.104.000,00)
10	Pendapatan Dana Desa	52.515.788.400,00	73.702.409.076,00	(21.186.620.676,00)
11	Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi	75.848.612.615,00	60.666.825.094,00	15.181.787.521,00
12	Pendapatan Bantuan Keuangan	435.600.000,00	0,00	435.600.000,00
13	Pendapatan Hibah	30.000.000,00	138.000.000,00	(108.000.000,00)
14	Pendapatan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6.064.009.818,00	4.579.879.303,00	1.484.130.515,00
	Jumlah	1.543.288.121.765,78	1.831.797.610.547,98	(288.509.488.782,20)



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

5.5.1.2. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi	31 Desember 2025 1.168.133.065.226,86	31 Desember 2024 1.233.471.268.128,50
--	--	--

Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.168.133.065.226,86 dan Rp1.233.471.268.128,50.

Tabel 5.5.2. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
I	II	III	III	IV
1	Belanja Pegawai	506.616.293.948,06	467.108.665.972,00	39.507.627.976,06
2	Belanja Barang dan Jasa	440.925.782.385,80	447.961.452.752,50	(7.035.670.366,70)
3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Subsidi	2.525.000.000,00	2.735.558.710,00	(210.558.710,00)
5	Belanja Hibah	40.037.795.041,00	80.845.739.144,00	(40.807.944.103,00)
6	Belanja Bantuan Sosial	11.877.905.000,00	21.828.001.450,00	(9.950.096.450,00)
7	Belanja Tak Terduga	5.522.666.080,00	423.718.824,00	5.098.947.256,00
8	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	1.380.490.812,00	0,00	1.380.490.812,00
9	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00
10	Transfer Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	10.000.000,00	40.000.000,00	(30.000.000,00)
11	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	159.237.131.960,00	212.528.131.276,00	(53.290.999.316,00)
	Jumlah	1.168.133.065.226,86	1.233.471.268.128,50	(65.338.202.901,64)

5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi	31 Desember 2025 (514.306.061.871,00)	31 Desember 2024 (544.403.128.159,90)
---	--	--

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas pemerintah selama satu tahun anggaran. Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp514.306.061.871,00 dan Rp544.403.128.159,90.

5.5.2.1. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi	31 Desember 2025 21.315.900,00	31 Desember 2024 73.936.465,00
---	---	---

Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp21.315.900,00 dan Rp73.936.465,00.

Tabel 5.5.3. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

No	Uraian	Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
I	II	III	IV	V
1	Hasil Penjualan Peralatan/Mesin	0,00	0,00	0,00
2	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
3	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	312.500,00	(312.500,00)
4	Penjualan Aset Lain-Lain	21.315.900,00	73.623.965,00	(52.308.065,00)
	Jumlah	21.315.900,00	73.936.465,00	(52.620.565,00)



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

5.5.2.2. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	514.327.377.771,00	544.477.064.624,90

Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp514.327.377.771,00 dan Rp544.477.064.624,90.

Tabel 5.5.4. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

No	Uraian	Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024	Kenalkan/ (Penurunan)
I	II	III	IV	V
1	Perolehan Tanah	0,00	0,00	0,00
2	Perolehan Peralatan dan Mesin	50.944.552.172,00	76.322.201.311,00	(25.377.649.139,00)
3	Perolehan Gedung dan Bangunan	172.512.642.353,00	146.211.601.103,80	26.301.041.249,20
4	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	287.563.196.250,00	309.157.085.006,10	(21.593.888.756,10)
5	Perolehan Aset Tetap Lainnya	218.199.996,00	44.337.204,00	173.862.792,00
6	Perolehan Aset Lainnya	3.088.787.000,00	441.840.000,00	2.646.947.000,00
7	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	12.300.000.000,00	(12.300.000.000,00)
	Jumlah	514.327.377.771,00	544.477.064.624,90	(30.149.686.853,90)

5.5.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	(14.615.453.716,00)	(150.000.000,00)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Pendanaan meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas, yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu tahun anggaran. Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp14.615.453.716,00 dan Rp150.000.000,00

5.5.3.1. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	0,00	0,00

Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.3.2. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	14.615.453.716,00	150.000.000,00

Jumlah Arus Kas keluar dari Aktivitas Pendanaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp14.615.453.716,00 dan Rp150.000.000,00.

5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	477.747.005,00	0,00

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran dan tidak disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp477.747.005,00 dan Rp0,00.

5.5.4.1. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	94.836.166.139,83	79.518.617.266,00



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp94.836.166.139,83 dan Rp79.518.617.266,00.

5.5.4.2. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	94.358.419.134,83	79.518.617.266,00

Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp94.358.419.134,83 dan Rp79.518.617.266,00

5.5.5. Kenaikan/Penurunan Kas	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(153.611.302.043,08)	53.773.214.259,58

Kenaikan/ Penurunan Kas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp153.611.302.043,08 dan Rp53.773.214.259,58.

5.5.6. Saldo Akhir Kas	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	10.504.631.703,03	163.870.063.173,77

Saldo Akhir Kas untuk periode berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp10.504.631.703,03 dan Rp163.870.063.173,77.

Tabel 5.5.5. Rincian Sisa Lebih Pembiayaan

No	Uraian	Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Saldo Akhir Kas di BUD:	3.541.633.155,35	156.242.300.522,37	(152.700.667.367,02)
	PT. BPK Cab. Buntok (DAU)	0,00	88.144.694.001,55	(88.144.694.001,55)
	PT. BPK Cab. Buntok (RKUD)	3.505.740.031,87	4.313.049.924,02	(807.309.892,15)
	PT. BPK Cab. Buntok (PAD)	8.437.966,00	63.783.944.159,26	(63.775.506.193,26)
	PT. Bank Mandiri Cab. Buntok	390.157,48	0,00	390.157,48
	PT. BRI (Giro)	27.040.000,00	612.437,54	26.427.562,46
2	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00
3	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	7.217.349,00	60.060,00	7.157.289,00
4	Saldo Akhir Kas di BLUD	4.062.060.857,28	3.975.530.309,98	86.530.547,30
5	Saldo Akhir Kas di Bendahara FKTP Kas di Bendahara BOK Puskesmas	2.687.884.218,06	2.388.779.776,12	299.104.441,94
6	Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS	190.836.123,34	119.250.709,00	71.585.414,34
7	Saldo Akhir Kas Lainnya	15.000.000,00	38.000.000,00	(23.000.000,00)
	Koreksi Belanja yang Menambah Kas di Kas Daerah atas Realisasi SP2D yang Melebihi Nilai Kontrak	0,00	1.106.141.796,30	(1.106.141.796,30)
	penyetoran kekurangan pemindahbukuan dari Bank Mandiri ke Rekening RKUD pada akhir tahun 2025	25.000,00	0,00	25.000,00
	Saldo Akhir Kas	10.504.631.703,03	163.870.063.173,77	153.365.431.470,74
	Keterangan Selisih			
	Koreksi atas Saldo Akhir Kas Tahun Sebelumnya karena Double Debit SP2D Bank Kalteng	(322.590.000,00)	322.590.000,00	(322.590.000,00)
	Selisih Silpa Tahun Sebelumnya Sisa Dana Akibat Kesalahan penyetoran Dana Yayasan PAUD atas transaksi pada Des 2024	0,00	100.000.000,00	(100.000.000,00)



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
	Jumlah	10.182.041.703,03	164.292.653.173,77	(154.110.611.470,74)

5.6. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp2.922.862.677.264,03 dan Rp2.776.641.866.063,20

Tabel 5.6.1 Rincian Laporan Perubahan Ekuitas

URAIAN	REF	2025	2024
1	2	3	4
EKUITAS AWAL	5.6	2.776.641.866.063,20	2.607.544.245.113,22
SURPLUS/DEFISIT-LO		156.652.447.193,37	159.439.151.926,32
Koreksi Penambahan Nilai Aset Tetap		0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Saldo Awal Piutang		0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Saldo Awal Aset Lancar		(36.448.200,00)	747.898.188,89
Koreksi Ekuitas Saldo Awal Aset Tetap		32.248.011,95	6.489.712.480,00
Koreksi Ekuitas Saldo Awal Aset Lainnya		0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Saldo Awal Aset Lain-lain		0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Saldo Awal Akumulasi Penyusutan		0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Saldo Awal Akumulasi Amortisasi		0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Saldo Awal Investasi Jangka Panjang		0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Saldo Awal Persediaan		0,00	0,00
Koreksi ekuitas Lain-lain		(10.427.435.804,54)	2.420.858.354,77
Jumlah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar		0,00	0,00
EKUITAS AKHIR	5.6	2.922.862.677.263,98	2.776.641.866.063,20
Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan			

Koreksi ekuitas lainnya tersebut digunakan sebagai penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang penggolongan dan Kodefikasi BMD yang diterapkan pada tahun 2022. Akun koreksi ekuitas tersebut juga digunakan untuk pencatatan mutasi masuk dan keluar BMD antar SKPD dan penyesuaian nilai Investasi Permanen.

M



Catatan Atas Laporan Keuangan **Pemerintah Kabupaten Barito Selatan**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

BAB VI **INFORMASI NON KEUANGAN**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 320 ayat (1) dan (2) yang menjelaskan bahwa Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud paling sedikit meliputi laporan realisasi anggaran (LRA), laporan perubahan saldo anggaran lebih (LP SAL), neraca, laporan operasional (LO), laporan arus kas (LAK), laporan perubahan ekuitas (LPE) dan catatan atas laporan keuangan (CaLK) yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD.

Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 disajikan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Penyesuaian atas penyajian pos-pos pada LRA, LP SAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan CaLK telah dilakukan untuk memastikan kesesuaiannya dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

Beberapa informasi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan:

6.1.1. Domisili Entitas

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan beralamat Jl. Pelita Raya No.305F
Telepon 21242 Kode Pos 73711 @Setda.baritoselatankab.go.id.

6.1.2. Sifat Operasi Entitas dan Kegiatan Pokoknya

Tugas utama Pemerintah Kabupaten Barito Selatan adalah menyusun program kegiatan sesuai renstra dan renja yang telah ditetapkan dalam melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Barito Selatan serta visi dan misi Bupati Barito Selatan untuk peningkatan pembangunan di segala bidang.

6.1.3. Ketentuan Perundang-Undangan sebagai Landasan Operasional

1. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
4. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; dan
5. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 34 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

6.1.4. Susunan Struktur Kepemimpinan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Bupati.

Wakil Bupati. Sekretaris Daerah dan Bendahara Umum Daerah
Bupati : EDDY RAYA SAMSURI, S.T., MM.
Wakil Bupati : KHRISTIANO YUDHA, S.T.
Sekretaris Daerah : Dr. ITA MINARNI, ST.
Bendahara Umum : ALI SADIKIN, SE., MM.



Catatan Atas Laporan Keuangan **Pemerintah Kabupaten Barito Selatan**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

6.1.5. Visi Dan Misi Bupati Barito Selatan

Visi:

"Terwujudnya Barito Selatan yang Sejahtera, Berdaya Saing, serta Menjadi Penyangga Pangan dan Energi Ibu Kota Nusantara"

Visi tersebut menggambarkan kondisi ideal yang ingin dicapai oleh Kabupaten Barito Selatan bertujuan untuk memberikan arah yang jelas dalam mengatasi permasalahan pembangunan daerah serta menyelesaikan isu-isu strategis yang menjadi tantangan pembangunan jangka menengah Menciptakan kesadaran bahwa 283 dengan bekerja bersama tantangan pembangunan yang kompleks dapat diatasi secara lebih efektif dan efisien, Untuk lebih detail mengenai makna dari visi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Terwujudnya Barito Selatan yang Sejahtera
Sejahtera mencerminkan kondisi Kabupaten Barito Selatan yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemerataan pembangunan sosial dan ekonomi, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja.
2. Terwujudnya Barito Selatan Yang Berdaya Saing
Berdaya saing memiliki arti bahwa Kabupaten Barito Selatan mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional dengan mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperbaiki infrastruktur dan konektivitas yang mendukung pertumbuhan ekonomi.
3. Terwujudnya Barito Selatan Sebagai Penyangga Pangan Ibu Kota Nusantara
Penyangga pangan menggambarkan peran Kabupaten Barito Selatan dalam mendukung ketahanan pangan untuk kebutuhan regional dan nasional, khususnya untuk Ibu Kota Nusantara. Hal ini mencakup penguatan sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan dengan fokus pada peningkatan produktivitas dan efisiensi distribusi pangan.
4. Terwujudnya Barito Selatan Penyangga Energi Ibu Kota Nusantara
Penyangga energi berarti Kabupaten Barito Selatan berkontribusi dalam penyediaan energi yang mendukung Ibu Kota Nusantara. Hal ini meliputi pengembangan sektor energi baik terbarukan maupun fosil serta infrastruktur yang mendukung keberlanjutan pasokan energi.

Misi:

1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Agamis, Sehat, Cerdas dan Terampil.
Tantangan utama yang dihadapi Kabupaten Barito Selatan dalam pembangunan sumber daya manusia adalah ketimpangan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Keterbatasan jumlah dan persebaran tenaga kesehatan maupun tenaga pengajar menjadi faktor penghambat dalam pemerataan kualitas layanan dasar. Dengan demikian, penguatan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Barito Selatan menjadi fondasi penting dalam mendukung pencapaian visi daerah yang sejahtera dan berdaya saing. Fokus pada peningkatan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan serta kesehatan akan menjadi kunci untuk menghasilkan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan terampil yang mampu berkontribusi aktif dalam pembangunan berkelanjutan.



Catatan Atas Laporan Keuangan **Pemerintah Kabupaten Barito Selatan**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

2. Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
Pembangunan ekonomi di Kabupaten Barito Selatan menghadapi berbagai tantangan struktural yang memengaruhi daya saing daerah, terutama dalam hal kemiskinan, kualitas tenaga kerja, dan pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena itu, pengembangan daya saing ekonomi di Barito Selatan perlu diarahkan pada penguatan sektor unggulan lokal yang ramah lingkungan, peningkatan kompetensi tenaga kerja, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif. Pendekatan ini menuntut integrasi dari berbagai pihak untuk mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, tangguh, dan berkeadilan.
3. Mengembangkan infrastruktur wilayah mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya.
Tantangan utama yang dihadapi Kabupaten Barito Selatan dalam pengembangan infrastruktur wilayah adalah ketidakmerataan kualitas dan kuantitas sarana serta prasarana dasar yang mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Kabupaten Barito Selatan dapat mengoptimalkan potensi ekonominya. Infrastruktur yang lebih baik akan memperlancar mobilitas dan akses, serta membuka peluang ekonomi baru yang berdampak positif terhadap kesejahteraan Masyarakat
4. Memantapkan kondisi sosial budaya daerah berbasiskan kearifan lokal.
Pembangunan sosial budaya di Kabupaten Barito Selatan menghadapi tantangan dalam menjaga keberlanjutan nilai-nilai kearifan lokal di tengah dinamika perubahan sosial dan budaya. Meskipun memiliki kekayaan kearifan lokal yang berharga, Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kearifan lokal dan kesetaraan gender menjadi hal yang sangat mendasar untuk memastikan keberlanjutan nilai budaya di tengah modernisasi yang semakin berkembang. Sebagai daerah yang kaya dengan tradisi, Kabupaten Barito Selatan perlu menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara perkembangan zaman dan pelestarian budaya yang ada
5. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik
Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Barito Selatan merupakan pondasi utama dalam mendukung efektivitas pembangunan daerah. Perlunya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan dalam menciptakan pemerintahan yang dipercaya masyarakat.
6. Mewujudkan ketahanan pangan dan energi daerah yang berkelanjutan
Pelu adanya penguatan ketahanan pangan dan energi dengan strategi terpadu melalui peningkatan produktivitas di sektor pangan, pengembanagn komoditas unggulan lokal berdaya saing, serta percepatan pemanfaatan potensi EBT. Upaya ini perlu didukung oleh kolaborasi lintas sektor, penguatan kapasitas kelembagaan, dan dukungan kebijakan. Dengan kebijakan yang tepat dan implementasi yang konsisten, Kabupaten Barito Selatan dapat mengatasi tantangan ketahanan pangan dan energi dalam menciptakan ketahanan sosial yang lebih baik untuk seluruh masyarakat

6.1.6. Satuan Kerja Perangkat Daerah

Jumlah dan jenis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan terdiri dari Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Inspektorat, 6 (enam) Badan, 20 (dua puluh) Dinas, 6 (enam) Kantor Kecamatan, 1 (satu) BLUD RSUD Jaraga Sasameh dan 12 (dua belas) BLUD UPT Puskesmas.



Catatan Atas Laporan Keuangan **Pemerintah Kabupaten Barito Selatan**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

6.1.7. Lembaga Keuangan dan Perbankan

Lembaga Keuangan dan Perbankan ada lima unit Lembaga Keuangan dan Perbankan di Kabupaten Barito Selatan, yaitu:

1. Bank Pembangunan Kalteng Cabang Buntok;
2. Bank Rakyat Indonesia Cabang Buntok;
3. Bank Mandiri Cabang Buntok;
4. Bank Nasional Indonesia 1946 Cabang Buntok; dan
5. Bank Tabungan Pensiunan Cabang Buntok.

6.1.8. Profil Barito Selatan

Semboyan	: Dahani Dahana Tuntung Tulus (Selamat Sentosa. Adil Makmursampai selama-lamanya
Peta Lokasi	: Koordinat: 1°20 Lintang Utara - 2°35 Lintang Selatan dan 114° - 115° Bujur Timur
Provinsi	: Kalimantan Tengah
Ibukota	: Buntok
Bupati	: EDY RAYA SAMSURI
DAU	: Rp483.563.006.552,00
Luas	: 8.830 Km ²
Total Populasi	: 131.100 Jiwa (2020)
Kepadatan	: 15 Jiwa/Km ²
Kode Area Tlpn	: 0525
Kecamatan	: 6
Website	: http://www.baritoselatankab.go.id

Berikut ini adalah daftar nama-nama yang pernah memimpin Kabupaten Barito Selatan sejak tahun 1959:

Gomer Tamin Binti (1959 - 1961)
Benjamin Tidja (1961 - 1967)
Urbanus Martjun (1967 - 1975)
Drs. H. Mangkusari (1976 - 1981)
H. Kamberani Seman. BA (1981 - 1991)
Drs. H. Asmawi Agani (1991 - 1996)
Ir. Achmad Diran (1996 - 2001)
Ir. H. Baharudin N. Lisa (2001 - 2011)
Ir. H. M. Farid Yusran. MM (2011 - 2016)
H. Eddy Raya Samsuri. ST (2017 - 2029)



Catatan Atas Laporan Keuangan **Pemerintah Kabupaten Barito Selatan**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

BAB VII **PENUTUP**

Sebagai penutup Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Selatan. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Prinsip-prinsip Akuntansi yang Berterima Umum (PABU) dan berbasis akrual. Basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta basis akrual untuk pengakuan aktiva (aset), utang (kewajiban), dan ekuitas.

Diharapkan dengan diterbitkannya Laporan Keuangan, dapat dijadikan salah satu sumber informasi bagi pihak eksternal yaitu para *stakeholders* dalam memahami kondisi dan kemampuan yang tergambar dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Demikian Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI BARITO SELATAN



EDDY RAYA SAMSURI



Catatan Atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

LAMPIRAN